



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah adanya perubahan yang mendasar karena kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa perubahan yang mendasar meliputi keadaan darurat pandemi Covid-19 yang melanda secara global sejak akhir tahun 2019 yang belum mereda sampai saat ini telah mengubah beberapa pandangan dokumen RPJMD baik terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah termasuk target indikator kinerja utama daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 21a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, dunia usaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- 18a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan adanya perubahan yang mendasar karena kebijakan nasional diantaranya:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024; dan
 - d. 6 (enam) Arahan Presiden dalam Membendung Covid19 serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
19. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.

30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah Langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/asasr hubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
41. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
42. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.

43. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
44. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
45. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
47. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
48. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
49. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB IX PENUTUP.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Februari 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 332-6/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Kemudian, RPJMD juga memuat strategi dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus menggunakan konsep SMART-C (*Specific, Measurable, Aggreable, Realistic, Time-bounded, and Continously Improve*). **Spesific** atau spesifik, artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat menggambarkan kesesuaian dengan kespesifikan dari tujuan, sasaran dan program yang akan diukur. **Measurable** atau dapat diukur, artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. **Aggreable** atau disepakati, artinya indikator dalam RPJMD telah disepakati oleh semua pihak. **Realistic** atau dapat dicapai, artinya indikator kinerja dalam RPJMD dapat dicapai sehingga mampu menyediakan data secara tepat dan akurat. **Time-bounded** atau berjangka waktu tertentu, artinya indikator kinerja dalam RPJMD mempertimbangkan periode waktu tertentu dalam pencapaiannya. **Continously Improve** atau upaya peningkatan yang berkelanjutan, artinya ada upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas, target dan proses pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Pasal 7 bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pendekatan teknokratis diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan utamanya gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan yang mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodisasi RPJMD.

Dalam ketentuan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2018-2023 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Secara umum hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD yaitu masih terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra. Adapun beberapa hasil evaluasi yang tidak sesuai diantaranya Visi pada beberapa Renstra perangkat daerah memiliki redaksi yang berbeda yaitu redaksi "Nilai-nilai Islam". Sedangkan Visi yang ada di RPJMD yaitu "Nilai-nilai agama". Masih ada tujuan pada Renstra PD yang belum sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD. Beberapa PD masih belum menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ada di RPJMD. Pada program dan dana indikatif masih banyak PD yang belum sesuai program maupun dana indikatif antara RPJMD dan Renstra. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa poin pada RPJMD Kabupaten Pamekasan yang belum berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten yaitu : 1) Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. 2) Program Aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, 3) Kawasan hutan produksi dan 4) Kawasan pertambangan.

2. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berlakunya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Adapun informasi tersebut, memiliki maksud sebagai berikut:

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;

- 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
 - 3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah; menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
 - 4) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - 5) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
 - 6) Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
- Sehubungan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pemetaan dan penyesuaian urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi dan organisasi menurut klasifikasi, kodifikasi serta nomenklatur secara detail sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing dinas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 3 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 salah satunya membahas mengenai organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Penyusunan rancangan RPJMD selain memprioritaskan pada agenda-agenda daerah juga harus melakukan telaah terhadap perencanaan nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan berada pada pergantian Presiden yang sekaligus menjadi dasar perubahan pada RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Konsekuensi dari perubahan RPJMN tersebut yaitu Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan program prioritas nasional yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024.
- Penyusunan rancangan RPJMD selain memprioritaskan pada agenda-agenda daerah juga harus melakukan telaah terhadap perencanaan provinsi. RPJMD Kabupaten Pamekasan berada pada pergantian Gubernur yang sekaligus menjadi dasar adanya perubahan pada RPJMD Provinsi Tahun 2014-2019 menjadi RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024 yang menjabarkan visi, misi, dan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RPJMD Provinsi menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten/Kota, sehingga RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan.
6. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Melalui perubahan regulasi ini, maka berdampak pula terhadap perubahan klasifikasi belanja dalam struktur APBD. Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Menyesuaikan dengan perubahan tersebut berpengaruh pada perlunya dilakukan perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023.
7. Adanya Arahan Enam (6) Arahan Presiden dalam Membendung Covid19 serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Enam (6) Arahan Presiden dalam Rangka Membendung Covid-19 yaitu:

- 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau *telemedicine*;
- 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detil dan baik;
- 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19;
- 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
- 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Selain Enam Arahan Presiden, berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menyebabkan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi/Kab/Kota) harus merealokasi APBD untuk kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi. Realokasi anggaran dilakukan dari rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak proritas/produktif.

Sebagai upaya menindaklanjuti ketujuh hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Namun tentu Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tetap merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-45
1.4.1 Maksud.....	I-45
1.4.2 Tujuan.....	I-45
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-47
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Topografi.....	II-4
2.1.3 Geologi.....	II-7
2.1.4 Hidrologi.....	II-8
2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-10
2.1.6 Demografi	II-12
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana.....	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..	II-19
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-29
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-39
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-39
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-95
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-153
2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan	II-192
2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	II-197
2.3.6 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-203
2.3.7 Fokus Kewilayahan.....	II-205
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-211
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-211
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-214
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia	II-214
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.1.2 Neraca Daerah	III-12



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-26
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-28
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-29
3.3 Kerangka Pendanaan	III-33
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-35
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-43
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis	IV-9
4.2.1 Isu Strategis Internasional	IV-9
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-23
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-56
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan (RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat)	IV-56
4.2.5 Telaahan Dokumen Lainnya	IV-60
4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan	IV-99
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-2
5.2. Misi	V-6
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN DAERAH	VI_1
6.1 Strategi Umum	VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN	
PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi	IX-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-17
Gambar 1.1	Pola Hubungan RPJMD dengan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang.....	I-29
Gambar 2.1	Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.....	II-1
Gambar 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-13
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan	II-20
Gambar 2.4	Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-22
Gambar 2.5	Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan 2015-2020.....	II-24
Gambar 2.6	Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2015-2020	II-30
Gambar 2.7	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-41
Gambar 2.8	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-42
Gambar 2.9	Tingkat Pendidikan	II-48
Gambar 2.10	Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Jawa Timur Tahun 2015-2020 ..	II-55
Gambar 2.11	Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Pamekasan Tahun 2017-2019	II-98
Gambar 2.12	Proporsi Laki-laki dan Perempuan dalam Sektor Formal dan Informal Tahun 2019	II-99
Gambar 2.13	Jumlah Pengunjung Domestik Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata di Kabupaten Pamekasan, 2018-2019.....	II-172
Gambar 2.14	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020	II-177
Gambar 2.15	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	II-194
Gambar 2.16	Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2016.....	II-212
Gambar 2.17	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019.....	II-213
Gambar 2.18	Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 ..	II-214



Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020	III-5
Gambar 3.2	Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020.....	III-6
Gambar 3.3	Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020.....	III-9
Gambar 3.4.	Rasio Lancar dan Rasio <i>Quick</i> Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020	III-18
Gambar 3.5.	Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020	III-21
Gambar 3.7	Persentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja.....	III-29
Gambar 4.1	Pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan Lapangan Usaha	IV-25
Gambar 5.1	Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-17
Gambar 6.1	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	VI-2
Gambar 6.2	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	VI-3
Gambar 6.3	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Daya Beli Masyarakat .	VI-4
Gambar 6.4	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah ..	VI-5
Gambar 6.5	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha.....	VI-6
Gambar 6.6	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	VI-7
Gambar 6.7	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kemandirian Desa	VI-8
Gambar 6.8	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	VI-9
Gambar 6.9	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Terpadu	VI-10
Gambar 6.10	Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	VI-11



Gambar 6.11 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, dan Tertib	VI-12
Gambar 6.12 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	VI-13
Gambar 6.13 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	VI-14
Gambar 6.14 Milestone Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023.....	VI-16



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan dengan RPJMN.....	I-17
Tabel 1.2	Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab.Pamekasan	I-19
Tabel 1.3	Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur	I-27
Tabel 1.4	Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, dan RTRW Kabupaten Sekitar	I-30
Tabel 1.5	Sinkronisasi RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Materi Teknis RTRW dan Dinamika Pembangunan.....	I-37
Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Nama Ibu kota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-2
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.....	II-3
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.....	II-4
Tabel 2.5	Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	II-5
Tabel 2.6	Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	II-8
Tabel 2.7	Nama, Panjang, dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	II-9
Tabel 2.8	Jumlah Sumber/ Mata Air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.....	II-9
Tabel 2.9	Nama-Nama Dam/ Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.....	II-10
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020	II-13
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020	II-14
Tabel 2.12	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pamekasan, 2020.....	II-15



Tabel 2.13	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020.....	II-15
Tabel 2.14	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020	II-16
Tabel 2.15	Persentase Desa/Kelurahan yang memperoleh Peringatan Dini dan Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana Tahun 2015-2020	II-17
Tabel 2.16	Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2015-2020.....	II-18
Tabel 2.17	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-18
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atau Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 (%).....	II-21
Tabel 2.19	Data terkait Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-26
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020	II-28
Tabel 2.21	Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019	II-29
Tabel 2.22	Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-32
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-36
Tabel 2.24	Kategori Indeks Pelayanan Publik	37
Tabel 2.25	Indeks Pelayanan Publik Dinas/ Badan Tahun 2020	II-38
Tabel 2.26	Indeks Pendidikan Tahun 2015-2020.....	II-40
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020	II-43
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 .	II-44
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020 .	II-45
Tabel 2.30	Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020	II-46
Tabel 2.31	Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.	II-47



Tabel 2.32	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-48
Tabel 2.33	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2019.....	II-51
Tabel 2. 34	Realisasi dan Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	II-51
Tabel 2.35	Indeks Kesehatan 2015-2020.....	II-54
Tabel 2.36	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-57
Tabel 2.37	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-57
Tabel 2.38	Angka Kematian Ibu Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.39	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-59
Tabel 2.40	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-59
Tabel 2. 41	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-60
Tabel 2. 42	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020	II-61
Tabel 2.43	Rasio Tenaga Dokter Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-63
Tabel 2.44	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020.	II-63
Tabel 2.45	Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, 2020	II-64
Tabel 2.46	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-64
Tabel 2.47	Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-65
Tabel 2.48	Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-65
Tabel 2.49	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-66
Tabel 2.50	Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-66



Tabel 2.51	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.52	Kesehatan Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.53	Jumlah Kasus Penyakit Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-68
Tabel 2.54	Data Perkembangan Stunting Menurut Bulan Timbang Agustus Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020	II-69
Tabel 2.56	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-76
Tabel 2.57	Panjang Jalan (km) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-76
Tabel 2.58	Panjang Jalan dan Jembatan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2020	II-77
Tabel 2.59	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2019 ..	II-77
Tabel 2.60	Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-78
Tabel 2.61	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-78
Tabel 2.62	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai Dengan RTRW Kabupaten Pamekasan ...	II-79
Tabel 2.63	Rumah Layak Huni (unit) dan Kawasan Kumuh Tahun 2015-2020.....	II-80
Tabel 2.64	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2015-2020	II-81
Tabel 2.65	Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-82
Tabel 2.66	Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-83
Tabel 2.67	Persentase Kasus Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-84
Tabel 2. 68	Realisasi dan Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-84
Tabel 2.69	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2015-2020	II-87
Tabel 2.70	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2020	II-88



Tabel 2.71	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020.....	II-88
Tabel 2.72	Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020	II-89
Tabel 2. 73	Realisasi dan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020	II-89
Tabel 2.74	Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-96
Tabel 2.76	Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-100
Tabel 2.77	Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-101
Tabel 2.78	Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan 2015-2019.....	II-102
Tabel 2.79	Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2017.....	II-104
Tabel 2.80	Tanah Bersertifikat Menurut Kecamatan dan Status Kepemilikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017	II-104
Tabel 2. 81	Indeks Kualitas Air Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-106
Tabel 2.82	Kasus Lingkungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-107
Tabel 2.83	Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-108
Tabel 2.84	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-110
Tabel 2.85	Perbandingan IKLH Kabupaten Pamekasan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020.....	II-110
Tabel 2.86	Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015-2020	II-111
Tabel 2.87	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang Tahun 2015-2019	II-112
Tabel 2.88	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2020	II-112
Tabel 2.89	Persentase PKK Aktif Tahun 2015-2020	II-113
Tabel 2.90	Posyandu Aktif Tahun 2015-2020.....	II-113
Tabel 2.91	Jumlah Desa Mandiri Tahun 2015-2020.....	II-114
Tabel 2.92	Jumlah Desa Maju Tahun 2015-2020	II-116
Tabel 2.93	Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015-2020	II-116
Tabel 2.94	Angka Kelahiran Total di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-117



Tabel 2.95	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-118
Tabel 2.96	Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-119
Tabel 2.97	Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi Tahun 2015-2020	II-120
Tabel 2.98	Rasio Akseptor KB Tahun 2015-2020	II-121
Tabel 2.99	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2015-2020	II-122
Tabel 2.100	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana ([LKB/ PKB) di Setiap Desa/ Kelurahan Tahun 2015-2020 .	II-123
Tabel 2.101	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2015-2020	II-123
Tabel 2.102	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2015-2020	II-124
Tabel 2.103	Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2015-2020	II-125
Tabel 2.104	Persentase Pencapaian Peserta KB (%) Tahun 2015-2020	II-125
Tabel 2.105	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-126
Tabel 2.106	Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-127
Tabel 2.107	Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-128
Tabel 2. 108	Angka Kecelakaan di Kabupaten Pamekasan dan Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019.....	II-129
Tabel 2.109	Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-130
Tabel 2.110	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan Tahun 2015-2020.....	II-131
Tabel 2.111	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020	II-133
Tabel 2.112	Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2020	II-134
Tabel 2.113	Kondisi Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018.....	II-136
Tabel 2.114	Perkumpulan Olahraga Tahun 2015-2019	II-137
Tabel 2.115	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015-2019 .	II-137
Tabel 2.116	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015-2019	II-138



Tabel 2.117	Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015-2019	II-139
Tabel 2.118	Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2015-2019 ..	II-139
Tabel 2.119	Jumlah Lembaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-141
Tabel 2.120	Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-142
Tabel 2.121	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2015-2020	II-142
Tabel 2.122	Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2015-2020	II-143
Tabel 2.123	Pengunjung, Koleksi Judul Buku, Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020	II-144
Tabel 2.124	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Tahun 2015-2020	II-145
Tabel 2.125	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2015-2020	II-145
Tabel 2.126	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2015-2020	II-146
Tabel 2.127	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun pada Tahun 2015-2020.....	II-147
Tabel 2.128	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Tahun 2015-2020	II-147
Tabel 2.129	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2015-2020	II-148
Tabel 2.130	Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2020	II-148
Tabel 2.131	Jumlah Koleksi Judul Buku dan Jumlah Buku di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020...	II-149
Tabel 2.132	Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2013-2019	II-150
Tabel 2.133	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020	II-151
Tabel 2.134	Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku Tahun 2015-2020	II-152
Tabel 2.135	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2015-2020.....	II-152
Tabel 2.136	Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-154
Tabel 2.137	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-156
Tabel 2.138	Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-157



Tabel 2.139	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-158
Tabel 2. 140	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-159
Tabel 2.141	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabuapten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-159
Tabel 2.142	Jumlah Perahu/ Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-160
Tabel 2.143	Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-160
Tabel 2.144	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-161
Tabel 2.145	Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-162
Tabel 2.146	Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-162
Tabel 2.147	Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-163
Tabel 2.148	Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-164
Tabel 2.149	Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-164
Tabel 2.150	Jumlah dan Persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-165
Tabel 2.151	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-167
Tabel 2.152	Jumlah Objek Wisata Tahun 2018-2020	II-167
Tabel 2.153	Potensi Wisata Kabupaten Pamekasan	II-168
Tabel 2.154	Distribusi Persentase Sektor Tanaman Pangan, Hortukultura, dan Perkebnan Terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016.....	II-174
Tabel 2.155	Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-174



Tabel 2.156	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-175
Tabel 2.157	Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pamekasan	II-176
Tabel 2.158	Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2019.....	II-176
Tabel 2.159	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020.....	II-178
Tabel 2.160	Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan, 2019-2020.....	II-179
Tabel 2.161	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020.....	II-180
Tabel 2.162	Banyaknya Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2020	II-180
Tabel 2.163	Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.....	II-181
Tabel 2.164	Jumlah Industri Usaha Tahun 2015-2020	II-182
Tabel 2.165	Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-182
Tabel 2.166	Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-183
Tabel 2.167	Persentase Kerjasama Produksi Antar IKM yang Telah Dibina Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-183
Tabel 2.168	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-184
Tabel 2.169	Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-184
Tabel 2.170	Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-185
Tabel 2.171	Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-185
Tabel 2.172	Unit Usaha Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-186
Tabel 2.173	Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-186
Tabel 2.174	Jumlah Ormas, Kegiatan Politik Daerah, dan Kegiatan Pembinaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-188
Tabel 2.175	Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019	II-188



Tabel 2.176	Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019	II-188
Tabel 2.177	Presentase Penduduk Berakte Lahir Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019.....	II-189
Tabel 2.178	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015-2020	II-192
Tabel 2.179	Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya Tahun 2015-2020	II-192
Tabel 2.180	Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-193
Tabel 2.181	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-193
Tabel 2.182	Jumlah Kebijakan Daerah yang Di Terbitkan dalam 1 Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-195
Tabel 2.183	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-195
Tabel 2.184	Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-196
Tabel 2.185	Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015-2020	II-196
Tabel 2.186	Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Tahun 2015-2020..	II-196
Tabel 2.187	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019	II-197
Tabel 2.188	Persentase SP2D yang Terbit Kurang Dari 2 Hari Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-198
Tabel 2.189	Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD <50% Tahun 2015-2020.....	II-198
Tabel 2.190	Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD >90% Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-199
Tabel 2.191	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-199
Tabel 2.192	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-200



Tabel 2.193	Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020	II-200
Tabel 2.194	Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020	II-201
Tabel 2.195	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-201
Tabel 2.196	Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Terdapat Hukuman Disiplin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-202
Tabel 2.197	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-202
Tabel 2.198	Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Tahun 2015-2020	II-203
Tabel 2.199	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar Tahun 2015-2020	II-205
Tabel 2.200	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis Tahun 2015-2020	II-206
Tabel 2.201	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur Tahun 2015-2019.....	II-207
Tabel 2.202	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan Tahun 2015-2020.....	II-207
Tabel 2.203	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Tahun 2015-2019	II-208
Tabel 2.204	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan Tahun 2015-2020.....	II-209
Tabel 2.205	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo Tahun 2015-2020	II-210
Tabel 2.206	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean Tahun 2015-2020	II-210
Tabel 2.207	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Tahun 2015-2020	II-210
Tabel 2.208	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Tahun 2015-2020	II-211
Tabel 2.209	Perkembangan Komponen Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016.....	II-212
Tabel 2.203	Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018	II-214
Tabel 2.204	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018	II-215
Tabel 2.205	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan	III-217



Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan	III-4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	III-8
Tabel 3.3	Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan.....	III-11
Tabel 3.4	Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pamekasan.....	III-14
Tabel 3.5	Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas.....	III-17
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Pamekasan.....	III-28
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan	III-30
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan.....	III-31
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pamekasan.....	III-32
Tabel 3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.....	III-35
Tabel 3.11	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	III-44
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	III-45
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	IV-2
Tabel 4.2	Ketercapaian TPB di Kabupaten Pamekasan	IV-13
Tabel 4.3	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan.....	IV-28
Tabel 4.4	Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan ..	IV-29
Tabel 4.5	Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia.....	IV-31
Tabel 4.6	Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa	IV-34
Tabel 4.7	Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV-36
Tabel 4.8	Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Menciptakan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	IV-39
Tabel 4.9	Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	IV-40
Tabel 4.10	Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik	IV-42



Tabel 4.11	Produktivitas Komoditas Unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan	IV-46
Tabel 4.12	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang	IV-62
Tabel 4.13	Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Pamekasan.....	IV-93
Tabel 4.14	Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.....	IV-97
Tabel 4.15	Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Urusan Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	IV-100
Tabel 4.16	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .	IV-105
Tabel 4.17	Skala Penilaian Metode Rating	IV-113
Tabel 4.18	Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	IV-114
Tabel 4.19	Rata-Rata Skor Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	IV-120
Tabel 4.20	Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas	IV-125
Tabel 4. 21	Pemetaan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan.....	IV-127
Tabel 5.1	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan.....	V-5
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.....	V-6
Tabel 5.3	Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.....	V-16
Tabel 5.4	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Visi: "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama" .	V-18
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pamekasan.....	VI-16
Tabel 6.2	Program Prioritas Anak Cerdas dan Pintar (ACAR).....	VI-19
Tabel 6.3	Program Prioritas Kesehatan Gratis (Sehati).....	VI-26
Tabel 6.4	Program Prioritas Desa Cerdas dan Mandiri (Cerdas).....	VI-37
Tabel 6.5	Program Prioritas Rujak Corek	VI-40
Tabel 6.6	Program Prioritas Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa) ...	VI-47
Tabel 6.7	Program Prioritas Kesejahteraan Guru Honorar, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam).....	VI-50



Tabel 6.8	Program Prioritas Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru da Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru)	VI-53
Tabel 6.9	Program Prioritas Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette).....	VI-60
Tabel 6.10	Pelayanan Perijinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service / Pelayanan Prima (Ji Dulasis)	VI-66
Tabel 6.11	Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng).....	VI-69
Tabel 6.12	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pamekasan	VI-72
Tabel 7.1	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.....	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-5

x x x x



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat 1. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama, kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Kemudian, RPJMD juga memuat strategi dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas serta indikator kinerja daerah.

RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih **H. Baddrut Tamam, S.Psi** dan **Raja'e, S.Hi.** yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2018. Dokumen RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 akan dijadikan sebagai acuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan perencanaan tahunan dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai bentuk pelaksanaan RPJMD dan keselarasan perencanaan



tahunan dengan perencanaan jangka menengah serta keselarasan perencanaan tingkat pemerintah daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus menggunakan konsep SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded, and Continuously Improve*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 Ayat 1, yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasal 7, menyatakan bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pendekatan teknokratis diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada Rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan ini juga menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:



- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan utamanya gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan



- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa perodesasi RPJMD.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD 2018-2023 Menunjukkan Hal-Hal Sebagai Berikut:

Secara umum hasil Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD yaitu masih terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra. Adapun beberapa hasil evaluasi yang tidak sesuai diantaranya Visi pada beberapa Renstra perangkat daerah memiliki redaksi yang berbeda yaitu redaksi “Nilai-nilai Islam”. Sedangkan Visi yang ada di RPJMD yaitu “Nilai-nilai agama”. Masih ada tujuan pada Renstra PD yang belum sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD. Beberapa Perangkat Daerah masih belum menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ada di RPJMD. Pada program dan dana indikatif masih banyak PD yang belum sesuai program maupun dana indikatif antara RPJMD dan Renstra. Selanjutnya,



berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa poin pada RPJMD Kabupaten Pamekasan yang belum berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten yaitu : 1) Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. 2) Program Aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, 3) Kawasan hutan produksi dan 4) Kawasan pertambangan.

2. Perubahan yang disebabkan karena regulasi dan kebijakan baru, diantaranya meliputi:

- a. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan/atau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- b. Terdapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024
- e. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



3. Keadaan darurat

Pandemi *Covid-19* yang melanda secara global sejak awal tahun 2020 yang belum mereda sampai saat ini, telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, proyeksi keuangan daerah (pendapatan yang mengalami penurunan realokasi belanja daerah) dan juga target indikator kinerja utama daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas. Hal ini sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (*Covid-19*) serta adanya Enam (6) Arahan Presiden dalam Membendung *Covid-19* yaitu:

- 1) Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau *telemedicine*;
- 3) Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detail dan baik;
- 4) Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran *Covid-19*;



- 5) Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
- 6) Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

Sebagai upaya menindaklanjuti ke-tujuh hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Namun tentu Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tetap merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018- 2023, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa timur sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kota praja surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah UU Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi djawa timur dan UU Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat, dan daerah istimewa jogjakarta;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;



31. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);



37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

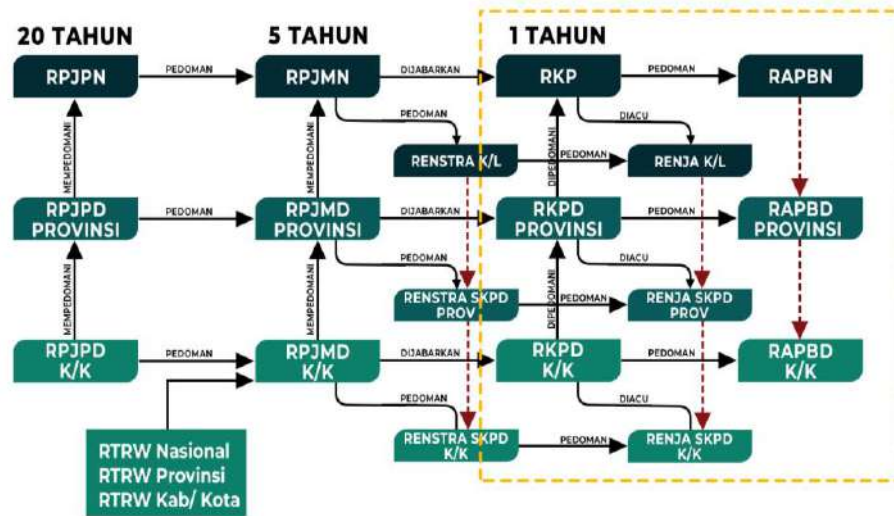


- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6 No.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 260-6/2020);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
 52. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain tersebut meliputi; RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten dan/atau kota di sekitarnya. Secara umum pola keterkaitan antara RPJMD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Gambaran secara detail mengenai keterkaitan RPJMD Kabupaten Pamekasan dengan dokumen lainnya digambarkan dalam tabulasi sebagai berikut.

Tabel 1.1 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan dengan RPJMN

No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.	Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi 1 RPJMD yaitu, Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan	Sesuai dengan Misi ke-2 pada RPJMD yaitu,



No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	Berdaya Saing.	Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya.
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.	Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi ke-4, yaitu Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat.
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	Sesuai dengan Tujuan yang ada pada Misi ke-4, yaitu Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat.
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.	Sesuai dengan Misi ke-5, yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.
6	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.	
7	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.	Sesuai dengan Tujuan yang ada dalam Misi ke-3 RPJMD, yaitu
8	Pengelolaan Pemerintahan	Meningkatkan



No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel.
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023

Pada tahap selanjutnya akan disajikan mengenai keselarasan antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025

No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
1	Visi RPJPD : <i>"Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT"</i>	Visi RPJMD memiliki kesesuaian dan kesinambungan dengan Visi RPJPD, yaitu ; <i>"Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"</i>
2	Sasaran Pokok RPJPD Tahun Ke-3 (2016-2020) Adalah terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Agar sasaran pokok pembangunan tersebut dapat dicapai secara optimal maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang diarahkan pada:	Kebijakan Pembangunan Pada Sasaran Pokok RPJPD Tahun ke-3 , apabila dikaitkan dengan RPJMD sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran 1 dan 7 RPJPD, sejalan dengan Misi ke-4 yaitu Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan. ▪ Sasaran 2, 4 dan 6 RPJPD, sejalan dengan Misi 1, yaitu



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<ol style="list-style-type: none">1) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berkualitas yang mendukung perkembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing baik pada pasar lokal, regional, nasional maupun pasar internasional;3) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa baik dalam semua aspek kehidupan. Supremasi hukum dan penegakan keadilan perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan di bidang hukum dapat diwujudkan secara nyata;4) Mengembangkan SDM yang berkualitas dan profesional merupakan bekal pokok dalam upaya menciptakan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi sangat strategis dalam upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek atau aktor pembangunan;5) Mengembangkan kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan dengan disertai oleh pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.	<p><i>Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sasaran 3 RPJPD sejalan dengan Misi 3 RPJMD yaitu <i>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.</i>▪ Sasaran ke-5 RPJPD sejalan dengan Misi 5 dalam RPJMD yaitu <i>Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.</i>



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<p>Pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang sensitif gender, pengembangan program pembangunan berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan, pengembangan program asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta program pemberdayaan kontrol dan prakarsa masyarakat lokal;</p> <p>6) Meningkatkan pelayanan dan akses di sektor pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas serta menganut prinsip non diskriminatif;</p> <p>7) Menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah serta dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial yang memfokuskan pada sektor agropolitan dan minapolitan.</p>	
3	<p>Tahap Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah tahapan pemantapan yakni peningkatan akselerasi pembangunan dan penyempurnaan terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Agar sasaran pokok pada tahapan lima tahun terakhir ini terealisasi dengan baik maka kebijakan</p>	<p>Kebijakan Pembangunan Pada Sasaran Pokok RPJPD Lima Tahun ke-4, apabila dikaitkan dengan RPJMD sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pada Sasaran 1 dan 4 RPJPD <i>concern</i> pada akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<p>diarahkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan akselerasi atau percepatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Pamekasan yang kuat dan mandiri yang mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan baik lahir maupun batin;2) Meningkatkan pembangunan agama agar peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dapat diwujudkan merupakan langkah yang harus dilakukan pada tahapan ini. Melalui peningkatan pelayanan dan pemahaman agama yang baik diharapkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan ridho Allah SWT juga akan mengalami peningkatan dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Di samping itu dalam proses pembangunan agama peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang dapat mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat juga perlu senantiasa didorong agar ketentraman dan	<p>sesuai dengan Misi 2, yaitu Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada Sektor pertanian dan didukung Percepatan pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pada sasaran 2 RPJPD memiliki korelasi dengan Sasaran 9, yaitu terkait dengan pembangunan toleransi dan nilai-nilai agama dengan aspek keamanan dan ketertiban umum. Kedua sasaran RPJPD ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan masyarakat yang harmonis serta Sejahtera.▪ Sasaran 3 RPJPD berkaitan erat dengan Misi 3 RPJMD, yaitu Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini sebagai <i>effort</i> untuk meningkatkan efektivitas dan



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<p>kedamaian dapat direalisasikan. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran berkaitan dengan realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;</p> <p>3) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparat birokrasi pemerintah yang lebih profesional, bersih dan berwibawa. Dengan kondisi kelembagaan dan aparat yang professional dan berwibawa diharapkan ke depan akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan publik secara optimal. Birokrasi pemerintahan diharapkan juga lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Terwujudnya pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa merupakan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses</p>	<p>efisiensi pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sedangkan Sasaran ke-5 dan ke-7 RPJPD <i>concern</i> pada Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Misi 1 RPJMD yaitu Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.▪ Sasaran 6 RPJPD yaitu penerapan SPM. Untuk urusan wajib pelayanan dasar, hal ini telah dilakukan, apalagi pada Renstra Perangkat Daerah telah ditegaskan hal tersebut.▪ <i>Concern</i> RPJMD terkait dengan kebijakan supremasi hukum bila dikaitkan dengan RPJMD tahun 2018-2023 dapat dilihat dari sasaran di misi ke-5 RPJMD berupa Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib.



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<p>pembangunan jangka panjang;</p> <p>4) Penguatan sektor ekonomi yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya kondisi ekonomi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan dalam dimensi ekonomi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan;</p> <p>5) Menyediakan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan senantiasa harus mendapat perhatian pemerintah mengingat sektor ini merupakan sector penentu IPM (Indeks Pembangunan Manusia);</p> <p>6) Menyediakan SPM (standar pelayanan minimal) di seluruh bidang pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya SPM maka pelayanan terhadap publik yang diberikan menjadi semakin profesional, transparan dan akuntabel;</p> <p>7) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan</p>	



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	<p>pendidikan dan kesehatan, akses serta fungsi kontrol atas fasilitas-fasilitas pelayanan kebutuhan sosial dasar tersebut;</p> <p>8) Meningkatkan pembangunan di bidang hukum yang difokuskan pada perwujudan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;</p> <p>9) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Upaya mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan cita-cita bersama yang harus direalisasikan sebab dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap akan dapat menciptakan kenyamanan seluruh warga masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Akhirnya melalui berbagai inisiatif yang dilakukan melalui proses pembangunan dan tahap pembangunan setiap lima tahunan diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025</p>	



No	RPJPD Kab. Pamekasan Tahun 2005-2025	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
	yakni Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT dapat benar-benar dicapai.	

Sumber: RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023

Pada tahap selanjutnya akan disampaikan Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pembangunan yang sinergis antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.



Tabel 1.3 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

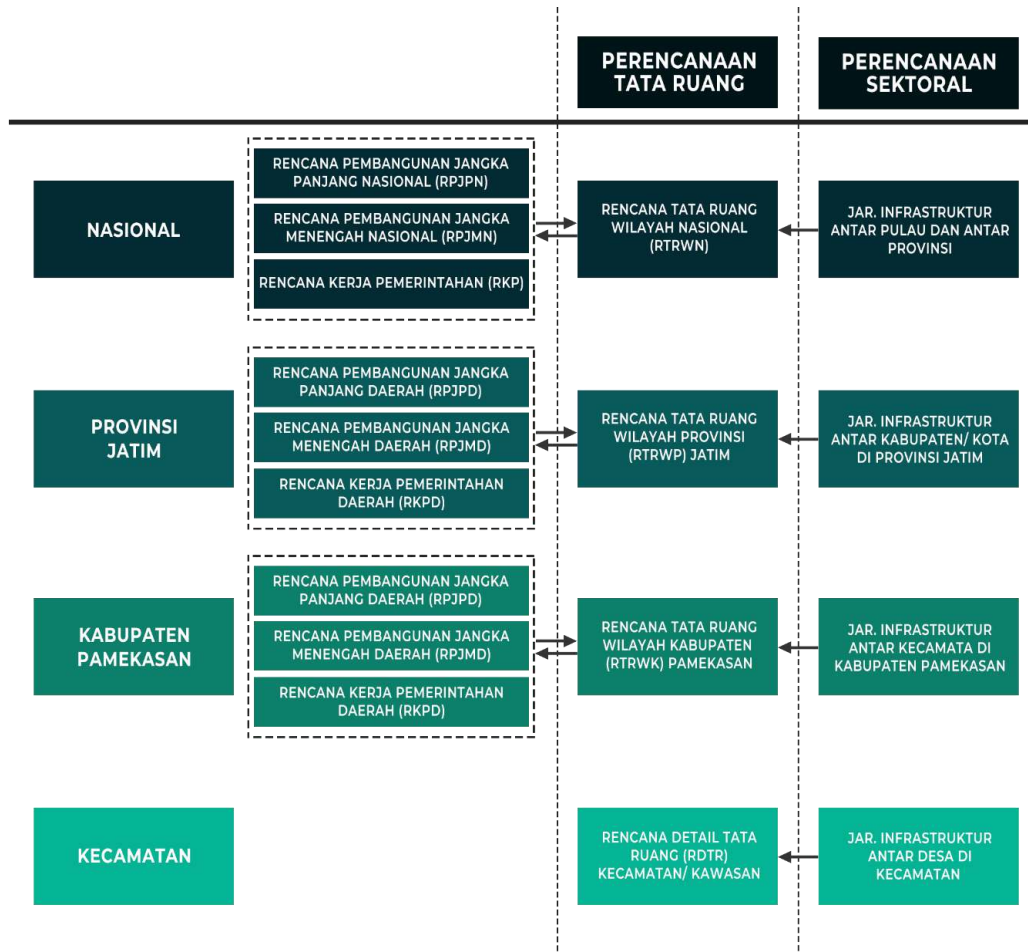
No	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
1	<p>Misi 4: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.</p>	<p>Hal ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu <i>Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan.</i> Misi ke-5 terdiri dari 3 Sasaran sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib▪ Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat▪ Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan
2	<p>Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.</p>	<p>Hal ini sesuai dengan Misi 4 RPJMD yaitu, <i>Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat.</i> Misi ke-4 terdiri dari 2 Sasaran sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu▪ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau <p>Dan hal tersebut juga selaras dengan Misi 2, yaitu <i>Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan</i></p>



No	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023
		Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sector potensial lainnya.
3	Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	Hal tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel.
4	Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	Hal ini sesuai dengan Misi 5 RPJMD, yaitu Meningkatkan Harmoni Nilai-Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan. Misi ke-5 terdiri dari 3 Sasaran sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none">▪ Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib▪ Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat▪ Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023

Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen RPJMD mengacu pada ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan mekanisme sebagaimana tersaji pada Gambar 1.2



Gambar 1.1 Pola Hubungan RPJMD dengan Penyempurnaan Rencana Tata Ruang

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Mengacu pada diagram tersebut di atas tampak bahwa RPJMD Kabupaten/Kota disusun mengacu pada Rencana Tata Ruang, sebaliknya rencana pembiayaan Tata Ruang dan Perencanaan Sektoral akan tertuang pada prioritas program RPJMD. Terkait dengan Tata Ruang, data dan informasi, serta rencana tata ruang diolah melalui proses:

- a. Analisis daerah;
- b. Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;



- c. Perumusan masalah pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 1.4 Keselarasan Antara RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, dan RTRW Kabupaten Sekitar

No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
1	<p>Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kab. Pamekasan.</p> <p>Pengembangan pusat kegiatan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) PKW : Perkotaan Pamekasan PKLP : Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru PPK : Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaan Batumarmar, Perkotaan Pasean, Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur.</p> <p>Pengembangan Kawasan perdesaan melalui Agrobisnis. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pamekasan untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan. Kawasan yang ditetapkan</p>	<p>Kebijakan RTRW Nasional yang terkait dengan daerah:</p> <p>Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 (Revisi RTRWN) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.</p> <p>Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.</p> <p>Kawasan andalan berkembang Ditetapkan dengan kriteria : memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan; memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen); memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
	<p>sebagai kawasan Agropolitan yaitu :</p> <p>a. Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : durian, pisang dan pepaya.</p> <p>b. Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicornong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan kambing.</p> <p>c. Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Haji, dan Desa Plakpak, dengan</p>	<p>penduduk provinsi; memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.</p> <p>Kawasan andalan prospektif Berkembang ditetapkan dengan kriteria: memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan; memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma nol lima persen); memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun; memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah penduduk provinsi; memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.</p> <p>Kawasan andalan laut Ditetapkan dengan kriteria memiliki sumber daya kelautan; memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
	<p>arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, cabe, dan durian.</p> <p>d. Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamaroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.</p>	<p>memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.</p>
2	<p>Kebijakan RPJMD yang Terkait dengan RTRW Jawa Timur.</p> <p>Pada kebijakan RTRW Jawa Timur, Kab Pamekasan masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah, Pengembangan Germakertosusila Plus, Jaringan Jalan Arteri Primer, Rencana pengembangan kawasan strategis dan kawasan tertinggal.</p> <p>Kebijakan dalam RPJMD yang sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur tersebut secara tegas disampaikan dalam Strategi Pembangunan melalui pembangunan dari bawah dan merata.</p> <p>Salah satu implementasi kebijakan tersebut antara lain Pembangunan</p>	<p>Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur yang Terkait dengan Kab Pamekasan.</p> <p>Kab. Pamekasan sesuai Pasal 19 ayat (1) masuk Sistem perkotaan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah): Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan;</p> <p>Kab Pamekasan juga masuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep, dengan fungsi:</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
	<p>prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan. Kebijakan ini meliputi Perkotaan Batumarmar, Pasaan, Larangan, Pegantenan, Palengaan, Proppo, Pademawu, Galis, Kadur, Tlanakan.</p> <p>Sedangkan salah satu kebijakan yang sinergis dengan jalan arteri nasional, maka untuk jalan kabupaten dilakukan pelebaran jalan pada ruas jalan < 6 meter dan peningkatan kualitas perkerasan jalan. Untuk rencana pelebaran jalan dilakukan sehingga terpenuhi persyaratan minimum sebagai ruas jalan lokal primer.</p>	<p>pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;</p> <p>Jalan nasional arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi konservasi jalur perkeretaapian mati meliputi: Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget.</p> <p>Sedangkan Rencana pengembangan kawasan strategis (Pasal 87) dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi: Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis (meliputi Kab Madiun, Kab.Magetan, Kab Ngawi, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, dan Kota Madiun), Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru (meliputi Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Sidoarjo), Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, dan Kab. Situbondo), dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura (meliputi Kabupaten Bangkalan,</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
		<p>Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep);</p> <p>Pada sisi lain, tantangannya pada Pasal 87 ayat 8 dijelaskan Kawasan tertinggal berupa kabupaten/kota dengan keberadaan desa-desa tertinggal yang di dalamnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah kota/kabupaten dan provinsi yang penyebarannya meliputi Kab. Bangkalan, Kab. Bondowoso, Kab.Pamekasan, Kab. Sampang, dan Kab. Situbondo.</p>
3	<p>Kebijakan RPJMD Kab.Pamekasan yang Terkait dengan RTRW Kab. Sampang.</p> <p>Salah satu Kebijakan/Perencanaan Tata Ruang, dilakukan dengan Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis</p>	<p>Kebijakan dalam RTRW Kab. Sampang yang terkait Kab.Pamekasan.</p> <p>Pengembangan wilayah lintas kabupaten berupa Perwujudan sistem jaringan transportasi jalan (Pasal 54 Perda RTRW Kab. Sampang) mencakup kegiatan: peningkatan jalan penghubung antara Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan melalui Kecamatan Omben;</p> <p>Salah satu kebijakan yang perlu diantisipasi adalah Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 17 meliputi:</p> <p>a. konservasi rel mati;</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
	provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sampang.	b.pengembangan jalur perkeretaapian umum yang menghubungkan Bangkalan-Kamal-Sampang - Pamekasan -Sumenep yang terintegrasi dengan jaringanperkeretaapian di Surabaya;
4	<p>Kebijakan RPJMD Kab.Pamekasan yang Terkait dengan RTRW Kab. Sumenep.</p> <p>Salah satu Kebijakan/Perencanaan Tata Ruang, dilakukan dengan Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan, yaitu Kabupaten Sumenep.</p> <p>Kebijakan lain yang dilakukan pasca tarif nol Jembatan Suramadu adalah pengintegrasian kebijakan kewilayahan yang dimulai dari perencanaan kebijakan kepariwisataan madura yang meliputi 4 kabupaten di Pulau Madura.</p>	<p>Kebijakan dalam RTRW Kab. Sumenep yang terkait Kab.Pamekasan.</p> <p>Kebijakan untuk mendukung konektivitas antar daerah (Pasal 16) berupa Jalan Nasional berupa jalan arteri primer meliputi ruas Batas Kabupaten Pamekasan - Batas Kota Sumenep, Jalan raya Pamekasan, Jalan Trunojoyo, Batas Kota Sumenep - Kalianget, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani,Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Yos Sudarso.</p> <p>Sedangkan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer meliputi Ruas Batas Kabupaten Pamekasan - Batas Kota Sumenep, Jalan Raya Manding, Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Gapura dan Batas Kota Sumenep - Pantai Lombang:</p> <p>Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana Pasal 19 meliputi pembangunan jalur kereta api ditujukan pada pengaktifan kembali</p>



No	RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023	Keterkaitan dengan Dokumen RTRW secara Vertikal maupun Horizontal
		lintas non operasional di Pulau Madura menghubungkan Bangkalan -Kamal - Sampang - Pamekasan- Sumenep;

Sumber: RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Kab. Pamekasan, RTRW Kabupaten Sampang, dan RTRW Kabupaten Sumenep.



Tabel 1.5 Sinkronisasi RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Materi Teknis RTRW dan Dinamika Pembangunan

Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.	Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait pengembangan kualitas SDM ataupun pengembangan fasilitas umum khususnya pendidikan dan kesehatan	Adanya usulan pengembangan Kawasan Pendidikan Berbasis Pesantren di Kecamatan Palengaan, sedangkan dari bidang kesehatan tidak terdapat dinamika pembangunan yang mempengaruhi tata ruang
Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal.	Telah sesuai dengan kebijakan RTRW nomor 2 dan 4 yaitu: a. Kebijakan 2: Penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong inventasi produktif di bidang berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, dengan strategi: ➤ Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah; ➤ Meningkatkan akses terhadap kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang didukung oleh sarana prasarana pertanian pada kawasan-kawasan potensial; ➤ Mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk meningkatkan pelayanan	a. Aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dikembangkan agar terintegrasi dengan sektor lain yang terkait untuk meningkatkan potensi produk unggulan lokal yang siap jual. b. Pengembangan kawasan agrotekno pemanfaatan embung untuk pertanian dan agro ternak (sapi) di Kecamatan Palengaan c. Program aksi berbaur untuk UMKM dan Industri Kreatif serta pelatihan sehingga memudahkan para petani untuk mengakses bantuan permodalan, di antaranya melalui koperasi desa atau koperasi petani agar petani tidak lagi menemui hambatan



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
		<p>listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan ketersediaan sumberdaya air dalam menunjang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; dan➤ Mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting. <p>b. Kebijakan 4: Pengembangan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta penguatan lembaga pendukungnya;➤ Mengembangkan potensi pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan;➤ Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;➤ Mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;	<p>permodalan saat memulai proses produksi</p> <p>d. Adanya usulan untuk pengembangan IKM di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pamekasan sehingga perlu adanya perubahan lokasi dan luasan</p> <p>e. Pengembangan kawasan agropolitan Rupanandur sebagai kawasan strategis ekonomi</p>



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
		<ul style="list-style-type: none">➤ Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan➤ Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.	
		Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait pengembangan industri kreatif, koperasi dan UMKM. Pengembangan industri hanya sebatas kegiatan peningkatan teknologi yang ramah lingkungan yaitu strategi yang terdapat pada kebijakan nomor 4	<ol style="list-style-type: none">a. Program aksi berbaur untuk UMKM dan Industri Kreatif serta pelatihan sehingga memudahkan para petani untuk mengakses bantuan permodalan, di antaranya melalui koperasi desa atau koperasi petani agar petani tidak lagi menemui hambatan permodalan saat memulai proses produksib. Adanya usulan untuk pengembangan IKM diseluruh Kecamatan di Kabupaten



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
			Pamekasan sehingga perlu adanya perubahan lokasi dan luasan
		Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan kemandirian fiskal daerah	Tidak terdapat dinamika terkait kemandirian fiskal daerah
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan pelayanan publik	Tidak terdapat dinamika terkait peningkatan pelayanan publik
Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	Kebijakan dan strategi terkait infrastruktur yang terdapat di dalam RTRW dikhususkan untuk peningkatan agropolitan, sehingga sarana dan prasarana yang terkait hanya berhubungan dengan pertanian. Sedangkan terkait kualitas lingkungan telah terakomodir didalam Kebijakan nomor 3 yaitu Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, dengan strategi: a. Memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap	a. Peningkatan jalan di ruas jalan lingkaran selatan sepanjang 9.050 meter untuk menghubungkan Kabupaten Pamekasan dengan kabupaten lain di Pulau Madura. b. Pembangunan jalan lingkaran timur yang dimulai dari Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan hingga Desa Tambung Kecamatan Pademawu sepanjang 13,8 kilometer dengan lebar 6 meter. c. Pembangunan jalan lingkaran barat yang dimulai dari Desa Laden Kecamatan Pamekasan hingga terhubung dengan jalan Desa Larangan Badung Kecamatan



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
		<p>permukaan tanah dan mampu meresapkan air;</p> <p>b. Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan membatasi dan mencegah aktifitas perusakan, pengendalian pencemaran dan meningkatkan upaya konservasi sungai dan mata air serta merehabilitasi ekosistem yang rusak;</p> <p>c. Membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;</p> <p>d. Mempertahankan fungsi lindung pada kawasan berhutan bakau, disertai perlindungan pengembangan nilai budaya masyarakat lokal dengan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan; dan</p> <p>e. Melakukan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lintas wilayah.</p> <p>Namun infrastruktur lainnya terkait dengan kualitas lingkungan permukiman belum terakomodir di dalam RTRW</p>	<p>Palangan dengan panjang sekitar 13 km dengan lebar 4,5 hingga 7 meter.</p> <p>d. Pengembangan jalan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional rencana terdiri atas ruas Bangkalan – Tanjung Bulu Pandan – Ketapang – Sotobar – Sumenep yang menghubungkan masing-masing kabupaten di Pulau Madura.</p> <p>e. Pemerintah Kabupaten telah melakukan kajian trase jalur kereta api di Kabupaten Pamekasan sebagai langkah awal agar jalur rel kereta api di Madura kembali diaktifkan.</p> <p>f. Pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani transportasi laut dari Kabupaten Pamekasan ke provinsi lain mengalami pembangunan yang status pengelolaannya belum jelas. Selain itu terdapat sarana prasarana yang tidak sanggup dibangun oleh Pemerintah</p>



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
			<p>Kabupaten karena masalah dana yang besar.</p> <p>g. Pengembangan trayek penyeberangan Pamekasan- Probolinggo untuk mempersingkat waktu dari Madura dan Probolinggo menjadi 1-1,5 jam, sehingga berdampak untuk mempercepat pembangunan sektor lain seperti ekonomi, dan wisata.</p> <p>h. Sumber minyak gas yang ada di Pulau Mandangin Sampang dan di Kecamatan Kadur Pamekasan memiliki 104 blok migas dan baru 14 blok yang sudah dieksploitasi.</p> <p>i. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan dibangun di Kecamatan Tlanakan, namun hingga kini belum dilaksanakan dan direncanakan untuk ditempatkan di bagian pantai utara Pamekasan.</p> <p>j. Pengembangan kawasan konservasi sebagai kawasan sempadan SUTT dan SUTM</p>



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
			<p>sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat sesuai RTRW belum berjalan</p> <p>k. Pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit dengan penambahan sejumlah titik wifi dan meningkatkan teknologi dalam bidang perekonomian.</p> <p>l. Pembangunan prasarana sumber daya air mencakup kegiatan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi dan perlindungan terhadap sumber seperti saluran irigasi, serta daerah aliran sungai, namun pembangunan jaringan irigasi sudah mengalami kerusakan dalam waktu setahun karena kegagalan konstruksi.</p> <p>m. Pemerintah mengefisiensi anggaran sehingga belum bisa mengalokasikan dana untuk rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pembangunan</p>



Kebijakan RPJM	Strategi RPJM	Sinkronisasi dengan Kebijakan & Strategi RTRW	Sinkronisasi dengan Dinamika Pembangunan PK RTRW
			Tempat Pemrosesan Akhir ditempatkan di Desa Bindang Kecamatan Pasean. n. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera	Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan.	Tidak ada kebijakan maupun strategi yang mengakomodir terkait peningkatan potensi sosial dan budaya	a. Makam Ratu Pemelingan diusulkan untuk masuk kedalam Kawasan Cagar Budaya b. Pelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya berupa Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo

Sumber: RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023 dan Dinamika Pembangunan PK RTRW



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penyesuaian dengan SOTK baru serta dinamika pembangunan baru lainnya di Pamekasan. Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, serta memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD ini juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dan 2023 sebagai kelanjutan perencanaan pembangunan tahun 2019-2021.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan 2018-2023 adalah sebagai berikut:



1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pamekasan;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara lebih efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan
7. Memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2022 dan 2023.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Dasar Hukum

1.2 Hubungan RPJMD Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai



program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa sehingga menghasilkan isu-isu strategis sebagai pijakan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dijabarkan menjadi Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang menunjukkan satu kesatuan logika perencanaan yang utuh dan konsisten.

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan



dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTA DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Pada bagian penutup akan disajikan dua bagan penting, yaitu Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, yang memberikan petunjuk bagaimana masa peralihan dokumen ini diwaktu yang akan datang, serta keterkaitannya dengan dokumen lainnya seperti Renstra dan RKPD



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



kecamatan, Kecamatan Batumarmar seluas 97,05 Km² atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan dengan luasan 26,47 Km² atau 3,3% dari luas wilayah secara keseluruhan.

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan dan Nama Ibu kota Kecamatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)
Tlanakan	Branta Tinggi	48.10
Pademawu	Bunder	71.90
Galis	Galis	31.86
Larangan	Larangan Luar	40.86
Pamekasan	Patemon	26.47
Proppo	Proppo	71.49
Palengan	Palengan Laok	88.4
Pegantenan	Pegantenan	86.04
Kadur	Kadur	52.43
Pakong	Pakong	30.71
Waru	Waru Barat	70.03
Batumarmar	Tamberu	97.05
Pasean	Tlontoraja	76.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Adapun rincian jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	17	17	17	17	17	17
Pademawu	22	22	22	22	22	22
Galis	10	10	10	10	10	10
Larangan	14	14	14	14	14	14
Pamekasan	18	18	18	18	18	18
Proppo	27	27	27	27	27	27
Palengaan	12	12	12	12	12	12
Pegantenan	13	13	13	13	13	13
Kadur	10	10	10	10	10	10
Pakong	12	12	12	12	12	12
Waru	12	12	12	12	12	12
Batumarmar	13	13	13	13	13	13
Pasean	9	9	9	9	9	9

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka, 2021



Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang stagnan dari tahun 2015-2020, tidak ada jumlah Desa/Kelurahan yang berkurang maupun yang bertambah jumlahnya. Dengan jumlah Desa/Kelurahan yang paling sedikit pada Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Pasean yaitu 9 Desa/Kelurahan, sementara Desa/Kelurahan yang paling banyak pada Kecamatan di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Proppo yaitu 27 Desa/Kecamatan.

Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Kecamatan	Tinggi Wilayah	Jarak Dari Ibukota Kab (Km)	Persentase Terhadap Luas Kab/Kota
Tlanakan	22	7.0	6.1
Pademawu	7	9.0	9.1
Galis	6	9.1	4.0
Larangan	36	12.5	5.2
Pamekasan	15	2.0	3.3
Proppo	47	10.0	9.0
Palengaan	77	15.5	11.2
Pegantenan	312	15.6	10.9
Kadur	140	15.5	6.6
Pakong	250	24.0	3.9
Waru	159	34.0	8.8
Batumarmar	16	47.0	12.2
Pasean	50	40.3	9.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Ditinjau dari tinggi wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Pegantenan menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu 312 m, sementara Kecamatan yang menunjukkan angka yang paling rendah adalah Kecamatan Galis dengan tinggi wilayah 6 m. Sedangkan jarak wilayah Kecamatan terjauh dari Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Batumarmar, yakni 47.0 km sementara jarak kecamatan yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Pamekasan dengan jarak 2.0 km.



2.1.2 Topografi

2.1.2.1 Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Pamekasan tersebar pada berbagai kelas lereng, Kemiringan Lahan yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan ini yaitu kemiringan 0-15° dengan luas areal sebesar 59.964 ha, sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722.ha. Untuk luas total lahan sebesar 79.230 ha. Distribusi Kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

No	Kecamatan	Kemiringan Lahan (Ha)				Jumlah
		0-15°	15-25°	25-40°	>40°	
1	Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2	Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3	Galis	3.186	-	-	-	3.186
4	Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5	Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6	Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7	Palengaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8	Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
9	Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10	Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11	Waru	4.774	1.509	-	720	7.003
12	Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13	Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
JUMLAH/TOTAL		59.964	14.291	2.253	2.722	79.230

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Secara kuantitatif luas lahan yang berada pada kelas lereng antara 0-15° mendominasi kondisi lahan di Pamekasan, yaitu 59,964 ha sedangkan untuk kemiringan 15-25° dengan luas kedua terbesar yaitu 14.291 ha, sedangkan untuk kemiringan 25-40° dengan luas yaitu 2.253 ha, dan untuk kemiringan paling tinggi yaitu >40° dengan luas areal sebesar 2.722 ha. Untuk luas total kemiringan lahan sebesar 79.230 ha.



2.1.2.2 Ketinggian Tempat

Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)	Tinggi Dari Permukaan Laut (M)
1	Tlanakan	4.810,0	6,1%	22
2	Pademawu	7.189,0	9,1%	7
3	Galis	3.186,0	4,0%	6
4	Larangan	4.086,0	5,2%	36
5	Pamekasan	2.647,0	3,3%	15
6	Proppo	7.149,0	9,0%	47
7	Palengaan	8.848,0	11,2%	77
8	Pegantenan	8.604,0	10,9%	312
9	Kadur	5.242,0	6,6%	140
10	Pakong	3.071,0	3,9%	250
11	Waru	7.003,0	8,8%	159
12	Batumarmar	9.707,0	12,3%	16
13	Pasean	7.688,0	9,7%	50
JUMLAH/TOTAL		79.230,0	100,0%	1.137

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Ditinjau dari ketinggian tempat pada tabel 2.5, sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 0-50 m dpl atau pada kelompok dataran rendah sampai sedang. Untuk gambaran ketinggian di Kabupaten Pamekasan ini terdapat pada uraian berikut:

- Ketinggian 0-50 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 0-50 m yaitu 26.391,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Tlanakan sebesar 4.286,1 ha, Kecamatan Pademawu sebesar 7.182,9 ha, Kecamatan Galis seluas 3.181,6 ha, Kecamatan Larangan sebanyak 1.678,2 ha, Kecamatan Pamekasan seluas 2.545,7 ha, Kecamatan Proppo sebanyak 4.676,5 ha, Kecamatan Palengaan seluas 220,4 ha, Kecamatan Kadur seluas 148,4 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 738,8 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.732,8 ha;
- Ketinggian 50-100 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 50-100 m yaitu 17.192,9 ha,



- yang tersebar di Kecamatan Tlanakan seluas 48,10 km², Kecamatan Pademawu seluas 71,90 km², Kecamatan Galis seluas 4,4 ha, Kecamatan Larangan seluas 1.891,9 Ha, Kecamatan Pamekasan seluas 101,3 ha, Kecamatan Proppo seluas 2.060,1 ha, Kecamatan Palengaan seluas 4.248,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.334,7 ha, Kecamatan Kadur seluas 2.171,6 ha, Kecamatan Waru seluas 217,0 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.759,3 Ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.874,3 ha;
- Ketinggian 100 – 150 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 100 - 150 m yaitu seluas 18.807,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Larangan seluas 515,9 ha, Kecamatan Proppo seluas 412,4 ha, Kecamatan Palengaan seluas 3.105,0 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 3.144,3 ha, Kecamatan Kadur seluas 1.496,4 ha, Kecamatan Waru seluas 2.842,2 Ha, Kecamatan Batumarmar seluas 5.348,1 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.943,2 ha;
 - Ketinggian 150-200 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 150 - 200 m yaitu seluas 8.408,7 ha, yang tersebar di Kecamatan Palengaan seluas 274,3 ha, Kecamatan Pegantenan seluas 1.134,0 ha, Kecamatan Kadur seluas 687,0 ha, Kecamatan Pakong seluas 202,2 ha, Kecamatan Waru seluas 2.978,3 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 1.659,5 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 1.473,5 ha;
 - Ketinggian 200-250 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 200 - 250 m yaitu seluas 3.815,5 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 748,6 ha, Kecamatan Kadur seluas 641,1 ha, Kecamatan Pakong seluas 968,5 ha, Kecamatan Waru



- seluas 601,1 ha, Kecamatan Batumarmar seluas 201,3 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 654,9 ha;
- Ketinggian 250-300 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 250-300 m yaitu seluas 2.342,0 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 523,2 ha, Kecamatan Kadur seluas 91,8 ha, Kecamatan Pakong seluas 1.550,4 ha, Kecamatan Waru seluas 167,4 ha, dan Kecamatan Pasean seluas 9,3 ha;
 - Ketinggian 300 – 350 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 300 - 350 m yaitu seluas 2.151,6 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 1.645,9 ha, Kecamatan Kadur seluas 5,6 ha, Kecamatan Pakong seluas 329,6 ha, dan Kecamatan Waru seluas 170,5 ha;
 - Ketinggian 350 – 396 m : total dari keseluruhan wilayah yang memiliki ketinggian 350 - 396 m yaitu seluas 120,3 ha, yang tersebar di Kecamatan Pegantenan seluas 73,4 ha, Kecamatan Pakong seluas 20,3 ha, dan Kecamatan Waru seluas 26,5 ha.

2.1.3 Geologi

2.1.3.1 Struktur dan Karakteristik Geologi

Berdasarkan Tabel 2.6, Luas tanah pada kedalaman kurang dari 30 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Batumarmar seluas 5.027, 08 Ha dan terendah pada Kecamatan larangan seluas 208,37 Ha, pada kedalaman 30-60 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Larangan seluas 2.303.67 Ha dan terendah pada Kecamatan Proppo seluas 14,40, pada kedalaman tanah 60-90 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Pasean seluas 4.434,44 Ha dan terendah pada Kecamatan Tlanakan seluas 60,67 Ha, dan pada kedalaman lebih dari 90 cm yaitu tertinggi pada Kecamatan Pademawu

seluas 6.632,73 dan terendah pada Kecamatan Batumarmar seluas 10,26 Ha.

Tabel 2.6 Kedalaman Tanah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Kecamatan	Kedalaman Tanah Efektif				Jumlah
	30 cm	30-60 cm	60-90 cm	> 90 cm	
Tlanakan	-	-	60.67	5,231.46	5,292.13
Pademawu	-	5.11	-	6,632.73	6,637.84
Galis	-	351.86	-	3,061.74	3,413.60
Larangan	208.37	2,303.67	1,019.91	549.98	4,081.93
Pamekasan	-	95.90	-	2,590.82	2,686.72
Propo	273.86	14.40	-	7,147.66	7,435.92
Palengan	969.54	678.50	556.72	5,586.42	7,791.18
Pegantenan	1,028.77	1,714.23	4,247.02	2,088.97	9,078.99
Kadur	2,457.61	133.56	2,889.70	-	5,480.87
Pakong	665.78	2,140.80	493.37	-	3,299.95
Waru	2,116.59	697.37	4,265.76	-	7,079.72
Batumarmar	5,027.08	823.47	4,002.62	10.26	9,863.43
Pasean	2,422.33	771.72	4,443.44	-	7,637.49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021.

2.1.3.2 Potensi Geologi

Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha. Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.4 Hidrologi

2.1.4.1 Sungai

Di Kabupaten Pamekasan terdapat 13 sungai yang melintasi beberapa wilayah kecamatan, selain itu juga terdapat pula sumber mata air dan dam/bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk sarana irigasi lahan pertanian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Nama, Panjang, dan Muara Sungai yang Melintas Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

No.	Nama Sungai	Wilayah Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Muara
1	Kloang	Kadur/Pamekasan	6	Selat Madura
2	Lembun Bunter	Palengaan/Proppo/Pamekasan	11	Selat Madura
3	Sbr. Payung	Proppo/Pamekasan	10	Selat Madura
4	Semajid	Pamekasan/Pademawu	16	Selat Madura
5	Jombang	Pamekasan	4	Selat Madura
6	Tambak Ponteh	Larangan/ Galis	9	Selat Madura
7	Pendi	Larangan/ Galis	9	Selat Madura
8	Egrang	Larangan	8	Selat Madura
9	Berlanjang	Waru	5	Laut Jawa
10	Lesong	Batumarmar	6	Laut Jawa
11	Tamberu	Batumarmar	5	Laut Jawa
12	Angsokah	Pasean	6	Laut Jawa
13	Pasean	Pasean	8	Laut Jawa

Sumber: Dinas Pengairan UPTD Pamekasan, 2021

2.1.4.2 Sumber Mata Air/Bendungan

Data sumber mata air dan bendungan disajikan dalam tabel di bawah ini. Sumber mata air dan bendungan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.8 Jumlah Sumber/ Mata Air di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sumber /Mata Air	
		JUMLAH	AREAL (HA)
1	Tlanakan	1	2
2	Pademawu	1	6
3	Galis	-	-
4	Larangan	3	281
5	Pamekasan	1	5
6	Proppo	-	-
7	Palengaan	2	10
8	Pegantenan	6	260
9	Kadur	1	10
10	Pakong	18	1.257
11	Waru	2	105
12	Batumarmar	1	15
13	Pasean	4	138
Jumlah		40	2.089

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2019

Berdasarkan Tabel 2.9 terdapat 15 bendungan di Kabupaten Pamekasan dengan total volume air sekitar 3.510



m³ Volume air yang tertampung pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau 947 m³.

Tabel 2.9 Nama-Nama Dam/ Bendungan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

No.	Dam /Bendungan	Areal (Ha)	DEBIET L/det.		Lokasi
			Penghujan (Max)	Kemarau (Min)	
1.	Dam Samiran	2.462	2.200	700	Ds. Kodik Kec. Proppo
2.	Dam Klampar	189	147	38	Ds. Klampar – Proppo
3.	Dam Toronan	53	40	19	Ds. Toronan – Pamekasan
4.	Dam Blumbungan	121	137	37	Ds. Kowel – Pamekasan
5.	Dam Grujugan	98	58	22	Ds. Grujugan – Larangan
6.	Dam Bulay	238	185	23	Ds. Bulay – Galis
7.	Dam Polagan	321	220	30	Ds. Polagan – Galis
8.	Dam Duko I	98	60	5	Ds. Duko – Larangan
9.	Dam Duko II	33	24	5	Ds. Duko – Larangan
10.	Dam Lancar	138	69	3	Ds. Lancar – Larangan
11.	Dam Taman Pakong	30	52	6	Ds. Seddur – Pakong
12.	Dam Cenlecen	51	43	8	Ds. Cenlecen – Pakong
13.	Dam Batu Kerbuy	190	136	25	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
14.	Dam Angsoka	3	3	1	Ds. Bt. Kerbuy – Pasean
15.	Dam Batu Bintang	100	136	25	Ds. Bt. Bintang-Btmarmar
	JUMLAH	4.125	3.510	947	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan, 2021

Proses sedimentasi dan pendangkalan bendungan ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air.

2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang



kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan karakteristik tanah dan penggunaan kawasan yang ada, Kabupaten Pamekasan terdiri dari:

1. Kawasan Permukiman/Perkampungan seluas 11.524,10 hektar yang tersebar di 13 kecamatan dengan kecamatan yang memiliki wilayah permukiman terluas adalah Kecamatan Larangan 584,6 hektar, dan terkecil adalah Kecamatan Galis 281,16 hektar (data tahun 2007).
2. Kawasan Sawah untuk pertanian yang terdiri dari sawah irigasi, sawah drainase, dan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan merupakan area yang paling luas di antara area sawah yang lain yaitu sebesar 8.569,00 hektar; kemudian sawah semi irigasi seluas 5.213,03 hektar; dan sawah irigasi hanya 1.386,00 hektar. Hal ini mengingat keadaan tanah yang tidak kedap air tersebut. Sawah Irigasi hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pegantenan, Pakong, Batumarmar dan Pasean.
3. Kawasan Tegalan, merupakan kawasan yang paling luas di antara kawasan lainnya yaitu seluas 32.966,34 hektar. Kawasan ini tersebar merata di 13 kecamatan. Kecamatan Batumarmar merupakan wilayah yang memiliki kawasan tegalan paling luas yaitu seluas 4.882,10 hektar dan Kecamatan Pakong merupakan



wilayah yang paling kecil kawasan tegalannya yaitu hanya seluas 215,29 hektar.

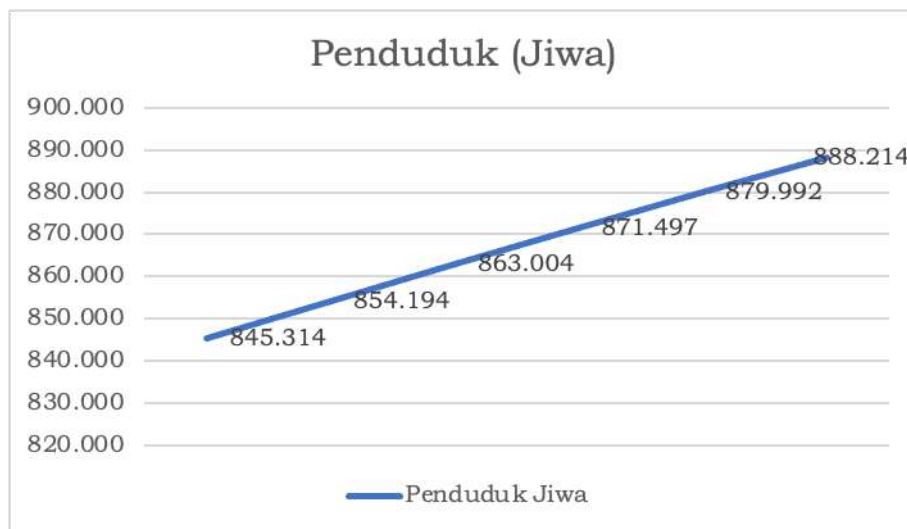
4. Kawasan hutan, Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektar yang terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan seluas 338 hektar, Kecamatan Pademawu 257,3 hektar, Kecamatan Galis 285,5 hektar, Kecamatan Waru 235,7 hektar, dan Kecamatan Batumarmar 102,3 hektar.
5. Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kabupaten Pamekasan memiliki kawasan seluas 2.229,1 hektar yang terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.
6. Kawasan Jasa Perdagangan seluas 238,2 hektar tersebar di 13 Kecamatan, terluas di Kecamatan Pamekasan seluas 360 hektar dan terkecil di Kecamatan Pakong seluas 11,0 hektar.
7. Kawasan Industri Pertanian seluas 92,40 hektar tersebar di 10 Kecamatan, meliputi Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu seluas 32,4 hektar.
8. Kawasan tambang seluas 9.0 hektar berada di Kecamatan Kadur.

Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.

2.1.6 Demografi

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun

mengalami penurunan pada tahun 2020, data tersebut adalah penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan di Kabupaten Pamekasan. Penduduk Pamekasan Tahun 2015 yaitu sebanyak 845.314 jiwa, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 854.194 jiwa. pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan kembali meningkat menjadi 863.004 jiwa, kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 871.497 jiwa. peningkatan dan lonjakan tertinggi pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2019 dimana jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat sebanyak 45.109 jiwa menjadi 916.606 jiwa yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan menjadi 888.214 jiwa. Berikut grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan:



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Sumber Data :Pamekasan dalam angka, 2020.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk	Jiwa	845.314	854.194	863.004	871.497	879.992	888.214
Laki-laki	Jiwa	410.800	415.217	419.489	423.587	427.801	431.822
Perempuan	Jiwa	434.514	438.977	443.515	447.910	452.191	456.392
Rasio Jenis Kelamin	%	94,54	94,59	94,58	94,57	94,61	94,62

Sumber Data :Pamekasan Dalam Angka, 2021.



Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	35,405	34,105	69,510
5-9	32,417	31,147	63,564
10-14	32,266	30,642	62,908
15-19	33,246	31,754	65,000
20-24	38,074	36,507	74,581
25-29	34,363	34,210	68,573
30-34	34,083	36,033	70,116
35-39	30,221	33,568	63,789
40-44	32,671	35,244	67,915
45-49	28,294	29,155	57,449
50-54	24,485	26,472	50,957
55-59	20,438	22,821	43,259
60-64	15,477	17,181	32,658
65-69	11,735	13,705	25,440
70-74	6,888	8,556	15,444
75+	6,898	11,996	18,894
Kabupaten Pamekasan	416,961	433,096	850,057

Pada tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan meningkat. Pada jenis gender terlihat gender perempuan berjumlah lebih besar daripada laki-laki. Hal ini terlihat pada jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 hanya berjumlah 431.822 orang sedangkan perempuan berjumlah 456.392 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin bergerak fluktuatif. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 94,62 yang berarti setiap 10 orang wanita terdapat 9,462 laki-laki.

Tabel 2.12 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pamekasan, 2020

Angkatan Kerja				
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ Sekolah Dasar (SD)	259,868	4,596	264,464	98.26
Sekolah Menengah Pertama	66,081	1,768	67,849	97.39
Sekolah Menengah Atas	98,501	6,859	105,360	93.49
Perguruan Tinggi	39,056	3,549	42,605	91.67
Jumlah/Total	463,506	16,772	480,278	96.51

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Mencari Pekerjaan	77,103	341,567	77.43
Mempersiapkan Usaha	70,247	138,096	49.13
Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan	56,015	161,375	65.29
Sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja	4,244	46,849	90.94
Jumlah/Total	207,609	687,887	69.82

Tabel 2.13 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	32,157	29,809	61,966
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	90,724	36,525	127,249
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10,404	3,375	13,779
Buruh/Karyawan/Pegawai	51,860	23,750	75,610
Pekerja bebas	33,844	6,160	40,004
Pekerja keluarga/tak dibayar	38,058	106,840	144,898
Jumlah/Total	257,047	206,459	463,506

Pertumbuhan penduduk adalah angka pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020.

Tabel 2.14 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Penduduk	%	1,09	1,05	1,03	0,98	0,97	0,93

Sumber Data: Pamekasan Dalam Angka, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga berada di 0,93% pada tahun 2020. Penurunan penduduk ini menunjukkan pengendalian penduduk sudah berhasil dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana



Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Pamekasan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu wilayah tengah, Selatan dan daerah perkotaan, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut harus waspada. Wilayah tengah itu diantaranya Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong dan Kecamatan Kadur. Sementara wilayah selatan adalah



Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan dan sebagian Kecamatan Proppo. wilayah tengah yang dipetakan tersebut cenderung berpotensi rawan longsor, dan wilayah selatan berpotensi puting beliung. Sementara wilayah perkotaan adalah rawan banjir saat musim hujan terutama di wilayah aliran sungai Kali Jombang dan Kali Semajid.

Delapan dari 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan, masuk kategori rawan bencana alam. Delapan kecamatan tersebut selalu mengalami kejadian bencana setiap tahun. Delapan kecamatan tersebut adalah, Pademawu, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Larangan, Kadur, Galis dan Kecamatan Pakong. Jenis bencana yang terjadi di wilayah tersebut kebanyakan berupa angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran. Sementara kecamatan yang masuk kategori aman dari peristiwa bencana alam ialah Kecamatan Pamekasan.

Tabel 2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang memperoleh Peringatan Dini dan Persentase Desa/Kelurahan tangguh Bencana Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	2	2	3	3	3	1
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	-	100	150	125	100	50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan
Jumlah Desa/Kelurahan kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 1%, keadaan ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang sebesar 3%. Desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami keadaan yang



fluktuatif juga setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 50%, namun angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019 dengan jumlah sebesar 100%.

Tabel 2.16 Data Kejadian Bencana Alam dan Angka Korban Bencana Alam Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Data kejadian bencana alam (kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dsb)	52	60	78	69	90	50
Angka korban bencana alam (jiwa)	4	1	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan
Data kejadian bencana alam mulai dari kebakaran, tanah longsor, banjir, pohon tumbang dan sebagainya yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sangat fluktuatif. Hal ini terlihat dari data kejadian bencana di tahun 2020 sebesar 50 kejadian, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2019 yang sebesar 90 kejadian. Sedangkan untuk angka jumlah korban bencana alam dari tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sejumlah 4 orang, kemudian menjadi 1 orang di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 hingga tidak ada korban bencana.

Tabel 2.17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan (Desa/Kelurahan)	58	60	63	65	68	70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pamekasan
Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tahun 2020 sejumlah 70, namun angka ini lebih besar dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yakni sebesar 68. Hal ini perlu



diimbangi dengan peningkatan kesadaran Masyarakat/Lembaga dalam penanggulangan bencana.

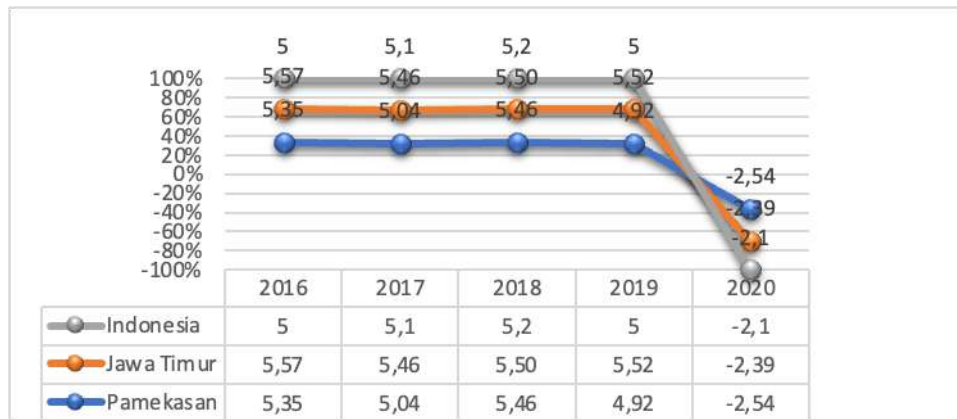
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.



Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan mencapai 5,35%, tahun 2017 menurun menjadi 5,04% kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,46%, namun pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 4,92% dan pada tahun 2020 kembali menurun dengan mencapai -2,54%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2016 mencapai angka 5,57%, pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga angka 5,46%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali mencapai 5,5%, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 5,52%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan mencapai -2,39%.

Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2016 mengalami mencapai angka 5%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 mencapai angka 5,1%, pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 5,2%, namun pada tahun 2019



mengalami penurunan hingga menunjukkan angka 5%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan mencapai -2,1%.

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satuan rupiah setiap tahun.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atau Dasar Harga Konstan (TD 2010) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020 (%)

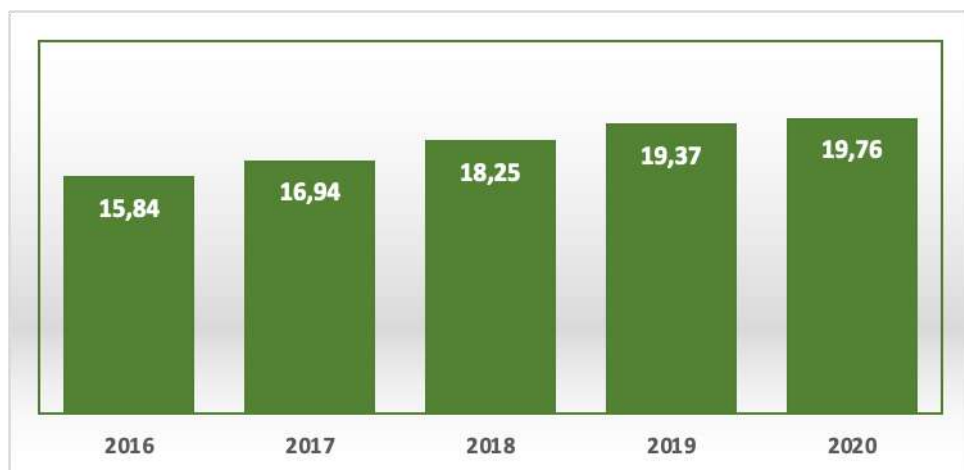
Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	0,43	1,60	0,13	0,72
B	Pertambangan dan Penggalian	2,62	12,60	5,49	3,68	-6,40
C	Industri Pengolahan	6,40	7,47	8,69	9,16	-3,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,83	4,43	3,94	5,05	-1,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,41	5,22	3,83	4,54	4,08
F	Konstruksi	5,36	8,40	8,22	8,06	-7,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	7,57	7,28	6,90	-7,98

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
H	Transportasi dan Pergudangan	7,34	8,14	6,73	8,94	-6,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,46	9,51	8,81	7,02	-8,90
J	Informasi dan Komunikasi	8,18	8,06	7,94	8,25	7,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,66	4,08	6,16	4,89	-0,22
L	Real Estate	6,20	4,80	6,61	6,83	1,01
M,N	Jasa Perusahaan	6,39	5,91	6,74	6,72	-6,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,80	3,57	4,90	3,16	-1,19
P	Jasa Pendidikan	6,06	4,72	6,58	7,13	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,44	7,64	7,59	8,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,63	4,54	4,71	5,80	-15,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,35	5,04	5,46	4,92	-2,54

Sumber : Pamekasan dalam angka, 2019

Keterangan : ** Angka Sementara

Kemudian, PDRB per kapita Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita menjadi acuan dalam menghitung besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah.



Gambar 2.4 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Sumber : Pamekasan dalam Angka, 2021

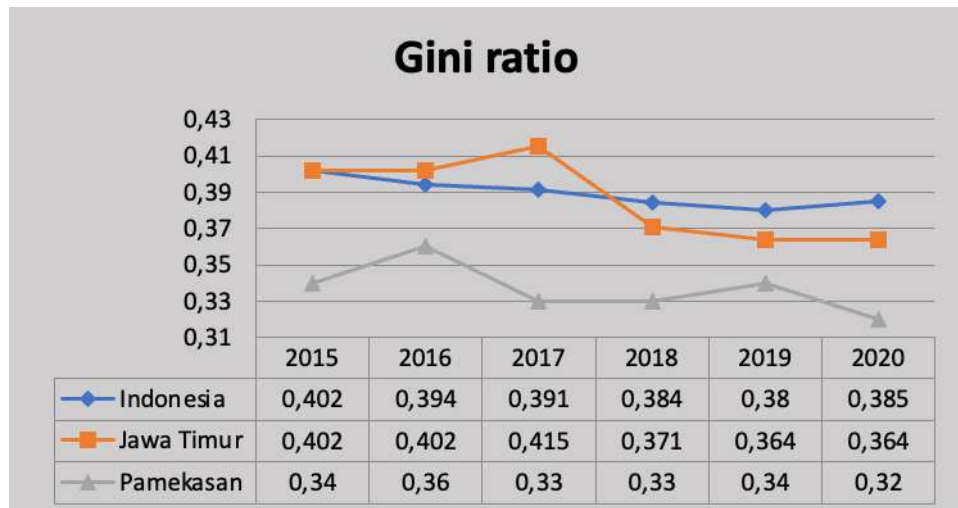
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Pamekasan menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut



terlihat dari grafik diatas yang menunjukkan awal mula posisi PDRB yang berada pada 15,84 pada tahun 2016 menjadi 19,76 pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017-2018 yang mengalami peningkatan sebanyak 1,31. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2019-2020 yang mengalami peningkatan hanya sebesar 0,39. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

2.2.1.3 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah makalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan dalam hal ini kabupaten Pamekasan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.



Gambar 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pamekasan 2015-2020

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Pada mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini. Indikator ini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa indeks gini di Kabupaten Pamekasan selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,32-0,36).

Gini Rasio Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun



2015 gini rasio di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 0,34%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,36%, pada tahun 2017 menurun hingga 0,33%, pada tahun 2018 stagnan yaitu 0,33%, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,34%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,32%. Peningkatan yang terjadi pada beberapa tahun, kalau terus dibiarkan tentunya bisa berdampak kurang baik. Ketimpangan pendapatan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah semakin tinggi. Patut menjadi perhatian, walau indeks gini rasio masih dalam kategori sedang, tetapi ada kecenderungan meningkat. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015-2020 selalu lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang



dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah Jawa Timur dan Kabupaten/Kota telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Tabel 2.19 Data terkait Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan)	(Rp)	278.093	292.631	302.431	317.144	332.775	357.074
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	146,92	142,32	137,77	125,76	122,43	129,41
Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	17,41	16,7	16	14,47	13,95	14,6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	3,24	2,38	1,66	1,7	1,85	1,89
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,88	0,54	0,33	0,32	0,39	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Garis kemiskinan adalah Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis



kemiskinan lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Garis kemiskinan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang menandakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan semakin naik. Garis kemiskinan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 adalah Rp 357.074.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan penduduk yang masuk ke dalam klasifikasi masyarakat yang memiliki upah rendah atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya minimal sama dengan garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan menurun hingga tahun 2019 mencapai 122,43 jiwa dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 129,41 dikarenakan Pandemi Covid-19.

Persentase penduduk miskin adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan total keseluruhan jumlah penduduk suatu daerah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan secara perlahan hingga 13,95% pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 14,6% dikarenakan Pandemi Covid-19.

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang paling baik diraih Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2017 yang berhasil mencapai 1,66% untuk tingkat kedalaman kemiskinan.

Tingkat keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi



ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan yang paling baik diraih Kabupaten Pamekasan adalah pada tahun 2018 yang berhasil mencapai 0,32% untuk tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Madura dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	
	2019	2020
Bangkalan	186,11	204,00
Sampang	225,13	204,82
Pamekasan	137,77	129,41
Sumenep	211,92	218,60
Jawa Timur	4.617,01	4.332,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Tabel tersebut berisi data kondisi kemiskinan di Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 mencapai 186,11 ribu penduduk, pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 204,00 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sampang pada tahun 2019 mencapai 225,13 ribu, pada tahun 2020 menurun mencapai 204,82 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 mencapai 137,77 ribu, pada tahun 2020 menurun mencapai 125,76 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mencapai 211,92 ribu penduduk, pada tahun 2020 naik mencapai 218,60 ribu penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 4.617,01 ribu, kemudian menurun pada tahun 2020 mencapai 4.332,59 ribu. Teridentifikasi dari tabel tersebut bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan paling rendah, apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Provinsi Jawa Timur.

2.2.1.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku dimana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Tabel 2.21 Laju Inflasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laju Inflasi	5,22	2,19	3,67	2,82	3,06

Sumber: BPS Kab. Pamekasan

Di Kabupaten Pamekasan, nilai inflasi tahun 2015 sebesar 5,22% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 2,19%. Pada tahun 2017 kembali terjadi peningkatan inflasi Kabupaten Pamekasan menjadi sebesar 3,67% dan kembali mengalami penurunan menjadi 2,82% ditahun 2018 dan mengalami penurunan kembali menjadi 2,06% pada tahun 2019.

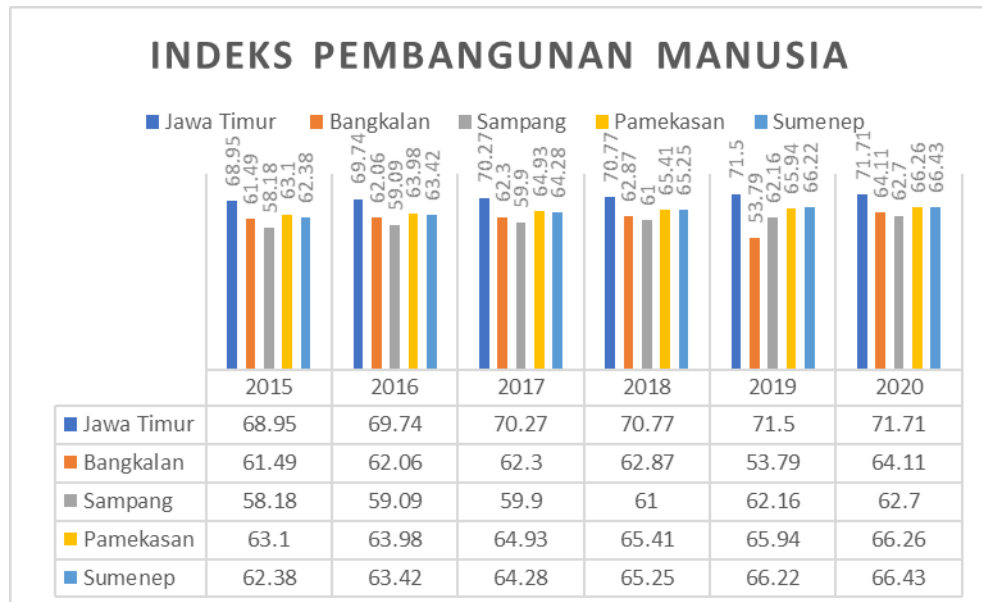
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di negara tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun

tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. IPM ini juga dapat menjadi tolak ukur pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota.

IPM Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai IPM Pamekasan sebesar 63,1 poin, kemudian tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 63,98 poin, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 65,94 poin, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 66,26 poin, seperti terlihat pada gambar 2.6 berikut:



Gambar 2.6 Perbandingan IPM Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun 2015-2020

Sumber : BPS Jawa Timur, 2021

IPM Jawa Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 IPM Provinsi



Jawa Timur mencapai angka 68,95 poin dan terus meningkat hingga mencapai 71,71 poin pada tahun 2020. Kabupaten Bangkalan menunjukkan capaian IPM yang fluktuatif, pada tahun 2015 capaiannya sebesar 61,49 poin, pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 62,06 poin, pada tahun 2017 mencapai 62,30 poin, pada tahun 2018 mencapai 62,87 poin dan pada tahun 2019 mencapai 53,79 poin, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 64,11 poin. IPM Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Sampang mencapai 58,18 poin dan meningkat hingga tahun 2020 mencapai 62,7 poin. Selanjutnya, IPM di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2015 mencapai 63,1 poin kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 63,98 poin, kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 64,93 poin. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 65,41 poin dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 65,94 poin. Pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan mencapai 66,26 poin. Selanjutnya, IPM Kabupaten Sumenep, mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015 nilainya mencapai angka 62,38 poin dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga mencapai 66,43 poin.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu terus mendorong peningkatan IPM dikarenakan:



1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 2.22 Hasil Capaian Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	66,86	66,95	67,05	67,22	67,45	67,58
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,34	13,35	13,61	13,62	13,63	13,64
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,73	6,08	6,25	6,35	6,4	6,69
Pengeluaran Perkapita/Thn Disesuaikan	(Ribu Rp)	7.679	7.975	8.311	8.536	8.834	8.739
Indeks Kesehatan	Indeks	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73
Indeks Pendidikan	Indeks	0,56	0,57	0,59	0,59	0,59	0,6
Indeks Daya Beli (PPP)	Indeks	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	63,1	63,98	64,93	65,41	65,94	66,26
Percepatan IPM	%	0,7	1,39	1,48	0,74	0,81	0,49
Ranking IPM di Jawa Timur	Ranking	33	34	32	32	34	34
Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,26	ts	85,68	85,5	86,05	86,17
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	52,27	ts	55,81	57,29	53,13	br
Gini Ratio	Indeks	0,34	0,36	0,33	0,33	0,34	br
Nilai Tukar Petani	%	ts	ts	ts	108,48	113,28	br
Nilai Tukar Nelayan	%	ts	ts	ts	120,89	116,87	br

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

Usia harapan hidup adalah didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin baik pula pelayanan kesehatan dan kesejahterannya. UHH Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan hingga mencapai 67,58 tahun pada tahun 2020.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan



dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 13,64 tahun pada tahun 2020.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Capaian RLS Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 6,69 tahun pada tahun 2020.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Capaian pengeluaran perkapita Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai Rp 8.739 pada tahun 2020.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 0,6 pada tahun 2020. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development*



Report (HDR). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan mengalami pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 66,26 pada tahun 2020.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2020 hingga mencapai 86,17 pada tahun 2020.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 53,13 pada tahun 2019.

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Capaian rasio gini Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 0,34 pada tahun 2019.

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 113,28% pada tahun 2019.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil



tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Capaian nilai tukar nelayan Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pada tahun 2015-2019 hingga mencapai 116,87% pada tahun 2019.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Pada kurun waktu enam tahun (2015-2020), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang dinamis. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan trend yang fluktuatif, kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan trend yang fluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 70,05%, selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 71,08% di tahun 2017. Pada tahun 2018, TPAK mengalami penurunan hingga menunjukkan angka 69,7%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2019 mencapai 68,50%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 69,82%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 menunjukkan angka 4,26%, pada tahun 2017 menunjukkan angka 3,91%. Pada tahun 2018 menunjukkan angka 2,88%, kemudian pada tahun 2019 menunjukkan angka 2,26%, sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 3,49%. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020,



pada tahun 2015 mencapai angka 634.253 penduduk, pada tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai angka 651.952 penduduk, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai angka 660.551 penduduk, dan pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 669.078 penduduk. Pada tahun 2020 mencapai 687.887 penduduk.

Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,05	*	71,08	69,70	68,50	69,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,26	*	3,91	2,88	2,26	3,49
Jumlah Penduduk Usia Kerja	634.253	*	651.952	660.551	669.078	687.887

Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka, 2021

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Namun pada tahun 2019, tercatat bahwa terjadi penurunan TPT di Kabupaten Pamekasan hingga mencapai 2,26%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 3,49%.

Selain hal di atas, permasalahan lain bertambahnya tingkat pengangguran di kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi

kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;

2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
3. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
4. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan
6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai hasil dari pembobotan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang dilakukan. Adapun kategori indeks pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)



Range Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Sumber: PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan tolok ukur yang diberlakukan oleh Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan potensi pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sampai pada kategori Pelayanan Prima (A). Indeks pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan masih perlu ditingkatkan kembali.

Tabel 2.25 Indeks Pelayanan Publik Dinas/ Badan Tahun 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	IPP
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.03
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.87
3	Badan Keuangan Daerah	2.62
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.30
5	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	2.61
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.62
7	Dinas Kesehatan	2.82
8	Dinas Sosial	2.32
9	Dinas Pendidikan	2.38
10	Dinas Perhubungan	3.10
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.94
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.76
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.99
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.43
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.63
16	Dinas Lingkungan Hidup	2.47
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.08
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.79
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.72
20	Inspektorat Daerah	3.72



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	IPP
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.83
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.93
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.65
24	Dinas Perikanan	3.34
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.76
26	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	3.16
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.43
28	RSUD WARU	3.49
29	RSUD Slamet Martodirjo	3.92
30	Satuan Polisi Pamong Praja	2.59
31	Sekretariat DPRD	2.03
32	Sekretariat Daerah	2.87

Sumber Data: Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, 2020

Dari hasil pengukuran Indeks Pelayanan publik 32 (Tiga Puluh Dua) Perangkat Daerah diatas diatas dapat disimpulkan bahwa indeks pelayanan publik Kabupaten Pamekasan tahun 2020 berada pada nilai 2.85 yang masuk pada kategori C dengan makna (cukup), artinya ini sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Karenanya kemudian pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula.

Permasalahan pendidikan setidaknya ada tiga, pertama pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (ratio guru yang cukup tetapi tidak merata), kedua kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait *how to have* (bagaimana memperoleh/rekrutment) dan *how to empower* (bagaimana memberdayakan), ketiga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata.

2.3.1.1.1 Indeks Pendidikan

Tabel 2.26 Indeks Pendidikan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pendidikan	0,56	0,57	0,59	0,59	0,59	0,60

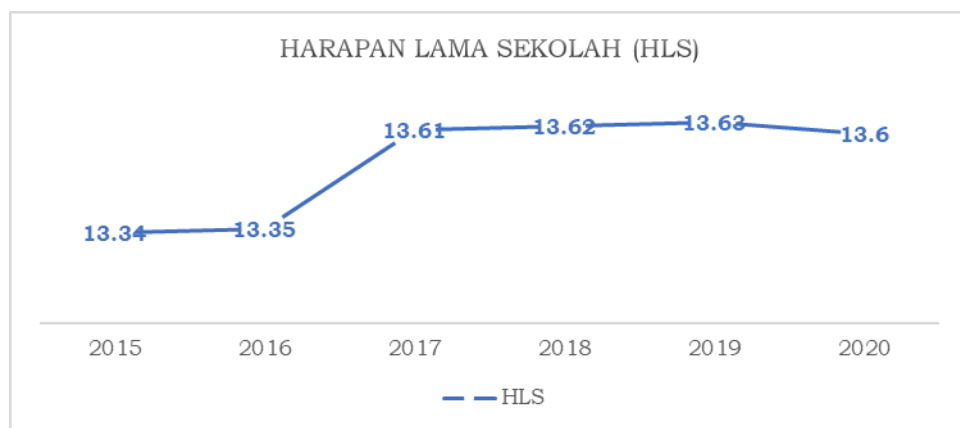
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data di atas, indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari 2015 sampai dengan tahun 2016, kemudian stagnan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, lalu meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2015 indeks Pendidikan Kabupaten Pamekasan mencapai 0,56%, pada tahun 2016 mencapai 0,57%, pada tahun 2017 mencapai 0,59%, pada tahun 2018

mencapai 0,59%, pada tahun 2019 masih stagnan pada angka 0,59%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 0,60%.

2.3.1.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

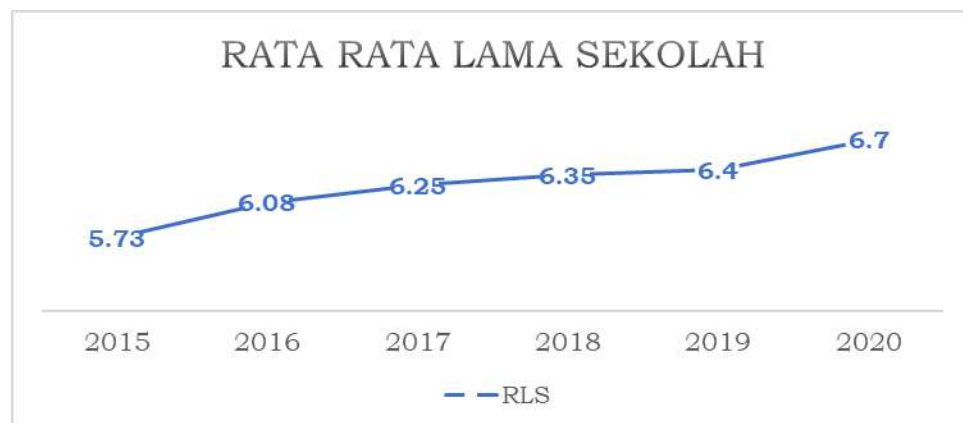
Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, 2021

Data menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020, pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah Kabupaten Pamekasan sebesar

13,34 tahun, pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah Kabupaten Pamekasan mencapai 13,35 tahun, pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah mencapai 13,61 tahun, kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai angka 13,62 tahun, dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai angka 13,63 tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 13,6 tahun.

2.3.1.1.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 2.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Sumber :BPS Kabupaten Pamekasan, 2021

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pamekasan tahun 2015 menunjukkan angka 5,73 tahun, pada tahun 2016 menunjukkan angka 6,08 tahun, pada tahun 2017 menunjukkan angka 6,25 tahun, pada tahun 2018



menunjukkan angka 6,35 tahun, pada tahun 2019 menunjukkan angka 6,40 tahun, dan terus meningkat hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan angka RLS mencapai 6,7 tahun.

2.3.1.1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SPM/MTs di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 - 2020

Angka Partisipasi Sekolah	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD	Persen	90,25	93,2	65,42	94,75	94,85	97,30
SLTP	Persen	75,45	95,45	94,35	83,65	85,45	94,85
SLTA	Persen	69,81	73,60	77,59	72,74	73,16	69,81

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan, 2021

Pada tahun 2015, APS SD Kabupaten Pamekasan mencapai 90,25%, artinya hampir seluruh penduduk usia 7-12 tahun sedang sekolah di tingkat SD/MI. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 93,2%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 mencapai 65,42% dan pada tahun 2018 APS SD meningkat kembali mencapai 94,75% pada tahun 2019 mencapai 94,85%, dan pada tahun 2020 mencapai 97,30%.

Pada tahun 2015, APS SLTP Kabupaten Pamekasan mencapai 75,45% APS SMP/MTs Kabupaten Pamekasan tahun 2016 meningkat mencapai 95,45%. Pada tahun 2017

mengalami penurunan mencapai 94,35%. Pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 83,65% meningkat pada tahun 2019 menjadi 85,45%, dan pada tahun 2020 mencapai 94,85%.

Pada tahun 2015, APS SLTA Kabupaten Pamekasan mencapai 69,81%. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 73,60% dan 77,59%. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 mencapai 72,74%, pada tahun 2019 APS SLTA meningkat kembali mencapai 73,16%, dan pada tahun 2020 menurun mencapai 69,81%.

2.3.1.1.5 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Tabel 2.28 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020

Jenjang Pendidikan	APM					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD	89,26	91,33	93,65	92,68	97,53	97,66
SLTP	74,63	73,99	72,32	75,86	75,27	76,07
SLTA	57,45	60,39	63,59	60,94	60,06	60,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Murni SD mencapai 89,26%, kemudian terus meningkat sampai tahun 2017 mencapai 93,65%. Pada tahun 2018 menurun



mencapai 92,68% dan terus meningkat kembali hingga tahun 2020 mencapai 97,66%. Angka Partisipasi Murni SLTP Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 mencapai 74,63%, pada tahun 2016 menurun mencapai 73,99%, pada tahun 2017 menurun mencapai 72,32%, pada tahun 2018 meningkat mencapai 75,86%, pada tahun 2019 menurun lagi mencapai 75,27%, kemudian meningkat lagi tahun 2020 mencapai angka 76,07%. Angka Partisipasi Murni SLTA Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 mencapai angka 57,45%, kemudian meningkat sampai tahun 2017 mencapai 63,59%, pada tahun 2018 menurun menjadi 60,94% dan menurun lagi pada 2019 menjadi 60,06. Pada tahun 2020 meningkat kembali mencapai angka 60,88%.

2.3.1.1.6 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2015-2020

Jenjang Pendidikan	APK					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD	111,10	115,16	115,16	114,54	108,57	108,76
SLTP	88,97	90,35	90,35	84,98	84,04	87,38
SLTA	81,12	86,87	86,87	81,50	80,06	80,27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021



Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 APK SD mencapai 111,10%, tahun 2016 mencapai 115,16%, tahun 2017 mencapai 115,16%, tahun 2018 mencapai 114,5%, dan tahun 2019 mencapai 108,57%, kemudian pada tahun 2020 meningkat mencapai 108,76%. Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 APK SLTP mencapai 88,97%, kemudian pada tahun 2020 menurun mencapai 87,38%. Angka Partisipasi Kasar SLTA Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2015-2017, pada tahun 2015 mencapai 81,12%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 meningkat mencapai 86,87%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 80,06% dan meningkat lagi pada tahun 2020 mencapai 80,27%.

2.3.1.1.7 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

**Tabel 2.30 Angka Melek Huruf Kabupaten Pamekasan
Tahun 2015 - 2020**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	86	90	91	92	87,46	88,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Angka Melek Huruf di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 angka melek huruf Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 86%, kemudian meningkat pada tahun



2016 mencapai 90%, pada tahun 2017 mencapai 91%, pada tahun 2018 mencapai 92%, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 87,46% dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 88,09%, meskipun peningkatan tersebut tidak sebesar capaian pada tahun 2018.

2.3.1.1.8 Kondisi Bangunan Sekolah dan Rasio Ketersediaan Sekolah

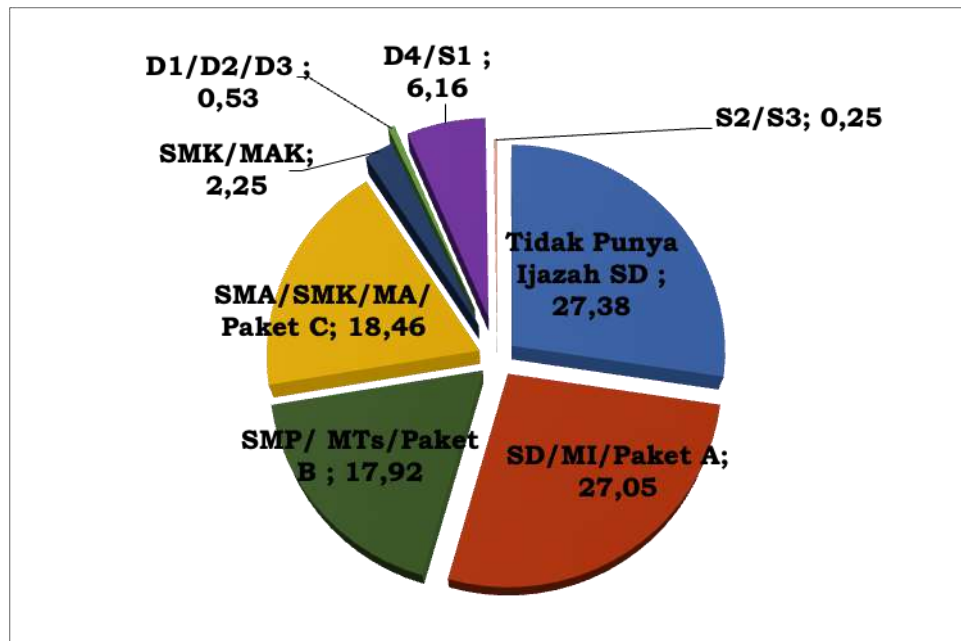
Tabel 2.31 Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Kondisi Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Baik	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	3071	2632	3204	3123	3128	3188
SMP/MTs	777	755	860	880	867	889

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan, 2021

Kondisi bangunan sekolah untuk SD/MI dalam keadaan baik di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun 2015 mencapai 3.071 sekolah, pada tahun 2016 mencapai 2.632 sekolah, pada tahun 2017 mencapai 3.204 sekolah, pada tahun 2018 mencapai 3.123 sekolah, kemudian pada tahun 2019 mencapai 3.128 sekolah, pada tahun 2020 menurun hingga 3.188 sekolah. Kondisi bangunan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2015 mencapai 777 sekolah, pada tahun 2016 mencapai 755 sekolah, pada tahun 2017 mencapai 860 sekolah, pada tahun 2018 mencapai 880 sekolah, pada tahun 2019 mencapai 867 sekolah, pada tahun 2020 meningkat mencapai 889 sekolah.

2.3.1.1.9 Ijazah Tertinggi



Gambar 2. 9 Tingkat Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan tingkat ijazah tertinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2019, masyarakat yang tidak punya ijazah SD memiliki persentase tertinggi yakni 27,38%, lalu secara berurutan dari tinggi ke rendah disusul oleh SD/MI/Paket A dengan 27,05%, SMA/SMK/MA/Paket C dengan 18,46%, SMP/MTS/Paket B dengan 17,92%, D4/S1 dengan 6,16%, SMK/MAK dengan 2,25%, D1/D2/D3 dengan 0,53% dan terakhir S2/S3 dengan persentase 0,25%.

2.3.1.1.10 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru

Tabel 2.32 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten	9,5	10	10,5	10,6	10,7	10,39



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pamekasan						
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	4,5	5	5,3	5,4	8,3	7,62
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	6,5	7	7,2	7,4	7,2	9,75
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	5,5	6	6,5	7,3	11,9	7,55
Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	4,2	4,5	5	5,13	5,36	12,16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 2021

Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 9,5%, di tahun 2016 kenaikan menjadi 10%, kemudian di tahun 2017 sebesar 10,5%. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,6% tahun 2019 menjadi 10,7%, sampai di tahun 2020 mencapai 10,39%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan,



tahun 2015 sebesar 4,5%, di tahun 2016 sebesar 5%, meningkat kembali tahun 2017 sebesar 5,3 %, pada tahun 2018 mencapai 5,4% sampai dengan tahun 2019 meningkat sebesar 8,3%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 7,62%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama terus menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2015-2020, pada tahun 2015 sebesar 6,5%, di tahun 2016 sebesar 7%, kemudian peningkatan di tahun 2017 sebesar 7,2%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,4%, namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,2%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 mencapai 9,75%. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2015 sebesar 5,5%, di tahun 2016 sebesar 6%, kemudian di tahun 2017 sebesar 6,5%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 7,3% sampai dengan peningkatan di tahun 2019 sebesar 11,9%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 7,55. Jumlah Sekolah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 4,2%, pada tahun 2016 sebesar 4,5%, kemudian di tahun 2017 sebesar 5%, sampai tahun 2018 sebesar 5,13%, pada tahun 2019 sebesar 5,36%, sampai dengan peningkatan di tahun 2020 mencapai 12,16%.



2.3.1.1.11 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Tabel 2.33 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2019

Indikator	2018	2019
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	-	14.126 (84,09%)
SD/MI	9.441 (98,4%)	9.014 (93,2%)
SMP/MTs	2.632 (39,5%)	5.112 (71,63%)

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Pamekasan

Jumlah angka kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019. Untuk rincian angka kelulusan pada tingkat SD/MI di tahun 2018 sebesar 98,4% kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 93,2%. Untuk tingkat SMP/MI pada tahun 2018 sebesar 39,5% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 71,63%.

Tabel 2. 34 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Capaian Kabupaten/ Kota				84,60%	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			100,00%	
		757577	757450	127		
	1.	Modul Belajar	757577	757450	127	99.98 %
	2.	Perlengkapan Belajar	57577	57685	-108	100.19 %
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	57577	57577	0	100.00 %
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	5004	4567	437	91.27 %	



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	5.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	5769	5650	119	97.94 %
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2459	3467	-1008	140.99 %
	7.	PKBM Terakreditasi minimal C	3148	3148	0	100.00 %
	8.	jumlah rombongan belajar di PKBM	472	472	0	100.00 %
2		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan			73.47%
			21246	20114	1132	
	1.	Modul Belajar	21246	20114	1132	94.67 %
	2.	Perlengkapan Belajar	0	50	-50	0%
	3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	70	60	10	85.71 %
	4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	30	20	10	66.67 %
	5.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	50	40	10	80.00 %
	6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	14	12	2	85.71 %
	7.	PKBM Terakreditasi minimal C	8	7	1	87.50 %
	8.	jumlah rombongan belajar di PKBM	40	35	5	87.50 %
3		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			80.32%
			500	400	100	
	1.	Buku Gambar	75	70	5	93.33 %

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Alat Mewarnai	90	80	10	88.89 %
3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	40	30	10	75.00 %
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	50	40	10	80.00 %
5.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	20	15	5	75.00 %
6.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	60	50	10	83.33 %
7.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	15	10	5	66.67 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

2.3.1.2 Kesehatan



Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran.

2.3.1.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks Kesehatan berkaitan dengan Angka Harapan Hidup saat kelahiran. Indeks Pendidikan pada tahun 2015 hingga 2017 mencapai 0,72 dan meningkat pada tahun 2019 hingga 2020 mencapai 0,73.

Tabel 2.35 Indeks Kesehatan 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73

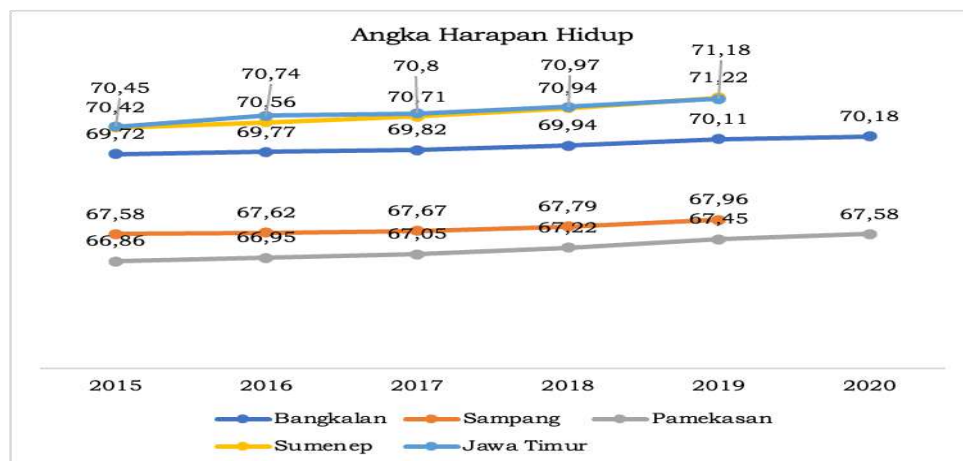
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021

2.3.1.2.2 Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan

dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasankemiskinan.



Gambar 2.10 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Jawa Timur Tahun 2015-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021



Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Bangkalan mencapai 69,72%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 70,18%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Sampang mencapai 67,58%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 67,96%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Pamekasan mencapai 66,86%, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 67,45%. Pada tahun 2015 AHH Kabupaten Sumenep mencapai 70,42%, dan terus meningkat pada tahun 2019 mencapai 71,22%. Pada tahun 2015 AHH Provinsi Jawa Timur mencapai 70,45%, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 71,18%.

2.3.1.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan mengalami capaian yang fluktuatif.

Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan



kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Pada tahun 2015 angka kematian bayi adalah 1, kemudian pada tahun 2016 menjadi 5 dan pada tahun 2017 meningkat pesat menjadi 21. Pada tahun 2018 AKB di Kabupaten Pamekasan menjadi 9, pada tahun 2019 menjadi 13, kemudian pada tahun 2020 angka kematian bayi 0 kasus.

Tabel 2.36 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	1	5	21	9	13	0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten pamekasan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 capaian cakupan ini mencapai 56%, angka ini bertahan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 51%, pada tahun 2018 angka ini mengalami penurunan yang cukup jauh mencapai 25%. Dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 20%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 2%. Faktor pendukung pencapaian ini adalah adanya kegiatan pencegahan dan pengukuran status gizi dan hal yang menjadi faktor penghambat capaian dalam cakupan ini adalah status ekonomi masyarakat, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi.

Tabel 2.37 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan balita gizi buruk	56	56	51	25	20	2



mendapat perawatan (%)						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

2.3.1.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh.

Tabel 2.38 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu	60	14	8	154	102	101

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian atau jumlah yang fluktuatif, pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 60 orang, kemudian pada tahun 2016 angkanya menurun menjadi 14 orang, pada tahun 2017 angkanya mencapai 8 orang, dan pada tahun 2018 angkanya mengalami peningkatan hingga 154 orang dan pada tahun 2019 angkanya mencapai 102 orang, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 101 orang. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dari capaian ini adalah adanya kemitraan bidan dan dukun serta yang menjadi faktor penghambatnya adalah persalinan komplikasi, resiko tinggi, penyakit penyerta serta akses layanan.

2.3.1.2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Tabel 2.39 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	13408	13028	13138	13284	13586	13496

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki capaian yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah 13.408 orang dan menurun pada tahun 2016 sejumlah 13.028, mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan jumlah 13.586 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 13.496 orang. Peningkatan didukung dengan adanya kemitraan bidan dan dukun dan masyarakat sudah memilih tenaga kesehatan dokter spesialis obgyn/bidan untuk memilih sebagai penolong persalin dan terdapat beberapa hambatan yang juga mempengaruhi penurunan, yaitu penyakit penyerta, kesadaran ibu, dan sistem rujukan.

2.3.1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Tabel 2.40 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	2659	2648	2948	3067	2632	2808

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani memiliki capaian yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah



2.659 orang dan menurun pada tahun 2016 sejumlah 2.648, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sejumlah 2.948, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 mencapai 3.067, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah 2.632, pada tahun 2020 meningkat mencapai 2.808 orang.

2.3.1.2.7 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Tabel 2. 41 Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	111	143	145	135	152	119

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) fluktuatif. Peningkatan terjadi pada tahun 2015-2017 dengan 145 des/kelurahan pada tahun 2017. Tahun 2018 menurun dan meningkat kembali pada tahun 2019 dengan 152 desa/kelurahan. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 119 desa/kelurahan.

2.3.1.2.8 Tenaga Kesehatan

Pemerintah harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015-2020. Terdapat upaya dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi sumber daya kesehatan dengan rekrutmen. Dengan bertambahnya jumlah dokter umum dan spesialis yang berpraktek di fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik, puskesmas



maupun di praktek mandiri sehingga rasio dokter terhadap penduduk semakin meningkat.

Tabel 2. 42 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perawat (orang)	260	234	199	586	588	1145
Jumlah Bidan	515	518	505	529	528	665
Jumlah Farmasi	3	4	5	5	15	50
Jumlah Ahli Gizi	0	0	20	20	25	46
Jumlah Dokter Spesialis	38	38	43	47	55	66
Jumlah Dokter Gigi	20	19	25	43	23	24
Jumlah Dokter Umum	106	123	127	128	123	133

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan tabel diatas Jumlah perawat dari tahun ke tahun jumlahnya fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 sejumlah 260 orang, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 234 orang, kemudian turun kembali di tahun 2017 sejumlah 199 orang, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018 sejumlah 586 orang, pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 588 orang, dan sampai pada tahun 2020 sebesar 1.145. Jumlah Bidan cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 sejumlah 515 orang, di tahun 2016 menjadi 518 orang, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 505 orang, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah menjadi 529 orang, sampai pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 528 orang, dan pada tahun 2020 sebesar 665 orang.

Jumlah farmasi terjadi peningkatan dan di beberapa tahun terdapat kestabilan dalam jumlah farmasi di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2015 jumlah farmasi sejumlah 3 orang, di tahun 2016 menajadi 4 orang,



kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 5 orang dan di tahun 2018 jumlah farmasi masih sama seperti di tahun sebelumnya yakni 5 orang sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 15 orang, dan di tahun 2020 sebesar 50 orang. Jumlah ahli gizi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan sebagai bukti upaya pemerintah daerah untuk terus berusaha menyediakan sumber daya bagi tenaga kesehatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum ada ahli gizi di kabupaten Pamekasan, kemudian di tahun 2017 dan 2018 terdapat 20 orang ahli gizi, kemudian jumlah ini naik pada tahun 2019 sejumlah 25 orang dan di tahun 2020 meningkat sebesar 46.

Dari tabel tersebut diatas juga menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan terhadap jumlah Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter umum. Jumlah Dokter Spesialis dari tahun 2015-2020 terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah dokter spesialis yakni 38 orang, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sejumlah 43 orang, meningkat kembali di tahun 2018 sejumlah 47 orang sampai pada tahun 2019 meningkat sejumlah 53 orang dan di tahun 2020 meningkat menjadi 66 orang. Jumlah dokter pada tahun 2015 jumlah dokter gigi sejumlah 20 orang, setelah itu mengalami penurunan di tahun 2016 sejumlah 19 orang, kemudian mengalami peningkatan jumlah menjadi 25 orang, dan mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan pada tahun 2018 sejumlah 43 orang, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah sebesar 23 orang dan di tahun 2020 meningkat menjadi 24 orang. Jumlah dokter umum di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015-2019 jumlahnya fluktuatif dari tahun tersebut. Pada tahun 2015

jumlah dokter umum sejumlah 106 orang, di tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 123 orang, kemudian di tahun 2017 meningkat kembali sejumlah 127 orang, dan di tahun 2018 terus meningkat sejumlah 128 orang, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah menjadi 123 orang dan pada tahun 2020 meningkat sejumlah 133 orang.

Tabel 2.43 Rasio Tenaga Dokter Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tenaga Dokter Per 100.00 Penduduk (Dokter Spesialis/ Dokter Umum)	8,5 / 9,2	5,9 / 10,5	8,4 / 8,6	18,5 / 35,5	5,9 / 12,7	7,4 / 15,0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk realisasinya fluktuatif. Realisasi terbesar adalah pada tahun 2018 dengan 18,5/35,5, yaitu dokter spesialis/dokter umum. Kemudian, menurun di tahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020 dengan 7,4/15,0 Per 100.000 penduduk. Peningkatan tersebut masih tidak lebih besar dari realisasi tahun 2018.

2.3.1.2.9 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas

Tabel 2.44 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit	5	5	6	7	7	7
Puskesmas	20	20	20	20	20	22

Sumber : Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik, 2021

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah Rumah Sakit sejumlah 5 rumah sakit,



kemudian naik pada tahun 2017 sejumlah 6 rumah sakit, sampai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya yakni dengan jumlah yang sama sejumlah 7 rumah sakit. Jumlah Puskesmas pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dengan total 22 puskesmas di tahun 2020, Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, 2020

Nama Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Tlanakan	2	3
Pademawu	2	4
Galis	1	2
Larangan	3	2
Pamekasan	2	5
Proppo	2	5
Palengaan	2	4
Pegantenan	2	1
Kadur	1	2
Pakong	1	2
Waru	2	1
Batumarmar	1	1
Pasean	1	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

Tabel 2.46 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Kecamatan dan Jenis Fasilitas	836	841	993	1052	1305	1185

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, 2021

Jumlah Puskesmas, Pustu, Polineds, Klinik RS, praktek dokter bersama, perorangan, umum, praktek dokter gigi perorangan, dokter spesialis perorangan, pengobatan tradisional, Bank Darah, unit transfusi darah di Kabupaten

Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 sejumlah 1305. Akan tetapi pada tahun 2020 menjadi sejumlah 1185.

Tabel 2.47 Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Kunjungan ke Puskesmas	374,507	327,453	607,500	622,307	1,507,930	766,503

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Jumlah rawat jalan di Puskesmas mengalami penurunan pada tahun 2016, dari 374.507 di tahun 2015 menjadi 327.453 di tahun 2016. Pada tahun 2016-2019 jumlah rawat jalan mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 terdapat 1.507.930 dan menurun di tahun 2020 sebesar 766.503. Hambatan dalam merealisasikan kunjungan ke puskesmas adalah sistem rujukan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit.

Tabel 2.48 Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas	7110	7879	13599	12344	17223	9381

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Jumlah rawat inap di puskesmas mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017. Menurun di tahun 2018 menjadi 12.344 dan meningkat kembali sejumlah 17.223 di tahun 2019. Penurunan kembali terjadi di tahun 2020 menjadi 9.381.



Tabel 2.49 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	22	24	25	28	29	29

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 29 persen, meskipun begitu jumlah ini belum optimal karena masih ada masyarakat belum memiliki kartu jaminan kesehatan dan kurang mamahami manfaat dan fungsi kartu jaminan kesehatan.

Tabel 2.50 Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Puskesmas Akreditasi Minimal Madya	0	55	85	85	85	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Jumlah Puskesmas akreditasi minimal madya di Kabupaten Pamekasan meningkat dari tahun 2016-2020. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Akreditasi ini dapat menjadi acuan terkait dengan kesediaan Puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang semakin baik.



Tabel 2.51 Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas	98	98	98	98	98	98

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Jumlah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Pamekasan di tahun 2015-2020 stagnan, yaitu 98. Hal tersebut menunjukkan rata-rata Puskesmas di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas pelayanan.

2.3.1.2.10 Kesehatan Bayi

Tabel 2.52 Kesehatan Bayi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	478	396	0	507	416	436
Gizi Buruk	56	52	51	25	0	0
Cakupan Kunjungan Bayi	12959	12810	12816	13291	13470	10670
Ibu Hamil Kunjungan K1	14078	13976	14010	14649	14648	14544
Ibu Hamil Kunjungan K4	13207	12602	12508	12963	13497	13259

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 bayi berat badan lahir rendah sebesar 478 kemudian di tahun 2016 sebesar 396, kemudian pada tahun 2017 menjadi 0, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 507 sampai pada akhirnya di tahun 2019 mengalami penurunan kembali



sebesar 416 dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 436.

Bayi gizi buruk di Kabupaten Pamekasan menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Realisasi tertinggi pada tahun 2015 sejumlah 56 bayi. Realisasi terendah pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 0 bayi. Selanjutnya cakupan kunjungan bayi mengalami realisasi yang fluktuatif. Realisasi terbesar pada tahun 2019 sejumlah 13.470 bayi dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 10.670.

Ibu Hamil Kunjungan K1 dan K4 cenderung fluktuatif. Realisasi tertinggi Ibu Hamil Kunjungan K1 adalah pada tahun 2019 sejumlah 14.648 ibu hamil, kemudian menurun pada tahun 2020 sejumlah 14.544. Ibu Hamil Kunjungan K4 memperoleh realisasi tertinggi pada tahun 2019 sejumlah 13.497 ibu hamil dan menurun pada tahun 2020 sejumlah 13.259 ibu hamil. Hal ini terjadi salah satunya karena rasio kecukupan bidan yang belum terpenuhi.

2.3.1.2.11 Jumlah Kasus Penyakit

Tabel 2.53 Jumlah Kasus Penyakit Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Kasus Penyakit	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HIV	11	2	73	73	67	54
DBD	363	375	230	176	281	192
Tuberculosis	506	862	1043	826	1.064	1028
Hypertensi	n.a	n.a	n.a	n.a	1.160	686
Anemia	n.a	n.a	n.a	n.a	1.009	633
DM	n.a	n.a	n.a	n.a	995	422
Katarak	n.a	n.a	n.a	n.a	815	332
Heart Failure	n.a	n.a	n.a	n.a	721	485
Stroke	n.a	n.a	n.a	n.a	581	257
Cronic Kidney Disease	n.a	n.a	n.a	n.a	556	360
GEA	486	369	361	358	354	342
Dyspepsia	463	382	358	327	296	283
Urinary tract Infection	n.a	n.a	n.a	n.a	291	221

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020



Jumlah kasus penyakit di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Kasus HIV di Kabupaten Pamekasan mengalami kondisi yang fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah 11 kasus, menurun di tahun 2016 sebesar 2 kasus, dan mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2017 sejumlah 73 kasus, kemudian di tahun 2018 kondisi stagnan di angka 73 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 67 kasus, sampai pada tahun 2020 menurun hingga 54 kasus. Untuk kasus DBD di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sejumlah 363 kasus, di tahun 2016 menjadi 375 kasus, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 230 kasus, terus menurun di tahun 2019 menjadi 176 kasus, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 281 kasus, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 192 kasus. Berdasarkan data di atas, penyakit Tuberculosis menjadi kasus penyakit terbesar di Kabupaten Pamekasan mencapai 1.028 kasus pada tahun 2020. Sedangkan HIV menjadi penyakit dengan kasus terendah mencapai 54 kasus pada tahun 2020.

Tabel 2.54 Data Perkembangan Stunting Menurut Bulan Timbang Agustus Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020

NO	PUSKESMAS	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah Balita Diukur	Balita Stunting		Jumlah Balita Diukur	Balita Stunting		Jumlah Balita Diukur	Balita Stunting	
			Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%
1	TLANAKAN	2417	639	26,44	2763	612	22,15	2977	826	27,75
2	BANDARAN	1514	656	43,33	1533	360	23,48	1468	248	16,89
3	PANDEMAWU	1192	246	20,64	2686	350	13,03	1961	258	13,16
4	SOPAAH	2392	649	27,13	2516	703	27,94	2577	619	24,02
5	GALIS	1470	446	30,34	1671	162	9,69	1704	105	6,16
6	LARANGAN	2098	438	20,88	2057	455	22,12	1600	100	6,25
7	TALANG	1092	391	35,81	1228	235	19,14	727	234	32,19
8	TEJA	2533	467	18,44	2837	319	11,24	2095	395	18,85
9	KOWEL	2772	765	27,6	3188	332	10,21	1637	200	12,22
10	PROPO	2105	752	35,72	2216	453	20,44	2132	614	28,8
11	PANAGUAN	1201	597	49,71	1559	737	47,27	2123	653	30,76
12	PALENGAN	5735	1369	23,87	5958	414	6,95	3600	397	11,03
13	PEGANTENAN	2259	139	6,15	2624	494	18,83	2664	599	22,48
14	BULANGAN HAJI	1000	395	39,5	1385	143	10,32	1578	139	8,81
15	KADUR	1878	609	32,43	1965	511	26,01	2128	635	29,84
16	PAKONG	1533	501	32,68	2288	90	3,93	2196	71	3,23
17	WARU	1174	496	42,25	1744	285	16,34	1770	108	6,1
18	TAMPOJUNG PREGI	1552	485	31,25	1795	357	19,89	1302	259	19,89
19	BATUMARMAR	5207	1216	23,35	5429	1182	21,77	6077	665	10,54
20	PASEAN	2208	736	33,33	3082	774	25,11	3523	381	11,71
	PAMEKASAN	43332	11992	27,67	50524	8968	17,75	45569	7506	16,47

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020



Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan data pada tahun 2018 jumlah balita stunting mencapai 11.992 balita. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan jumlah balita stunting mencapai 8.968 balita. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 jumlah balita stunting di Kabupaten Pamekasan adalah 7.506 balita atau sekitar 16,47% dari seluruh balita yang diukur yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2. 55 Realisasi dan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Capaian Kabupaten/ Kota				88.53%	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			98.06%	
		13947	13259	688		
	1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	13947	13522	425	96.95 %
	2.	Tablet Tambah Darah	13947	13946	1	99.99 %
	3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13947	13832	115	99.18 %
	4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	13947	13225	722	94.82 %
	5.	Buku KIA	13947	13861	86	99.38 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			99.99%	
		13313	13312	1		
	1.	Formulir Fotograf	13313	13312	1	99.99 %
	2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	13947	13945	2	99.99 %
	3.	Buku KIA	13947	13944	3	99.98 %
3	Pelayanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang			98.13%	



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian		
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	bayi baru lahir	mendapatkan layanan kesehatan					
		12656	11122	1534			
	1.	Vaksin Hepatitis BO	12679	12426		253	98.00 %
	2.	Vitamin K1 Injeksi	12679	12346		333	97.37 %
	3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik	12679	12548		131	98.97 %
	4.	Formulir Bayi Baru Lahir	12679	12163		516	95.93 %
	5.	Formulir MTBM	12679	12494		185	98.54 %
	6.	Buku KIA	13947	13944	3	99.98 %	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			99.43%		
		63367	57139	6228			
	1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	50415	50408		7	99.99 %
	2.	Formulir DDTK	50415	50408		7	99.99 %
	3.	Buku KIA	50415	50408		7	99.99 %
	4.	Vitamin A Biru	12670	12664		6	99.95 %
	5.	Vitamin A Merah	50415	50408		7	99.99 %
	6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell	836	836		0	100.00 %
	7.	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella	836	822		14	98.33 %
	8.	Jarum Suntik dan BHP	836	822		14	98.33 %
9.	Peralatan Anafilaktik	836	822	14	98.33 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan			75.88%		
		105032	73671	31361			
	1.	Buku Raport Sehatanku	165897	125882		40015	75.88 %
	2.	Buku Pemantauan Kesehatan	165897	125882		40015	75.88 %
	3.	Kuesioner Skrining Kesehatan	165897	125882		40015	75.88 %
4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	165897	125882	40015	75.88 %		



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	165897	125882	40015	75.88 %	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			100.00 %	
		588354	355726	232628		
	1.	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	190	190	0	100.00 %
2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	190	190	0	100.00 %	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			67.85%	
		129836	76786	53050		
	1.	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	124537	94432	30105	75.83 %
	2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	124537	74524	50013	59.84 %
3.	Buku Kesehatan Lansia	124537	84538	39999	67.88 %	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			100.00%	
		234770	97028	137742		
	1.	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	22	22	0	100.00%
	2.	Tensimeter	190	190	0	100.00%
	3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	21	21	0	100.00 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang			100.00%	



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	melitus	mendapatkan layanan kesehatan			
		10172	10171	1	
	1. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	9618	9618	0	100.00%
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	21	21	0	100.00%
3. Pedoman dan Media KIE	22	22	0	100.00%	
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan			99.74%
		1633	1239	394	
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	380	376	44	98.95 %
	2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	21	21	0	100.00 %
	3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	21	21	0	100.00 %
4. Media KIE	22	22	0	100.00 %	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan			68.78%
		8212	5650	2562	
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	0	0	0	0%
	2. Reagen Zn TB	656	650	6	99.09 %
	3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	236	236	0	100.00 %
	4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	46400	45560	840	98.19 %
	5. Catridge Tes Cepat Molekuler	4750	4000	750	84.21 %
	6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	0	0	0	0%
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur	3	3	0	100.00 %	

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan Layanan Kesehatan			54.52%	
		15458	10849	4609		
	1.	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	0	0	0	0%
	2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	27835	27550	285	98.98 %
3.	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	32514	21000	11514	64.59 %	

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum



2.3.1.3.1.1 Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan



tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum atau yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).

Jalan raya yang melintas di wilayah Pamekasan sepanjang 676,7 Km, yang terdiri dari jalan negara sekitar 4,4 persen, jalan provinsi sepanjang 20,4 persen dan jalan kabupaten kurang lebih 75,2 %. Pada tahun 2015, sepanjang 46,1 Km kondisi jalan provinsi dalam keadaan baik dan 70,6 Km dalam kondisi sedang. Sedangkan yang mengalami kerusakan sepanjang 22,6 Km.

Permukaan jalan selama 6 tahun terakhir, menunjukkan perkembangan kualitas yang menurun. Pada tahun 2015 panjang kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 411,441 km dan terus mengalami penurunan kualitas jalan dalam kondisi Baik sampai pada tahun 2019 menjadi 279,887 km, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 mencapai 363,10 km. Hal ini selaras dengan kondisi jalan yang mengalami rusak berat

yang kondisinya fluktuatif di setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 kondisi jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 14,175 km, di tahun 2016 sepanjang 92,350 km, pada tahun 2017 sepanjang 73,900 km, pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni sepanjang 35,373 km dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kerusakan sepanjang 117,86 km, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan(km)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	411,441	358,256	373,212	336,110	279,887	363,10
Sedang	73,029	34,784	37,053	54,701	112,926	98,670
Rusak	13,714	25,069	28,194	86,175	30,268	11,33
Rusak Berat	14,175	92,350	73,900	35,373	89,278	117,86
Jumlah	512,359	510,459	512,359	512,359	512,359	590,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Sedangkan perkembangan panjang jalan sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini. Pada setiap tahunnya panjang jalan memiliki panjang yang stagnan.

Tabel 2.57 Panjang Jalan (km) Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pamekasan	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269
Tlanakan	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275	38.275
Galis	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
Larangan	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
Kadur	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
Pakong	20.799	20.799	20.799	20.799	20.799	20.799
Waru	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050
Pasean	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
Batumarmar	52.170	52.170	52.170	52.170	52.170	52.170
Pegantenan	48.322	48.322	48.322	48.322	48.322	48.322
Palangaan	56.243	56.243	56.243	56.243	56.243	56.243

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Sedangkan perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2020 sepanjang 512.359 km. Sedangkan perkembangan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2015 mencapai 21.284 km, kemudian

pada tahun 2016 tetap 21.284 km, pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 21.486 km, pada tahun 2018 mencapai 22.086 km, dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 dan 2020 sepanjang 22.258 km.

Tabel 2.58 Panjang Jalan dan Jembatan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	21,284	21,284	21.486	22.086	22.258	22.258
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pamekasan	512,359	510,459	512,359	512,359	512,359	590,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Kemudian untuk kualitas panjang jalan kota dalam kondisi di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dalam kondisi fluktuatif. Menurunnya kualitas panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2019 yaitu 27.590 dibandingkan tahun 2018 yaitu 33.109. dan terjadi peningkatan kualitas panjang jalan pada tahun 2020 sebesar 279,887

Tabel 2.59 Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pamekasan (km) Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kota dalam kondisi baik	36,689	36,689	34,789	33,109	27,590	279,887

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.3.1.2 Jembatan

Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa proporsi jembatan dalam

kondisi baik konstan pada 5 tahun terakhir ini, yakni sebesar 1.632.

Tabel 2.60 Proporsi Jembatan dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Jembatan dalam keadaan baik	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.1.3.1.3 Kondisi Jaringan Irigasi

Panjang jaringan irigasi terpanjang adalah 3.095 km pada tahun 2020. Kemudian untuk irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik terbesar adalah di tahun 82,96 persen di tahun 2020. Capaian keduanya cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2.61 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jaringan Irigasi	2,464	2,557	2,598	2,626	3,025	3,095
Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	66.05	68.54	69.65	70.40	81.09	82.96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.3.1.3.2 Penataan Ruang

2.3.1.3.2.1 Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk



pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.62 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai Dengan RTRW Kabupaten Pamekasan

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	0,72	0,99	0,96	65	87	98

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada sub Penataan Ruang, Irigasi, Jembatan dan Jalan, maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan pada periode berikutnya, antara lain:

1. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang andal serta terpadu dan berbasis penataan ruang yang berkelanjutan;
2. Optimalisasi luas layanan jaringan irigasi teknis (ha);
3. Optimalisasi Perda rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Pamekasan.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penanganan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).



Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berdasarkan validasi data pada tahun 2019 bahwa jumlah Rumah Layak Huni (RLH) sebesar 210.976 unit, sedangkan kawasan kumuh di tahun 2019 sebesar 10,41 ha. Dari data tersebut bahwa terjadi peningkatan ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2016 sampai dengan 2019, dimana tahun 2016 sebesar 209.091. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pamekasan terjadi karena beberapa faktor, yakni:

1. Tersedianya dana yang cukup, baik dari APBD maupun APBN.
2. Sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Tersedianya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan ketersediaan Rumah Layak Huni.
4. Antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat terutama calon penerima bantuan.

Tabel 2.63 Rumah Layak Huni (unit) dan Kawasan Kumuh Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Ketersediaan Rumah layak huni (unit)	-	209.091	209.398	210.531	210.976	211.620
Kawasan Kumuh (ha)	60,9	60,91	53,55	43,14	10,41	0

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Pamekasan, 2021

Air minum dan sanitasi sebagai salah satu penunjang kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat, sudah



selayaknya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak. Air minum dan sanitasi yang buruk memicu penyebaran penyakit yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Masih banyak masyarakat Pamekasan yang belum mendapatkan akses sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak. Sedangkan dalam kenyataan kebutuhan rumah tangga dalam menggunakan atau mengkonsumsi air minum setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun 2020 mencakup 211.620 unit rumah layak huni. Sehingga menunjukkan bahwa masalah terkait rumah layak huni dan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan dapat diatasi secara bertahap.

Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Pengguna Air Minum (%)	0,67	1,5	3	13,37	53,75	51,8
Persentase rumah tinggal Bersanitasi	1,15	1,58	1,58	4,29	80,29	61,6

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab.

Pamekasan

Berdasarkan data diatas, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

1. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
2. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani, masih terbatas kawasan kumuh di perkotaan;
3. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak.

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir. Pada tabel di bawah ini menunjukkan informasi terkait Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020.

Tabel 2.65 Linmas dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk (orang)	Orang	37	35	63	35	62	69
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)	Orang	0,79	0,69	0,65	0,65	0,57	0,57
Jumlah Satpol PP	Orang	67	67	58	57	53	50
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang 15 menit (%)	%	48	45	54	54	50	94

Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan

Dalam aspek hukum, tingkat penurunan pelanggaran Perda berjalan optimal, hal ini ditunjukkan dengan data pada tabel dibawah ini secara stabil selama jangka waktu 5 tahun terakhir pada keadaan 100%. Kondisi stabil dalam upaya penurunan pelanggaran PERDA Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa terwujud secara optimal dikarenakan intensitas penegakan perda meningkat, regulasi yang ada dapat ditegakkan dengan benar, kesadaran



masyarakat meningkat terhadap pelanggaran perda. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan tingkat penurunan gangguan ketertiban umum mengalami fluktuatif setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 sebesar 73, di tahun 2016 sebesar 72, kemudian mengalami peningkatan terbesar di tahun 2017 sebesar 86, kemudian mengalami penurunan paling rendah di tahun 2018 sebesar 67, kemudian di tahun 2019 sebesar 70 dan tahun 2020 menjadi 28. Ketidakstabilan kondisi dalam upaya menurunkan gangguan ketertiban umum adalah karena regulasi yang berlaku belum banyak diketahui oleh masyarakat dan masih adanya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran ketertiban dan ketentaman umum.

Tabel 2.66 Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda (%)	100	100	100	100	100	42
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	73	72	86	67	70	28

Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan

Sedangkan kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pamekasan kasus yang direspon kurang dari 15 menit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 mencapai 48% kasus, pada tahun 2016 mencapai 45 kasus, pada tahun 2017 mencapai 54% kasus, pada tahun 2018 mencapai 54% kasus, hingga pada tahun 2019 mencapai 61% kasus.



Tabel 2.67 Persentase Kasus Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspon Kurang 15 menit (%)	48	45	54	54	61

Sumber: Satpol PP Kab. Pamekasan

Tabel 2. 68 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Capaian Kabupaten/Kota				48,42%
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100,00%
		757577	757450	127	
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	65	65	0	100,00 %
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5	5	0	100,00 %
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			70,54%
		99	99	0	
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	99	70	2929	70,71 %
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standard	22	20	22	90,91 %
3.	Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standard	54	27	2727	50,00 %
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	1	1	0	20,00%



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0%
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0%
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1	1	0	100,00 %
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0,00%
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00%
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00 %
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	65	65	0	100,00 %
3.	Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	65	65	0	100,00 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	65	65	0	100,00 %
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00 %
6.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	65	65	0	100,00 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65	65	0	0,00%
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	0	0	0	0%
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

2.3.1.6 Sosial



Persentase PMKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Tabel 2.69 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2015-2020

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (org)	Orang	21.727	32.980	57.869	82.758	77.789	112.025
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (panti)	Panti	60	82	87	93	97	99
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	75,54	45,92	50,51	50,65	50,65	50,65

Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan

Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya adalah masih tingginya jumlah PMKS. PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020, hal tersebut merupakan upaya dari Pemerintah Daerah untuk

memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.70 Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	110.579	128.553	129.587	112.025

Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan

Berdasarkan data di atas untuk jumlah fakir miskin di Kabupaten Pamekasan yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 110.579, kemudian meningkat pada tahun 2018 berjumlah 128.553 dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 sebesar 129.587, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai 112.025 Fakir Miskin.

Tabel 2.71 Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina di Kabupaten Pamekasan	14	49	11
Jumlah PPKS Lainnya	145.115	148.574	149.789

Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan

Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang di bina pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2018 berjumlah 14 orang, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 49 orang. Faktor penyebab kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya aparatur yang tersedia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 11 orang.



Jumlah PPKS Lainnya di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 mencapai 145.115 orang, kemudian meningkat mencapai 148.574 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2020 mencapai 149.789 orang.

Tabel 2.72 Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	293	20	25

Sumber: Dinas Sosial Kab. Pamekasan

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 berjumlah 293 orang kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 menjadi 20 orang. Faktor penyebab penurunan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya aparatur yang tersedia. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 25 orang.

Tabel 2. 73 Realisasi dan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Capaian Kabupaten/Kota				81,96%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			85,33%
		150	140	10	
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah	20	18	2	90,00 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan				
2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	50	45	5	90,00 %
3.	Penyediaan permakanan	30	25	5	83,33 %
4.	Penyediaan sandang	20	15	5	75,00 %
5.	Penyediaan alat bantu	30	20	10	66,67 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	60	55	5	91,67 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	60	50	10	83,33 %
9.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	80	70	10	87,50 %
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	50	40	10	80,00 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	70	65	5	92,86 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	45	40	5	88,89 %
13.	Layanan rujukan	60	55	5	91,67 %
14.	Layanan data dan pengaduan	10	8	2	80,00 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	15	14	1	93,33 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			77,45%
		200	170	30	
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	60	50	10	83,33 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	25	20	5	80,00 %
3.	Penyediaan permakanan	50	40	10	80,00 %
4.	Penyediaan sandang	70	65	5	92,86 %
5.	Penyediaan alat bantu	60	50	10	83,33 %
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	90	80	10	88,89 %
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	80	70	10	87,50 %
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	40	35	5	87,50 %
9.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	60	50	10	83,33 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20	18	2	90,00 %
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	20	10	66,67 %
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25	0	25	0%
13.	Layanan rujukan	60	50	10	83,33 %
14.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	40	30	10	75,00 %
15.	Layanan data dan pengaduan	50	40	10	80,00 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			80,72%
		70	60	10	
1.	Layanan data dan pengaduan	60	50	10	83,33 %
2.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	60	55	5	91,67 %
3.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	20	15	5	75,00 %
4.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	65	60	5	92,31 %
5.	Penyediaan permakanan	20	20	0	100,00 %
6.	Penyediaan sandang	60	52	8	86,67 %
7.	Penyediaan alat bantu	40	20	20	50,00 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Penyediaan perbekalan kesehatan	30	20	10	66,67 %
9.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	50	40	10	80,00 %
10.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	70	65	5	92,86 %
11.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	40	30	10	75,00 %
12.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40	30	10	75,00 %
13.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	70	50	20	71,43 %
14.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40	35	5	87,50 %
15.	Layanan rujukan	60	50	10	83,33 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			82,34%
		250	230	20	
1.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	60	50	10	83,33 %
2.	Penyediaan permakanan	40	30	10	75,00 %
3.	Penyediaan sandang	70	60	10	85,71 %
4.	Penyediaan alat bantu	80	70	10	87,50 %
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	60	50	10	83,33 %
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	50	40	10	80,00 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	70	60	10	85,71 %
8.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	70	50	20	71,43 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40	35	5	87,50 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	60	45	15	75,00 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	60	55	5	91,67 %
12.	Layanan rujukan	50	40	10	80,00 %
13.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	50	40	10	80,00 %
14.	Layanan data dan pengaduan	50	40	10	80,00 %
15.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus	90	80	10	88,89 %
16.	layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti				
5,	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			83,97%
		300	275	25	
1.	Penyediaan permakanan	50	40	10	80,00 %
2.	Penyediaan sandang	80	70	10	87,50 %

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	60	50	10	83,33 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	70	60	10	85,71 %
5.	Pelayanan dukungan psikososial	30	25	5	83,33 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan



Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menjadi urusan wajib non dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Ketenagakerjaan menyangkut aspek tenaga kerja, usia kerja, sampai upah minimum Kabupaten. Berikut adalah hasil capaian urusan ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020.



Tabel 2.74 Hasil Capaian Fokus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	634.253	ts	651.952	660.551	669.078	687.887
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,05	ts	71,08	69,35	68,13	69,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,26	ts	3,91	2,92	2,32	3,49
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	95,74	ts	96,09	97,08	97,68	96,51
Upah Minimum Kabupaten	(Ribuan Rp)	1.210	1.350	1.495	1.588	1.763	1.913

Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu pada umur 15 tahun atau lebih. Data dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang perlahan dari tahun 2015 berjumlah 634.253 jiwa meningkat hingga 687.887 pada tahun 2020.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Dari data di tabel terlihat bahwa TPAK Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan hingga 69,82% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih banyak daripada peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan Hal ini disebabkan banyak hal antara lain tingkat pendidikan yang rendah atau kemiskinan struktural. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sampai tahun 2019 hingga 2,32%. Namun hal ini



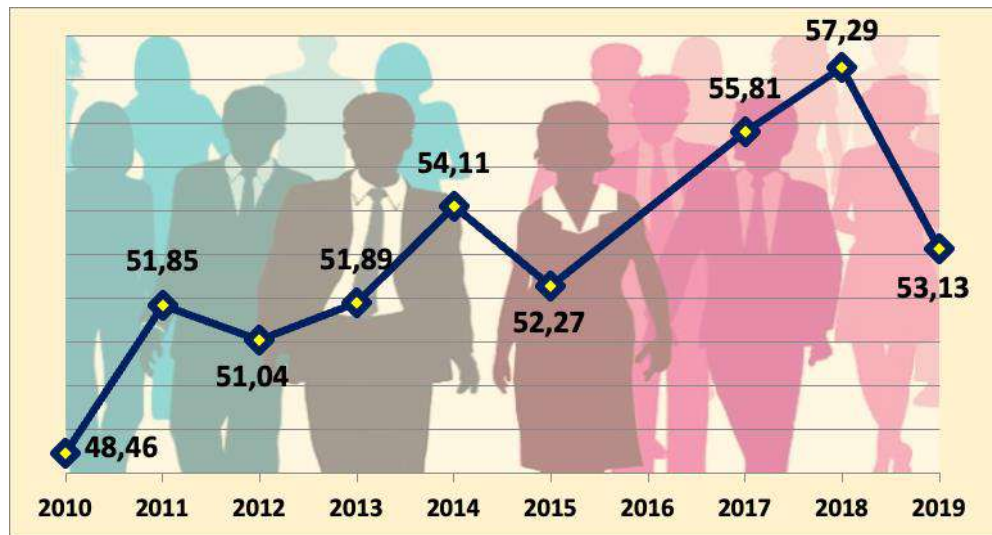
meningkat lagi menjadi 3,49% pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Pamekasan mengalami pergerakan yang berfluktuatif dan pada tahun 2020 berada pada 96,51%.

Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimal yang harus diberikan kepada seluruh pekerja di kabupaten tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan upah minimum ini didasarkan pada standar hidup layak daerah tersebut. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa upah minimum Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 1,2 juta menjadi 1,9 juta pada tahun 2020.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam pemberdayaan perempuan dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan. Salah satu indikator yang mampu menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik adalah Indeks Pemberdayaan Gender. Berikut merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan dari tahun 2010 sampai dengan 2019.

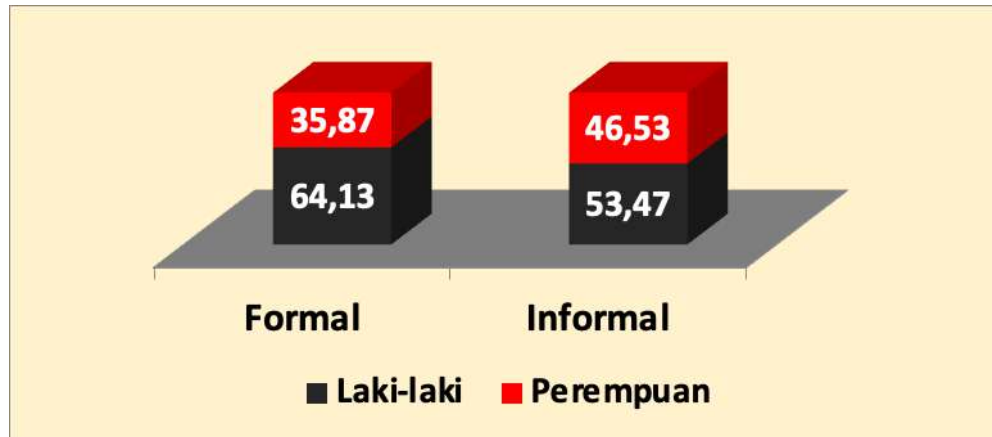


Gambar 2.11 Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Pamekasan Tahun 2017-2019

Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2010-2019, pada tahun 2010 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 48,46, pada tahun 2011 meningkat sebesar 51,85, kemudian turun pada tahun 2012 ke angka 51,04, pada tahun 2013 dan 2014 terus naik ke angka 51,89 dan 54,11, tahun 2015 mengalami penurunan hingga 52,27, naik kembali pada tahun 2017 dan 2018 hingga 55,81 dan 57,29, namun turun lagi pada tahun 2019 hingga 53,13.

Peningkatan pemberdayaan gender di Kabupaten Pamekasan dapat terlihat dari partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pada tahun 2019, persentase gender di Kabupaten Pamekasan yang bekerja pada sektor formal untuk laki-laki 64,13%, perempuan 35,87%. Persentase gender yang bekerja pada sektor informal untuk laki-laki 53,47%, perempuan 46,53%.



Gambar 2.12 Proporsi Laki-laki dan Perempuan dalam Sektor Formal dan Informal Tahun 2019

Sumber: BPS dan Pamekasan Dalam Angka Kabupaten Pamekasan

Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahan mempengaruhi pembentukan kebijakan Pemerintah Daerah yang *family friendly* dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan Bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Tabel 2.75 Capaian Kinerja terkait Perempuan dan Anak di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan perempuan di parlemen	%	6,67%	6,67%	6,67 %	6,67 %	4,44%	4,44%
Sumbangan pendapatan perempuan	%	32,98%	-	33,46%	33,55%	33,83%	33,87%
Perempuan sebagai tenaga profesional	%	32,55	n.a	39,93	45,83	37,37	37,21
Korban kekerasan terhadap perempuan	orang	-	44	31	26	28	n.a
Korban kekerasan terhadap anak	orang	-	31	36	22	19	9

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

1. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Masih adanya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Perlunya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak.

Tabel 2.76 Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	Kelompok	1	1	13	13	13	13
Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan	Jumlah PA	137.907	135.111	133.910	135.794	136.651	143.554
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	75,81	75,5	75,55	73,96	72,96	76,48

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan, 2021

Jumlah Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan setelah tahun 2015 dan 2016 sejumlah 1 kelompok, kemudian naik cukup signifikan sebesar 13 kelompok di tahun 2017, kemudian stagnan sampai pada tahun 2020. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana (KB) aktif menurut Kecamatan dan jenis kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan



mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari jumlah PA di tahun 2020 sejumlah 143.554, kemudian jumlah ini lebih besar daripada tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 136.651. Sedangkan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif, hal ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 76,48%, sedangkan jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yakni 72,96%.

Tabel 2.77 Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1	1	13	13	13	13
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)	Jumlah	137.907	135.111	133.910	135.794	136.651	143.554
Persentase Pencapaian Peserta KB	%	75,81	75,5	75,55	73,96	72,96	76,48

Sumber: Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pamekasan

Pada tabel diatas bahwa untuk rata-rata jumlah anak di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan signifikan dan kemudian stagnan. Dapat terlihat pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 1% kemudian mengalami kenaikan menjadi 13% di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) setiap tahun mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2020. Hal ini terlihat pada tahun 2020 sejumlah 143.554, sedangkan jumlah ini lebih kecil dari tahun 2019 sebesar 136.651. Pencapaian peserta KB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dari tahun ke



tahun mengalami fluktuatif, hal ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 76,48%, namun jumlah ini lebih besar dari jumlah tahun sebelumnya di tahun 2019 sebesar 72,96%.

2.3.2.3 Ketahanan Pangan

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lahan pekarangan sebagai media penumbuh pangan dan tetap melakukan pemberdayaan peternak selaku penghasil protein hewani.

Tabel 2.78 Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Pamekasan 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari.	2904 dan 77,52	3080 dan 79,80	2917,32 dan 56,42	2945,28 dan 56,96	2982 dan 57,7
pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan (%)	70	80	17	17	-
Ketersediaan Pangan Utama (%)	390,341	386,395	387,43	387,43	-
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB)	7,91	7,76	7,90	7,95	-
Konsumsi energy dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari dan gram/capital/hari)	-	-	-	-	2.037 Dan 48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Kab. Pamekasan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pertambahan penduduk yang terus meningkat serta meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi



permukiman menyebabkan timbulnya permasalahan pangan yaitu ketersediaan pangan utama (khusus Kabupaten Pamekasan terdiri dari beras dan jagung) tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk meskipun setiap tahun data produksi pangan utama meningkat, namun hal tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang makin bertambah persentase ketersediaan pangan utama makin menurun setiap tahun). Selain itu, permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan;
2. Peternakan berkontribusi terhadap PDRB kabupaten, namun peternak selaku penghasil protein hewani belum sepenuhnya berdaya karena peternakan masih bersifat sub sistem, akses terhadap permodalan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya penerapan teknologi peternakan dan pada rantai pemasaran senantiasa berada pada posisi tawar yang rendah;
3. Ketersediaan energi dan protein terus diupayakan meningkat mengingat kebutuhan energi dan protein makin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
4. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
5. Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim) berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat;
6. Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih memerlukan penanganan serius.



2.3.2.4 Pertanahan

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Tabel 2.79 Jumlah Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2017

Status kepemilikan Tanah	Tahun		
	2015	2016	2017
Sertipikat Hak Milik	3.079	6.131	17.845
Sertipikat Hak Guna Bangunan	56	87	139
Sertipikat Hak Guna Usaha	0	0	0
Sertipikat Hak Pakai	104	50	23
Jumlah	3.239	6.268	18.007

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan

Penataan dan pemanfaatan ruang serta legalisasi pertanahan menjadi hal yang penting dalam pengembangan pembangunan daerah. Tabel di atas menggambarkan kondisi pertanahan di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.80 Tanah Bersertifikat Menurut Kecamatan dan Status Kepemilikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017

No	Kecamatan	Status Kepemilikan Tanah			Jumlah
		Hak Milik	Hak Pakai	Hak Bangunan	
1.	Pamekasan	13.736	83	319	14.138
2.	Proppo	25.868	22	147	26.037
3.	Tlanakan	4.703	56	0	4.579
4.	Pademawu	16.021	50	3	16.074
5.	Galis	22.146	428	41	22.615
6.	Larangan	5.288	184	157	5.629
7.	Kadur	7025	8	3	7.036

No	Kecamatan	Status Kepemilikan Tanah			Jumlah
		Hak Milik	Hak Pakai	Hak Bangunan	
8.	Pakong	7.164	26	1	7.191
9.	Pegantenan	6.511	14	0	6.525
10.	Palengaan	3,474	38	5	3.517
11.	Waru	8.029	1	1	8.031
12.	Batumarmar	6.693	3	3	6.699
13.	Pasean	3.248	3	3	3.254
Jumlah		129.906	916	683	131.505

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan

2.3.2.5 Lingkungan Hidup



Lingkungan hidup adalah kondisi alam atau lingkungan, dimana hakikatnya manusia tidak dapat terpisahkan dengan lingkungan hidup. Mutu lingkungan hidup di suatu wilayah dapat menciptakan keserasian antara lingkungan alam dengan lingkungan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu : Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

2.3.2.5.1 Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap



kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Tabel 2. 81 Indeks Kualitas Air Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks kualitas air	50,00	65,00	67,5	70	70	64
Volume sampah yang ditangani (ton)	NA	NA	24.199,35	24.836,30	25.902,84	32.815,89
Volume produksi sampah (ton)	NA	NA	95.717,24	97.005,17	98.305,04	99.350,12
Persentase Penanganan sampah	NA	NA	25,28	25,6	26,35	33,03
Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk	NA	NA	0,204	0,182	0,080	0,80
Jumlah daya tampung TPS	NA	NA	204	182	80	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan

Indeks Kualitas Air di Pamekasan terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 sebesar 50.00 dan 65.00 pada tahun 2016 kemudian di tahun 2017 sebesar 67,5, di tahun 2018 dan tahun 2019 indeks kualitas air kondisinya stabil yakni di angka 70, namun pada tahun 2020 indeks kualitas air di kabupaten Pamekasan mengalami penurunan menjadi 64. Kualitas air selain dipengaruhi oleh limbah industri dan limbah rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari perairan sungai hal ini akan berpengaruh pada baku mutu air sungai. Persentase penanganan sampah di tahun 2017 dan 2018 stagnan di angka 25,28% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 26,35%. Angka ini



kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 33,03.

Untuk volume produksi sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 95.717,24 dan terus meningkat sampai di tahun 2019 menjadi 98.305,04. Angka ini kembali meningkat menjadi 99.350,12 pada tahun 2020. Sedangkan untuk volume sampah yang ditangani jika dilihat pada tabel diatas juga terus mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 24.199,35 sampai pada tahun 2019 sebesar 25.902,8 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 32.815,89 pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk Kabupaten Pamekasan yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 0,204 dan terus menurun sampai di tahun 2019 sebesar 0,080. Angka ini bertahan hingga tahun 2020.

Tabel 2.82 Kasus Lingkungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus)	11	7	9	15	9	8
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda (kasus)	11	7	9	15	9	8
Persentase Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan

Kualitas air juga di tentukan dari kualitas lingkungan yang ada di sekitar. Jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2019 mengalami jumlah kasus yang fluktuatif, yakni pada tahun 2015 sejumlah 11 kasus, tahun 2016 sebanyak 7 kasus, kemudian di tahun 2017 terdapat 9 kasus dan kasus terbesar terjadi di tahun 2018 sebanyak 15 kasus kemudian mengalami penurunan di tahun 2019



dengan 9 kasus. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8 kasus. Sedangkan jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan oleh Pemda jumlahnya sama dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus lingkungan yang terjadi seluruhnya dapat diselesaikan oleh Pemda. Dan untuk persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan data sudah sangat maksimal dan stabil, dengan berada pada kondisi 100%.

2.3.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 2.83 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	94,01	83,01	81,99	86,55	86,32	85,10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan

Kondisi Indeks Kualitas Udara di Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 94,01 dan menurun menjadi 83,01 pada tahun 2016, terus mengalami penurunan di tahun 2017 yakni 81,99 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 86,55, dan di tahun 2019 menjadi 86,32. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020



menjadi 85,10. Dengan demikian kualitas udara di Pamekasan mengalami tingkat yang fluktuatif, jika semakin menurun kebersihan yang nantinya akan berdampak bagi masyarakat, oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah menyusun kebijakan terkait penanganan terhadap kualitas udara di Pamekasan.

2.3.2.5.3 Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL merupakan bagian dari indeks kualitas lingkungan hidup yang menggambarkan kualitas lahan yang dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Tutupan Hutan adalah hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan analisis citra satelit yang merupakan acuan untuk perhitungan dari kualitas tutupan hutan dan kualitas tutupan hutan sebagai dasar dari perhitungan IKTL.

Pengelolaan tutupan lahan merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan hutan diperoleh dari data sebagai berikut :

1. Tutupan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;
2. Semak/ belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu;
3. Hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan atau ruang terbuka hijau.



Tabel 2.84 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Tutupan Lahan (Ha)	3.907	3.414	3.415	6.572	8.380	17.441,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan

Luas Tutupan Hutan di Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 3.907 ha dan Luas Tutupan Hutan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016 sebesar 3.414 ha dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2020 sebesar 17.441 Ha. Kenaikan ini dialami dengan metode perhitungan tutupan lahan menggunakan bantuan Citra Satelit sehingga lebih banyak data yang terkumpul. faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Tutupan Lahan, antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan. Data ini dapat dilihat di tabel diatas.

Tabel 2.85 Perbandingan IKLH Kabupaten Pamekasan, Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Indikator	Pamekasan	Jawa Timur	Nasional
	Tahun 2020		
IKLH	61,79	67,70	70,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pamekasan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 61,79, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur menunjukkan angka 67,70, sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional mencapai 70,27. Berdasarkan data perbandingan antara IKLH Kabupaten Pamekasan dengan Provinsi dan Nasional, maka IKLH Kabupaten Pamekasan perlu untuk ditingkatkan.



2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.3.2.6.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tabel 2.86 Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015-2020

Indikator Kerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD	1126	1126	1171	1186	1187	1187

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 memiliki jumlah yang tetap pada tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini dibuktikan dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 1126 LKD. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1171 LKD. Pada tahun 2018 terdapat 1186 LKD. Pada tahun 2019 mencapai 1187 LKD dan jumlah ini bertahan hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor pendorong yaitu, komitmen dan mitra kerja dalam mendukung penguatan posyandu dan PKK sangat tinggi. Faktor penghambat dari program ini yaitu, capaian belum maksimal karena program/kegiatan pembinaan dan penataan RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga adat belum tertangani dengan baik.

2.3.2.6.2 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan,

dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Pamekasan.

Tabel 2.87 Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang	%	0,21% /974	0,12% /553	0,18% /812	0,19% /864	0,10% /474

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020

Jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Pada tahun 2015 jumlah usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan mencapai 0,21%/974. Pada tahun 2016 turun menjadi 0,12%/553. Pada tahun 2017 mencapai 0,18%/812. Pada tahun 2018 menjadi 0,19%/864. Pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 0,10%/474. Faktor penghambat dari program ini adalah pagu anggaran menurun berpengaruh kepada target yang ingin dicapai.

Tabel 2.88 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	0,28%	0,29%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021



Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan bertahan hingga 2019 dengan jumlah yang tetap. Pada tahun 2015 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 0,28%/51. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,29%/53. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata jumlah yang tetap yaitu 0,30%/55. Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK didorong oleh komitmen TP. PKK Kab, TP.PK Kec dan TP PKK Desa/Kelurahan dalam mengembangkan kelompok binaan PKK dalam mendorong percepatan program 10 pokok PKK.

Tabel 2.89 Persentase PKK Aktif Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PKK Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

Persentase PKK aktif mengalami stagnan dengan pencapaian terbaik yaitu 100%. Capaian ini menggambarkan bahwasanya seluruh PKK yang ada di Kabupaten Pamekasan aktif dalam melaksanakan kegiatan maupun agenda-agenda lainnya.

Tabel 2.90 Posyandu Aktif Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Posyandu Aktif	Jumlah	923	923	967	987	984	620

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

Posyandu aktif Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah yang stagnan dari tahun 2015 hingga 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019. Jumlah posyandu aktif pada tahun 2015 dan 2016 adalah 923. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 967 posyandu. Pada tahun 2018 mencapai 987 posyandu. Pada tahun 2019 berjumlah 984 posyandu, namun pada tahun 2020 jumlah



posyandu aktif di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan hingga 620. penurunan di tahun 2020 disebabkan karena refocusing karena Covid-19 dan kurangnya pembinaan sehingga berdampak pada posyandu yang aktif. Selain itu yang menjadi faktor pendorong posyandu aktif Kabupaten Pamekasan adalah komitmen Pokjandal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta pokja posyandu Desa/Kelurahan dalam mendukung program posyandu/taman posyandu sangat tinggi.

Tabel 2.91 Jumlah Desa Mandiri Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	No Data	No Data	No Data	1 desa	3 desa	5 desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 Kabupaten Pamekasan memiliki satu Desa mandiri. Pencapaian ini didorong oleh komitmen bersama Kabupaten dan Desa untuk mendorong peningkatan status Desa.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada



- pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;



- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- 5) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Tabel 2.92 Jumlah Desa Maju Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Maju	Jumlah	No Data	No Data	7	12	15	40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Jumlah Desa maju mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 terdapat 7 Desa maju. Pada tahun 2018 jumlah desa maju mencapai 12 desa. Pada tahun 2019 mencapai 15 Desa Maju. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 40 Desa Maju dari 178 desa yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.93 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015-2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Tertinggal	No Data	No Data	54	19	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2020

Dari data di atas bahwa di Kabupaten Pamekasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dari pemerintah daerah, hal ini terbukti dari data tabel di atas tingkat jumlah Desa Tertinggal dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 54 Desa Tertinggal di Kabupaten Pamekasan, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 19 Desa Tertinggal, sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2020



sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Pamekasan.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk Warga Negara Asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

2.3.2.7.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Madura. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sekitar 0,59 persen (2013–2016) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata-rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah dua anak lebih baik.

Tabel 2.94 Angka Kelahiran Total di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TFR (Total Fertility Rate)	1,92	1,96	2,02	2,07	2,01	1,98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021

Angka kelahiran total di kabupaten pamekasan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Hal ini didorong oleh Kesadaran tentang pengaturan kelahiran dan kesertaan ber-KB masyarakat cukup tinggi serta Sarana pelayanan KB semakin merata. Di tahun 2015 sebesar 1,92



meningkat sebesar 1,96 ditahun 2016, kemudian meningkat ditahun 2017 sebesar 2,02, ditahun 2018 meningkat sebesar 2018. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,01 dan kembali mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 1,98. Hal ini disebabkan oleh Tingkat pendewasaan usia pernikahan masih relatif rendah dan tidak merata di semua lapisan dan strata sosial masyarakat.

Tabel 2.95 Modern Contraceptive Prevalence Rate di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	-	-	-	-	72,96%	76,84%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021

Angka pemakaian kontrasepsi modern dihitung mulai dari tahun 2019 sebesar 72,98% dan mengalami peningkatan sebesar 76,84% ditahun 2020. Peningkatan disebabkan oleh dukungan dan kerjasama mitra dan OPD terkait baik, terutama perannya dalam memberikan KIE dan pelayanan KB

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%

Sumber: Dinas PP,PA & KB Kab.Pamekasan, 2021

Hal ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga pemerintah daerah di pamekasan memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas.



Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Paguyuban dan Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (kelompok)	1	1	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021

Banyaknya paguyuban dan petugas Keluarga Berencana menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah paguyuban dan petugas Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan hanya ada satu kelompok, kemudian angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 menjadi 13 kelompok, capaian ini bertahan hingga tahun 2020.

Tabel 2.96 Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan (Jumlah PA)	137.907	135.111	133.910	135.794	136.651	143,554

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021

Banyaknya Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 137.907, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 135.111, dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 133.910. pada tahun 2018



angka atau jumlah Akseptor KB Aktif mengalami peningkatan menjadi 135.794 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 136.651. Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 143.554. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait / mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya laparaskopi untuk Layanan MOW.

Tabel 2.97 Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PA	137.907	135.111	133.910	135.794	136.651	143.554
Jumlah PUS	181.913	178.947	177.251	183.609	187.430	187.719

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021*

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Jumlah PA dan PUS dalam rasio akseptor kb dan penggunaan kontrasepsi mengalami peningkatan atau capaian yang fluktuatif.

Pada tahun 2015 Jumlah PA berjumlah 137.907 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 181.913.



Kemudian pada tahun 2016 Jumlah PA berjumlah 135.111 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 178.947. pada tahun 2017 Jumlah PA berjumlah 133.910 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 177.251. Kemudian pada tahun 2018 Jumlah PA berjumlah 135.794 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 183.609. Pada tahun 2019 Jumlah PA berjumlah 136.651 berbanding dengan Jumlah PUS sebanyak 187.430. Kemudian pada tahun 2020 PA berjumlah 143.554 dengan jumlah PUS sebanyak 187.719. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait / mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya lapraskopi untuk layanan MOW.

2.3.2.7.2 Rasio Akseptor KB

Tabel 2.98 Rasio Akseptor KB Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio akseptor KB (%)	131,57	131,57	131,57	135,13	100/73	100/76

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Rasio akseptor KB di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 rasionya mencapai 131,57%. Angka ini bertahan hingga tahun 2017. Angka ini kembali mengalami peningkatan



menjadi 135,13%. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 100/73 dan pada tahun 2020 menjadi 100/76. Faktor pendukung indikator ini adalah pemahaman masyarakat terhadap manfaat pemakaian kontrasepsi sudah meningkat, dukungan dari lintas sektor terkait/ mitra kerja, ketersediaan alkon yang memadai, dan dukungan anggaran APBD. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana pendukung, misalnya lapraskopi untuk layanan MOW.

2.3.2.7.3 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel 2.99 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	75,81	75,5	75,55	73,96	72,96	76,4

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021*

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif. pada tahun 2015 capaiannya mencapai 75,81%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 75,5%. Capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 75,55%. Kemudian pada tahun 2018 capaiannya mencapai angka 73,96% dan pada tahun 2019 menjadi 72,96%. Pada tahun 2020 mencapai 76,4%.



2.3.2.7.4 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)

**Tabel 2.100 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/
Penyuluhan Keluarga Berencana ([LKB/ PKB) di Setiap
Desa/ Kelurahan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan (orang)	58/189	60/189	53/189	53/189	58/189	54/189

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 58/189 orang, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 60/189 orang pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 angkanya mengalami penurunan menjadi 53/189 orang, angka ini bertahan hingga tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 58/189 orang pada tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 54/189.

2.3.2.7.5 Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Tabel 2.101 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat	Jumlah Alkon (Penerimaan)	81.938	134.099	218.192	182.082	116.319	83.190
Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Jumlah Alkon (Pengeluaran)	155.580	63.100	263.820	161.780	99.670	81.503

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat memiliki kondisi yang



fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah alkon (Penerimaan) mencapai 81.938 sedangkan pengeluarannya sebesar 155.580. Kemudian pada tahun 2016 jumlah alkon (Penerimaan) mencapai 134.099 sedangkan pengeluarannya sebesar 63.100. pada tahun 2017 alkon (Penerimaan) mencapai 218.192 dan alkon yang keluar mencapai 263.820. angka ini berubah pada tahun 2018 menjadi 182.082 untuk penerimaan dan 161.780 untuk pengeluaran. Angka dan capaian ini berubah pada tahun 2019 yaitu untuk penerimaan sebanyak 116.319 dan pengeluaran 99.670. Selanjutnya tahun 2020 jumlah alkon (penerimaan) sebanyak 83.190 dan jumlah alkon (pengeluaran) sebanyak 81.503.

2.3.2.7.6 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)

**Tabel 2.102 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)
Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB)	32	32	33	32	32	33

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2020

Jumlah Klinik Keluarga Berencana yang ada di kabupaten Pamekasan sebanyak 32 buah, klinik ini tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Pamekasan. Jumlah klinik ini tetap sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Faktor pendukungnya adalah dukungan Faskes/Klinik KB di 13 Kecamatan terhadap Layanan KB.



2.3.2.7.7 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

Tabel 2.103 Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	189/1163	189/1163	189/1163	189/1163	189/1163	189/1164

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021*

Pos KB atau keluarga berencana desa adalah sarana pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana melalui sistem kelompok-kelompok akseptor keluarga berencana, yang mula-mula timbul atas inisiatif dan kesadaran masyarakat sendiri di desa untuk mencapai kelestarian akseptor keluarga berencana, menuju ke arah keluarga kecil yang sejahtera. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang ada di kabupaten Pamekasan berjumlah 189 buah, jumlah ini bertahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

2.3.2.7.8 Persentase Pencapaian Peserta KB (%)

Tabel 2.104 Persentase Pencapaian Peserta KB (%) Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pencapaian Peserta KB (%)	122,08	102,71	233,75	107,11	112,2	116,32

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, 2021*

Persentase Pencapaian Peserta KB di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami kondisi yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase ini mencapai angka 122,08%, kemudian angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 102,71%. Pada tahun 2017 persentase ini

mengalami peningkatan sebanyak 233,75% dan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 107,11%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 112,2% dan kembali meningkat menjadi 116,32% ditahun 2020.

2.3.2.8 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan pergerakan manusia yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa.

2.3.2.8.1 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, fasilitas penerangan jalan dan lain-lain.

Tabel 2.105 Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpasang di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rambu-rambu lalu lintas terpasang (unit)	270	320	320	361	285	292

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020

Jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi



menurun di tahun 2019. Pada tahun 2015 pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 270 unit, kemudian di tahun 2016 dan 2017 stagnan di angka 320 unit, kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 361 unit dan mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2019 sebesar 285 unit. Hal ini disebabkan karena rambu-rambu yang tersedia banyak yang rusak sehingga perlunya pengadaan kembali dan rambu-rambu yang ada masih belum memadai. Kemudian kembali meningkat di tahun 2020 sebesar 292 unit. Adanya tambahan anggaran membuat pengadaan rambu rambu lalu lintas meningkat.

Tabel 2.106 Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Menurut Jenis Kendaraan dan Penggunaan di Kabupaten Pamekasan	5.342	5.466	5.181	7.320	6.411

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji menurut jenis kendaraan dan penggunaan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kondisi yang fluktuatif. Dari tabel di atas terlihat bahwa di tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor wajib uji sebanyak 5.342, di tahun 2016 sebesar 5.466, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5.181, akan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7.320 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 sebesar 6.411. Ketidakstabilan tersebut dikarenakan masyarakat menganggap kendaraan tidak wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor dan Masyarakat menganggap Uji KIR merupakan proses yang rumit.



Tabel 2.107 Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah angkutan darat (kendaraan)	371	394	389	524	495	n/a
Jumlah penumpang angkutan darat (orang)	N/A	208	181	119	171	n/a
Persentase layanan angkutan darat	70	70	70	80	80	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2021

Sedangkan untuk jumlah angkutan darat pada kondisi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 sebanyak 371 kendaraan, di tahun 2016 pada angka 394 kendaraan, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 389, dan mengalami peningkatan terbesar di tahun 2018 sebesar 524 kendaraan, kemudian turun kembali di tahun 2019 sebesar 495 kendaraan. Penurunan tersebut dikarenakan Perbandingan angkutan lebih banyak daripada jumlah penumpang yang harus dilayani. Untuk jumlah penumpang angkutan darat sendiri terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, yakni pada tahun 2015 tidak terdapat data (N/A) tahun 2016 sejumlah 208 orang dan terus menurun sampai pada tahun 2019 sebesar 171 orang. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah penumpang angkutan darat, yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas untuk para penumpang kurang lengkap dan kurang memadai.
2. Semakin meningkatnya angka ekonomi, semakin berkurangnya minat untuk menggunakan angkutan umum.
3. Angka minat penumpang angkutan umum menurun dikarenakan angkutan umum itu sendiri semakin lama semakin tidak terawat.
4. Kurangnya usulan mengenai peningkatan angkutan umum.



Untuk persentase layanan angkutan darat pada kondisi stagnan walaupun di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Di tahun 2015 sampai 2017 berada pada angka 70% dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebesar 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa presentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pamekasan masih bisa di optimalkan lagi.

Tabel 2. 108 Angka Kecelakaan di Kabupaten Pamekasan dan Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	70%	70%	70%	80%	80%	80%
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	N/A	230	257	280	326	728

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan

Pada data tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 70% dan meningkat di tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 80%. Peningkatan ini dapat terjadi karena tersedianya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pamekasan angkanya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 230 kasus, di tahun 2017 menjadi 257 kasus, kemudian tahun 2018 280 kasus, kemudian meningkat sampai pada tahun 2019 sebanyak 326 kasus dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebanyak 726 kasus. Dari data tersebut diatas, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena dengan

sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, dapat memperlancar dan memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Volume kendaraan meningkat setiap tahun, tetapi pelebaran jalan kurang.
2. Peremajaan kendaraan kurang.
3. Kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri, seperti: memaksakan diri berkendara saat mengantuk, menggunakan HP, dll.
4. Faktor kendaraan yang sebelumnya tidak di periksa terlebih dahulu sebelum berkendara.
5. Faktor kontur jalan yang tidak rata dan rusak juga menjadi faktor pendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas.
6. Faktor lingkungan juga mendukung terjadinya angka kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2.109 Persentase Sarana/Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Sarana / Prasarana Penerangan Jalan Umum yang layak fungsi	50	50	50	50	60	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase sarana/prasarana penerangan jalan umum yang layak fungsi di Kabupaten Pamekasan tahun 2015 sampai 2019 cukup stagnan sampai meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2015 sampai 2018 stagnan di 50% kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 60%. Angka ini kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun



2020 menjadi 100%. Peningkatan persentase sarana/prasarana penerangan jalan umum yang layak fungsi pada tahun 2020 ini dikarenakan tersedianya anggaran untuk pengadaan sarana/prasarana penerangan jalan umum.

Tabel 2.110 Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap parkir berlangganan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Pamekasan

Berdasarkan tabel diatas persentase kepatuhan masyarakat terhadap parkir berlangganan berada pada angka yang stagnan, sehingga tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam parkir berlangganan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, yakni:

1. Kurang sadarnya masyarakat untuk mematuhi peraturan perparkiran.
2. Kurangnya sarana untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Juru Parkir.
3. Perlu Pengadaan SDM yang profesional Khususnya Juru Parkir di Tepi Jalan dan Parkir Khusus melalui BKPSDM.

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pamekasan terus berjalan. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pamekasan mulai tahun 2013 sudah mencapai 100% hal ini menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi sudah merata di seluruh daerah di Kabupaten Pamekasan, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi



penurunan menjadi 99.40%. capaian ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 98.88%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun sudah ada perbaikan dan peningkatan layanan telekomunikasi, layanan telekomunikasi yang sudah ada juga harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur TI dalam rangka peningkatan layanan akses internet kepada masyarakat.

Beberapa media elektronik dan media cetak di Kabupaten Pamekasan menjadi bagian dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah selain itu juga penyebarluasan informasi pembangunan daerah dilakukan melalui kelompok – kelompok informasi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jumlah penyiaran radio maupun TV lokal yang ada di Kabupaten Pamekasan stagnan di angka 8, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah menjadi 7.

Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan namun hal itu perlu disertai dengan peningkatan keamanan informasi. Di Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2017 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah masih (%) masih 0% hal ini dikarenakan Kabupaten Pamekasan belum memiliki perangkat khusus atau sistem elektronik tertentu yang diberikan tambahan modul keamanan sesuai rekomendasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun seiring berjalannya waktu dan perbaikan yang dilakukan, capaian ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari hanya 2 Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah



menjadi 75% Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi guna meningkatkan keamanan informasi.

Tabel 2.111 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah(%)	100	100	100	100	0	2	67,78	75
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	100	99.40	99.40	98.88
Jumlah Penyiaran Radio /TV Lokal	8	8	8	8	8	8	8	7
Jumlah Surat Kabar Lokal	55	58	61	61	16	16	-	41

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pamekasan, 2021

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Pamekasan ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Jumlah Koperasi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 jumlah Koperasi di Kabupaten Pamekasan mencapai 688 koperasi. Persentase Koperasi yang dibina di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase Koperasi yang dibina mencapai

60,1%. Jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan mencapai 9.441 UMKM. Persentase UMKM yang dibina menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase UMKM yang dibina di Kabupaten Pamekasan mencapai 62,67%. Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020, pada tahun 2020 persentase UMKM yang mendapat bantuan modal di Kabupaten Pamekasan mencapai 88%.

Tabel 2.112 Capaian Indikator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2020

Keterangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Koperasi	596	638	638	656	666	688
Persentase Koperasi yang dibina	%	55%	57,2%	57,2%	58,2%	58,8%	60,1%
Jumlah UMKM	UMKM	4.817	7.810	8.196	9.129	9.441	9.441
Persentase UMKM yang dibina	%	40,59 %	65,33 %	50,66 %	20,95 %	62,67 %	62,67 %
Persentase UMKM yang mendapat bantuan modal	%	0	0	9%	32%	73%	88%

Sumber : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kab.Pamekasan

2.3.2.11 Penanaman Modal

Iklim investasi di Pamekasan menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Pamekasan yang strategis menempatkan Kabupaten Pamekasan menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan



kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Pamekasan. Selain itu, belum optimalnya peran penanaman modal terhadap perekonomian inklusif dikarenakan:

- a. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan.
- b. Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan *reward* dan *punishment* pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.
- c. Belum memiliki Peta Potensi Investasi.
- d. Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- e. Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha.
- f. Belum optimalnya kinerja Satgas Percepatan Berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani.

2.3.2.11.1 Nilai Realisasi Investasi

Total nilai realisasi investasi menunjukkan peningkatan selama tahun 2013-2016, yaitu masing-masing 136.075.322.300 rupiah (2013); 236.053.053.742 (2014); dan 194.127.650.000 (2015); 315.601.000.000 (2016); Total investor untuk realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2016 sebanyak 896 investor.

Sementara pada tahun 2017 realisasi PMA/PMDN turun menjadi 139.054.944.800 rupiah dengan jumlah investor 603, hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, yang salah satunya karena perubahan struktur Perangkat

Daerah, pelayanan dan perubahan regulasi perizinan, sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat besar dari sisi nilai investasi yaitu 1.994.499.844.523 rupiah. Pertama kali nilai investasi menyentuh angka satu trilyun dalam sejarah Kabupaten Pamekasan dan jumlah investor sebanyak 5.935 (pertama kali menyentuh 4 digit, atau naik $\pm 10 \times$ lipat) dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang perizinan dengan adanya PP 24 Tahun 2018 dan aplikasi prizinan online melalui Online Single Submission (OSS) dan semakin baiknya iklim investasi di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.113 Kondisi Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rupiah	236.053.053.742	194.127.650.000	315.601.000.000	139.054.944.800	1.994.499.844.523
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Investor	751	982	896	603	5935

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.Pamekasan

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga



Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan

kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tabel 2.114 Perkumpulan Olahraga Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya perkumpulan Olahraga menurut kecamatan dan jenis olahraga di kabupaten Pamekasan	N/A	N/A	N/A	N/A	279 dari 14 Cabang Olahraga	285

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020*

Dalam PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 28 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Banyaknya perkumpulan olahraga menurut kecamatan dan jenis olahraga di kabupaten Pamekasan di tahun 2019 mencapai 279 perkumpulan dari 14 cabang olahraga. Dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 285 perkumpulan.

Tabel 2.115 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan Olahraga	4	4	6	5	8	3

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020*



Jumlah kegiatan Olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hanya ada 4 kegiatan yang dijalankan, hal ini berlanjut hingga tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 6 kegiatan olahraga yang dijalankan, pada tahun 2018 hanya ada 5 kegiatan olahraga yang dijalankan dan pada tahun 2019 terlaksana 8 kegiatan olahraga. Dan di tahun 2020 hanya terdapat 3 kegiatan olahraga. Hal yang menjadi faktor penghambat dari kegiatan ini adalah ada beberapa kegiatan olahraga yang tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal dengan kegiatan lain. Serta dampak Covid – 19 di tahun 2020

Tabel 2.116 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	3	6	8	9	2

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020*

Jumlah kegiatan Kepemudaan yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hanya ada 6 kegiatan yang dijalankan. Tahun 2016 ada 3 kegiatan yang dijalankan. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 6 kegiatan olahraga yang dijalankan, pada tahun 2018 ada 8 kegiatan kepemudaan yang dijalankan dan pada tahun 2019 terlaksana 9 kegiatan kepemudaan, pada tahun 2020 terdapat 3 kegiatan kepemudaan yang dijalankan. Hal yang menjadi faktor penghambat dari kegiatan ini adalah ada beberapa kegiatan kepemudaan yang tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal dengan kegiatan lain. Serta dampak Covid – 19 di tahun 2020

Tabel 2.117 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	242	255	260	260	260	260

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020*

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 ada 242. Organisasi Olahraga, berlanjut hingga tahun 2016 terdapat 255 organisasi olahraga. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 260 organisasi olahraga. Jumlah ini bertahan hingga tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 2.118 Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Gedung Olahraga	3	3	4	4	4	4

Sumber: *Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2020*

Jumlah gedung olahraga yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 3 buah gedung. Kemudian bertambah satu pada tahun 2017 menjadi 4 buah gedung olahraga. Jumlah itu bertahan hingga tahun 2020.

2.3.2.13 Kebudayaan



Pamekasan merupakan salah satu kota ternama yang ada di Madura. Pamekasan saat ini sedang merajut masa depan yang meluas. Mulai dari kabupaten dengan predikat



Kota Pendidikan Madura, Kota Budaya, Kota Gerbang Salam, hingga Pamekasan sebagai Kota Batik.

Kabupaten Pamekasan ini ada beberapa kebudayaan. Di Pamekasan alat seperti keris masih menjadi sebuah benda yang sakral. Para kaum tua banyak yang mempunyai keris yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Keris ini dipercaya mempunyai kekuatan dan mereka merawat keris tersebut. Ada pula yang menganggap keris tersebut merupakan wujud dari nenek moyang atau sesepuh mereka.

Selain keris, ada pula sebuah tradisi di Pamekasan yang diperingati setiap satu tahun sekali. Tentunya nama Kerapan Sapi tidak asing lagi di telinga kita. Kerapan Sapi merupakan sebuah tradisi yang dipatenkan sebagai tradisi orang Madura. Kerapan Sapi ini merupakan balapan yang terdiri dari dua ekor sapi dan satu joki. Kerapan sapi ini biasanya setiap bulan bahkan setiap minggu dilaksanakan. Akan tetapi ajang bergengsi dari Kerapan Sapi ini biasanya diperingati setiap satu tahun sekali. Ajang ini disebut ajang bergengsi karena memperebutkan Piala Presiden. Ajang bergengsi ini biasanya diselenggarakan di Stadion Hadiwidjojo yang berada di daerah Lawangan Daya dan ada pula tradisi menjemput sanak saudara yang naik haji.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pamekasan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, di sisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Pamekasan seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong,



kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Penyusunan tabel capaian indikator seni budaya dengan merujuk tatacara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah.

Tabel 2.119 Jumlah Lembaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Lembaga Seni di Kabupaten Pamekasan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pamekasan	Orang	33	29	26	29	31	33
Proppo	Orang	7	7	7	8	8	8
Tlanakan	Orang	5	6	6	8	8	8
Pademawu	Orang	10	10	10	10	10	10
Galis	Orang	2	2	2	1	2	2
Larangan	Orang	8	8	9	9	9	10
Kadur	Orang	1	1	2	2	1	1
Pakong	Orang	1	1	1	-	1	1
Pegantenan	Orang	-	-	-	-	-	-
Palengaan	Orang	1	1	3	3	3	3
Waru	Orang	-	2	3	3	3	3
Batumarmar	Orang	-	1	-	-	-	-
Pasean	Orang	-	-	1	1	2	2
Total	Orang	68	68	70	74	78	81

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan, 2021

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pelestarian nilai-nilai tradisi dan budaya lokal yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat, maka data di atas menunjukkan data sebaran jumlah Lembaga seni. Kecamatan Pamekasan merupakan kecamatan dengan jumlah Lembaga Seni terbanyak jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, yaitu sebesar 33 lembaga Seni dari 81 Lembaga Seni di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020.



Tabel 2.120 Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Jumlah Tenaga Seni Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pamekasan	Orang	514	489	462	474	490	520
Propo	Orang	124	124	124	135	135	135
Tlanakan	Orang	183	153	153	182	182	182
Pademawu	Orang	276	276	276	276	276	276
Galis	Orang	30	30	30	20	30	30
Larangan	Orang	244	244	260	260	260	275
Kadur	Orang	25	25	35	35	25	25
Pakong	Orang	20	20	20	-	20	20
Pegantenan	Orang	-	-	-	-	-	-
Palengaan	Orang	40	40	64	64	64	64
Waru	Orang	-	55	70	70	70	70
Batumarmar	Orang	-	22	-	-	-	-
Pasean	Orang	-	-	15	15	32	32
Total	Orang	1456	1478	1509	1531	1584	1629

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Pamekasan, 2021

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pelestarian nilai-nilai tradisi dan budaya lokal yang memiliki nilai luhur bagi masyarakat, maka data di atas menunjukkan data sebaran jumlah tenaga seni. Kecamatan Pamekasan merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga seni terbanyak jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, yaitu sebesar 520 tenaga seni dari 1629 tenaga seni di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020.

Tabel 2.121 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu (unit)	-	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, di darat dan/atau air, yang perlu dilestarikan keberadaannya

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, melalui proses penetapan. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Pamekasan adalah 13 Cagar budaya, jumlah ini tidak berubah sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.122 Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pagelaran festival seni dan budaya	Pagelaran	N/A	N/A	8	9	10	2

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Pagelaran Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2017 Pagelaran Festival Seni dan Budaya dilaksanakan sebanyak 8 kali. Pada tahun 2018 menjadi 9 kali, dan pada tahun 2019 menjadi 10 kali. Faktor yang mendorong capaian ini adalah Fasilitas Pagelaran Festival Seni Budaya. Namun pada tahun 2020 hanya diadakan 2 kali, penurunan tersebut disebabkan oleh pandemic *covid-19*.

2.3.2.14 Perpustakaan



Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat

memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Perpustakaan merupakan perantara masyarakat. oleh karena itu, perkembangan perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tercermin dalam sejarah masyarakat, kadang-kadang dalam sejarah negara. Dengan demikian, sejarah perpustakaan di Pamekasan tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Berikut ini ditampilkan data terkait informasi dan perpustakaan di Pamekasan.

Tabel 2.123 Pengunjung, Koleksi Judul Buku, Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun (Orang)	65.589	47.828	67.505	79.865	222.467	208.104	226.738	100.287
jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	10.750	11.415	14.400	15.112	17.479	19.850	21.043	23.877
Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	2	2	2	2	5	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan, 2021

Mengacu pada tabel 2.97 dapat diketahui Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun



2019 menjadi 226.738 orang. Namun pada tahun 2020 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 100.287 orang karena kondisi pandemic covid-19. Demikian juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 jumlah judul buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan berjumlah 15.112 judul buku, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 23.877 judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.124 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)	67.505	79.865	222.467	208.104	226.738	100.287

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 226.738 orang. Namun pada tahun 2020 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 100.287 orang karena kondisi pandemic covid-19.

Tabel 2.125 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	14.400	15.112	17.479	19.850	21.043	23.877

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021



Jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku perpustakaan sebanyak 14.400 buku, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 15.112 buku. pada tahun 2017 jumlah buku menjadi 17.479 buku, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 19.850 buku dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 21.043 buku. Pada tahun 2020 menjadi 23.877 judul buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk pengadaan.

Tabel 2.126 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	2	2	5	6

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan meskipun perlahan. Pada tahun 2015 jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat hanya 2 orang, jumlah ini bertahan hingga tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 5 orang dan kembali bertambah pada tahun 2020 menjadi 6 jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki sertifikat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terlaksananya diklat sertifikasi.



Tabel 2.127 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun pada Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	67.505	79.865	222.467	208.104	226.738	100.287

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 67.505 orang, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 79.865 orang. pada tahun 2017 jumlah pengunjung menjadi 222.467 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 208.104 orang dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 226.738 orang. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya fasilitas internet. Namun pada tahun 2020 Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 100.287, hal ini disebabkan karena pandemic covid-19.

Tabel 2.128 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	n/a	n/a	80,19	82,31	85,09	83,96

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan



perpustakaan sebesar 80, kemudian pada tahun 2018 nilainya menjadi 82,31 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 85,09. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,96 dan hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasana.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya fasilitas dan peningkatan jumlah perpustakaan.

Tabel 2.129 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	%	45,34	40,60	42,77	45,68	45,65	46,27

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 45,34%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 40,60%. Pada tahun 2017 Persentase Koleksi buku menjadi 42,77%, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 45,68% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 45,65%. Capaian ini kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 46,27%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pengadaan bahan pustaka.

Tabel 2.130 Persentase Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pengunjung perpustakaan	7,99	9,35	25,78	23,88	26,02	11,80

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan Pada tahun 2015 hingga



2019. Pada tahun 2015 Persentase pengunjung perpustakaan sebanyak 7,99%, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 9,35%. pada tahun 2017 Persentase pengunjung perpustakaan menjadi 25,78%, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 23,88% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 26,02%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11,80% yang disebabkan pandemic covid-19.

Tabel 2.131 Jumlah Koleksi Judul Buku dan Jumlah Buku di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Judul)	judul	14.400	15.112	17.479	19.850	21.043	23.877
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku)	eksemplar	31.760	37.226	40.864	43.456	46.094	51.605

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021*

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sejumlah 14.400 judul buku, kemudian di tahun 2016 menjadi 15.112 buah, meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 17.479 buah, pada tahun 2018 sejumlah 19.850 pada tahun 2019 sejumlah 21.043 buah, terus meningkat sampai dengan tahun 2020 mencapai 23.877 buah. Faktor pendorong meningkatnya jumlah koleksi judul buku ini karena adanya ketersediaan anggaran untuk pengadaan buku. Selain itu, jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sejumlah 31.760 buah, pada tahun 2016 menjadi 37.226 buah, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 40.864 buah, pada tahun 2018 menjadi sejumlah 43.456 buah, dan pada tahun 2019 menjadi 46.094, terus meningkat sampai dengan 2020 mencapai 51.605 buah. Faktor pendorong terus meningkatnya jumlah koleksi jumlah buku di perpustakaan daerah adalah karena adanya buku hibah sehingga menambah jumlah koleksi buku.

2.3.2.15 Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor.

Tabel 2.132 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku Tahun 2013-2019

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	30	30	43	43	46	50	60	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Pamekasan

Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku di



Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku sebanyak 43% kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 43% pada tahun 2017 Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku menjadi 46% kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 50% dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 60% faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif.

Tabel 2.133 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	24	25	25	27	33	33

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 24 Perangkat Daerah (PD), kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 25 Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2017 Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku menjadi 25 Perangkat Daerah (PD) kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 27 Perangkat Daerah (PD) dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 33 Perangkat Daerah (PD), jumlah ini bertahan hingga tahun 2020. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif.



Tabel 2. 134 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku (%)	43%	43%	46%	50%	60%	70%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku di Kabupaten Pamekasan memiliki peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku sebanyak 43% dan stagnan pada tahun 2016 menjadi 43% pada tahun 2017 Persentase Penerapan Pengelola Arsip Baku menjadi 46% kemudian pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 50% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 60% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 70%, faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena terselenggaranya Bimtek, Sosialisasi, dan Monev secara intensif.

Tabel 2.135 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	-	-	2	1	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

SDM (Sumber Daya Manusia) Kearsipan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Dari beberapa komponen tersebut nampaknya pengaruh SDM kearsipan dalam kegiatan kearsipan secara menyeluruh sangat penting, SDM kearsipan itu sendiri pada prinsipnya dikelompokkan menjadi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam hal ini adalah pimpinan, pembina kearsipan, tim penilai jabatan fungsional arsiparis dan arsiparis. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah dilakukan beberapa kali di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2015 satu kali, kemudian pada tahun 2018 dua kali



dan pada tahun 2019 kegiatan ini telah dilaksanakan satu kali.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor potensial untuk menggerakkan perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan. Usaha sektor perikanan di Kabupaten Pamekasan dikembangkan di wilayah pesisir utara dan selatan.

Dengan otonomi daerah maka setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan semua potensi daerah yang dimilikinya. Sumber daya perikanan sebagai salah satu bentuk potensi sumber daya alam di Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya pelaku usaha perikanan. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar baik laut maupun darat dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, namun belum termanfaatkan secara optimalnya. Aktivitas usaha perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Pamekasan mencakup perikanan tangkap/laut, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Komoditi perikanan yang potensial di Kabupaten Pamekasan yaitu garam, ikan teri dan rumput laut. Komoditi perikanan lain yang potensial yaitu budidaya udang vannamei pada lahan tambak dan budidaya air tawar khususnya ikan lele.

2.3.3.1.1 Produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan garam. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya



laut, tambak, kolam. Data produksi perikanan di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.136 Produksi Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (ton)	25.882,90	25.071,56	23.533,12	20.341,69	22.820,90	23,513.90
Perikanan Tangkap (ton) : Produksi Perikanan Laut	24.391,90	23.190,15	21.689,00	19.554,10	21.886,10	22,592.30
Perikanan Budidaya (ton)	1.491,00	1.881,41	1.844,12	787,59	934,08	921,60
• Produksi Budidaya Tambak	564,09	1.267,20	704,58	232,44	176,97	209,90
• Produksi Budidaya Kolam	716,33	337,47	1.001,81	451,16	634,61	702,10
• Produksi Budidaya Laut	210,58	276,73	137,73	103,99	735,01	9,60
Produksi Garam (ton)	123.534,70	3.208,30	54.831,50	128.247,42	152.540,50	118.458,40

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Dari tabel diatas, bahwa kondisi produksi perikanan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah produksi perikanan sebesar 25.882,90 ton, di tahun 2016 sebesar 25.071,56 ton, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 23.533,12, dan mengalami penurunan terbanyak pada tahun 2018 sebesar 20.341,69 ton, kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 22.820,90 ton dan di tahun 2020 sebesar 23,513.90 ton. Produksi perikanan dari tahun 2015 sampai 2020 cenderung fluktuatif dikarenakan kegiatan perikanan tidak menentu dan tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dari kondisi tersebut ada beberapa faktor penghambat meningkatnya produksi perikanan, yakni:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan.
2. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan.



3. Tingginya biaya operasional, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif.
4. Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.

Sedangkan untuk produksi garam juga mengalami kondisi yang sama yakni fluktuatif, yakni pada tahun 2015 sebesar 123.534,70, kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2016 sebesar 3.208,30, mulai mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 54.831,50, di tahun 2018 sebanyak 128.247,42 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 152.540,50. Dari data tersebut terlihat bahwa di tahun 2016 produksi garam sangat kecil dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun tersebut, hal ini dikarenakan musim hujan sangat panjang sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam.

2.3.3.1.2 Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

Peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan merupakan kelompok yang mendapatkan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis bidang perikanan. Melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta memfasilitasi berupa pemberian bantuan sarana sehingga harapannya kelompok pelaku usaha perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas baik kemampuan personil maupun kelembagaannya. Upaya meningkatkan kelas kelompok ini diharapkan dapat turut menstimulasi kelompok dalam memperbesar skala usaha, sehingga dapat turut meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya.



**Tabel 2.137 Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kelompok Usaha Bersama (KUB)	89	116	120	128	128
Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	23	23	41	44	49
Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR)	58	43	46	48	46
Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR)	170	170	164	164	164
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	7	7	7	7	7
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	347	359	378	391	394

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2020

Pembinaan kelompok merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kelompok dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan serta kesejahteraan hidupnya. Tujuan pembinaan kelompok adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usahanya secara mandiri oleh para pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan. Data kelompok pelaku usaha perikanan dan capaian indikator bidang perikanan seperti tabel di atas. Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yakni di 2015 sebanyak 347 kelompok sampai pada tahun 2019 meningkat sebanyak 394 kelompok.

Dari peningkatan jumlah kelompok usaha perikanan diatas, dapat dilihat bahwa usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah kelompok usaha dilakukan secara maksimal. Mulai dari melakukan pendampingan dan pembinaan yang intensif kepada kelompok dengan



memperhatikan pada penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama dan akses informasi pasar. Selain itu, juga adanya pedoman kerja penyuluhan perikanan yang ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok.

Tabel 2.138 Capaian Indikator Bidang Perikanan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9,848	8,643	2,401	2,626	1,086	1,274
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	9,070	6,881	6,747	2,034	2,256	2,406
Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	18,868	0,339	4,505	15,301	46	N/A
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha Perikanan (%)	N/A	N/A	1,500	1,320	1,237	1,234

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Berdasarkan data tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian indikator utama bidang perikanan merupakan perhitungan realisasi tahun berjalan dibagi target tahun berjalan. Capaian persentase peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan garam tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya tidak dapat diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca sedangkan produksi budidaya tiap tahunnya cenderung mengalami fluktuatif disebabkan perubahan cuaca yang



ekstrem, ketersediaan benih ikan dan faktor serangan hama penyakit ikan. Produksi garam tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan faktor cuaca yakni tingginya intensitas curah hujan sehingga para petambak garam tidak dapat memproduksi garam. Sedangkan capaian persentase peningkatan kelompok pelaku usaha perikanan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.139 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	663	617	431	555	555	555
Pademawu	533	826	588	1.154	1.154	1.154
Galis	241	432	71	383	383	383
Larangan	309	160	195	145	145	145
Kadur	N/A	N/A	N/A	11	11	11
Pasean	310	257	320	232	232	232
Batumarmar	278	164	189	152	152	152
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Pamekasan (ton)	2.334	2.456	1.794	2.632	2.632	2.632

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun-tahun 2015 berjumlah 2.334, di tahun 2016 sebanyak 2.456, kemudian tahun 2017 mengalami penurunan signifikan sebesar 1.794, kemudian di tahun



2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.632. kemudian pada tahun 2020 jumlah ini tetap sama.

Tabel 2. 140 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Sub Sektor di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	12.336,89	11.836,89	10.633,20	11.233,20	11.487,70	14.981,33
Pademawu	1.736,74	1.736,75	5.015,40	3.226,20	4.545,20	3.390,50
Galis	71,40	71,40	166,60	592,10	673,00	488,25
Larangan	655,41	655,40	2.492,80	794,80	1.502,60	658,73
Kadur	N/A	N/A	N/A	105,50	224,00	90,95
Pasean	7.529,93	6.828,22	2.028,10	2.746,10	2.860,30	1.950,28
Batumarmar	2.061,54	2.061,54	1.352,90	856,20	593,30	1.032,26

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor pada tahun 2015 sampai 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif, kecamatan yang menghasilkan produksi ikan paling rendah, yakni Kecamatan Kadur, dan kecamatan dengan produksi ikan terbanyak adalah Kecamatan Tlanakan yang pada tahun 2020 mencapai angka 14.981,33.

Tabel 2.141 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pademawu	122	20	145	127	124	125
Galis	29	97	113	19	19	33
Larangan	42	47	44	44	44	44
Kadur	14	34	35	22	28	30
Pakong	86	30	37	37	16	15
Waru	123	66	68	68	7	7
Batumarmar	23	26	11	11	3	2
Pasean	13	19	11	11	4	4
Pamekasan	46	16	22	22	16	14
Propo	18	6	18	18	36	38
Palengaan	25	6	12	12	35	20
Tlanakan	21	6	9	8	6	19
Pegantenan	78	78	15	16	34	16
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Pamekasan (orang)	640	451	540	415	372	367

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021



Dari tabel diatas, bahwa jumlah rumah tangga perikanan budidaya menurut Kecamatan dan jenis budidaya di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 berjumlah 640 orang, kemudian penurunan di tahun 2016 yakni 451 orang, di tahun 2017 menjadi 540 orang, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebanyak 415 orang dan di tahun 2019 merupakan penurunan terbanyak sebesar 372 orang. Angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 367 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.142 Jumlah Perahu/ Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	663	596	431	523	523	523
Pademawu	533	498	588	602	602	602
Galis	79	54	71	88	88	88
Larangan	176	146	195	145	145	145
Kadur	0	0	0	11	11	11
Pasean	334	241	320	232	232	232
Batumarmar	278	259	189	152	152	152
Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pamekasan (unit)	2.063	1.794	1.794	1.753	1.753	1.753

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Sedangkan untuk jumlah perahu/kapal menurut kecamatan dan jenis kapal di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Jumlah tertinggi di tahun 2015 dan jumlah terendah di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 berjumlah 2.063 unit, kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 sebesar 1.794 unit dan menurun kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 1.753 unit.

Tabel 2.143 Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	2.334	2.456	1.794	2.632	2.632	2.632
Perikanan Budidaya	640	451	540	415	372	367



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Unit Pengolah Ikan (UPI)	904	952	248	248	365	389
Perikanan Pemasar/Pedagang Ikan	824	892	705	705	705	705
Banyaknya Desa Perikanan dan RTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (RTP)	4.702	4.751	3.287	4.000	4.074	4.093

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Pada lima tahun terakhir, jumlah Desa Perikanan dan RTP menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan dalam kondisi fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, di tahun 2015 sebesar 4.702, di tahun 2016 merupakan tahun tertinggi, yakni 4.751, kemudian mengalami penurunan dan menjadi tahun terendah di tahun 2017 sebesar 3.287, kemudian meningkat pada tahun 2018 4.000 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 4.074 dan di tahun 2020 sebesar 4.093.

Tabel 2.144 Jumlah Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	4.949	3.959	2.754	3.659	3.659	3,659
Pademawu	3.666	3.720	3.757	3.558	3.558	3,558
Galis	571	585	454	503	503	503
Larangan	1.415	804	1.246	762	762	762
Kadur	N/A	N/A	N/A	68	68	68
Pasean	2.244	1.434	2.044	1.185	1.185	1,185
Batumarmar	2.163	960	1.207	884	884	884
Banyaknya Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (nelayan/petani ikan)	15.008	11.462	11.462	10.619	10.619	10.619

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Jumlah nelayan dan petani ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020 cenderung menurun. Jumlah tertinggi di tahun 2015 dan



jumlah terendah di tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2015 berjumlah 15.008 nelayan/petani ikan, di tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 11.462, dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 10.619 nelayan/petani ikan.

Tabel 2.145 Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	663	596	431	523	523	523
Pademawu	533	498	588	602	602	602
Galis	79	54	71	88	88	88
Larangan	176	146	195	145	145	145
Kadur	0	0	0	11	11	11
Pasean	334	241	320	232	232	232
Batumarmar	278	259	189	152	152	152
Banyaknya Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (unit)	3.054	2.018	1.723	2.189	2.189	2.189

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan

Jumlah alat penangkap ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020, dengan jumlah paling besar di tahun 2015 sebanyak 3.054 unit, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2.018, kemudian penurunan paling besar di tahun 2017 sebesar 1.723 dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2.189, jumlah ini bertahan hingga tahun 2020.

Tabel 2.146 Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	55.94	25.41	32.95	8.90	108.24	153.80
Pademawu	235.70	294.67	165.59	113.97	137.16	31.17
Galis	336.09	1162.19	405.66	168.53	76.59	145.14
Larangan	334.30	275.13	471.25	253.10	265.80	231.04
Kadur	22.30	13.97	9.53	36.82	119.27	103.36
Pasean	20.77	6.70	34.96	9.44	6.99	2.02
Batumarmar	52.24	5.80	46.36	13.75	10.37	6.83
Pakong	102.52	16.05	66.90	14.91	6.04	25.02
Waru	132.31	19.29	518.78	19.01	7.77	5.20
Pamekasan	77.02	15.31	38.03	35.21	44.47	37.56



Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Propopo	56.46	30.72	26.57	60.96	73.18	118.18
Palengaan	33.78	9.75	23.78	27.39	60.99	50.99
Pegantenan	31.57	6.42	3.78	25.61	17.21	11.29
Produksi Ikan Menurut Kecamatan, Sub Sektor dan Tempat Budidaya di Kabupaten Pamekasan (ton)	1,491.00	1,881.41	1,844.12	787.59	934.08	921.60

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021

Jumlah produksi ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sampai 2020, dengan jumlah paling besar di tahun 2016 sebanyak 1.881,41, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.844,12, pada tahun 2018 sebanyak 787,59, pada tahun 2019 naik menjadi 934,08, dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 921,6.

Tabel 2.147 Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tlanakan	3,209.00	3,074.73	2,911.68	3,551.71	3,930.24	2,203.41
Pademawu	2,987.00	4,308.34	4,337.20	3,970.15	3,534.98	3,571.19
Galis	1,777.00	1,144.89	1,045.50	931.63	505.79	255.38
Larangan	1,432.00	409.08	398.54	533.38	1,359.30	259.75
Pakong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Pasean	3,457.00	4,635.82	4,635.82	1,211.74	453.39	441.57
Batumarmar	924.00	457.27	457.27	52.11	52.01	15.18
Pamekasan	95.86	30.94	30.55	28.14	59.08	18.62
Produksi Ikan Olahan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Pamekasan (ton)	13,881.86	14,061.05	13,816.54	10,278.86	9,894.78	6,769.53

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021

Produksi ikan olahan menurut kecamatan dan jenisnya di Kabupaten Pamekasan selama tahun 2015-2020 realisasinya menurun. Selama enam tahun dari tahun 2015-



2020 realisasi tertinggi pada tahun 2016 sejumlah 14.061,05 ton. Realisasi terendah adalah pada tahun 2020 sejumlah 6.679,53 ton.

Tabel 2.148 Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udang Vannamei	390,66	419,74	450,15	217,10	173,64	8,07
Bandeng	173,43	32,57	8,53	2,33	3,33	201,84
Gracillaria SP	0,00	814,89	229,44	13,01	0,00	0,00
Udang Putih	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
Udang Lainnya	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Rajungan	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00
Ikan Lainnya	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00
Produksi Ikan Tambak Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pamekasan (ton)	564,09	1.267,20	704,58	232,44	176,97	209,90

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Produksi ikan tambak menurut jenis ikan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbanyak pada tahun 2016 dan paling rendah di tahun 2019. Pada tahun 2015 berjumlah 564,09 ton, di tahun 2016 merupakan tahun terbanyak dengan jumlah 1.267,20, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 704,58 ton, di tahun 2018 sebanyak 232,44 ton dan penurunan produksi ikan tambak secara signifikan terjadi di tahun 2019 sebanyak 176,97 ton. Pada tahun 2020 jumlah ini kembali meningkat menjadi 209 ton.

Tabel 2.149 Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pademawu	2.316.248	0,00	1.514.986	1.403.865	756.611	28.800
Persentase Konsumsi Ikan	95,80	107,32	135,07	112,91	102,43	102,43
Jumlah Produksi ikan (Laut)	24.391,90	23.190,15	21.689,00	19.554,10	21.886,10	22.592,30
Jumlah Produksi ikan (Payau)	564,09	1.267,20	704,58	232,44	176,97	209,90
Jumlah peningkatan produksi	38,75	37,22	38,60	39,31	41,28	41,28



Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ikan						
Jumlah Konsumsi Ikan	125,08	109,26	101,18	78,47	111,03	112,94
Persentase Produksi ikan	95,80	107,32	135,07	112,91	102,43	100,41
Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (x Rp 1.000)	2.316.248	0,00	1.514.986	1.403.865	756.611	28.800

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Pamekasan, 2021

Sedangkan nilai produksi budidaya rumput laut menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu Kecamatan Pamekasan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 adalah tahun dengan produksi tertinggi sebesar 2.316.248, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 1.514.986, di tahun 2018 sebesar 1.403.865 dan di tahun 2019 sebesar 756.611, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 28.800.

Tabel 2.150 Jumlah dan Persentase Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi ikan (Laut)	Ton	24.391,9	23.190,15	21.689,0	19.554,1	21.886,1	22.592,30
Jumlah Produksi ikan (Payau)	Ton	564.092	1.267.202	704.584	232.4412	176.970	209.90
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kpt/thn	38,75	37,22	38,60	39,52	41,28	41,28
Persentase Produksi Ikan	%	125,08	109,26	101,18	78,47	111,03	111,03
Persentase Konsumsi Ikan	%	95,80	107,32	135,07	112,91	102,43	102,43

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2021

Jumlah dan produksi ikan laut cenderung menurun, realisasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 24.391,9 ton, terendah sebesar 19.554,1 ton di tahun 2018. Jumlah produksi ikan payau cenderung menurun, realisasi tertinggi



pada tahun 2016 sebesar 1.267,202 ton, terendah sebesar 209,90 ton di tahun 2020. Jumlah konsumsi ikan cenderung meningkat, realisasi terendah pada tahun 2016 sebesar 37,22 kg/kpt/thn dan tertinggi sebesar 41,28 kg/kpt/thn di tahun 2020. Persentase produksi ikan tertinggi sebesar 125,08 persen pada tahun 2015, terendah sebesar 78,47 persen di tahun 2018. Persentase konsumsi ikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 135,07 persen, dan yang terendah pada tahun 2015 sebesar 95,80 persen.

2.3.3.2 Pariwisata

Pamekasan adalah Ibu Kota Kabupaten Pamekasan. Salah satu kabupaten yang tersembunyi di Pulau Madura. Pamekasan berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Madura, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam objek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Pamekasan cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Kabupaten terpencil yang berada di pulau Madura ini memiliki potensi wisata yang yang menjanjikan. Karena pesona dan keindahan alam dan wisatanya yang sangat indah. Pamekasan sama halnya dengan kota lain di Pulau Madura juga punya potensi wisata yang dapat menarik wisatawan. Diantaranya ada 8 wisata yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luar, seperti **Wisata Api Tak Kunjung Padam**. Mungkin ini adalah nama tempat wisata



paling puitis di Indonesia. **Wisata Api Tak Kunjung Padam** berada di Desa Larangan, Tokol. **Air Terjun Durburgen** terletak di Kelurahan Kowel Kecamatan Kota Pamekasan, **Pantai Jumiang** ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Rawa Mangunan, **Pantai Talang Siring** berada di Desa Montok Kecamatan Larangan, **Vihara Avalokitesvara atau Kelenteng Kwan Im Kiong**, **Bukit Waru** berada di antara Desa Waru Barat dan Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, dan Gua Blaban berada di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar.

Tabel 2.151 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kunjungan Wisata (org)	N/A	9.783	30.412	30.903	55.012

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021*

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Pamekasan sebanyak 9.783 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 30.412 orang. pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 30.903 orang, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi 55.012 orang.

Tabel 2.152 Jumlah Objek Wisata Tahun 2018-2020




Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Objek Wisata Menurut kecamatan dan Jenis Wisata di Kabupaten Pamekasan, Tahun 2019	3	5	7




Sumber: *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021*




Objek Wisata Menurut kecamatan dan Jenis Wisata di Kabupaten Pamekasan diantaranya adalah 1) Wisata Bahari Talang Siring kec. Larangan, 2) Wisata Bahari Jumiang Kec.



Pademawu, 3) Ekowisata Mangrove Kec. Galis, 4) Wisata Alam Api Tak Kunjung Padam Kec. Tlanakan, 5) Wisata Buatan Selamat Pagi Madura (SPM) Kec. Pademawu, 6) Wisata Bukit Ratu Kec. Pagentenan, 7) Wisata Kampung Durian Kec. Pegantenan, 8) Wisata Alam bukit Kehi Kec. Kadur, 9) Wisata Alam Brukoh Hill Kec. Pakong.

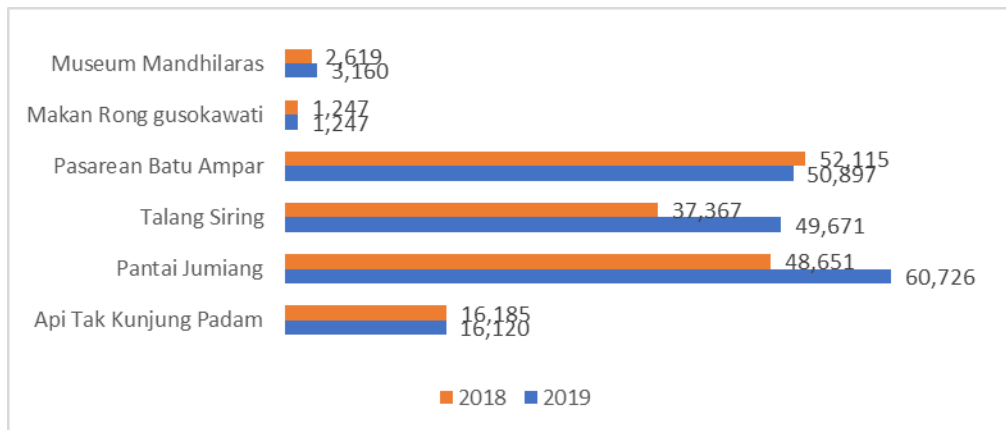
Tabel 2.153 Potensi Wisata Kabupaten Pamekasan

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan	Gambar
Wisata Pantai	Pantai Talang Siring	10 Km kearah Timur dari Kota Pamekasan	
	Pantai Jumiang	Mudah dijangkau kendaraan roda dua dan empat dengan jarak 15 Km dari pusat kota	
	Pantai Batu Kerbuy	Terletak di Kecamatan Pasean dengan luas 5 Ha dengan keindahan alam pantainya yang menarik. Nama Batu Kerbuy diambil dari sebuah batu yang berbentuk seperti kerbau yang terletak 8 Km dari pantai	

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan	Gambar
Wisata Alam	Api tak Kunjung Padam	Biasa disebut dengan Jangka, terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan yang berjarak 4 Km dari pusat kota dengan prasarana jalan yang cukup baik. Juga telah tersedia kios dan warung souvenir.	
Wisata Ziarah	Makam Keramat Pasarean Batuampar	Makam para ulama yang memiliki Karomatullah yang besar setara dengan para Waliyulloh atau Wali Songo. Terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo sekitar 15 Km dari pusat kota.	
	Vihara Alokitesvara	Berada di Kampung Candi Desa Monto' Kecamatan Galis (14 Km dari Kota Pamekasan), berdekatan dengan Pantai Talangsiring. Vihara terbesar kedua di Pulau Jawa. Salah satu keunikannya, yaitu di dalam komplek terdapat Musholla, Gereja dan Pura yang melambangkan kerukunan beragama	

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan	Gambar
	Situs Pangeran Ronggo Sukowati	Terletak di Kelurahan Kolpajung Kabupaten Pamekasan kira-kira 1 Km sebelah utara alun-alun Kota Pamekasan. Situs ini merupakan kompleks makam Pangeran Ronggo Sukowati dan keluarganya, merupakan raja Islam pertama dan pendiri Kabupaten Pamekasan. Situs Pangeran Ronggo Sukowati merupakan kompleks pemakaman Islam tertua di Pamekasan termasuk juga di wilayah Madura	
Wisata Budaya	Kerapan Sapi	Tradisi budaya masyarakat Madura yang biasanya digelar sehabis panen raya sebagai wujud rasa gembira atas keberhasilan yang diraih.	
	Sapi Sonok	Merupakan kontes pasangan sapi betina yang terdiri dari jenis ras Madura, dengan kriteria penilaian : kecantikan, penampilan, dan kekompakan dalam berlaga di arena kontes. di Kabupaten Pamekasan, lokasi kontes sapi sonok terletak di Desa Waru Barat Kecamatan Waru ± 34 Km arah utara dari Kota Pamekasan, dengan kondisi jalan aspal dapat ditempuh dengan	

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Keterangan	Gambar
	Upacara Petik Laut	<p>menggunakan sarana transportasi mobil angkutan umum.</p> <p>Merupakan pesta rakyat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas keberhasilannya dalam mengarungi lautan, dalam kegiatannya diawali dengan acara keagamaan dan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya setempat. Lokasi kegiatannya terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu ± 16 Km arah tenggara dari Kota Pamekasan, dapat ditempuh dengan sarana mobil angkutan umum/ojek dengan kondisi jalan aspal</p>	
Wisata Penunjang	Monumen Are' Lancor	<p>Terletak di jantung Kota Pamekasan di depan Masjid Agung Asyuhada' dan dikelilingi jalan yang berbentuk melingkar lafadz Allah. Merupakan monumen perjuangan kepahlawanan Rakyat Madura dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia</p>	



Gambar 2.13 Jumlah Pengunjung Domestik Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata di Kabupaten Pamekasan, 2018-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2020

2.3.3.3 Pertanian



Sektor Pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik.

Areal pertanian di Kabupaten Pamekasan seluas 64.919 hektar atau sekitar 81,94 persen dari total wilayah Pamekasan, sedangkan 18,06 persen sisanya berupa lahan bukan pertanian. Akan tetapi, areal pertanian yang tergolong lahan sawah hanya 28,93 persen, sedangkan sebagian besar (71,07%) areal pertanian di Kabupaten Pamekasan berupa



tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat dan kolam/tebat/empang.

Pada musim tanam tahun 2015, produksi padi sawah mencapai 105.222 ton dari luas panen sekitar 17.876 hektar. Dengan demikian produktivitas padi sawah mencapai 5,9 ton per hektar. Sedangkan luas panen padi ladang sekitar 8.725 hektar yang mampu memproduksi 52.698 ton gabah. Artinya produktivitas padi ladang sekitar 6,04 ton per hektar.

Sektor unggulan di Kabupaten Pamekasan adalah tanaman jagung, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada musim tanam 2015, luas panen tanaman ini mencapai 38.508 hektar dengan produksi sekitar 93.794 ton. Produksi terbesar ketiga setelah padi dan jagung adalah tanaman ubi kayu. Sejak lima tahun terakhir, produksi ubi kayu merupakan yang terbesar diantara tanaman palawija yang lain, hingga mencapai 25.358 ton. Agar dapat lebih meningkatkan perekonomian setempat, maka perlu diketahui komoditas unggulannya untuk menentukan kegiatan agribisnis pascapanen dan pengolahan yang tepat.

Sektor Pertanian yang terdiri dari Sub Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Pamekasan, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pamekasan, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah.

Beberapa tanaman perkebunan yang lain, produksinya masing-masing hanya dibawah 500 ton. Jika diurutkan mulai dari produksi terbesar, tanaman tersebut adalah Cabe



Jamu, Siwalan, Kapuk, Asam Jawa, Pinang, Jambu Mete, Lada dan Kopi.

2.3.3.3.1 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan terhadap PDRB

Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi komoditi: padi dan palawija. Sub Sektor Hortikultura meliputi tanaman buah, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias, sedangkan Sub Sektor Perkebunan meliputi tembakau, tebu, cabe jamu, kelapa, jambu mete dan tanaman perkebunan lainnya.

Tabel 2.154 Distribusi Persentase Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,73	6,00	5,83	5,52
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	17,76	17,67	17,49	16,80
Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya (Ton)	282.611	304.675	281.292	319.730

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan, 2017

Tabel 2.155 Produksi Padi, Produksi Jagung dan Kedelai dan Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (ton)	93.793	135.987	87.668	94.273	91.101
Produksi Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan (ton)	1.966	1.249	842	1.221	321
Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya (Ton)	281.292	319.730	262.061	274.372	206.368



Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)	266.962	290.337	40.236	475.118	354.783

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya, jagung dan kedelai mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton. Selain itu, masih belum optimalnya Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan tahun 2019 yaitu 91.101 (Jagung) dan 321 (Kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 (Jagung) dan 1.221 (Kedelai). Dalam produksi tanaman sayuran menurut Kecamatan pada tahun 2019 sebesar 354.783 ton. Produksi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 475.118 ton.

Tabel 2.156 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha)	4.533	5.335	5.439	5.810	5.453	5.921

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan Kab. Pamekasan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, berkurangnya Luas lahan panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman, dilihat dari pada tahun 2019 luas lahan seluas 5.453 Ha. Luas lahan

tersebut berkurang dibandingkan dari tahun 2018, yakni seluas 5.810 Ha. Namun pada tahun 2020 luas tanah sebesar 5.921. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yakni 5.453 Ha.

2.3.3.3.2 Potensi Komoditi

Sesuai dengan tipe iklim, tanah dan topografi, maka Wilayah Kabupaten Pamekasan mempunyai potensi untuk komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang spesifik lokasi.

Tabel 2.157 Potensi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pamekasan

Golongan	Komoditi
Padi dan Palawija	Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Kedelai.
Buah –buahan	Jeruk, Mangga, Jambu, Rambutan, Pisang, Alpukat, Durian, Pepaya, Sawo, Nanas dan Salak.
Sayur - sayuran	Bawang Merah, Bawang Daun, Kacang Panjang, Lombok, Tomat, Buncis, Terong, Ketimun, Kangkung dan Bayam.
Perkebunan semusim	Tembakau, Tebu, Cabe Jamu
Perkebunan (Tanaman Keras)	Kelapa, Jambu Mete, Kapuk Randu

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.3.3.3.3 Potensi Produksi Tanaman Buah

Hasil produksi tanaman buah yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan memiliki potensi untuk komoditi pertanian tanaman buah.

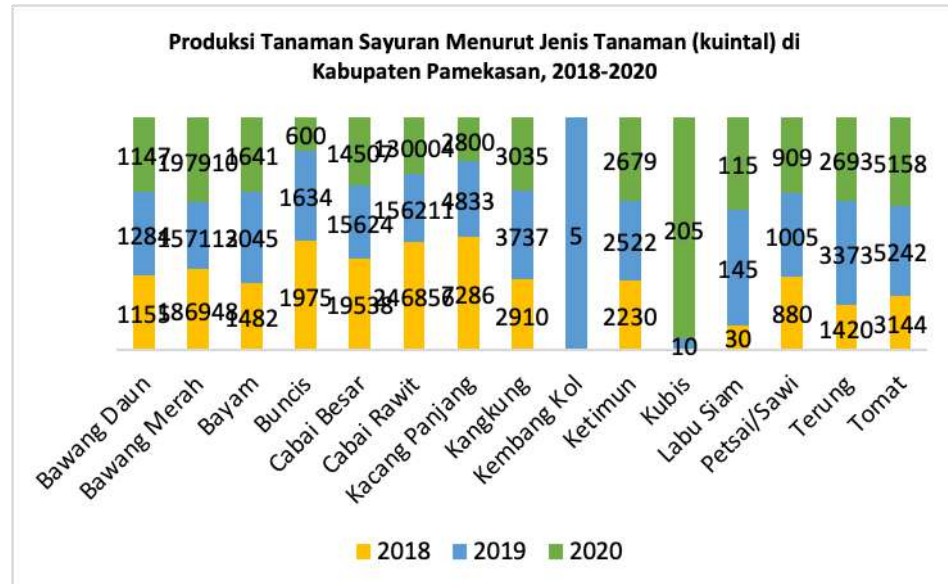
Tabel 2.158 Jumlah Produksi Tanaman Buah di Kabupaten Pamekasan 2019

Nama Buah	Satuan	Hasil Produksi
Mangga	Kuintal	142,023,00
Durian	Kuintal	4,591,00
Pisang	Kuintal	24,850,80
Jeruk	Kuintal	27,143,00
Pepaya	Kuintal	150,027,00
Salak	Kuintal	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.3.3.3.4 Tanaman Sayuran

Produksi tanaman sayuran memiliki nilai yang penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan lingkungan, karena pemanfaatan dari hasil produksi dari tanaman sayuran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan.



Gambar 2.14 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

2.3.3.3.5 Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim

Pada produksi tanaman sayuran dan buah-buahan pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan pada musimnya, sehingga kenkan ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas produksi pada tahun yang akan datang. Berikut uraian Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim:



Tabel 2.159 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Pamekasan, 2018-2020

Jenis Tanaman	2018	2019	2020
Sayuran			
Bawang Daun	1.155,00	1.284,00	1.147,00
Bawang Merah	186.948,00	157.113,00	197.910,00
Bawang Putih	-	-	-
Bayam	1.482,00	2.045,00	1.641,00
Buncis	1.975,00	1.634,00	600,00
Cabai Besar	19.538,00	15.634,00	14.507,00
Cabai Rawit	246.856,00	156.211,00	130.004,00
Cabai	266.394,00	171.835,00	-
Jamur	-	-	-
Kacang Merah	-	-	-
Kacang Panjang	7.286,00	4.833,00	2.800,00
Kangkung	2.910,00	3.737,00	3.035,00
Kembang Kol	-	5,00	-
Kentang	-	-	-
Ketimun	2.230,00	2.522,00	2.679,00
Kubis	-	10,00	205,00
Labu Siam	30,00	145,00	115,00
Lobal	-	-	-
Paprika	-	-	-
Petsai	880,00	1.005,00	909,00
Terung	1.420,00	3.373,00	2.693,00
Tomat	3.144,00	5.242,00	5.158,00
Wortel	-	-	-
Buah-buahan			
Blewah	300,00	-	-
Melon	-	-	1.045,00
Semangka	9.965,00	10.731,00	9.732,00
Stoberi	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021

2.3.3.3.6 Hortikultura

Dalam memaksimalkan peningkatan hasil produksi luas panen tanaman sayuran Kecamatan dan jenis tanaman (ha) di Kabupaten Pamekasan mengalami beberapa peningkatan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2019 hingga 2020.

**Tabel 2.160 Produksi Luas Panen Tanaman Sayuran
Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten
Pamekasan, 2019-2020**

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Rawit	
	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5
Tlanakan	3,00	2,00	250,00	327,00
Pandemawu	10,00	10,00	1,00	1,00
Galis	8,00	15,00	4,00	2,00
Larangan	-	2,00	28,00	58,00
Pamekasan	4,00	-	-	-
Propopo	11,00	9,00	12,00	21,00
Palengan	11,00	10,00	212,00	257,00
Pegantenan	16,00	4,00	304,00	354,00
Kadur	19,00	9,00	242,00	242,00
Pakong	2,00	2,00	1,00	5,00
Waru	293,00	320,00	455,00	358,00
Batumarmar	1.543,00	2.025,00	504,00	618,00
Pasean	367,00	318,00	452,00	350,00
Kabupaten Pamekasan	2.287,00	2.726,00	2.465,00	2.887,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.3.3.4 Perindustrian

Sektor Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan. Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016 Sektor Industri pengolahan menyumbang 6,23% terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Sektor Perdagangan menyumbang 21,05% terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan yaitu terbesar kedua setelah Sektor Pertanian.

Batik Pamekasan yang lebih dikenal sebagai batik Madura sudah diakui oleh masyarakat, baik masyarakat di Pulau Madura sendiri maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Motif dan warna batik yang cerah merupakan ciri khas Batik Madura yang pada umumnya sudah banyak dikenal. Seiring dengan pertumbuhan IKM Batik di

Kabupaten Pamekasan yang semakin meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan diikuti dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk Batik Pamekasan menyebabkan semakin bertambahnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan IKM Batik di Kabupaten Pamekasan adalah dengan melakukan pembinaan manajerial IKM Batik, Fasilitasi Pengembangan Produk IKM dan Pembangunan Sentra-sentra IKM Batik setiap wilayah. Efortasi tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (*prime mover*) juga dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Tabel 2.161 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2020

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri	0,49	0,22	0,40	0,26	0,71	0,78	0,93	13,45
Jawa Timur	-	-	0.47	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Pamekasan, 2021

Jumlah perusahaan industri di Pamekasan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2020 yang berada pada rentang pertumbuhan 0,49 sampai dengan 13,45. Perkembangan jumlah industri yang semakin meningkat tersebut berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran di Pamekasan.

Tabel 2.162 Banyaknya Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit Usaha (Unit)	14.346	14.404	14.441	14.543	14.654	14.792	16,782
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	46.305	46.707	47.153	47.605	47.770	48.072	48.584

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021



Sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Unit Usaha mandiri masyarakat menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Jumlah unit usaha pada tahun 2020 mencapai 16,782 unit usaha, sebuah perkembangan yang baik untuk terus ditingkatkan. Sementara pada saat yang sama terdapat 48.584 tenaga kerja aktif yang terserap dalam unit usaha tersebut. Dan jumlah nilai investasi 675.256.650.32. Penguatan dan pengembangan Unit Usaha mandiri akan semakin memperkokoh dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Tabel 2.163 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

No	Nama Sentra	Usaha	Tenaga Kerja
1.	Anyaman Tikar	39	53
2.	Batik Tulis	59	296
3.	Garam Curah	14	30
4.	Jamu	30	63
5.	KeripikSingkong	200	426
6.	Gula Siwalan	2	3
7.	Mebel	27	41
8.	Pande Besi	11	22
9.	Petis Ikan	52	69
10.	Ramuan Kopi Bubuk	14	47
11.	Makanan Lainnya	453	941
Jumlah		901	1991

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, 2021

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Usaha untuk peremajaan pasar rakyat dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pasar rakyat, meningkatkan layanan dasar pasar dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, dengan pertimbangan:

- a) Pemerintah Kabupaten Pamekasan memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan



umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

- b) Tidak tersedia dana yang cukup dalam APBD Kabupaten Pamekasan untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Tabel 2.164 Jumlah Industri Usaha Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah industri usaha	14.404	14.441	14.543	14.656	14.792	16.782

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Jumlah industri usaha yang ada di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah industri usaha di kabupaten Pamekasan berjumlah 14.404 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 14.441 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14.543 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha mencapai 14.656 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14.792. Jumlah ini kembali mengalami peningkatan menjadi 16.782 pada tahun 2020. Faktor Pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Tabel 2.165 Persentase Pertumbuhan Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Industri	0,4	0,26	0,71	0,78	0,93	13,45

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 persentase pertumbuhan industri sebesar 0,40%, kemudian tahun 2016 menjadi 0,26% dan meningkat kembali tahun 2017 menjadi 0,71%. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 0,78% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,93%. Angka ini

kembali mengalami peningkatan menjadi 13,45 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Pamekasan berkembang dengan baik.

Tabel 2.166 Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah IKM yang Melakukan Inovasi Produk	200	250	320	220	260	315

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk mencapai 200 IKM, kemudian pada tahun 2016 menjadi 250 IKM. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 320 IKM, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 220 IKM dan pada tahun 2019 menjadi 260 IKM. Ketersediaan anggaran pembinaan menjadi faktor pendukung capaian ini. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 315 IKM. Ketersediaan anggaran pembinaan menjadi faktor pendukung capaian ini.

Tabel 2.167 Persentase Kerjasama Produksi Antar IKM yang Telah Dibina Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kerjasama Produksi antar IKM yang Telah Dibina	100	100	100	100	100	100

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina di Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 100%, capaian ini stabil sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Hal yang menjadi faktor pendukung capaian ini adalah karena pembinaan yang dilaksanakan.

**Tabel 2.168 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	3,0	3,2	40,51	26,8	26,8	28,43

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 3,0% kemudian pada tahun 2016 menjadi 3,2 %. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 40,51 %, kemudian pada tahun 2018 menjadi 26,8 % dan pada tahun 2019 menjadi 26,8 %. Pada tahun 2020 28,45%. Faktor pendorong peningkatan tersebut karena pelaksanaan program pengembangan IKM.

**Tabel 2.169 Banyaknya Perusahaan Industri di
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyaknya Perusahaan Industri di Kabupaten Pamekasan	14.404	14.441	14.543	14.656	14.729	14.920

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Banyaknya perusahaan industri di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah industri usaha di kabupaten Pamekasan berjumlah 14.404 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 14.441 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14.543 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha sudah mencapai 14.656 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14.792. angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 14.920. Faktor Pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha.



Tabel 2.170 Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga kerja	46.707	47.153	47.605	47.770	48.072	48.584

Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020*

Banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan berjumlah 46.707 tenaga kerja, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 47.153 tenaga kerja dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 47.605 tenaga kerja. Pada tahun 2018 tenaga kerjasudahmencapai 47.770 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 48.072. pada tahun 2020 jumlah ini kembali mengalami peningkatan menjadi 48.584. Faktor pendorongnya adalah peningkatan jumlah industri dan kapasitas produksi.

Tabel 2.171 Jumlah Sentra Industri Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan	158	263	277	286	286	286

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah sentra industri di Kabupaten Pamekasan berjumlah 158 sentra industri, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 263 sentra industri dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 277 sentra industri. Pada tahun 2018 sentra industri sudah mencapai 286 sentra industri, pada tahun 2019 tetap 286 sentra industri dan pada tahun 2020 juga

tetap 286 sentra industri sentra industri. Faktor pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perijinan.

Tabel 2.172 Unit Usaha Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unit usaha	3.078	3.795	8.919	8.956	9.085	9.097

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Jumlah Unit Usaha yang ada di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah Unit Usaha di Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.078 usaha, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.795 usaha dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 8.919 usaha. Pada tahun 2018 industri usaha sudah mencapai 8.956 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 9.085. capaian ini kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 9.097 unit usaha di Kabupaten Pamekasan. Faktor pendorongnya adalah prospektif, kemudahan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Tabel 2.173 Tenaga Kerja Industri Unggulan Batik Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga kerja industri unggulan batik	3.804	6.526	6.526	6.536	6.550	6.717

Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021*

Banyaknya tenaga kerja industri unggulan batik di Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja industri unggulan batik di Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.804 tenaga kerja, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.526 tenaga kerja dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 6.526 Tenaga kerja. Pada tahun 2018 Tenaga kerja sudah



mencapai 6.536 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 6.550 tenaga kerja. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6.717 tenaga kerja. Faktor Pendorongnya adalah peningkatan jumlah industri dan kapasitas produksi.

2.3.3.5 Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) aktif yang mendorong wawasan kebangsaan dalam 5 tahun terakhir berada pada kondisi stagnan di tahun 2015 sampai 2018, yakni 115 ormas, akan tetapi mengalami penurunan yang sengketa drastis di tahun 2019 sebesar 47 ormas. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 Banyak Ormas yang sudah masa berakhir SKT habis dan tidak memperpanjang lagi. Namun pada tahun 2020 jumlah ormas yang ada di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan menjadi 50 ormas. Untuk kondisi kegiatan politik daerah di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 kondisinya stagnan yakni berada pada angka 2 kegiatan. Hal ini dikarenakan indeks partisipasi masyarakat terhadap politik masih rendah. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kondisi stagnan dari tahun 2015 sampai 2020, yakni sebesar 2 kegiatan. Kondisi stagnan tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi Ormas dan LSM terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.174 Jumlah Ormas, Kegiatan Politik Daerah, dan Kegiatan Pembinaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ORMAS aktif yang mendorong wawasan Kebangsaan	Jumlah	115	115	115	115	47
Kegiatan Politik Daerah	Jumlah	2	2	2	2	2
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Jumlah	2	2	2	N/A	N/A

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pamekasan

2.3.3.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.175 Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan	802,424	807,904	812,728	820,937	825,465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020

Jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 terdapat 802,424 jiwa. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 807,904 jiwa. Pada tahun 2017 mencapai 812,728 jiwa. Pada tahun 2018 menjadi 820,937 jiwa. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 825,465 jiwa.

Tabel 2.176 Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kepadatan Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	No Data	No Data	890,275	No Data	922,034

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020

Kepadatan penduduk dan rumah tangga menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan mengalami

peningkatan. Pada tahun 2017 berjumlah 890,275. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 922,034.

Tabel 2.177 Presentase Penduduk Berakte Lahir Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penduduk berakte lahir	33,19	37,11	38,38	41,33	42,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020

Persentase penduduk berakte lahir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 33,19%, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 37,11%, meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 38,38%, pada tahun 2018 sebesar 41,33% sampai pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,86%.

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Capaian Kabupaten/Kota				48,42%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	757577	757450	127	100,00%
	1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	65	65	0	100,00 %
	2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5	5	0	100,00 %
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	99	99	0	70,54%
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	99	70	2929	70,71 %



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian	
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	22	20	22	90,91 %
	3.	Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	54	27	2727	50,00 %
3.		Pelayanan informasi rawan bencana	1	1	0	20,00%
	1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
	2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0%
	3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0%
	4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1	1	0	100,00 %
	5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
4.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0,00%
	1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0%
5.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00%



No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00 %
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	65	65	0	100,00 %
3.	Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	65	65	0	100,00 %
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	65	65	0	100,00 %
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	65	65	0	100,00 %
6.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	65	65	0	100,00 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65	65	0	0,00%
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	0	0	0	0%
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0%

2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Tabel 2.178 Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme	%	100	100	100	100	100	80

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021

Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Pamekasan mengalami stagnan dengan pencapaian yang baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2015-2019 mencapai 100%. Namun di tahun 2020 turun menjadi 80%.

Tabel 2.179 Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021

Persentase Perangkat Daerah yang tertata kelembagaannya mengalami stagnan dengan pencapaian yang baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2016-2020 mencapai 100%. Faktor pendorong yang menyebabkan persentase Perangkat Daerah yang tertata kelembagaannya mencapai 100% adalah adanya regulasi yang mendasarinya dan kesesuaian tugas dan fungsi dengan program prioritas pembangunan daerah.



Tabel 2.180 Nilai LPPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai LPPD	Skor	-	2,9447	2,665	3,1630	n.a	n.a

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021

Nilai LPPD mengalami kenaikan terutama pada 2017 ke 2018 Pada tahun 2016 nilai LPPD mencapai skor 2.9447. Pada tahun 2017 nilai LPPD mengalami penurunan menjadi 2.665. Penyebab kenaikan nilai LPPD adalah ketepatan dan validitas dalam pelaporan data Perangkat Daerah. Sedangkan disamping lain skor untuk 2019 dan 2020 belum keluar dan belum adanya aplikasi LPPD yang menunjang.

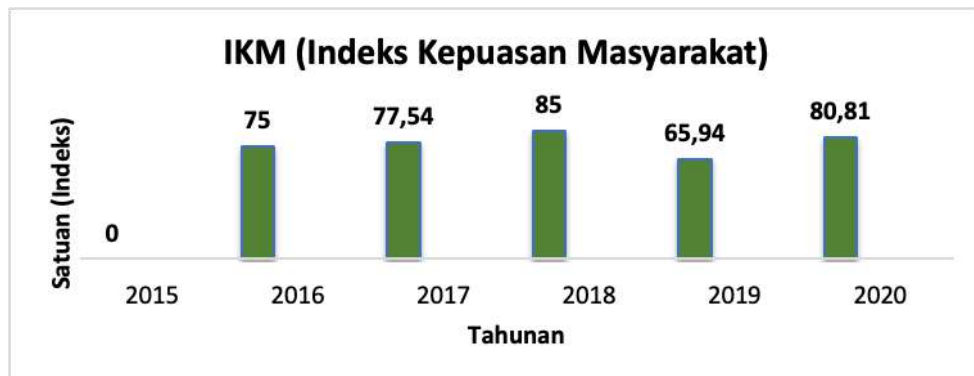
Tabel 2.181 Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya	%	85	85	90	98	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021

Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya menunjukkan angka yang tetap pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dan 2016 mencapai angka yang sama yaitu 85%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 90%. Pada tahun 2018 mencapai 98%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100% serta pada tahun 2020 dalam kondisi stabil yakni tetap 100%. Faktor pendorong naiknya persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya adalah karena kebutuhan Perangkat Daerah dalam menyusun RKA, perlunya dokumen ini untuk mengurangi ketidaksesuaian harga belanja barang dan jasa

pemerintah yang ada di Perangkat Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan yang sesuai petunjuk teknisnya yaitu beberapa item harga yang tidak sesuai dengan harapan Perangkat Daerah.



Gambar 2.15 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 memiliki indeks 75. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,54. Pada tahun 2018 mencapai 85. Faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan IKM Kabupaten Pamekasan adalah karena pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan SKM, melakukan survei kepuasan secara periodik setiap tahun sekali terhadap unit-unit pelayanan publik. Faktor penyebab rendahnya IKM adalah karena Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya, motivasi dan semangat Perangkat Daerah dalam melakukan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga perubahan peningkatan kualitas pelayanan masih rendah dan berdampak terhadap nilai kepuasan masyarakat yang diperoleh, survei kepuasan masih menggunakan metode yang menggabungkan antara ilmiah dan regulasi, sehingga



hasil survei belum tepat dan akurat untuk mengukur nilai sesungguhnya.

Tabel 2.182 Jumlah Kebijakan Daerah yang Di Terbitkan dalam 1 Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kebijakan Daerah yang di Terbitkan Dalam 1 Tahun	Jumlah	-	13	18	17	15	13

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2021

Jumlah Kebijakan Daerah yang di terbitkan dalam 1 tahun mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 diterbitkan 13 kebijakan. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 18. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 17. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 13. Faktor penyebab menurunnya jumlah kebijakan daerah yang diterbitkan dalam 1 tahun yaitu karena kurangnya sumber daya manusia di bagian perekonomian.

2.3.7.2 Sekretariat DPRD

Tabel 2.183 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
PPP	Orang	9	9	9	9	9	12
PKB	Orang	5	5	5	5	5	7
PBB	Orang	5	5	5	5	5	3
P. Demokrat	Orang	5	5	5	5	5	6
PAN	Orang	5	5	5	5	5	2
P. Golkar	Orang	4	4	4	4	4	3
P. Nasdem	Orang	4	4	4	4	4	2
PKS	Orang	3	3	3	3	3	5
P. Gerindra	Orang	3	3	3	3	3	4
PDIP	Orang	2	2	2	2	2	1
Laki-laki	Orang	42	42	42	42	43	43
Perempuan	Orang	3	3	3	3	2	2

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021



Jumlah anggota DPRD menurut partai politik di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 43 pada tahun 2020.

Tabel 2.184 Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketua	Orang	1	1	1	1	1	1
Wakil Ketua	Orang	3	3	3	3	3	3
Komisi I	Orang	10	10	10	10	10	9
Komisi II	Orang	10	10	10	10	10	11
Komisi III	Orang	11	11	11	11	11	11
Komisi IV	Orang	10	10	10	10	10	10

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021

Susunan Pimpinan dan Komisi DPRD Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015-2019 sama, tetapi formasinya berbeda pada tahun 2020.

Tabel 2.185 Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Kegiatan	Kegiatan	16	16	16	16	17	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021

Kegiatan DPRD Kabupaten Pamekasan menurut jenis kegiatan di tahun 2019 meningkat sejumlah 17 kegiatan. Kemudian, di tahun 2020 meningkat menjadi 30 kegiatan.

Tabel 2.186 Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan Tahun 2015-2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan	Keputusan	23	17	27	29	16	14

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan, 2021



Keputusan DPRD Kabupaten Pamekasan Menurut Jenis Keputusan realisasinya cenderung fluktuatif. Realisasi tertinggi adalah pada tahun 2018 sejumlah 29 keputusan dan yang terendah di tahun 2020 sejumlah 14 keputusan.

2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan

Tabel 2.187 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-	-	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sistem Informasi Manajemen Pemda (Jumlah)	-	-	1	2	3

Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan, Tahun 2020

Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah menyusun dokumen perencanaan RPJPD kemudian sudah menyusun dokumen perencanaan berupa RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, kemudian Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga sudah menyusun dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda. Terkait dengan sistem Informasi Manajemen Pemda jumlah laporan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penambahan satu angka di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sejumlah 1, di tahun 2017 menjadi 2, sampai pada tahun 2019 menjadi 3.

2.3.5.2 Keuangan

Tabel 2.188 Persentase SP2D yang Terbit Kurang Dari 2 Hari Tahun Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari (%)	35	35	30	30	25	25

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, 2021*

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 hari memiliki capaian yang cukup fluktuatif, pada tahun 2015 hingga 2016 angkanya mencapai 35%, kemudian pada tahun 2017 angkanya menurun menjadi 30%, angka ini bertahan kembali pada tahun 2018. Pada tahun 2019 capaiannya mencapai 25%. Dan Pada tahun 2020 capaiannya mencapai 25%.

Tabel 2.189 Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD <50% Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD \leq 50%	53,57	54,15	57,4	58,44	54,46	52,10

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, 2021*

Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) APBD \leq 50% memiliki capaian yang beragam. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 53,57%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 54,15% dan pada tahun 2017 angkanya mencapai 57,4%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 58,44% dan capaian pada tahun 2019 adalah 54,46%. Dan capaian pada tahun 2020 52,10%.



Tabel 2.190 Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD >90% Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase realisasi belanja langsung SKPD \geq 90%	84,03	81,81	77,04	72,48	76,19	48.89

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, 2021*

Persentase realisasi belanja langsung SKPD \geq 90% memiliki capaian yang beragam. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 84,03%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 81,81% dan pada tahun 2017 angkanya mencapai 77,04%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,48% dan capaian pada tahun 2019 adalah 76,19%. Namun capaian turun pada tahun 2020 sebesar 48.89%.

Tabel 2.191 Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Benar	86,2	90,28	93,9	97,28	100	100

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, 2021*

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) di Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2015 realisasinya mencapai angka 86,2%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 90,28%. Pada tahun 2017 kemudian menjadi 93,9% dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 97,28%. Pada tahun 2019 dan 2020 capaian Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebesar 100%.



Tabel 2.192 Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI	100	100	100	100	100	100

Sumber : *Badan Keuangan Daerah, 2021*

Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI capaiannya stabil dari tahun 2015 hingga tahun 2020, capaian dianggap 100% Wajar Sesuai SAP Berbasis AkruaI.

2.3.5.3 Kepegawaian

Tabel 2.193 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2020

Indikator	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan	5308	3402	5045	3308	4394	2984	4109	2861	3921	2922	3756	3059
Jumlah	8710		8353		7378		6970		6843		6815	

Sumber: *BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021*

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat dari Jumlah pada tahun 2020 sebesar 6816, jumlah tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 6845.



Tabel 2.194 Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis (%)	97%	79%	79%	74%	86%	85%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021

Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Namun, jika dilihat pada tahun 2020 sebesar 85% hal ini lebih rendah dari tahun 2019 yakni sebesar 86%. Tetapi, jika dilihat pada tahun 2020 yang sebesar 85%, artinya bahwa terdapat 15% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis. Selain itu, juga masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan.

Tabel 2.195 Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial (%)	53%	56%	50%	51%	52%	61%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021

Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial dari tahun 2015 yakni 53%, di tahun 2016 menjadi 56%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 50%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sebesar



51%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 52%, sampai pada tahun 2020 mencapai 61%.

Tabel 2.196 Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Terdapat Hukuman Disiplin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin (%)	99,9%	99,8%	99,9%	99,7%	99,6%	99,8%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin seperti tabel di atas menunjukkan bahwa masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%.

Tabel 2.197 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu, Umum, dan Jabatan Struktural di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	5.780	5.518	4.990	4.779	4.746	4.826
Jumlah Pemangku Jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah (orang)	2.051	1.981	1.550	1.405	1.419	1255



Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan struktural pada instansi pemerintah (orang)	879	854	838	786	678	636

Sumber: BKPSDM Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 4.826 orang, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2019 yakni 4.746, pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 4.826 orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 1.255 orang, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 1.419 orang. Jumlah pemangku jabatan struktural pada instansi pemerintah tahun 2020 sebesar 636 orang, jumlah ini lebih kecil daripada tahun 2019 yakni sebesar 678 orang.

2.3.6 Fokus Layanan Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1 Pengawasan

Tabel 2.198 Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	84.86%	85.18%	84.15%	79.85%	83.24%	90,00%
Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	8	13	7	20	22	4
Jumlah Temuan BPK	Temuan	13	12	13	24	12	10

Sumber: Inspektorat Daerah, Tahun 2021



2.3.6.1.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 tercatat 84.86%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 85.18%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84.15%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 79.85%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 83.24% sampai pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 90,00%. Faktor pendorong yang menyebabkan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan yaitu meningkatkan koordinasi dengan tim auditor terkait temuan yang belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti, asistensi/pendampingan atas hambatan dalam tindak lanjut temuan, penyusunan rencana aksi tindak lanjut dan pemantauan progress rencana aksi.

2.3.6.1.2 Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai

Kasus pelanggaran disiplin pegawai mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 tercatat sejumlah 8 kasus. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 13 kasus. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 20 kasus. Pada tahun 2019 mencapai 22 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4 kasus. Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran disiplin pegawai adalah belum optimalnya pemberian *reward* dan *punishment*, promosi dan rotasi belum sepenuhnya berbasis kinerja.

2.3.6.1.3 Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 mencapai jumlah 13. Pada tahun 2016 mencapai jumlah 12. Pada tahun 2017 mencapai jumlah 13. Pada tahun 2018

mengalami peningkatan menjadi 24. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12 serta sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 10. Faktor pendorong meningkatnya temuan BPK adalah adanya komitmen kepala daerah dan Perangkat Daerah, optimalisasi peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni layanan konsultasi, adanya kerjasama dalam bentuk asistensi, bimbingan teknis dan evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan serta Lembaga Vertikal lainnya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

2.3.7 Fokus Kewilayahan

2.3.7.1 Kecamatan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 yaitu 97,78%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 98,98%. Pada tahun 2017 menjadi 98,70%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 92%. Pada tahun 2019 menjadi 69,98%. Faktor penghambat yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar turun adalah karena kurangnya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral.

Tabel 2.199 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batumarmar	%	97,78	98,98	98,70	92	69,98

Sumber: Kecamatan Batumarmar, Tahun 2020



b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016 mencapai 81.42%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 79.613%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 83.24%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 81.25%. Faktor pendorong yang menyebabkan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis adalah antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk mendapatkan pelayanan dan terjadi peningkatan kebutuhan dalam pelayanan sehingga mendapatkan penilaian yang sangat baik dari masyarakat. Faktor penghambat yang menyebabkan turunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis adalah kurang mendapatkan apresiasi yang maksimal dari masyarakat perihal pelayanan dan terdapat penurunan apresiasi masyarakat sehingga ada penilaian yang di bawah standar.

Tabel 2.200 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Galis	%	n/a	81.42	79.613	83.24	81.25	81.25

Sumber: Kecamatan Galis, Tahun 2020

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur

Indeks Kepuasan Masyarakat Kadur mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kondisi stagnan kemudian meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2015 mencapai 90.87. Pada tahun 2016 mengalami



penurunan menjadi 80.90. Pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 90.70. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.80. Faktor penghambat meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kadur disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik dengan lintas sektoral.

Tabel 2.201 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kadur	90.87	80.90	90.70	90.70	90.80

Sumber: Kecamatan Kadur, Tahun 2020

d. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 yaitu 74%. Pada tahun 2016 mencapai 76%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 77%. Pada tahun 2018 tercatat 86%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 87%. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Larangan disebabkan oleh faktor pendorong berupa dukungan kinerja aparatur dan dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat yaitu belum ada regulasi *reward* dan *punishment* bagi aparatur pelayanan publik.

Tabel 2.202 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Larangan	%	74	76	77	86	87

Sumber: Kecamatan Larangan, Tahun 2020



e. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 mencapai 90.67. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 88.21. Faktor penghambat yang menyebabkan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pademawu berupa minimnya pelayanan yang tersedia, dan minimnya pemahaman SDM yang bertugas di pelayanan.

Tabel 2.203 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu	indeks	NA	NA	NA	90.67	88.21

Sumber: Kecamatan Pademawu, Tahun 2020

f. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 97,48%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 81,57%. Pada tahun 2019 mencapai 97,48%. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor pendorong berupa kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik, aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, sebagian aparatur telah mengetahui pembagian organisasi dan uraian tugas yang tertera pada SOP, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan,



sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya kemampuan sumber daya aparatur, kondisi kerja (suasana kerja yang tidak kooperatif, kobabotarif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparat dan minimnya fasilitas kerja). Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu mencapai 3,75% hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya aparatur dan kondisi kerja (suasana kerja yang tidak kooperatif, kolaboratif, kurangnya kejelasan tugas dan tanggungjawab masing-masing aparat dan minimnya fasilitas kerja).

Tabel 2.204 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pamekasan Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pademawu	Indeks	NA	NA	97.48	81.57	97.48	3,75

Sumber: Kecamatan Pamekasan, Tahun 2021

g. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 yaitu 85.14%. Pada tahun 2018 mencapai 85.24%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 85.43%. kemudian angka ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 85,86%. Faktor pendorong meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Proppo disebabkan oleh faktor pendorong berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan, aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, kemampuan dan keterampilan, dan kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.



Tabel 2.205 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Proppo	%	n.a	n.a	85.14	85.24	85.43	85,86

Sumber: Kecamatan Proppo, Tahun 2020

h. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 sebesar 74,00% dan pada tahun 2020 sebesar 76,92%. Hal ini terdorongkan dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan pelayanan.

Tabel 2.206 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasean	%	n/a	n/a	n/a	n/a	74,00%	76,92%

Sumber: Kecamatan Proppo, Tahun 2021

i. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 namun realisasinya tidak lebih dari tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasinya sebesar 109,82, tahun 2019 sebesar 80,47 dan pada tahun 2020 sebesar 82.

Tabel 2.207 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakong	Indeks	81,19	81,548	109,05	109,82	80,47	82

Sumber: Kecamatan Pakong, 2021

j. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru cenderung fluktuatif, mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, namun mengalami penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2019. Meningkat kembali pada tahun 2020, namun peningkatan ini tidak lebih besar dari tahun 2018. Realisasi di tahun 2018 sebesar 99,80, tahun 2019 menurun sebesar 83,58, dan di tahun 2020 meningkat sebesar 88,32.

Tabel 2.208 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Waru	Indeks	99.64	99.80	99.96	99.80	83.58	88.32

Sumber: Kecamatan Waru, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

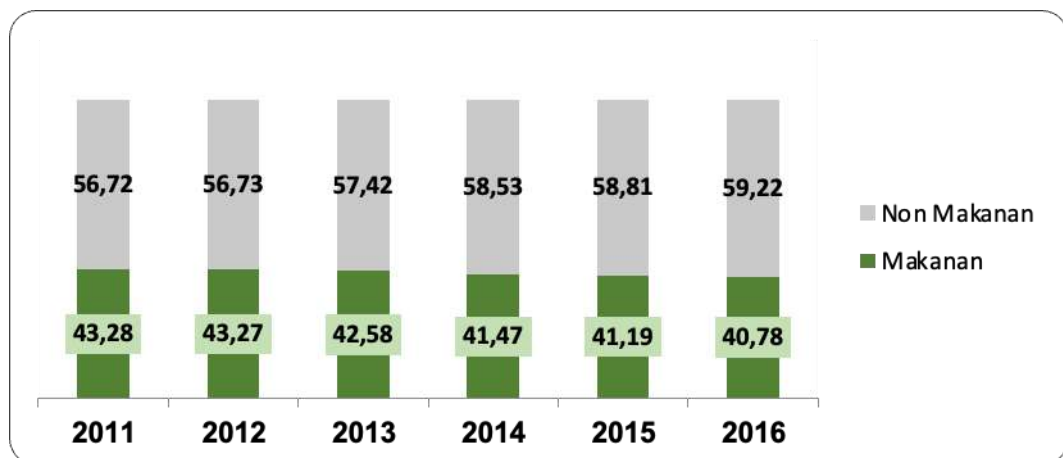
Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Pamekasan ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.209 Perkembangan Komponen Rumah Tangga PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Konsumsi Rumah Tangga (Milyar Rp)						
ADHB	6.495,84	7.162,75	7.850,70	8.601,47	9.238,38	9.932,97
ADHK 2010	6.091,09	6.393,15	6.747,29	7.142,22	7.411,50	7.699,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	81,92	80,47	79,22	77,72	75,11	73,44
Konsumsi Perkapita (Ribu Rp)						
ADHB	8.038,27	8.759,74	9.488,32	10.286,08	10.928,93	11.628,47
ADHK 2010	7.537,42	7.818,56	8.154,74	8.541,04	8.767,74	9.013,95
Total Konsumsi Rumah Tangga (%)	5,02	4,96	5,54	5,85	3,77	3,89
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	3,78	3,73	4,30	4,74	2,65	2,81
Jumlah Penduduk	808.114	817.690	827.407	836.224	845.314	854.194
Jumlah Rumah Tangga	209.670	212.155	214.676	216.694	219.028	221.322

Sumber : BPS Kab.Pamekasan

Selama periode tahun 2011 - 2016 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 2.16 Proporsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Total Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2017

Dari gambar 2.16 di atas bahwa proporsi konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pamekasan untuk konsumsi makanan cenderung mengalami penurunan, sebaliknya proporsi konsumsi non makanan secara pasti terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi konsumsi makanan sebesar 43,28 persen terhadap total konsumsi rumah tangga. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya proporsinya mengalami penurunan menjadi 40,78 persen pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumahtangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.



Gambar 2.17 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 – 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Nilai Investasi

Tabel 2.203 Nilai Investasi Kabupaten Pamekasan Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Nilai Investasi (Juta Rp)	18.791.602.058	22.985.602.058	28.357.602.058	33.739.602.058	34.940.102.058	-

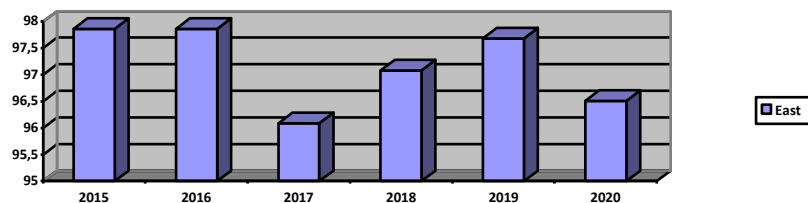
Sumber: DPMPTSPNakertrans Kabupaten Pamekasan, 2020

Jumlah nilai investasi Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 nilai investasi Kabupaten Pamekasan adalah Rp. 18.791.602.058 sementara pada tahun 2018 nilai investasi Kabupaten Pamekasan mencapai angka Rp. 34.940.102.058.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Iulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga daerah dapat ditopang melalui tingkat pendidikan yang bisa dicapai oleh penduduk di Kabupaten Pamekasan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (jazah tertinggi yang dimiliki) merupakan indikator pokok kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Dari grafik berikut ini dapat diketahui komposisi persentase penduduk 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah maupun memiliki ijazah.



Gambar 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Pamekasan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan



Pada tahun 2015 Kabupaten Pamekasan usia 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2015 mencapai 97,86%, kemudian stagnan pada tahun 2016 mencapai 97,86%, pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 96,09, meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai 97,08%, terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 mencapai 97,68%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 96,51%.

2.4.3.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi >64 tahun). Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.204 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2018

No	Uraian	2017	2018
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	221.537	223.691
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	47.691	48.194
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	269.228	271.885
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	593.776	599.612
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	45,34	45,34

Sumber Data : BPS Kab.Pamekasan (2018)

Pada tabel di atas, data menunjukkan angka ketergantungan penduduk Kabupaten Pamekasan relatif stabil pada kisaran 45,34 pada tahun 2017 dan tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif di Kabupaten Pamekasan



untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Tabel 2.205 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,42	64,93	65,41	65,94	66,26	65,56	>
2	Pertumbuhan Ekonomi	5,35	5,04	5,46	4,92	-2,54	5,22	<
3	Gini Ratio	0,36	0,33	0,33	0,34	0,32	0,3	>
4	Persentase Penduduk Miskin	16,7	16	14,47	13,95	14,6	12,98	>
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n.a	85,68	85,5	86,05	86,17	87,84	<
6	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	0,59	0,59	0,6	0,62	<
7	Indeks Kesehatan	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,76	<
8	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	n.a	3,91	2,88	2,26	3,49	2,65	>
9	Nilai SAKIP		68,4 (B)	68,44 (B)	68,80 (B)	70,02 (BB)	80,12 (A)	<
10	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
11	Indeks Pelayanan Publik	n.a	n.a	n.a	3,51 (B)	2,85 (C)	3,76 (B)	<
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n.a	55,81	57,29	53,13	n.a	57,86	<

Sumber: Kabupaten Pamekasan; Badan Pusat Statistik.



Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan untuk indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah melebihi standar, pertumbuhan ekonomi belum mencapai standar, gini ratio melebihi standar, persentase penduduk miskin melebihi standar, Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum mencapai standar, Indeks Pendidikan belum mencapai standar, Indeks Kesehatan belum mencapai standar, Tingkat Pengangguran Terbuka melebihi standar, NILAI SAKIP belum mencapai standar, Opini BPK telah mencapai standar, Indeks Pelayanan Publik belum mencapai standar, Indeks Pemberdayaan Gender belum mencapai standar.



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis kinerja keuangan daerah, kajian kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam RPJMD Perubahan tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi, salah satunya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan dan mempengaruhi pendapatan daerah sehingga akan berpengaruh pada pembiayaan program, kegiatan maupun pembangunan yang sudah dirancang dan disusun pada RPJMD sebelumnya.



3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen ini terdiri dari beberapa bab, salah satunya adalah BAB III yang merupakan pembahasan mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Pada bab ini akan bersinergi dan menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki, mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan sesuai kebijakan pemerintah yang ditetapkan dan mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tepat dan baik.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:



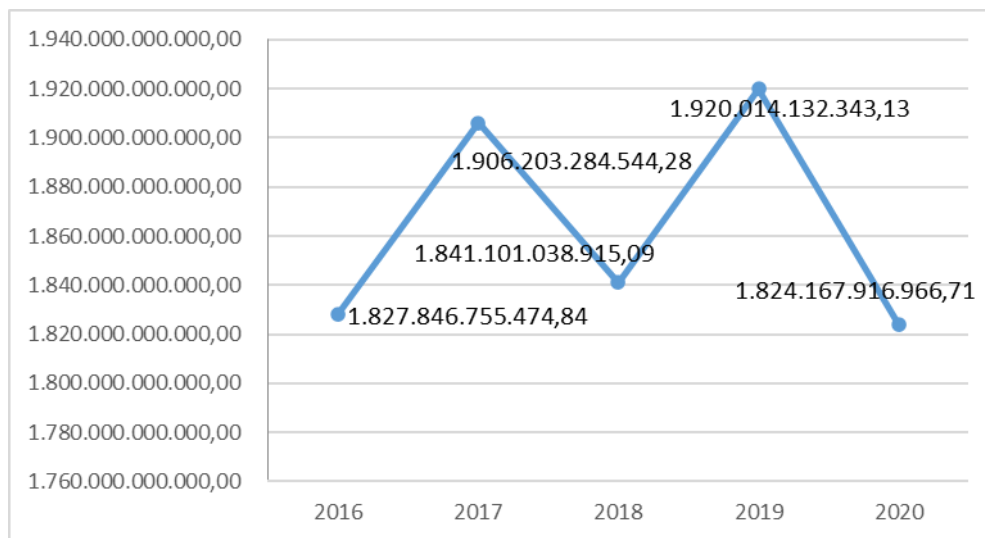
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.827.846.755.474,84	1.906.203.284.544,28	1.841.101.038.915,09	1.920.014.132.343,13	1.824.167.916.966,71	0,04
1.1	Pendapatan Asli Daerah	178.478.890.963,84	243.311.843.020,28	222.410.664.049,09	219.671.437.717,13	232.262.477.004,71	8,06
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	26.949.852.758,00	35.053.956.091,00	36.520.160.896,00	44.204.121.424,40	37.192.592.664,00	9,86
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.415.336.487,00	15.448.484.968,00	16.150.680.713,88	17.762.125.858,00	16.517.650.380,73	5,67
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.834.159.904,00	1.868.949.377,92	1.923.442.124,80	2.016.350.446,08	2.052.672.129,60	2,86
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	136.279.541.814,84	190.940.452.583,36	167.816.380.314,41	155.688.839.988,65	176.499.561.830,38	8,53
1.2	Pendapatan Transfer	1.638.067.199.511,00	1.657.522.291.024,00	1.564.606.934.866,00	1.642.229.654.626,00	1.535.107.892.862,00	-1,49
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.463.526.022.444,00	1.498.905.168.098,00	1.440.171.040.953,00	1.510.145.721.637,00	1.421.730.362.758,00	-0,62
1.2.2	Transfer antar-daerah	174.541.177.067,00	158.617.122.926,00	124.435.893.913,00	132.083.932.989,00	113.377.530.104,00	-9,67
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.300.665.000,00	5.369.150.500,00	54.083.440.000,00	58.113.040.000,00	56.797.547.100,00	215,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.300.665.000,00	5.369.150.500,00	54.083.440.000,00	58.113.040.000,00	56.797.547.100,00	215,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Berdasarkan data selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Pamekasan cukup baik dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, total pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 1.827.846.755.474,84. Angka tersebut terus mengalami peningkatan sampai 2017, dan hanya di tahun 2018 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan kembali menjadi Rp 1.920.014.132.343,13. Namun pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan Kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.824.167.916.966,71. Peningkatan rata-rata pendapatan daerah pertahun sebesar 0,04%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan kemajuan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini

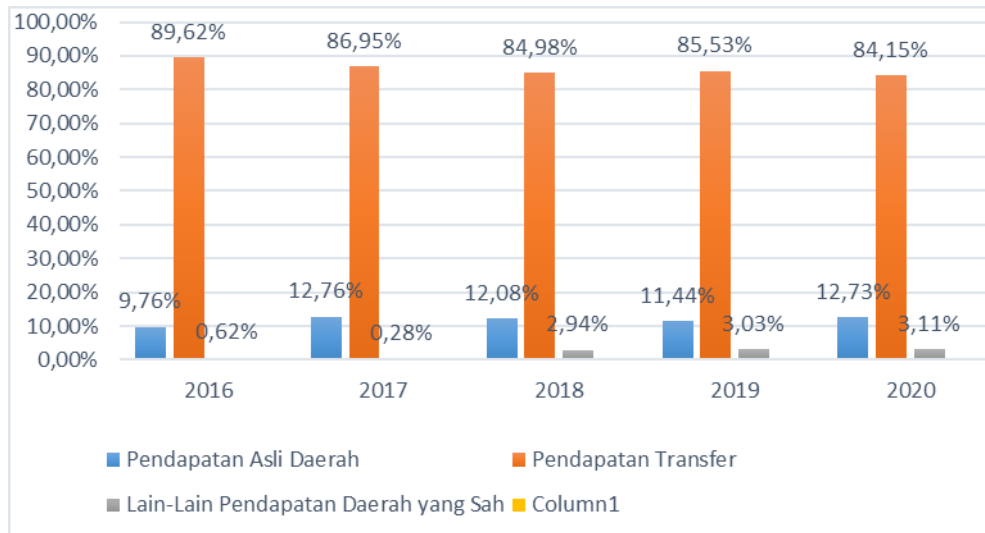


Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Persentase Komponen Pendapatan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021

Berdasarkan grafik 3.2 selama tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan Kabupaten Pamekasan berdasarkan komponen pendapatan diketahui penyumbang terbanyak berasal dari pendapatan transfer sebesar 89,62% tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 84,15% di tahun 2020, penyumbang pendapatan terbesar kedua diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,76% tahun 2016, dan meningkat pada 2020 menjadi sebesar 12,73%. Penyumbang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,62% pada tahun 2016 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 3,11%. Proporsi sumber pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan masih bergantung pada pusat dan provinsi lainnya melalui pendapatan transfer.



a. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budgeting*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:



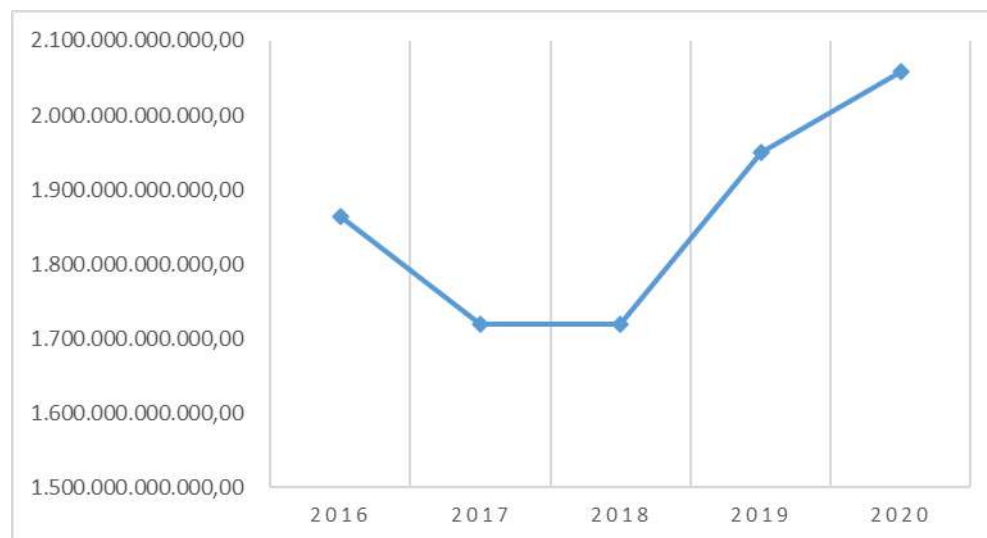
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH	1.864.638.211.688,95	1.719.504.104.745,23	1.719.319.711.299,32	1.949.149.808.057,85	2.059.118.220.818,57	2,80
2.1	Belanja Operasi	1.099.788.394.703,95	1.087.646.216.668,00	1.136.317.571.794,49	1.229.838.488.083,85	1.239.889.477.519,74	3,10
2.1.1	Belanja Pegawai	779.736.858.382,00	705.931.702.073,90	696.617.746.036,90	696.775.967.923,00	674.614.637.282,00	-3,49
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	253.293.433.846,95	305.094.291.492,54	359.004.837.716,23	476.988.790.160,85	501.042.090.318,74	19,01
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	58.476.986.475,00	68.554.040.401,56	74.801.168.041,36	47.268.400.000,00	49.260.674.919,00	-1,56
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.281.116.000,00	8.066.182.700,00	5.893.820.000,00	8.805.330.000,00	14.972.075.000,00	22,48
2.2	Belanja Modal	544.165.819.579,00	372.031.422.731,73	317.340.696.505,83	399.606.369.876,00	462.851.108.600,38	-1,15
2.2.1	Belanja Tanah	2.309.880.500,00	1.437.224.900,00	7.328.519.100,00	9.164.167.600,00	5.329.136.400,00	88,83
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	67.440.422.728,00	72.426.663.799,00	69.406.570.346,00	89.904.495.983,00	73.704.858.105,00	3,68
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	70.473.444.915,00	41.768.168.437,00	66.002.243.608,26	86.557.442.183,00	46.125.792.323,60	0,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalan	402.557.177.715,00	239.758.951.197,00	163.341.926.819,57	202.798.056.288,00	329.621.049.610,78	3,59
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.384.893.721,00	16.640.414.398,73	11.261.436.632,00	11.182.207.822,00	8.070.272.161,00	260,18
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	271.542.000,00	2.772.888.100,00	3.367.467.650,00	4.129.064.250,00	42.520.226.230,00	473,75
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	271.542.000,00	2.772.888.100,00	3.367.467.650,00	4.129.064.250,00	42.520.226.230,00	473,75
2.4	Belanja Transfer	220.412.455.406,00	257.053.577.245,50	262.293.975.349,00	315.575.885.848,00	313.857.408.468,45	9,61
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.350.239.630,00	5.488.073.520,50	6.514.215.949,00	5.449.811.725,00	4.940.386.888,45	31,63
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	218.062.215.776,00	251.565.503.725,00	255.779.759.400,00	310.126.074.123,00	308.917.021.580,00	9,47
3	Pembiayaan	235.110.516.099,41	182.940.446.262,90	389.609.980.258,45	509.043.307.874,22	548.824.956.359,96	32,31
3.1	Penerimaan Pembiayaan	253.361.896.365,60	198.329.059.885,30	394.603.462.163,67	511.632.307.874,22	564.824.956.359,96	29,32
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.251.380.266,19	15.388.613.622,40	4.993.481.905,22	2.589.000.000,00	16.000.000.000,00	96,65

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Berdasarkan pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan pada Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,10%. Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan pada Belanja Modal memiliki rata-rata pertumbuhan positif, yaitu sebesar -1,15%. Sementara itu, belanja tidak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 473,75%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah realisasi yang sangat signifikan pada tahun 2017 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 271.542.000,00 menjadi Rp 2.772.888.100,00. Selanjutnya, belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif sebesar 9,61%.



Gambar 3.3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-



hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 1.864.638.211.688,95 dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 2.059.118.220.818,57 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2,80%.

b. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah,



penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Tabel 3.3 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pamekasan

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.841.101.038.915,09	1.920.014.132.343,13	1.824.167.916.966,71
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.719.319.711.299,32	1.949.149.808.057,85	2.059.118.220.818,57
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.993.481.905,22	2.589.000.000,00	16.000.000.000,00
A	Defisit Riil	116.787.845.710,55	(31.724.675.714,72)	(250.950.303.851,86)
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya	369.639.626.061,95	511.391.307.874,22	479.907.632.159,00
5	Pencairan dana cadangan	23.664.938.406,72	0,00	0
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	24.625.500,00	241.000.000,00	150.000.000.000,00
9	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.274.272.195,00	0,00	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	394.603.462.163,67	511.632.307.874,22	629.907.632.159,00
A				
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan	511.391.307.874,22	479.907.632.159,50	313.874.652.508,10
B				

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama tiga tahun perkembangannya cukup fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal investasi pemerintah daerah, hal ini untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan daerah.



Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018-2020 Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp 511.391.307.874,22; Rp 479.907.632.159,50; dan Rp 313.874.652.508,10. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan cukup kuat untuk membiayai belanja daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.



Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu 2015-2019 dijelaskan secara rinci pada Tabel 3.4 sebagai berikut:



Tabel 3.4 Rata Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pamekasan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET	2.847.639.494.852,91	3.202.523.870.567,79	3.483.606.764.607,15	3.649.901.120.551,89	3.721.643.174.886,75	6,99
1.1	ASET LANCAR	289.468.853.738,22	442.190.011.563,21	572.142.302.186,86	602.684.276.035,94	386.419.164.284,64	12,90
1.1.1	Kas	230.556.308.393,09	378.568.104.600,14	511.465.651.952,20	480.848.742.298,48	314.448.233.443,62	14,68
1.1.2	Piutang Pajak Daerah	14.464.433.057,00	16.300.576.765,00	17.157.040.570,00	9.537.676.390,00	10.123.558.273,00	(5,08)
1.1.3	Piutang Retribusi Daerah	1.365.842.385,00	1.220.800.700,00	1.175.337.200,00	1.497.774.086,00	1.757.499.253,00	7,61
1.1.4	Piutang Dana Bagi Hasil	21.462.824.071,00	18.207.729.147,00	0	33.569.178.298,00	14.272.626.030,00	(43,16)
1.1.5	Beban di Bayar di Muka	0	337.526.942,77	266.689.128,00	381.934.598,00	430.245.470,00	8,72
1.1.6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	12.673.000,00	23.877.166,00	35.199.667,93	20.200.003,00	11.250.000,00	12,23
1.1.7	Piutang Lainnya	7.682.823.763,21	14.011.379.779,00	19.702.072.766,73	32.811.497.200,52	15.585.445.385,26	34,26
1.1.8	Penyisihan Piutang	-7.687.397.305,19	-9.026.939.047,20	-10.621.211.454,00	-3.954.765.346,95	(5.604.363.927,01)	3,51
1.1.9	Persediaan	21.376.401.711,44	22.546.955.510,50	32.961.522.356,00	47.972.038.508,89	35.394.670.356,77	17,75
1.1.10	Sewa dibayar dimuka	234.944.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
1.2	Investasi Jangka Panjang	54.634.462.623,96	66.400.914.385,77	70.732.172.895,01	73.242.646.209,56	78.520.160.612,17	9,70
1.2.1	Investasi Non Permanen	9.082.589.250,00	9.082.589.250,00	9.082.589.250,00	9.082.589.250,00	15.082.589.250,00	16,52
1.2.2	Investasi Permanen	45.551.873.373,96	57.318.325.135,77	61.649.583.645,01	64.160.056.959,56	63.437.571.362,17	9,08
1.3	ASET TETAP	2.482.251.328.563,99	2.664.756.218.392,31	2.833.681.476.260,21	2.909.936.780.019,39	3.077.032.234.160,91	5,53
1.3.1	Tanah	570.001.042.554,19	630.358.427.116,69	636.924.651.716,69	646.276.041.316,69	666.028.370.916,69	4,04
1.3.2	Peralatan & Mesin	351.366.778.673,57	413.007.552.760,82	474.742.272.617,34	545.293.824.479,89	611.227.492.387,83	14,86
1.3.3	Gedung & Bangunan	866.983.745.631,03	863.005.588.341,78	946.676.806.856,48	1.054.389.295.618,92	1.096.660.545.229,52	6,16
1.3.4	Jalan, Irigrasi & Jaringan	1.518.784.502.622,52	1.739.855.710.616,98	1.958.205.088.198,82	2.006.165.562.706,75	2.201.721.699.502,22	9,83



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	40.989.476.259,85	55.961.061.116,58	67.983.394.568,58	79.957.605.490,58	88.780.189.851,58	21,66
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.343.066.500,00	9.111.309.830,00	3.356.052.951,38	2.810.714.844,00	22.058.820.300,00	168,98
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-871.217.283.677,17	-1.046.543.431.390,54	-1.254.206.790.649,08	-1.424.956.264.437,44	1.609.444.884.026,93	16,63
1.4	DANA CADANGAN	17.557.115.074,10	23.445.728.696,50	0	0	10.000.000.000,00	(16,62)
1.4.1	Dana Cadangan	17.557.115.074,10	23.445.728.696,50	0	0	10.000.000.000,00	(16,62)
1.5	ASET LAINNYA	3.727.734.852,64	5.730.997.530,00	7.050.813.265,07	64.037.418.287,00	169.671.615.829,03	262,49
1.5.1	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	7.291.671,00	1.562.500,07	0,00	0,00	(44,64)
1.5.2	Aset Tidak Berwujud	8.465.479.652,00	9.858.120.408,00	12.030.462.408,00	14.925.196.198,00	17.279.275.918,00	19,58
1.5.3	Aset Lain-lain	5.243.504.542,77	7.116.108.933,33	7.451.143.531,33	63.277.012.613,33	166.579.190.791,36	238,23
1.5.4	Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	-9.981.249.342,13	-11.250.523.482,33	-12.432.355.174,33	-14.164.790.524,33	(14.186.850.880,33)	9,33
2	KEWAJIBAN	38.506.646.666,50	19.178.574.851,90	13.669.362.419,27	15.687.068.675,01	126.356.335.483,71	160,33
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	38.506.646.666,50	19.178.574.851,90	13.669.362.419,27	15.687.068.675,01	41.439.192.176,71	25,00
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	84.917.143.307,00	-
3	EKUITAS	2.809.132.848.186,41	3.183.345.295.715,89	3.469.937.402.187,88	3.634.214.051.876,88	3.595.286.839.403,04	6,50
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	2.847.639.494.852,91	3.202.523.870.567,79	3.483.606.764.607,15	3.649.901.120.551,89	3.721.643.174.886,75	6,99

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Pada tahun 2020, Kabupaten Pamekasan memiliki aset senilai Rp 3.721.643.174.886,75 dengan tingkat pertumbuhan 6.99 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp 3 triliun dan rata-rata tumbuh 5.53 persen per tahun.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp126,35 milyar. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2018 dan tertinggi tahun 2020. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk



Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 mencapai Rp3,6 trilyun, dan mengalami pertumbuhan dari 2016-2020 dengan rata-rata 6.50 persen.

Tabel 3.5 Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 – 2020

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio Lancar	7,52	23,06	41,86	38,42	9,32
2	Rasio Quick	6,96	21,88	39,44	35,36	8,47
B	RASIO SOLVABILITAS					
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,013522304	0,005988581	0,003923911	0,004297943	0,03395176
2	Rasio total hutang terhadap total modal	0,013707663	0,006024661	0,003939369	0,004316496	0,035144994
C	RASIO AKTIVITAS					
1	Rasio belanja langsung	0,46	0,43	0,42	0,46	0,48
2	Rasio belanja tidak langsung	0,54	0,57	0,58	0,54	0,52

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020

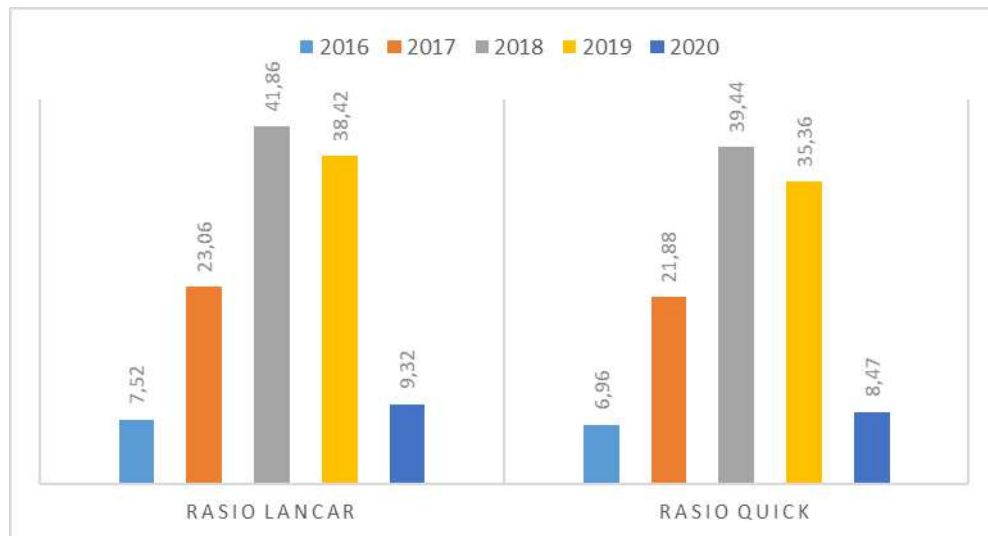
Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Pamekasan tahun 2016 - 2020 akan dijelaskan pada masing-masing poin rasio dibawah ini.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan aset

lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan.

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020):



Gambar 3.4. Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021

a. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lancar} = \text{aktiva lancar} : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Lancar Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai



rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai rasio lancar terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,52 dan titik tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 41,86. Pergerakan nilai rasio lancar pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai kewajiban dan nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Secara garis besar nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir masih berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar memiliki kategori yang masih baik.

b. Rasio Quick

Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio quick} = (\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) : \text{kewajiban jangka pendek}$$

Berdasarkan tabel perhitungan rasio likuiditas Kabupaten Pamekasan menunjukkan kondisi rasio *quick* yang dimiliki Kabupaten Pamekasan memiliki pola fluktuasi yang sama dengan kondisi rasio lancar, dimana pada tahun 2016 nilai rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten



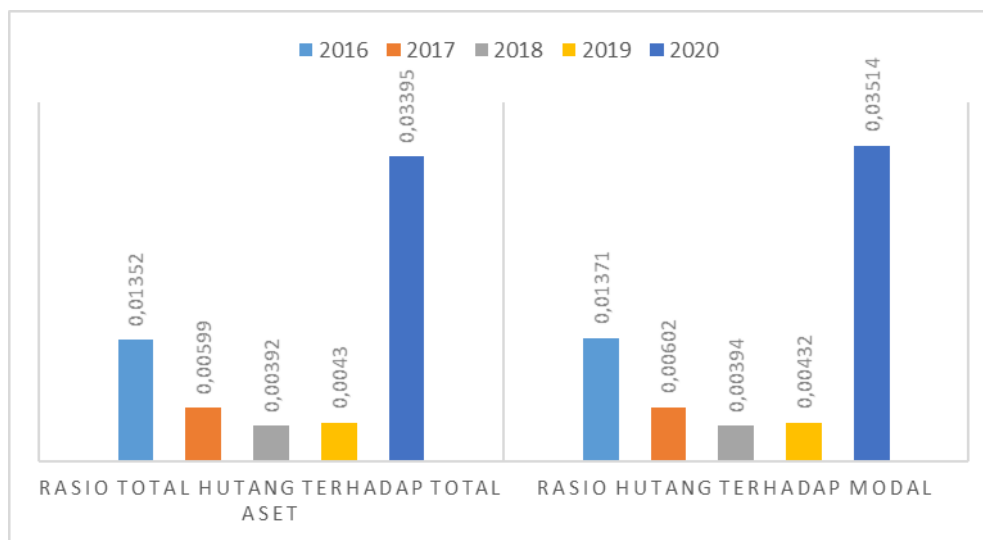
Pamekasan merupakan nilai yang terendah dari nilai rasio *quick* pada 4 tahun lainnya yaitu sebesar 6,96. Pada rasio *quick*, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya.

Rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) juga menunjukkan kondisi yang masih baik, dimana nilainya masih berada di atas 1, meskipun pada tahun 2019 dan 2020 nilainya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid (aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) masih cukup baik. Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang

menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.



Gambar 3.5. Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021

a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio total hutang terhadap total aset} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total aset}}$$

Nilai jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Pamekasan tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan *tren* yang meningkat pada setiap tahunnya. Akan tetapi nilai jumlah kewajiban



menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016-2020, sehingga nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan trend nilai yang fluktuatif pula. Pada tahun pertama yaitu tahun 2016 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan sebesar 0,01352, kemudian menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,00599 dan 0,00392, kondisi ini dikarenakan adanya jumlah kewajiban yang menurun dan adanya peningkatan jumlah aset pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kewajiban Kabupaten Pamekasan meningkat, sehingga Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan juga meningkat menjadi 0,00430 dan 0,03395.

Semakin rendah angka Rasio hutang terhadap total aset maka dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya. Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Pamekasan masih sangat kecil, yaitu jauh dibawah 0,5. Terjadinya kenaikan rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 dan 2020 pada dasarnya perlu menjadi perhatian, namun mengingat masih rendahnya nilai rasio yang dimiliki, maka tidak menjadikan suatu masalah. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan yang sehat.

b. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal



yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio hutang terhadap modal} = \text{total hutang} : \text{total ekuitas}$$

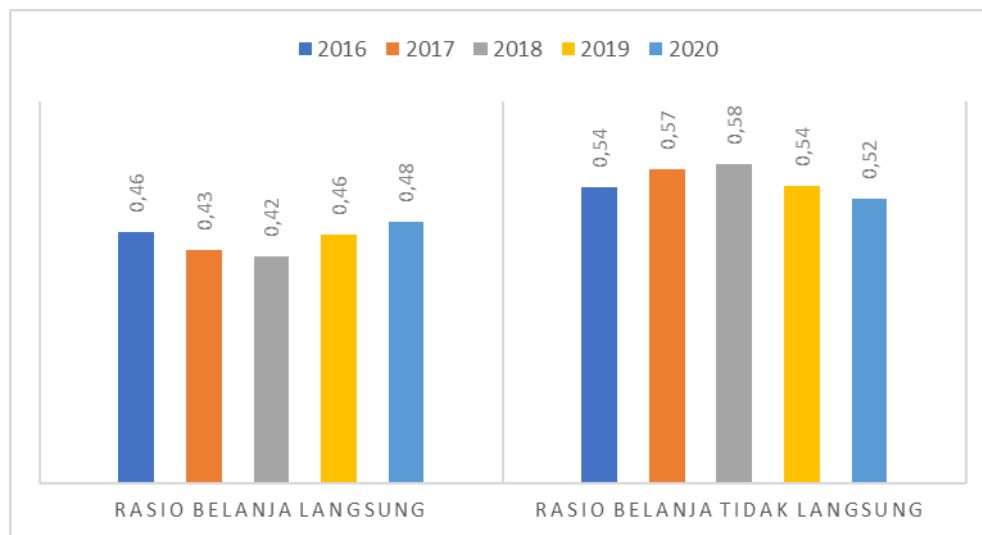
Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Melihat nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan pada dasarnya menunjukkan perkembangan nilai yang sama yaitu dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan memiliki tren yang fluktuatif pula. Kenaikan dan penurunan nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh adanya nilai ekuitas pada setiap tahunnya serta nilai kewajiban yang naik turun. Pada tahun 2016 nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar 0,01371 pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,00602 dan 0,00394. Adanya peningkatan kewajiban pada tahun 2019 dan 2020 menjadikan nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan juga meningkat pada angka 0,00432 dan 0,03514.

Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kabupaten Pamekasan masih cukup rendah. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini tidak bergantung pada hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah Kabupaten Pamekasan adalah rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung. Rasio belanja langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Sedangkan rasio belanja tidak langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja daerah.

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020):



Gambar 3. 6 Rasio Belanja Langsung dan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



a. Rasio Belanja Langsung

Rasio Belanja Langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Rumus perhitungan rasio belanja langsung yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa nilai Rasio Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai Rasio Belanja Langsung terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,42 dan titik tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,48. Pergerakan nilai Rasio Belanja Langsung pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah anggaran belanja langsung dan total belanja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

b. Rasio Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Tidak Langsung menunjukkan seberapa besar komposisi belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja daerah. Rumus perhitungan rasio belanja tidak langsung yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan pada gambar di atas maka



dapat diketahui bahwa nilai Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan cukup fluktuatif. Nilai rasio lancar Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Titik terendah nilai Rasio Belanja Tidak Langsung terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,52 dan titik tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,58. Pergerakan nilai Rasio Belanja Tidak Langsung pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah anggaran belanja tidak langsung dan total belanja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar



Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara itu, belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan yang mencakup:



3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

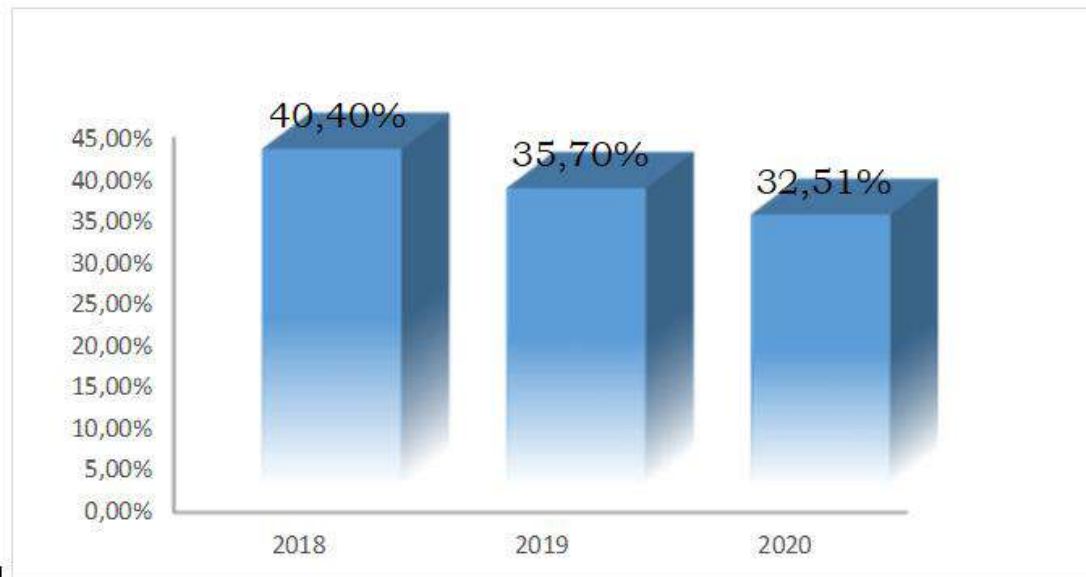
Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Pamekasan

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	696.617.746.036,90	1.724.313.193.204,54	40,40%
2	Tahun Anggaran 2019	696.775.967.923,00	1.951.738.808.057,85	35,70%
3	Tahun Anggaran 2020	674.614.637.282,00	2.075.118.220.818,57	32,51%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2018-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2018 sebesar Rp 696.617.746.036,90 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 696.775.967.923,00 dan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 674.614.637.282,00. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, hal ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3.7 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja

Berdasarkan gambar 3.7, terlihat bahwa persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan dari awal tahun 2018 sebesar 40,40% menurun menjadi sebesar 35,70% pada tahun 2019 dan menurun lagi pada tahun 2020 menjadi sebesar 32,51%. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun yang berarti alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan semakin bertambah. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan



Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kurun tahun 2017-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Pamekasan

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.841.101.038.915,09	1.920.014.132.343,13	1.824.167.916.966,71
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.719.319.711.299,32	1.949.149.808.057,85	2.059.118.220.818,57



No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.993.481.905,22	2.589.000.000,00	16.000.000.000,00
	Surplus/Defisit Riil	116.787.845.710,55	(31.724.675.714,72)	(250.950.303.851,86)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020

Berdasarkan tabel *defisit riil* anggaran di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 116.787.845.710,55, sedangkan pada tahun 2019 mengalami *defisit riil* sebesar Rp 31.724.675.714,72, dan pada tahun 2020 terjadi *defisit riil* lagi sebesar Rp 250.950.303.851,86. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tabel 3.7

Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Defisit Riil	116.787.845.710,55	(31.724.675.714,72)	(250.950.303.851,86)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya	369.639.626.061,95	511.391.307.874,22	479.907.632.159,00
2	Pencairan dana cadangan	23.664.938.406,72	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	24.625.500,00	241.000.000,00	150.000.000.000,00
7	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.274.272.195,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020



Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pamekasan

No.	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	511.391.307.874,22		479.907.632.159,50		313.874.652.507,00	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	42.436.095.063,09	8%	41.730.365.156,13	9%	49.527.123.342,71	16%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	11.251.374.053,00	2%	0		-	
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	26.132.438.055,00	5%	23.981.698.398,00	5%	-	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	284.386.172.346,86	56%	249.136.202.886,36	52%	209.160.732.669,58	67%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi	13.669.362.419,27	3%	15.687.068.675,01	3%	41.439.192.176,71	13%
7	Kegiatan lanjutan	133.515.865.937,00	26%	149.372.297.044,00	31%	13.747.604.318,00	4%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2020



Berdasarkan tabel 3.8 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2018-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

SiLPA di masa mendatang diharapkan semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.



Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.



3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan

Uraian	Pertumbuhan	Anggaran 2019 (Target RPJMD)	Realisasi 2019	Anggaran 2020 (Target RPJMD)	Realisasi 2020	Anggaran 2021 (Target RPJMD)	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,63	1.919.915.024.526,00	1.920.014.132.343,13	2.013.927.276.495,00	1.824.167.916.966,71	1.932.310.486.095,00	1.802.607.014.408,71	1.884.515.169.799,81
Pendapatan Asli Daerah	0,4	231.765.117.085,00	219.671.437.717,13	243.533.655.067,00	232.262.477.004,71	248.868.469.937,00	232.262.477.004,71	235.653.405.525,61
Hasil Pajak Daerah	2,53	39.441.773.768,00	44.204.121.424,40	42.597.115.669,00	37.192.592.664,00	49.570.650.387,00	37.192.592.664,00	38.696.533.600,20
Hasil Retribusi Daerah	-0,37	14.284.332.191,00	17.762.125.858,00	14.055.181.096,00	16.517.650.380,73	12.086.747.418,00	16.517.650.380,73	16.517.650.380,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-0,01	1.960.524.471,00	2.016.350.446,08	1.998.947.314,00	2.052.672.129,60	1.854.888.227,00	2.052.672.129,60	1.939.659.714,30
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,67	176.078.486.655,00	155.688.839.988,65	184.882.410.988,00	176.499.561.830,38	185.356.183.905,00	176.499.561.830,38	178.499.561.830,38
Pendapatan Transfer	0,65	1.646.678.012.061,00	1.642.229.654.626,00	1.720.671.491.625,00	1.535.107.892.862,00	1.610.891.609.854,00	1.511.142.440.504,00	1.586.699.562.529,20
Transfer Pemerintah Pusat	1	1.374.250.901.780,00	1.510.145.721.637,00	1.445.610.416.028,00	1.421.730.362.758,00	1.475.682.275.002,00	1.467.644.295.000	1.492.677.902.100,00
Transfer antar-daerah	-3	272.427.110.281,00	132.083.932.989,00	275.061.075.597,00	113.377.530.104,00	135.356.183.905,00	89.544.438.504,00	94.021.660.429,20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,53	41.471.895.380,00	58.113.040.000,00	49.722.129.803,00	56.797.547.100,00	72.550.406.304,00	59.202.096.900,00	62.162.201.745,00
Pendapatan Hibah	-25,57	41.471.895.380,00	58.113.040.000,00	49.722.129.803,00	56.797.547.100,00	72.550.406.304,00	59.202.096.900,00	62.162.201.745,00
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA DAERAH	6,08	1.997.453.561.728,00	1.949.149.808.057,85	2.070.079.907.332,00	2.059.118.220.818,57	2.246.185.136.602,00	1.959.955.164.391,14	2.057.952.922.610,70
Belanja Operasi	8,51	1.170.323.433.614,00	1.229.838.488.083,85	1.193.818.265.218,00	1.239.889.477.519,74	1.545.221.850.290,00	1.376.923.189.907,14	1.445.769.349.402,50
Belanja Pegawai	4,98	740.063.762.805,00	696.775.967.923,00	744.706.080.076,00	674.614.637.282,00	746.238.405.881,00	663.660.891.316,00	696.843.935.881,80
Belanja Barang Dan Jasa	12,91	349.444.473.469,00	476.988.790.160,85	357.451.562.590,00	501.042.090.318,74	705.935.928.486,00	587.968.957.056,00	617.367.404.908,95
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0	0



Uraian	Pertumbuhan	Anggaran 2019 (Target RPJMD)	Realisasi 2019	Anggaran 2020 (Target RPJMD)	Realisasi 2020	Anggaran 2021 (Target RPJMD)	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	19,79	74.815.197.340,00	47.268.400.000,00	85.570.622.552,00	49.260.674.919,00	75.494.065.923,00	86.057.091.535,00	90.359.946.111,75
Belanja Bantuan Sosial	67,96	6.000.000.000,00	8.805.330.000,00	6.090.000.000,00	14.972.075.000,00	17.553.450.000,00	39.236.250.000,00	41.198.062.500,00
Belanja Modal	5,1	479.343.257.997,00	399.606.369.876,00	517.814.653.269,00	462.851.108.600,38	370.292.898.836,00	279.892.066.500,00	293.886.669.825,00
Belanja Tanah	353,57		9.164.167.600,00		5.329.136.400,00	200.000.000,00	35.434.105.245,36	37.205.810.507,63
Belanja Peralatan dan Mesin	-1,93		89.904.495.983,00		73.704.858.105,00	62.809.687.836,00	41.353.296.523,20	43.420.961.349,36
Belanja Bangunan dan Gedung	0,79		86.557.442.183,00		46.125.792.323,60	67.314.333.103,00	40.046.873.263,20	42.049.216.926,36
Belanja Jalan, Irigasi dan Jalan	47,23		202.798.056.288,00		329.621.049.610,78	222.382.118.506,00	156.329.149.645,44	164.145.607.127,71
Belanja Aset Tetap Lainnya	11,23		11.182.207.822,00		8.070.272.161,00	17.586.759.391,00	6.728.641.822,80	7.065.073.913,94
Belanja Aset Lainnya	0		0		0	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	213,35	2.967.507.313,00	4.129.064.250,00	3.147.249.172,00	42.520.226.230,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	213,35	2.967.507.313,00	4.129.064.250,00	3.147.249.172,00	42.520.226.230,00	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.875.000.000,00
Belanja Transfer	2,83	344.819.362.804,00	315.575.885.848,00	355.299.739.673,00	313.857.408.468,45	321.670.389.476,00	295.639.907.984,00	310.421.903.383,20
Belanja Bagi Hasil	0,25	6.789.799.181,00	5.449.811.725,00	7.129.289.140,00	4.940.386.888,45	5.047.860.784,00	4.547.795.584,00	4.775.185.363,20
Belanja Bantuan Keuangan	2,88	338.029.563.623,00	310.126.074.123,00	348.170.450.533,00	308.917.021.580,00	316.622.528.692,00	291.092.112.400,00	305.646.817.020,00
Surplus/Defisit		-77.538.537.202,00	-29.135.675.714,72	-56.152.630.837,00	-234.950.303.851,86	-313.874.650.507,00	-157.348.149.982,43	-173.437.752.810,89
Pembiayaan	-20,79	77.538.537.202,00	509.043.307.874,22	56.152.630.837,00	548.824.956.359,96	313.874.652.507,00	157.348.149.982,43	173.437.752.810,89
Penerimaan Pembiayaan	-16,93	236.333.251.805,00	511.632.307.874,22	233.331.041.189,00	564.824.956.359,96	313.874.652.507,00	199.327.032.524,30	217.515.579.479,85
Pengeluaran Pembiayaan	162,74	158.794.714.603,00	2.589.000.000,00	177.178.410.352,00	16.000.000.000,00	0	41.978.882.541,87	44.077.826.668,96

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



a. Kebijakan Keuangan Daerah

Dari Tabel 3.10 di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2019 – 2023. Arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
Kebijakan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan membangun sistem dan prosedur, pendataan, pengelolaan pajak dan retribusi dan penguatan regulasi utamanya dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan, memantapkan perolehan BPHTB;2. Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan;3. Memanfaatkan <i>idle cash</i> (kas yang belum	<ol style="list-style-type: none">1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.3. Meningkatkan koordinasi secara



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito;</p> <p>4. koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pihak Swasta untuk meningkatkan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga</p>	<p>sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.</p> <p>5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.</p> <p>6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.</p> <p>7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan</p>



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		anggaran daerah. 8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
Kebijakan Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah;2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja melalui pengalokasian anggaran berdasarkan pada penilaian <i>output</i> maupun <i>outcome</i> yang dapat dicapai;3. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based</i>) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 dengan menganut prinsip



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan dan mendukung pemanfaatan potensi daerah</p> <p>4. Mengalokasikan anggaran untu kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan/ kebutuhan mendesak</p>	<p>akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;</p> <p>2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;</p> <p>3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip</p>



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		efisien dan efektif; 4. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan Pembiayaan Daerah	1. Penyertaan modal kepada BUMD: Bank Jatim, BPR Jatim, PDAM, PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur.	1. Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah serta skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta (<i>public private partnership</i>). 2. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran dan sistem pengendalian dan evaluasi



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		<p>pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Pinjaman daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudential management</i>), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.</p> <p>4. Menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai</p>



KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Secara keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.920.014.132.343,13	1.824.167.916.966,71	1.932.310.486.095,00	1.802.607.014.408,71	1.884.515.169.799,81
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	511.391.307.874,22	479.907.632.159,00	313.874.652.507,00	199.327.032.524,30	217.515.579.479,85
	Total penerimaan	2.431.405.440.217,35	2.304.075.549.125,71	2.246.185.138.602,00	2.001.934.046.933,01	2.102.030.749.279,66
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	1.061.471.329.671,00	1.072.864.075.323,45	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.589.000.000,00	16.000.000.000,00	0	41.978.882.541,87	44.077.826.668,96
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.367.345.110.546,35	1.215.211.473.802,26	2.246.185.138.603,10	1.959.955.164.391,14	2.057.952.922.610,70

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 202



Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Capaian		Proyeksi		
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.367.345.110.546,35	1.215.211.473.802,26	2.246.185.138.603,10	1.959.955.164.391,14	2.057.952.922.610,70
2.	Prioritas I	449.155.328.655,00	661.736.046.836,60	1.462.887.357.777,59	1.139.552.085.973,95	1.410.982.415.410,48
3.	Prioritas II	917.779.578.358,19	553.110.863.523,52	782.543.939.309,02	819.755.870.377,56	646.045.042.951,20
4.	Prioritas III	410.203.533,16	364.563.442,14	753.841.516,49	647.208.039,64	925.464.249,02

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Berdasarkan tabel 3.11 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, dan prioritas II, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, bersifat mendukung program prioritas utama. Disamping itu Program prioritas II berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

x x x x



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB IV

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU -ISU STRATEGIS



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan untuk periode 2018-2023 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pamekasan. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Pamekasan ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; telaah terhadap RPJM Provinsi Jawa Timur 2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap *Platform* Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini:

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren). Berikut permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan:

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pamekasan

No	Urusan/Permasalahan
1.	<p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang berkualitas dan belum merata. Hal ini dapat diidentifikasi dari:b. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 13,6 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,6 tahun. Namun data tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang mencapai 13,62 tahun.c. RLS Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 6,7 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Pamekasan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,7 tahun. Artinya, kualitas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan masih tergolong rendah, sehingga perlu upaya-upaya dalam rangka meningkatkan RLS Kabupaten Pamekasan.d. Angka partisipasi murni SLTA tahun 2020 yaitu 60,88%. Artinya bahwa masih terdapat 30,22% penduduk usia SLTA di Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah tepat pada waktunya (sesuai dengan usianya).e. Angka putus sekolah tahun 2019 yaitu 106. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Pamekasan.f. Angka kelulusan sekolah SD/MI dan SMP/MTs tahun 2019 yaitu 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019.
2.	<p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.



No	Urusan/Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none">b. Angka kematian bayi masih fluktuatif dan mencapai angka 13 bayi di tahun 2019.c. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2018 mencapai angka 154 orang dan di tahun 2020 mencapai angka 101 orang.d. Masih banyaknya balita stunting di Kabupaten Pamekasan yang ditunjukkan dengan data pada tahun 2020 mencapai 7.506 balitae. Masih banyaknya masyarakat yang mengalami kasus penyakit, pada tahun 2020 kasus HIV mencapai 54 kasus, sedangkan tuberculosis mencapai 1028 kasus.
3.	<p>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Belum terpenuhinya infrastruktur dasar yang merata dan layak bagi masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Panjang jalan Kabupaten Pamekasan dalam kondisi rusak masih mencapai 11,33 km pada tahun 2020b. Panjang jalan dalam kondisi rusak berat masih mencapai 117,86 km pada tahun 2020.c. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mencapai 61,6%, masih terdapat beberapa rumah tinggal yang tidak bersanitasi di Kabupaten Pamekasan.d. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan fasilitas sanitasi yang layak.
4.	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);b. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani, masih terbatas kawasan kumuh di perkotaan;
5.	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tingkat penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2020 mencapai 42%, angka tersebut turun dari capaian di tahun tahun sebelumnya yang mencapai 100%.
6.	<p>Sosial:</p> <p>Belum optimalnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masih tingginya jumlah fakir miskin, bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2019 mencapai 129.587 fakir miskin.b. Masih tingginya jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina tahun 2019 yaitu 49 orang dibandingkan tahun 2018 yaitu 14 orang.c. Masih tingginya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (tidak memiliki keahlian) tahun 2019 yaitu 20 orang.



No	Urusan/Permasalahan
7.	<p>Tenaga Kerja:</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 yaitu 69,82%. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yaitu 3,49%.</p>
8.	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2019 mencapai 53,13%, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 57,29%.b. Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pamekasan.c. Belum optimalnya sarana pendukung seperti Lapraskopi untuk Layanan MOW.
9.	<p>Ketahanan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pada peta kerawanan pangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan masih termasuk daerah rawan pangan.b. Peternak belum sepenuhnya berdaya karena peternakan masih bersifat sub sistem, akses terhadap permodalan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, rendahnya penerapan teknologi peternakan dan pada rantai pemasaran senantiasa berada pada posisi tawar yang rendah.c. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).d. Inflasi harga bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim) berakibat pada menurunnya akses pangan masyarakat.e. Mutu dan keamanan pangan segar dan olahannya masih memerlukan penanganan. <p>Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fluktuasi harga pangan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari tahun 2019 yaitu 2982 kkal dan 57,7 gram atau menurun dari tahun 2018 yaitu 2945,28 kkal dan 56.96 gram.b. Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi keberagaman pangan terutama buah dan sayur sebagian besar dipenuhi dari luar kota. Hal ini dapat dilihat dari Konsumsi energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari) tahun 2019 yaitu 2037 kkal dan 48 gram.



No	Urusan/Permasalahan
10.	<p>Lingkungan Hidup:</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang merata dan layak bagi masyarakat. Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Kabupaten Pamekasan tidak memiliki hutan, namun memiliki hutan produksi, luas tutupan lahan juga masih tergantung pada Instansi lain seperti Perum Perhutani dan Dinas Kehutan Provinsi. Hal ini karena kewenangan pengelolaan hutan merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi.Volume produksi sampah yang meningkat pada tahun 2020 yaitu 99.350,12 ton. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya usaha yang menghasilkan sampah tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan.Menurunnya jumlah daya tampung TPS pada tahun 2019 yaitu 80 m³. Hal ini karena dengan adanya TPS3R yang dikelola oleh Desa/Kelurahan maka beberapa TPS dengan ukuran kecil dibongkar.Persentase penanganan sampah yang masih rendah, pada tahun 2020 sekitar 33,03% sampah yang dapat ditangani oleh Kabupaten Pamekasan.Menurunnya kualitas udara yang dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara tahun 2020 yaitu 85,10%. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan dan tingginya pembakaran bahan bakar fosil di areal permukiman.
11.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa menuju Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Penurunan persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel di Pamekasan pada tahun 2019 yaitu 0,10% yang dimana tahun 2018 yaitu 0,19%.Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2020 yang mampu dicapai adalah 0,30%.Belum maksimalnya capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana pada tahun 2020 yaitu 1.187 LKD atau tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnyaJumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan masih sekitar 5 desa, jumlah desa mandiri memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun 5 desa tersebut masih cukup sedikit bila dibandingkan total desa yang ada di Kabupaten Pamekasan mencapai 178 desa, sehingga perlu upaya optimal untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan.



No	Urusan/Permasalahan
12.	<p>Perhubungan:</p> <ol style="list-style-type: none">Fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang belum memadai.Layanan angkutan darat di Kabupaten Pamekasan masih belum optimal.
13.	<p>Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none">Masih belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tahun 2015-2020 disebabkan:<ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi perikanan.Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan khususnya usaha pembenihan dan diversifikasi usaha budidaya ikan.Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di banding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif.Kurang variatifnya jenis alat tangkap penangkapan ikan yang digunakan nelayan sehingga menyebabkan jenis ikan dan produksi hasil tangkapan rendah, kurang efektif dan efisien.Produksi garam tahun 2016 yang kecil dikarenakan musim penghujan sangat panjang (Efek La Nina) sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam. Sedangkan Produksi budidaya tahun 2018 menurun diakibatkan perubahan cuaca yang ekstrem, masih terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih banyaknya hama dan penyakit pada budidaya rumput laut.
14.	<p>Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan:</p> <p>Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis tahun 2020 yaitu 85% dan persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial tahun 2020 yaitu 61% artinya bahwa terdapat 15% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis dan terdapat 39% pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan kompetensi manajerial.Masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%.



No	Urusan/Permasalahan
15.	<p>Pertanian:</p> <p>Belum optimalnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dapat diidentifikasi dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Masih belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton.b. Masih belum optimalnya produksi jagung dan kedelai menurut kecamatan tahun 2019 yaitu 91.101 ton (jagung) dan 321 ton (kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 ton (jagung) dan 1.221 ton (kedelai).c. Berkurangnya luas panen tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 5.453 Ha jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 5.810 Ha.d. Masih belum optimalnya produksi tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 354.783 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 475.118 ton
16.	<p>Penanaman Modal:</p> <p>Belum optimalnya peran penanaman modal terhadap perekonomian inklusif. Hal ini dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan.b. Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.c. Belum memiliki Peta Potensi Investasi.d. Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).e. Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha.f. Belum optimalnya kinerja satgas percepatan berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani
17.	<p>Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat.b. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya seniman, lembaga dan tenaga seni di beberapa kecamatan; danc. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya.



No	Urusan/Permasalahan
18	<p>Pariwisata:</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Kabupaten Pamekasan sangat beraneka ragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi ini masih perlu pengelolaan lebih lanjut, agar jumlah kunjungan wisata terus meningkat dari tahun 2017 yaitu 30.412 orang, meningkat di tahun 2018 yaitu 30.903 orang, dan kemudian meningkat di tahun 2019 yaitu 55.012 orang. Pertumbuhan sektor pariwisata ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa.</p>
19	<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:</p> <p>Belum optimalnya pelayanan publik terkait kependudukan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat dari cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat tahun 2020 yaitu 83.190 (penerimaan) dan 81.503 (pengeluaran). Artinya bahwa terdapat 1687 alat dan obat kontrasepsi yang belum digunakan. Hal ini karena masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan program keluarga berencana serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.</p>
20.	<p>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil:</p> <p>Persentase penduduk berakte kelahiran pada tahun 2019 mencapai 42,86%, masih ada beberapa penduduk yang belum berakte kelahiran.</p>
21.	<p>Keuangan:</p> <p>Menurunnya penyerapan anggaran belanja tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2020 yaitu 52,10% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 54,46%.</p>
22.	<p>Perpustakaan:</p> <p>Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 yang mencapai 226.738 orang menjadi 100.287 orang pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.</p>
23.	<p>Kearsipan:</p> <p>Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah dilakukan beberapa kali, namun masih belum optimal. Pada tahun 2015 dilaksanakan satu kali, kemudian pada tahun 2018 dua kali dan pada tahun 2019 kegiatan ini telah dilaksanakan satu kali.</p>



No	Urusan/Permasalahan
24.	Kesatuan Bangsa dan Politik: Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kondisi stagnan dari tahun 2015 sampai 2020, yakni sebesar 2 kegiatan. Kondisi stagnan tersebut diakibatkan kurangnya partisipasi Ormas dan LSM terhadap pembangunan daerah.
25	Perindustrian dan Perdagangan: Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten pamekasan yang terdampak Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan utilitas dan kapasitas produksi, sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut juga berdampak pada sisi permintaan dan penawaran ekonomi.

Sumber: Hasil Analisa (2021)

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan per urusan pada tabel di atas, secara keseluruhan Kabupaten Pamekasan masih dihadapkan pada permasalahan utama pembangunan (holistik-tematik) pengendalian wabah Covid 19 dan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid 19.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 *Sustainable Development Goal's (SDG's)*

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup



3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;

2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*)

Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;



6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)

Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*)

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;

10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*)

Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*)

Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;



13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*)

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;

14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*)

Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;

15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*)

Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strongg Institutions*)

Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goal's*)

Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Pamekasan memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017



tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.2 Ketercapaian TPB di Kabupaten Pamekasan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kategori Pencapaian TPB						Total
		(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	13	9	-	2	-	-	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2	5	-	4	-	-	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	19	6	3	5	-	1	34



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kategori Pencapaian TPB						Total
		(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	7	-	-	-	-	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	11	2	-	1	-	-	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	11	2	3	-	1	1	18
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	-	-	-	-	2	-	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	6	-	10	-	-	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	4	-	1	3	-	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneagra	6	3	-	2	-	--	11
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6	2	1	1	3	-	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	-	2	-	-	1	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	-	-	-	-	-	2
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1	-	2	1	-	-	4



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kategori Pencapaian TPB						Total
		(1)*	(2)*	(3)*	(4)*	(5)*	(6)*	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	5	-	3	-	-	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	4	1	5	1		16
JUMLAH		105	55	12	35	10	3	220

*(1) : indikator TPB sudah dilaksanakan sudah mencapai target;

(2) indikator TPB sudah dilaksanakan belum mencapai target;

(3) indikator TPB belum dilaksanakan belum mencapai target;

(4) indikator TPB belum ada data;

(5) indikator TPB tidak ada di wilayah kajian; dan

(6) indikator TPB bukan kewenangan.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ketercapaian TPB Kabupaten Pamekasan sebesar 48% atau sebanyak 105 indikator sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan sudah mencapai target nasional. Sedangkan untuk 55 indikator lain (25%) sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional; 12 indikator (5%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional; 35 indikator (16%) belum ada data; 10 indikator (5%) tidak ada di wilayah kajian; serta 3 indikator lainnya (1%) bukan kewenangan daerah.

4.2.1.2 Asean Economic Community (AEC)

AEC atau *Asean Economic Community* adalah produk yang dihasilkan oleh karena adanya globalisasi yang membentuk sebuah kesatuan ekonomi (*unity*) di Kawasan Asia Tenggara. Sama halnya Uni Eropa,



fokus strategi AEC adalah pengembangan aset negara untuk mampu bersaing dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Indonesia yang berada di wilayah ASEAN tentunya harus menyiapkan berbagai aspek untuk bersaing di pasar bebas ASEAN ini. Namun, sebelum tampil dikancah daya saing ASEAN, daya saing nasional tentunya harus juga ditingkatkan. Hingga saat ini daya saing nasional, dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi, dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan.

Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional, dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, dengan formula 5W+1H (*what, why, when, where, who, dan how*), telaah AEC bertujuan untuk menjelaskan *snapshot* daya saing nasional, dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC.

Pertama, *What*, apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing merupakan isu utama dalam wacana pembangunan setiap bangsa, atau negara. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu Institusi (organisasi), Kota, Daerah, Wilayah, atau Negara dalam mempertahankan, atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan. Konsep daya saing negara menurut *European Commission* adalah kemampuan memproduksi barang, dan jasa sesuai kebutuhan pasar internasional (global) yang diiringi dengan



kemampuan. Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka, suatu masyarakat, atau daerah hanya akan eksis, atau bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (Halwani, 2002: 423). Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan, dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul, baik secara kuantitas, ataupun kualitas pada skala nasional antar-daerah, atau pada skala internasional, antar-negara. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi, dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan, dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Kedua, *Why*, mengapa daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan pada era AEC. Jawabannya, karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar, dan ujung tombak daya saing nasional, serta akan menjadi faktor terpenting bagi Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Ketiga, *When*, kapan daya saing negara perlu dibangun, dan ditingkatkan. Sejatinya, indikator daya saing negara dan daerah dibutuhkan sejak dulu, sekarang, dan di masa akan datang, namun dimensi waktu (kapan) diperlukan penguatan kembali indikator daya saing negara, dan daerah-daerah di semua bidang, sektor, dan kegiatan pembangunan semakin terasa urgensi, dan signifikansinya saat ini.

Keempat, *Where*, dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan



otonomi daerah di Indonesia diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa level analisis penguatan kembali indikator daya saing Negara, bukan hanya pada tingkat nasional, dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan level (lokus) daerah otonom yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 22/1999; dan 32/2004; 23/2014; 9/2015), bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (Kecamatan, Kelurahan/Desa) di masyarakat, sebagai lokus (area) pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima, *Who*, siapa saja aktor (individu, institusi) yang berkepentingan terhadap penguatan, dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Aktor (birokrat) yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara (pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat) terfokus pada aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional yang meliputi bidang reformasi birokrasi, dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi, dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada 3 (tiga) bidang prioritas pembangunan lainnya, yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian.



Saat ini, dan di masa akan datang, tentu saja diharapkan selain melibatkan aktor-aktor pada lokus, dan fokus kelembagaan publik di atas, juga semakin melibatkan (kemitraan yang kolaboratif) pemangku kepentingan pada semua jenis, level, dan elemen masyarakat madani, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara anggota AEC.

Keenam, *How*, bagaimana cara (upaya) membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing Negara, atau daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu caranya adalah melakukan penataan, dan revitalisasi fungsi, serta peran kelembagaan (institusi birokrasi) di berbagai bidang, sektor, dan kegiatan, sebagai salah satu pilar daya saing.

4.2.1.3 Pandemi Corona *Virus Disease*

Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan pemulihan perekonomian. Adapun enam (6) arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;
2. Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, big data, IOB (*Immigration On Board*), maupun AI (*Artificial Intelligence*);



3. Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4. Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5. Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
6. Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

4.2.1.4 Pemulihan Ekonomi Nasional

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah mengamanatkan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP Nomor 23 Tahun 2020



kemudian telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Program PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut. Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa Program PEN dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

1. asas keadilan sosial;
2. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. mendukung Pelaku Usaha;
4. menerapkan kaidah kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam ruang lingkup pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara;
2. Penempatan dana;
3. Investasi pemerintah;
4. Penjaminan;
5. Kebijakan pemerintah melalui belanja negara.

Bila dikaitkan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Pamekasan salah satunya adalah menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana



anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. *Output* tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJKP dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJKP dan terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Isu RPJMN 2020-2024

4.2.2.1.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Salah satu isu strategis pembangunan nasional 5 (lima) tahun mendatang, adalah berkaitan dengan ekonomi. Mengingat isu ekonomi adalah isu yang penting karena memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan, dan berdampak pula terhadap segala aspek/urusan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Salah satu cara agar kita dapat mengetahui kondisi ekonomi yaitu melalui pemetaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan



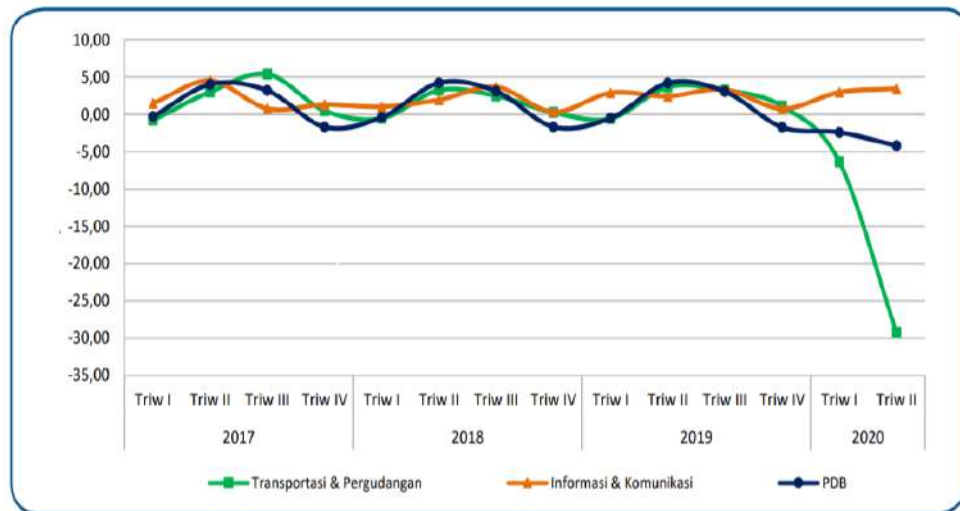
ekonomi sendiri menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang mana menjadi fokus internasional untuk dilakukan upaya pencapaiannya. Hal itu tertera dalam SDG's yang terletak pada fokus kedelapan yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (*decent work and economic growth*).

Tujuan dari upaya pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan. Berkaitan dengan upaya tersebut, pemerintah pusat berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Melalui peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi harapannya dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas dengan adanya keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan dasar agar membentuk sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri,

pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Adapun implementasi dari kedua pendekatan tersebut akan didukung dengan perbaikan data sehingga mampu menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan dalam upaya mencapai kualitas kebijakan. Adapun pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan beberapa lapangan usaha adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Pertumbuhan PDB Nasional berdasarkan Lapangan Usaha

Sumber: BPS, 2020

Pada gambar di atas, menggambarkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan tersebut diantaranya yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 29,22 persen; Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,31 persen; dan jasa lainnya sebesar 15,12 persen. Sementara pada sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 16,24 persen; kemudian informasi dan komunikasi sebesar 3,44 persen; dan Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah



dan daur ulang sebesar 1,28 persen. Melalui peningkatan yang positif tersebut, harapannya pengelolaan sumber daya ekonomi, mulai dari pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perairan maupun energi dan informasi komunikasi, mampu untuk memasok bahan baku yang berkualitas sehingga menjadi sebuah produk yang bernilai dan berkualitas tinggi. Adapun hal strategis yang dapat dilakukan dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu:

- 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
- 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
- 3) Transformasi Struktural; dan
- 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

Adapun Arah kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

- 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- 2) Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan
- 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.

B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

- 1) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- 2) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;



- 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
- 4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
- 5) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4.2.2.1.2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Isu mengenai pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan adalah salah satu bentuk integrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini karena, selain syarat akan berlangsungnya pembangunan berkelanjutan juga sebagai upaya pembangunan untuk membentuk perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, maka dibutuhkan pendekatan dan strategi melalui optimalisasi pengembangan wilayah. Adapun pengembangan wilayah nanti diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) strategi utama, yaitu pertumbuhan dan strategi pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan, sementara strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-

pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi dari strategi pertumbuhan dan pemerataan yang berkualitas maka dibutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan suatu keterkaitan antar wilayah serta penguatan rantai antara penghasil sumberdaya. Harapannya melalui 2 (dua) strategi tersebut dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
1	Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah
2	Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah
3	Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum
4	Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah
5	Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Kewilayahan
	di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa
6	Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi
7	Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan
8	Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional
9	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat
10	Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah

Sumber: RPJMN 2020-2024

Tidak hanya arah kebijakan dalam upaya pembangunan berbasis kewilayahan, tetapi juga terdapat strategi untuk mendukung arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Strategi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

No.	Fokus Strategi	Strategi
1	Pertumbuhan Ekonomi	Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya



No.	Fokus Strategi	Strategi
2	Pemerataan Ekonomi	<p>pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya</p> <p>memenuhi pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan</p>

Sumber: RPJMN 2020-2024

4.2.2.1.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Pemenuhan layanan dasar;
- 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
dan
- 5) Pengentasan kemiskinan; dan
- 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Oleh karena itu, kedepan pula pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan arah pembangunan serta strategi pembangunan, sehingga mampu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kebijakan pembangunan manusia sebagai berikut:

Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Manusia

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
		Integrasi sistem administrasi kependudukan
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial
		Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran
		Perlindungan sosial adaptif
		Peningkatan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
4	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
		Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
		Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata
		Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan



No.	Arah Kebijakan	Strategi
		pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar wilayah
		Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya
		Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		Peningkatan kualitas pemuda
6	Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
		Keperantaraan usaha dan dampak sosial
		Reformasi agraria
		Perhutanan sosial
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi
		Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Sumber: RPJMN 2020-2025

4.2.2.1.4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus



didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial.

Modernitas merupakan salah satu yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang salah satu caranya melalui pembangunan kebudayaan, dan karakter bangsa. Selain bertujuan untuk mencapai modernitas, pemerintah berharap pula melalui pembangunan budaya dan karakter bangsa akan terwujud mental bangsa yang disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih yang nantinya akan membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus dalam upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa melainkan pula pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui:

- 1) Pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti;
- 2) Pendidikan agama dan etika;
- 3) Pendidikan kewargaan dan bela negara;
- 4) Peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 5) Peningkatan peran keluarga dan masyarakat;
- 6) Perlindungan perempuan dan anak; dan
- 7) Peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam upaya melaksanakan pembangunan budaya

dan karakter bangsa terdapat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya, yaitu:

- 1) Melemahnya ketahanan budaya bangsa
- 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan bangsa
- 3) Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti
- 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama
- 5) Belum kukuhnya kerukunan umat beragama
- 6) Rendahnya budaya literasi; dan
- 7) Belum optimalnya peran keluarga.

Adapun arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya membangun budaya bangsa, dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Membangun Budaya dan Karakter Bangsa

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Memperkuat ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
		Penguatan pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di era globalisasi
		Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah
		Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi	Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
		Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
		Pengembangan budaya bahari dan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	arah perkembangan peradaban dunia	sumber daya maritim Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
3	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan
4	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi Pengembangan budaya Iptek dan inovasi Peningkatan kreativitas dan daya cipta Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sumber: RPJMN 2020-2025

4.2.2.1.5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Mengingat pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, dibutuhkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Tabel 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau
		Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
		Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman
		Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Transportasi Jalan
		Konektivitas Transportasi Kereta Api
		Konektivitas Transportasi Laut
		Konektivitas Transportasi Udara
		Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda
3	Infrastruktur Perkotaan	Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan
		Infrastruktur Jalan Perkotaan
		Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan
		Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan



No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan
		Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
4	Energi dan Ketenagalistrikan	<p>Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa; (b) pemanfaatan pengembangan mini/micro grid berbasis energi bersih; (c) pembangunan Pembangkit Listrik PLTA <i>Pumped Storage</i>; dan (d) pemanfaatan teknologi yang <i>high efficiency and low emission (HELE)</i></p> <p>Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan <i>Energy Service Company (ESCO)</i>; (b) memperluas, merehabilitasi dan upgrading sistem transmisi dan distribusi; (c) mengembangkan sistem informasi manajemen dan data control; (d) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi <i>smart grid</i>.</p> <p>Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui (a) penambahan kapasitas pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik; (b) pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (c) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (d) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (e) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (f) peningkatan infrastruktur gas bumi; (g) pengembangan cadangan penyangga/ operasional BBM dan LPG; serta (h) pemanfaatan <i>economically least cost fuels</i> untuk memasak (jaringan gas perkotaan, LPG, dan <i>electric and clean cook stove</i>)</p>

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
		<p>Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi badan regulator; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; (c) penerapan <i>power wheeling</i> untuk mendorong proyek EBT dapat langsung menjual ke pelanggan; (d) mereviu kebijakan harga EBT berbasis batas biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan; dan (f) implementasi metode penentuan <i>revenue requirement</i> yang optimal.</p> <p>Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif dan/atau dukungan pemerintah untuk peningkatan finansial PT PLN; (c) penerapan kembali <i>automatic tariff adjustment</i>; dan (d) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan <i>leverage asset</i>.</p>
5	Transformasi Digital	<p>Penuntasan Infrastruktur TIK</p> <p>Pemanfaatan Infrastruktur TIK</p> <p>Fasilitas Pendukung Transformasi Digital</p>

Sumber: RPJMN 2020-2025

4.2.2.1.6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi

menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.

Tabel 4.8 Arah Kebijakan dan Strategi Membangun Lingkungan Hidup, Menciptakan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Arah Kebijakan dan Strategi	Proses
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggulangan Bencana,
		Peningkatan Ketahanan Iklim
3	Pembangunan Rendah Karbon	Pembangunan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan Berkelanjutan
		Penanganan Limbah
		Pengembangan industri hijau
		Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan

Sumber: RPJMN 2020-2025

4.2.2.1.7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

Terwujudnya stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Hal tersebut dilakukan melalui upaya terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat sehingga akan berdampak kepada stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 4.9 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Fokus Kebijakan	Proses
1	Konsolidasi Demokrasi	Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif
		Menguatnya Wawasan Kebangsaan
		Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil



No	Fokus Kebijakan	Proses
		Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif
		Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri
		Menguatnya kerjasama pembangunan internasional
		Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional
		Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	Sistem Hukum Nasional yang Mantap	Terwujudnya regulasi yang berkualitas
		Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
		Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
		Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan
4	Reformasi Kelembagaan Birokrasi	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri
		Penguatan Kemampuan Pertahana
		Penguatan Keamanan Laut
		Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber

Sumber: RPJMN 2020-2025



**Tabel 4.10 Fokus Kebijakan Memperkuat Stabilitas
POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Konsolidasi Demokrasi	Penataan Lembaga Demokrasi
		Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil
		Peningkatan Kualitas Informasi Publik
		Penguatan Wawasan Kebangsaan
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri
		Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional
		Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional
		Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
3	Sistem Hukum Nasional yang Mantap	Optimalisasi Upaya Anti Korupsi
		Penataan Regulasi
		Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
		Perbaiki Sistem Peradilan
4	Reformasi Kelembagaan Birokrasi	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit
		Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme
		Penguatan kemampuan pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau



No	Arah Kebijakan	Strategi
		<i>Minimum Essential Force</i> (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpalhankam
		Penguatan keamanan laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan <i>relay time</i> dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, <i>response time</i> dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut
		Peningkatan keamanan personal dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, membaiknya Indeks WHO QoL (Indeks Kualitas Hidup), meningkatnya <i>clearance rate</i> , meningkatnya <i>respons time</i> , membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya indeks kepuasan layanan rehabilitasi
		Penguatan keamanan dan ketahanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam <i>Global Cybersecurity Index</i> .

Sumber: RPJMN 2020-2025

4.2.2.2 Covid-19

4.2.2.2.1 Arahan Presiden Bendung Covid-19

Arahan Presiden Bendung Covid-19 adalah arahan Presiden yang dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat dan pemulihan perekonomian. Adapun enam (6) arahan presiden dalam membendung Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan sehingga tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat;



2. Dukungan sarana dan prasarana medis yang memadai, termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut sensor tubuh, big data, IOB (*Immigration On Board*), maupun AI (*Artificial Intelligence*);
3. Komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan pada media harus dilakukan dengan detail dan baik;
4. Penegakan hukum dengan dukungan aparat negara;
5. Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah; dan
6. Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19.

4.2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Sebagai tindaklanjut dari percepatan pembangunan program prioritas nasional di Provinsi Jawa Timur dikeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Di dalam Lampiran Peraturan Presiden ini terdapat 4 (empat) usulan dari Kabupaten Pamekasan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Pembangunan pabrik gula beserta pengembangan budidaya tebu dengan rencana anggaran sebesar 210,00 Milyard dengan sumber dana dari KPBU;
2. Pengembangan RSUD Moch. Noer dengan rencana anggaran sebesar 295,00 Milyard dengan sumber dana dari KPBU;



3. Pengembangan Pelabuhan Pasean dengan rencana anggaran sebesar 150,00 Milyard dengan sumber dana dari APBN;
4. Pengembangan Pelabuhan Branta dengan rencana anggaran sebesar 80,00 Milyard dengan sumber dana dari APBN.

4.2.2.3.1 Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan

Tahun 2018, produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 ton. Potensi produksi garam Provinsi Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Saat ini diterapkan sistem pembuatan rumah garam yang dapat meningkatkan efisiensi produksi garam. Lokasi rumah garam saat ini terdapat pada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo.

4.2.2.3.2 Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan

Sektor dan Komoditas Unggulan Pertanian dan perikanan menjadi sektor andalan di Kawasan Madura dan Kepulauan. Komoditas pertanian unggulan dari kawasan ini diantaranya adalah jagung, bawang merah, tebu, dan Sapi Madura sedangkan garam dan rumput laut menjadi komoditas andalan untuk perikanan. Adapun sektor pendukung meliputi industri pengolahan dan pariwisata. Industri pengolahan berkisar pada pabrik pengolahan tebu, pengolahan garam dan industri mikro kecil rumput laut,

sedangkan sektor pariwisata menyumbangkan komoditas wisata alam pantai dan bahari sebagai sub sektor andalan. Kawasan Madura dan Kepulauan menjadi pemasok garam terbesar nasional, salah satu pemasok terbesar kebutuhan gula nasional, pemasok rumput laut dan sapi potong terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.11 Produktivitas Komoditas Unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan

Kabupaten	Komoditas Unggulan
Kabupaten Sampang	Jambu mente (1.309,16 ton)
	Cabai jamu (589,6 ton)
	Semangka (349,5 ton)
Kabupaten Pamekasan	Pisang (3.271 ton)
	Bawang merah (15.228,6 ton)
	Sapi potong (59.415 ekor)
	Jagung (5.498,6 ton)
	Tembakau (4.136 ton)
Kabupaten Sumenep	Rumput Laut (624.026,32 ton)
	Garam (232.000 ton)
	Jagung (17.481,43 ton)
	Cabai rawit (6.529,7 ton)
	Bawang merah (4.300,9 ton)
	Jambu mente (1.092,93 tin)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

4.2.2.3.3 Potensi dan Tantangan

Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan memiliki aneka potensi sumber daya alam dan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa potensi sumber daya alam dan lingkungan berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Dari sektor pertanian potensi wilayah Pulau Madura didominasi oleh pertanian sawah tadah hujan dan ladang dengan komoditas andalan jagung dan bawang merah. Kombinasi antara kondisi tanah dan geologi di kawasan ini kurang mendukung pengadaan lahan pertanian irigasi atau pertanian lahan basah sehingga intensifikasi pertanian



lahan kering berjalan lebih optimal. Adapun lahan pertanian irigasi terdapat di sebagian kecil kawasan Madura dan kepulauan seperti di sekitar wilayah perkotaan Kabupaten Sumenep, bagian selatan Kabupaten Pamekasan, dan sebagian kecil Kabupaten Sampang bagian barat daya. Komoditas jambu mente juga menjadi komoditas andalan khususnya di Kabupaten Sampang karena di wilayah wilayah bagian utara Kabupaten Sampang memiliki kondisi lahan yang sangat sesuai untuk menghasilkan buah jambu mente dengan kualitas terbaik.

Selain itu, sapi Madura menjadi komoditas unggulan di sektor peternakan. Ditinjau dari aspek iklim dan ketersediaan pangan ternak, sebagian besar Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep menjadi wilayah paling optimal untuk pengembangan ternak sapi Madura, terlebih di Pulau Sapudi yang menjadi wilayah permurnian populasi sapi Madura. Ditinjau dari bentuk kawasan yang merupakan kawasan kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang diantara kawasan ekonomi lain di Provinsi Jawa Timur tentu menyimpan kemelimpahan potensi perikanan. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang potensial mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. Komoditas rumput laut kawasan Madura dan kepulauan telah mampu menembus pasar luar negeri dan menjadikan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai pemasok rumput laut terbesar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, khusus Kabupaten Sumenep mampu memproduksi 624.026,32 ton rumput laut pada tahun 2017. Di lain sisi komoditas garam menjadi komoditas perikanan yang fenomenal hingga Pulau Madura dikenal sebagai pemasok garam terbesar nasional. Kondisi pesisir yang kering dengan kombinasi suhu tinggi dan kelembaban udara



rendah menjadikan garam memiliki potensi pengembangan yang sangat baik di kawasan ini.

4.2.2.3.4 Penguatan Konektivitas

Masih belum optimalnya keterkaitan antar pusat ekonomi kawasan membuat urgensi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penghubung antar wilayah sangat besar. Beberapa program prioritas penguatan infrastruktur wilayah direncanakan pemerintah untuk mengupayakan penguatan konektivitas antar wilayah dalam kawasan pendukung Madura dan kepulauan (PKL Sampang - PKW Pamekasan - PKL Sumenep) serta penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi di level provinsi dan nasional.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kawasan Madura dan kepulauan menjadi upaya awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar khususnya sumber daya air terus diupayakan pemerintah dengan pembangunan SPAM regional lintas madura didukung normalisasi waduk klampis. Adanya rencana program tersebut menjadi solusi efektif terhadap permasalahan sumber daya air yang sering dialami masyarakat Madura, yaitu keterbatasan perolehan air bersih di Pulau Madura akibat kekeringan saat musim kemarau. Konektivitas sumber daya air antar wilayah dalam kawasan Madura diharapkan tercapai dengan diupayakannya pembangunan SPAM yang rencananya dapat mengalirkan air ke seluruh penjuru Pulau Madura. Eksistensi Waduk Klampis juga diharapkan mampu mengatasi keterbatasan perolehan air saat musim kemarau, khususnya untuk pengairan pada lahan pertanian.



Infrastruktur pendukung transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dikembangkan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan lintas selatan (Pansela) Madura dan peningkatan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dampak pembangunan Pansela diharapkan mampu membangun efisiensi aliran produk dari komoditas unggulan Kawasan Madura dan Kepulauan menuju Kawasan Gerbangkertosusila. Dibangunnya jalan tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi Kawasan Madura dan kepulauan mengingat konektivitas dengan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila akan menguat. Program pengembangan kapasitas Jalan Raya Sumenep - Pamekasan juga ditujukan untuk efektivitas aliran logistik dan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

4.2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

1. Jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta



- setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya);
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap;
 3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut:

- a. Kondisi Global (Eksternal)



Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri dan ekonomi digital;

b. Kondisi Nasional (Internal)

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 57% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp 721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp 792 triliun pada Tahun 2019;

c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis

Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitas rendah.

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita baru sebesar Rp 4,6 juta per bulan. Dengan memperhitungkan potensi perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar \$7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 27 juta per bulan.



Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan



perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan

- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
- d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Ketenagakerjaan;



- c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- d. Kemudahan berusaha;
- e. Dukungan riset dan inovasi;
- f. Pengadaan tanah;
- g. Kawasan ekonomi;
- h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. Pengenaan sanksi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam Sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu



melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi.



4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1 RPJMD Jawa Timur 2019-2024

Adapun isu-isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 :

- a. Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dan Antar Wilayah
- b. Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas Serta Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- c. Internalisasi Demokrasi Kewargaan dalam Ruang Publik (*Public Sphere*) yang Antidiskriminasi
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif dan Inklusif
- e. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah
- f. Perluasan Akses Lapangan Pekerjaan
- g. Penguatan Kedaulatan Pangan Berbasis Masyarakat
- h. Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Utuh Berbasisikan Nilai Keagamaan dan Kebudayaan
- i. Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan (RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat)

Bagi Kabupaten Pamekasan, isu-isu strategis yang diidentifikasi, selain sejauh mungkin diupayakan tetap sinkron dengan arah kebijakan jangka panjang nasional dan kebijakan jangka panjang Provinsi Jawa Timur, juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 Pelaksanaan Tahun ke Empat dengan penyajian sebagai berikut :



1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 (awal RPJPD tahun ke empat) masih berada di angka 66,26 poin, atau masih dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 71,71 poin. Tanpa didukung fondasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, bukan tidak mungkin kesenjangan antar wilayah akan makin terpolarisasi dan menempatkan Kabupaten Pamekasan pada ranking terendah di antara kabupaten kota di Jawa Timur.
2. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebesar 129.410 atau sebesar 14,60%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 sebesar 3,49%.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,54%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur yaitu sebesar -2,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%.

4.2.4.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan yang dirumuskan dalam rangka merealisasikan ikhtiar tersebut antara lain:
 - a. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu;



- b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan berkualitas bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
 - d. Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;
 - e. Meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak dan perempuan serta keluarga miskin di berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.
2. Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tersebut diatas maka sesuai dengan sasaran pokok pertama yakni terjadinya pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta kesenjangan antar wilayah yang terjadi maka kebijakan diarahkan pada:
- a. Mendorong pemberdayaan dan pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin;
 - b. Mengembangkan diversifikasi usaha bagi masyarakat miskin agar selalu memiliki alternatif dan memiliki keberdayaan yang lebih tinggi;
 - c. Meningkatkan posisi tawar dan mengurangi kerentanan keluarga miskin. Program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya lebih mengedepankan program yang berorientasi pada proses pemberdayaan yang intinya bersifat



- people centered, participatory empowering dan sustainable;
- d. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin; Untuk mencegah agar berbagai kelompok masyarakat miskin tidak menjadi korban tindakan represive, eksploitatif dan intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka, maka ke depan yang dibutuhkan adalah program perlindungan sosial yang benar-benar efektif;
 - e. Meningkatkan peran lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan dan berjalan secara efektif.
3. Agar sasaran pokok pembangunan di sektor agropolitan dan minapolitan ini dapat diselenggarakan secara maksimal maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah:
- a. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mempercepat perkembangan wilayah pedesaan;
 - b. Menyediakan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi yang mampu mendukung pengembangan konsep agropolitan dan minapolitan;
 - c. Meningkatkan akses terhadap aktivitas produksi pertanian, perikanan dan kelautan



- yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. Mengintensifkan sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta penerapan prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agro-industri);
 - e. Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi dan produktivitas serta daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolahan hasil ikan.

4.2.5 Telaahan Dokumen Lainnya

4.2.5.1 Telaahan Dokumen RTRW Kabupaten Pamekasan

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 telah menelaah RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 sehingga didapatkan telaahan berkaitan dengan rencana struktur ruang; rencana pola ruang dan; indikasi program pemanfaatan ruang. Melihat pentahapan 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2032, RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 masuk dalam Tahapan I (2017-2021) dan II (2022-2026). Dimana mulai tahun 2017, hasil



telaahan struktur dan pola ruang tersaji ke dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.12 Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang

No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan						
1.1	Pengembangan kawasan agropolitan	Pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan	<p>Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : salak, pisang dan pepaya. - Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicornong, Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan kambing. - Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Haji, dan Desa Plakpak, dengan 				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			arahan pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan durian. - Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamaroh, Desa Bangkes, Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam petelur.				
		Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan	Kawasan Agropolitan RUPANANDUR				
1.2	Pengembangan Pusat Desa Berhirarki	Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> Desa Dempo Timur, Desa Bajur Tengah, Desa Pasanggar, dan Desa Sopah 				
		Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri					
		Pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan sektor unggulan					
		Meningkatkan aksesibilitas pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan					
		Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan					
2	Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan						
2.1	Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan	Pengembangan Perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	PKW : Perkotaan Pamekasan PKLp : Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru PPK : Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaan Batumarmar, Perkotaan Pasean, Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis,				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur.				
		Mempercepat pengembangan perkotaan	Perkotaan Waru dan Pakong				
		Pembangunan prasarana sosial-ekonomi untuk mendorong pengembangan perkotaan sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan.	Perkotaan Batumarmar, Pasean, Larangan, Pegantenan, Palengaan, Proppo, Pademawu, Galis, Kadur, Tlanakan.				
		Pengembangan/Peningkatan Rumah Sakit	Pamekasan, Perkotaan Waru, dan Pakong				
		Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Posyandu dan Prasarana Kesehatan Lainnya;	Kecamatan Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis, Proppo, Pegantenan, Palengaan, Kadur, Pasean dan Batumarmar.				
		Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan pasar umum.	Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, Galis, Proppo, Pakong, Pegantenan, Kadur, Waru, Palengaan, Pasean, dan Batumarmar.				
		Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan :	Kecamatan Larangan, Proppo, Pakong, Waru, dan Batumarmar				
		1. Pasar Hewan,					
		2. Rumah Potong Hewan	Kecamatan Pamekasan, Proppo, Pakong, Palengaan, Pegantenan dan Waru.				
		3. Pusat Kesehatan Hewan.	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Pembangunan, Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan	Wilayah Kabupaten Pamekasan				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
2,2	Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang belum mempunyai Rencana Detail					
		Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi pada kawasan perkotaan yang sudah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang	Perkotaan di Kabupaten Pamekasan				
		Pemetaan dan Pengukuran Tanah	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Penyusunan Informasi Kepemilikan Tanah	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Penyusunan Data Base profil desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Pemantauan, Pemetaan dan Pendataan Kawasan Kritis	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; dan Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Pemantapan Kelembagaan Pengendalian Tata ruang dan Lingkungan Hidup	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Pengendalian dan Pengawasan IMB	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Layanan Kesehatan	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
3	Perwujudan Sistem Prasarana						
3.1	Perwujudan						



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Sistem Prasarana Utama						
3.1.1	Pengembangan sistem transportasi darat	Rencana Pengembangan Jalan Nasional (Arteri Primer)	Ruas jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget; dan rencana pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional rencana terdiri dari atas ruas Bangkalan – Tanjung Bulu Pandan – Ketapang – Sotabar – Sumenep.				
		Jalan Provinsi	Ruas jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas batas Kabupaten Sampang – Sotabar – Batas Kabupaten Sumenep, Pamekasan – Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) – Pamekasan				
		Jalan Jalan Kabupaten	Melakukan pelebaran jalan pada ruas jalan < 6 meter dan peningkatan kualitas perkerasan jalan. Untuk rencana pelebaran jalan dilakukan sehingga terpenuhi persyaratan minimum sebagai ruas jalan lokal primer meliputi ruas : 1 Bandaran - Gro'om 2 Tattangoh - Gro'om				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			3 Penaguan - Palengaan Laok				
			4 Teja Timur - Gro'om				
			5 Patemon - Teja Timur				
			6 Laden - Teja Timur				
			7 Laden - Bunder				
			8 Bunder - Pademawu Timur				
			9 Pademawu Timur - Padelegan				
			10 Murtajih - Bunder				
			11 Bunder - Konang				
			12 Buddagan - Konang				
			13 Pademawu Timur - Gudang				
			14 Konang - SP. Galis				
			15 Pademawu Barat - Pademawu Timur				
			16 Sp. Galis - Capak				
			17 Ponteh - Galis				
			18 Palengaan - Pangerreman				
			19 Bujur Barat - Pangerreman				
			20 Bandungan - Guluk-guluk				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			21 Bujur Timur - Bujur Tengah				
			22 Panglegur -Tlanakan				
			23 Kadur – Sukolilo				
			24 Beltok - Palengaan Laok				
			25 Pegantenan - Bujur Barat				
			26 Waru - Tlonto Raja				
			27 Batumarmar - Bujur Barat				
			28 Beltok - Pegantenan				
			29 Palengaan - Pegantenan				
			30 Bajur - Sanah Tengah				
			31 Waru Barat - Dempo Timur				
			32 Waru Barat - Sana Tengah				
			33 Kadur - Klompang Timur				
			34 Dempo Barat - Sana Tengah				
			35 Lenteng - Palengaan				
			36 Rangperang Laok - Potoan Laok				
			37 Blumbungan - Beltok				
			38 Pamekasan - Beltok				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			39 Cok Gunung - Bujur Barat				
			40 Bandungan - Pegantenan				
			41 Pakong - Klompang Barat				
			42 Ponjangan Timur - Batu Bintang				
			43 Palengaan Laok - Tlambah				
			44 Kaduara Barat - Cenlece				
			45 Lenteng - Teja Barat				
			46 Blumbungan - Trasak				
			47 Larangan - Kadur				
			48 Penaguan - Gro'om				
			49 Gugul - Taro'an				
			50 Galis - Lembung				
			51 Panempan - Pegagan				
			52 Larangan Tokol - Pegagan				
			53 Tambung - Dasok				
			54 Pademawu Barat - Dasok				
			55 Montok - Gagah				
			56 Pamoroh - Kadur				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			57 Dempo Barat - Blindang				
			58 Pengerreman - Bts Sampang				
			59 Branta - Branta Pesisir				
			60 Batu Kerbuy - Dempo Barat				
			61 Tentenan Barat - Blumbungan				
			62 Nyalaran - Tambung				
			63 Pad. Barat - Sp. Pad. Barat				
			64 Palengaan Laok - Bts. Sampang				
			65 Cenlece - Batu Ampar				
			66 Seddur - Somalang				
			67 Nyalabu Laok - Larangan Badung				
			68 Bartim - Murtajih				
			69 Buddagan - Lemper				
			70 Bugih - Kodik				
			71 Dasok - Mondung				
			72 Bulangan Haji -Bulangan Branta				
			73 Lesong Daja - Batubintang				
			74 Kapong - Ponjanan Barat				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			75 Tegengser Daja - Tegengser Daja 76 Padelegan - Pegagan 77 Padelegan - Pegagan 78 Tampojujung - Guwa - Tamp. Tengginah 79 Bugih - Klampar 80 Sukalila - Kertagenah Tengah 81 Ponteh - Polagan 82 Bettet - Teja Barat 83 Larangan Slampar - Mangngar 84 Branta Tinggi - Tlasah 85 Kaduara Barat - Polagan 86 Artodung - Taraban 87 Sumedangan - Prekbun 88 Lawangan Daya - Sentol 89 Pademawu Timur - Majungan 90 Larangan Dalam - Sokolilo 91 Grujugan - Larangan Luar 92 Pakong - Tebul Barat				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			93 Bulangan Haji - Palesanggar 94 Kacok - Palesanggar 95 Rekkerrek - Panaan 96 Angsanah - Panaan 97 Penglegur - Ceguk 98 Dempo Timur - Prancak 99 Tamberru - Pesisir 100 Nyalabu Laok - Bettet 101 Bulay - Polagan 102 Mangngar - Debuan				
		Rencana pengembangan jaringan kereta api meliputi: Arahan pengembangan jalur perkeretaapian	Bangkalan - Kamal - Sampang - Pamekasan - Sumenep dan Penyambungan jaringan jalur perkeretaapian Pulau Madura ke jaringan perkeretaapian di Surabaya				
		Revitalisasi jalur	Kamal - Pamekasan - Sumenep dan menghidupkan kembali jalur rel Kereta Api Mati Bangkalan - Sampang - Pamekasan				
		Rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I	Kecamatan Pamekasan				
		Rencana pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan	Kecamatan Tlanakan Kecamatan Waru				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		1. Peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A 2. Peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B 3. Rencana Pengembangan Terminal Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pademawu ▪ Kecamatan Galis ▪ Kecamatan Larangan ▪ Kecamatan Propo ▪ Kecamatan Kadur ▪ Kecamatan Palengaan ▪ Kecamatan Pegantenan ▪ Kecamatan Pakong ▪ Kecamatan Batumarmar ▪ Kecamatan Pasean 				
		Rencana Pengembangan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Berupa Rute Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceguk - Lawangan Daya; ▪ Ceguk - Bugih; ▪ Lawangan Daya - Padelegan; ▪ Lawangan Daya - Sotabar; ▪ Lawangan Daya - Branta Pesisir; ▪ Lawangan Daya - Kadur; ▪ Lawangan Daya - Pakong; ▪ Lawangan Daya - Pegagan ▪ Bugih - Palengaan; ▪ Bugih - Pegantenan; ▪ Bugih - Proppo; dan ▪ Pegantenan - Batumarmar - Pasean 				
		Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dermagapenyeberangan lintas antar kabupaten meliputi pelabuhan Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari 				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			kabupaten kePasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi <ul style="list-style-type: none">dermaga penyeberangan lintas antar provinsi meliputi pelabuhan di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari kabupaten ke luar Provinsi lain.				
		Rencana pengembangan terminal angkutan barang	Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan				
3.1.2	Pengembangan sistem jaringan transportasi laut						
		Rencana Pelabuhan pengumpul	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan				
		Rencana pengembangan pelabuhan pengumpan	<ul style="list-style-type: none">pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari Daerah ke Pulau Jawa;pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk melayani angkutan barang dan sapi dari kabupaten menuju Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi; danpelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			transportasi laut dari kabupaten ke Provinsi lain				
3.2	Pengembangan sistem jaringan transportasi laut						
3.2.1	Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya						
	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi	Pengembangan jaringan listrik	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU	Perbatasan Desa Ambat dan Perbatasan Desa Kramat Kecamatan Tlanakan				
		Pengembangan energi alternatif berupa energi biomassa	Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur				
		Penelitian dan pengembangan sumber energi listrik alternatif berupa energi surya	Seluruh kecamatan				
		Pengembangan jaringan listrik baru untuk wilayah-wilayah hunian yang belum terlayani fasilitas listrik	Wilayah Kabupaten Pamekasan				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		Peningkatan infrastruktur pendukung termasuk komputerisasi sistem administrasi pelayanan pelanggan	Wilayah Kabupaten Pamekasan				
		Rencana pengembangan area konservasi pada area pengembangan jaringan listrik SUTT	Kecamatan Pamekasan – Kecamatan Proppo				
		Pengembangan gardu induk	Kecamatan Pamekasan				
3.2.2	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telematika	Pembangunan Jaringan Telematika	Wilayah Kabupaten				
		Penataan dan Penyusunan Pedoman Sistem Jaringan Telematika	Wilayah Kabupaten				
		Pengembangan Telekomunikasi yaitu dengan Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama.	Wilayah Kabupaten				
		Pengembangan sistem informasi dan Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi	Wilayah Kabupaten				
3.1.4	Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya		Wilayah Kabupaten				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Air						
		Survey dan Pemetaan Sumber Air	Wilayah Kabupaten				
		Pemanfaatan D.I	<ul style="list-style-type: none">▪ D.I Samiran				
			<ul style="list-style-type: none">▪ D.I Bales;▪ D.I Bangsokah;▪ D.I Batu Bintang;▪ D.I Batu Kerbuy;▪ D.I Blumbungan;▪ D.I Bulai;▪ D.I Cen Lencen;▪ D.I Duko I;▪ D.I Grujugan;▪ D.I Kapt. Blumbungan;▪ D.I Klampar;▪ D.I Kolbuk;▪ D.I Lancar;▪ D.I Panaguan;▪ D.I Penang;▪ D.I Polagan;				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			<ul style="list-style-type: none">▪ D.I Prompong;▪ D.I Raja;▪ D.I Taman Waru;▪ D.I Toronan;▪ D.I Angsoka;▪ D.I Ba Olah;▪ D.I Bajang;▪ D.I Balang;▪ D.I Batu Karang;▪ D.I Bungor;▪ D.I Burneh;▪ D.I Cangkreng;▪ D.I Dempo Timur;▪ D.I Dempo;▪ D.I Duko;▪ D.I Duko II;▪ D.I Duko II;▪ D.I Duko I;▪ D.I Enis;				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			<ul style="list-style-type: none">▪ D.I Glagas;▪ D.I Jrangoh;▪ D.I Kebun;▪ D.I Kenek;▪ D.I Kereman;▪ D.I Kolpoh;▪ D.I Lebek;▪ D.I Nyato;▪ D.I Ombar;▪ D.I Pancoran;▪ D.I Paojanan;▪ D.I Pegantenan;▪ D.I Sanip;▪ D.I Sentaman;▪ D.I Sere;▪ D.I Taman Gangser; dan▪ D.I Taman Pakong.				
	Pembangunan dan Pemeliharaan		Wilayah Kabupaten				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Jaringan Air Bersih						
		Pemeliharaan Sumber Air	Wilayah Kabupaten				
		Penyediaan air minum dari mata air	Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Palengaan				
		Pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih	Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan				
		Pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air	Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Palengaan				
3.1.5	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan		Wilayah Kabupaten				
		Penyusunan Masterplan Persampahan	Kawasan Perkotaan				
		Pembangunan sarana dan prasana sampah	<ul style="list-style-type: none">• TPA di Desa Bidang Kecamatan Pasean• TPST di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)			Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV		
		Pengembangan sistem Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja	TPA di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan				
4	Perwujudan Pola Ruang						
4.1	Perwujudan Kawasan Lindung	Kawasan hutan lindung	Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu				
		Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya meliputi kawasan resapan air	Wilayah Kabupaten				
		Kawasan yang memberi perlindungan setempat					
		a. sempadan pantai	kawasan pesisir pantai utara dan kawasan pesisir pantai selatan				
		b. sempadan sungai	Di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kadur				
		c. sempadan embung	Kecamatan Larangan, Pakong, Tlanakan dan Palengaan.				
		d. sempadan mata air	Di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pasean, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Waru				
		e. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Seluruh Kecamatan				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	Kawasan cagar budaya	di Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo				
		Kawasan Rawan Bencana	Wilayah kabupaten				
		Konservasi kawasan rawan bencana	Wilayah kabupaten				
		Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana	Wilayah kabupaten				
		Pemberian pengetahuan "bencana alam" kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat;	Wilayah kabupaten				
		Pemberian materi "bencana alam" ke dalam silabus mata pelajaran "lingkungan hidup" pada sekolah-sekolah	Wilayah kabupaten				
	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Karst Kelas I	Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan				
4.2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	Pengembangan kawasan peruntukan hutan	Pengukuran dan Pemantapan Batas Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Batumarmar ▪ Kecamatan Waru ▪ Kecamatan Tlanakan 				
	Kawasan Hutan	Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani	Wilayah Kabupaten				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Produksi						
	Kawasan Hutan Rakyat	Pemantapan Kawasan Hutan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pegantenan ▪ Kecamatan Proppo ▪ Kecamatan Palengaan ▪ Kecamatan Pamekasan ▪ Kecamatan Galis ▪ Kecamatan Tlanakan ▪ Kecamatan Larangan ▪ Kecamatan Kadur ▪ Kecamatan Pasean ▪ Kecamatan Batumarmar ▪ Kecamatan Pakong ▪ Kecamatan Waru ▪ Kecamatan Pademawu 				
		Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani	Wilayah kabupaten				
	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	Pemantapan kawasan lahan pertanian tanaman pangan	Wilayah kabupaten				
		Lahan pertanian pangan berkelanjutan	D.I Samiran				
		Pengembangan kawasan hortikultura	Kecamatan Pamekasan, Larangan, Proppo, Pakong, Pegantenan, Kadur, Palengaan, Waru, Batumarmar dan Pasean				
	Pengembangan						



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	n kawasan peruntukan perkebunan						
		Pengembangan kawasan unggulan untuk perkebunan	Di seluruh kecamatan				
		Pengembangan jaringan pemasaran	Di seluruh kecamatan				
	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan sentra peternakan	Ternak besar, ternak kecil dan unggas yang tersebar di Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean.				
		Peningkatan Produksi Ternak, pengembangan usaha pembibitan ternak, pakan ternak, teknologi budidaya ternak, dan pemberantasan penyakit	Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean.				
		Perluasan Jaringan Pemasaran	Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean.				
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak	Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean.				
		Pendidikan dan Pelatihan Teknologi dan Manajemen Budidaya dan Usaha Peternakan	Kecamatan Pamekasan, Galis, Pegantenan, Waru, Batumarmar, Kadur, Proppo, Tlanakan, Pademawu, Palengaan, Larangan dan Pasean.				
	Pengembangan	Pengembangan usaha perikanan	Di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis,				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	n kawasan perikanan	tangkap	Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar				
		Pengembangan usaha perikanan budidaya					
		1. Perikanan budidaya air payau	Kecamatan Pademawu, Galis dan Larangan				
		2. Budidaya tambak garam	Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis				
		3. Budidaya rumput laut	Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar				
		Pengolahan ikan	Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.				
		Kawasan peruntukan Minapolitan	Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan				
	Pengembangan kawasan pertambangan		Wilayah Kabupaten				
		Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam	Di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Pademawu,				
		Pengembangan kawasan pertambangan	Kecamatan Kadur				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		minyak bumi					
		Pengukuran, Pemetaan dan Pembuatan Basis Data Potensi Tambang dan Energi					
		Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi	Wilayah Kabupaten				
		Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi	Wilayah Kabupaten				
	Pengembangan kawasan industri	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Kecil dan Menengah (IKM) <ul style="list-style-type: none"> a. IKM garam yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis; b. IKM air minum mineral di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan; c. IKM rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Proppo; d. IKM petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean; e. IKM batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, 				
		Pengembangan Sentra Usaha Industri Rumah Tangga					



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru; dan f. IKM tikar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean. ▪ Industri rumah tangga pada skala permukiman				
	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
		Pengembangan daya Tarik wisata alam	Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pasean				
		Pengembangan daya Tarik wisata Budaya	Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis,.				
		Pengembangan daya Tarik wisata buatan	Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu				
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Wilayah kabupaten				
		Pembangunan Infrastruktur Penunjang pada Kawasan Pariwisata	Wilayah kabupaten				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		Pengembangan ODTW	Wilayah kabupaten				
		Penyelenggaraan Event Kepariwisata berbasis Budaya	Wilayah kabupaten				
	Peruntukan Kawasan Permukiman						
		Rencana pengembangan kawasan permukiman baru	Wilayah kabupaten				
		Rencana pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar	Wilayah kabupaten				
		Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refungsi, Peremajaan, Pebaikan)	Wilayah kabupaten				
	Peruntukkan Kawasan Peruntukkan Lainnya (Kawasan Pesisir)						
		Pengembangan kawasan andalan	Wilayah kabupaten				
		pengembangan zona perikanan meliputi :	Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Keamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.				
		✓ Pengembangan zona PPI					
		✓ Pengembangan TPI	Tempat Pelelangan Ikan Branta Pesisir,				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
			Kecamatan Tlanakan, Tempat Pelelangan Ikan Batu Bintang Kecamatan Batumarmar dan Tempat Pelelangan Ikan Tlontoh Rajeh, Kecamatan Pasean.				
		Pengembangan Kawasan Pertahanan dan kemandirian	Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean				
		Pengembangan sektor Informal	Seluruh Kecamatan				
5	Perwujudan Kawasan Strategis						
5.1		Perwujudan Kawasan Strategis Nasional meliputi kawasan andalan Kawasan Madura dan Kepulauan dan Kawasan Andalan Laut Madura	Wilayah kabupaten				
5.2	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan Ekonomi Madura	Wilayah Kabupaten				
		Kawasan Agropolitan Kepulauan Madura	Wilayah Kabupaten				
		Kawasan Tertinggal Kepulauan Madura					
5.3	Perwujudan	Kawasan Strategis dari sudut	Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong,				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
	Kawasan Strategis Kabupaten	kepentingan Ekonomi a. Kawasan Agropolitan	Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pagentenan.				
		b. Kawasan budidaya perikanan					
		✓ Kawasan tambak garam	- Desa Branta Tinggi dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; - Desa Baddurih, Pagagan, Majungan, Padelengan, Pademawu Timur, Bunder di Kecamatan Pademawu; dan - Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan dan Desa Artodung di Kecamatan Galis.				
		✓ Kawasan rumput laut	Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar				
		c. Kawasan Industri, perdagangan, jasa, industri dan pergudangan	Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Tlanakan				
	Kawasan Pariwisata	✓ Wisata Alam	- Api Tak Kunjung terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan; - Pantai Jumiang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu; - Pantai Batu Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean - Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan. - Lembah Sembir Kecamatan Batumarmar				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		✓ Wisata Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Budaya kesenian dan upacara seperti Event Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di Kecamatan Pamekasan,- upacara petik laut di Pantai di Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan- wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru dan Kecamatan Pakong- Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo- Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Desa Kolpajung Kecamatan Pamekasan.				
		✓ Wisata Buatan	Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu				
		e. Kawasan Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none">- kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan dan pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean; dan- Kawasan pelabuhan pengumpan Talang Siring di Kecamatan Larangan dan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu				
		f. Kawasan Minapolitan	Kawasan Pantai Selatan Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan				
		Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	Kecamatan Proppo berupa Makam Syeh Abdul Manam.				



No	Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang					
		Arah Pemanfaatan Ruang/indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II (2017 - 2021)	Lima Tahun ke-III (2022 - 2026)	Lima Tahun ke-IV
		a. Kawasan Cagar Budaya					
		b. Kawasan Makam	<ul style="list-style-type: none">- Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) terdapat di Kelurahan Kolpojung Kecamatan Pamekasan.- Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean.- Makam Ghung Seppoh-Gatut Kaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan.- Makam Joko Tarup/Tole di Desa Montok Kecamatan Larangan.				

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan



4.2.5.2 Telaahan RPJMD Daerah Sekitar

Tabel 4.13 Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Pamekasan

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1.	Kabupaten Sumenep	2016-2021	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
			2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.
			3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.
			4. Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
			5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta <i>Stakeholder</i> dalam Proses Pembangunan.
2.	Kabupaten Sampang	2019-2024	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
			2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
			3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
			4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
			5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
3.	Kabupaten Bangkalan	2019-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial, Pendidikan dan Kesehatan.2. Meningkatkan Fasilitasi ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan perikanan.3. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.4. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.5. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.7. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.8. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Sumber: Olahan Penulis (2020)

4.2.5.3 Telaah Isu Sekitar Daerah Strategis

A. RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024:

1. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan perdesaan yang mandiri
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara komprehensif



4. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
5. Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat

B. RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
5. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang dan Perumahan
6. Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Pembangunan yang Proporsional dalam Rangka Mengurangi Disparitas Wilayah Daratan dan Kepulauan
8. Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata, Koperasi dan UMKM
9. Penyediaan Tenaga Kerja
10. Peningkatan Ketahanan Pangan
11. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
12. Penanganan Bencana dan Pengendalian Penduduk
13. Peningkatan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama



16. Pelestarian Budaya yang Berwawasan Kearifan Lokal
17. Peningkatan Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga

4.2.5.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pamekasan ditentukan dengan melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan



kelompok kewenangan kabupaten yang berjumlah 222 indikator. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2017. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari proses Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Isu Strategis Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan

Aspek	No	Penjelasan Isu	Pengerucutan Isu
Lingkungan	1	Ketersediaan lahan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif• Ekskalasi bencana alam banjir dan gempa bumi• Masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi Pandemi• Rendahnya pengelolaan kualitas jalan karena faktor status jalan• Lemahnya pengendalian dan pemantauan kegiatan di sektor industri yang berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan meningkatkan resiko keselamatan tenaga kerja serta masyarakat sekitar industri• Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sarana infrastruktur secara efisien terutama di sektor air bersih dan persampahan perkotaan
	2	Perubahan luasan LP2B/ KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS	
	3	Jumlah Bangunan Pertanian (RPH/Puskesmas/BPP) yang perlu ditingkatkan	
	4	Kawasan pesisir pantai	
	5	Terdapat patahan aktif yang berpotensi bencana gempa bumi	
	6	Adanya potensi bencana banjir di wilayah perkotaan Pamekasan	
	7	Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok	
	8	Peningkatan status gizi	
	9	Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	
	10	Penguatan sistem kesehatan	
	11	Peningkatan akses layanan kesehatan	
	12	Perubahan panjang jalan kewenangan Kabupaten melalui peningkatan status jalan	
	13	pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek	
	14	Adanya pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas)	
	15	Adanya tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin	
Ekonomi	16	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Meningkatkan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Informal	<ul style="list-style-type: none">• Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM• Rendahnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi
	17	Minimnya pengetahuan masyarakat luar tentang Produk IKM	
	18	Kontinuitas produksi IKM yang tidak stabil dan konsisten	



Aspek	No	Penjelasan Isu	Pengerucutan Isu
	19	Kurangnya bantuan modal untuk koperasi dan UKM akibat pandemi Covid-19	pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat dari pandemi Covid 19
	20	Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19	
	21	Peningkatan pendapatan Keluarga Aseptor Dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga	• Masih lemahnya sektor pariwisata setelah terkena dampak Pandemi Covid 19
	22	Harga komoditas pertanian yang fluktuatif	• Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap kesejahteraan tenaga kerja
	23	Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi covid-19	
Sosial	24	Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil	• Lemahnya pendataan kependudukan
	25	Mewujudkan Indonesia Maju melalui percepatan penurunan Angka Stunting	• Perlindungan dan Akses Masyarakat Rentan terhadap pendidikan Kesehatan Keluarga dan Akses terhadap pelayanan kesehatan
	26	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PKL, PMKS, Perijinan)	• Gangguan Ketentraman karena konflik pemanfaatan lahan dan ruang
	27	Alih Fungsi Lahan (konflik kepentingan antara kepemilikan lahan dan pemanfaatan Ruang)	• Masih tingginya resiko kecelakaan lalu lintas karena lemahnya kesadaran keselamatan berlalu lintas dan kurangnya sarana prasarana jalan umum
	28	Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Berlalu Lintas dan Penataan Parkir Juga Pelaku Usaha (PKL/Pedagang Asongan) tentang Penempatan Lokasi Usahanya	• Kurang terintegrasinya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dengan program pendidikan
	29	Kurangnya Sarana dan Prasana Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas-Ruas Jalan termasuk Rambu dan Marka Jalan	
Hukum	30	Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal	• Masih rendahnya akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan daerah
Tata Kelola	31	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	• Belum optimalnya reformasi birokrasi dan lemahnya penerapan manajemen resiko
	32	Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa tidak ada yang bersedia untuk menjabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Jabatan Fungsional)	• Konflik yang muncul karena belum kuatnya dasar hukum mengenai deliniasi kawasan
	33	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah belum melekat pada pelaksanaan tugas	
	34	Kasus prangkat desa	
	35	Belum seluruh perangkat daerah menerapkan zona integritas	
	36	Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Pamekasan	
	37	Belum optimalnya penerapan manajemen risiko	
	38	Perda LP2B	

Sumber: KLHS Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023



4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Pamekasan

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun tahapan perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 melalui tahapan penentuan dan pembobotan. Secara teknis, proses tahapan penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Pamekasan, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Pamekasan serta hasil FGD yang dilaksanakan dengan perwakilan Perangkat Daerah terkait dan bidang sektoral Bappeda Kabupaten Pamekasan. Penentuan isu tersebut tersaji dalam daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Pamekasan. Berikut penentuan daftar panjang isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan:



**Tabel 4.15 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis
Pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Urusan
Pembangunan Kabupaten Pamekasan**

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya	1. Pendidikan; 2. Kesehatan; dan 3. Tata kelola pemerintahan.	Pendidikan	Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal
			Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah
			Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar
			Standarisasi pelayanan pendidikan
		Sosial	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial
			Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga
			Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat
		Tenaga Kerja	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
			Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan
			Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran
		Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan	Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah
			Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran
		Kesehatan	Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya
			Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan
			Peningkatan program edukasi mengenai kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan
			Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil
			Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat
			Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi
			Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien <i>Tuberculosis</i>
Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat			
Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	Optimalisasi aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan		
	Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di		



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Kabupaten Pamekasan
			Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat
		Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan
		Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Penguatan Pembangunan Berbasis Gender
		Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA
		Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
		Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini
		Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan partisipasi politik masyarakat
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjunjung supremasi hukum
		Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
		Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan
		Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) berkurang
		Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Kebudayaan	Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional
		Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini
		Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda
		Kearsipan	Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua Perangkat Daerah
		Kearsipan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah
		Perpustakaan	Penambahan sarana/prasarana perpustakaan



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa
			Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan
		Statistik	Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral
		Keuangan	Peningkatan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung
			Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi
		Persandian	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten
Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam	1. Perekonomian; 2. Pertanian; 3. Perternakan; 4. Ketahanan Pangan; dan 5. Energi, dan Pertambangan	Perdagangan	Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan
			Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah
		Perindustrian	Optimalisasi pengembangan IKM
		Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat
			Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
		Penanaman Modal	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
			Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan
		Pangan	Peningkatan Resiko keamanan pangan segar untuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam
			Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan
			Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup
		Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen
			Optimalisasi kinerja kelembagaan pertanian
			Peningkatan produksi pertanian
			Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak
		Pariwisata	Peningkatan sosialisasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan
			Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian
Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata			
Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten Pamekasan			
	Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman		
	Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata		



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata
		Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat
			Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa
			Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga
			Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan
			Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan
			Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna
Bidang Pembangunan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah	1. Manajemen Bencana; 2. Kawasan Perkotaan, dan Permukiman; 3. Kawasan Hutan, dan Perkebunan; 4. Manajemen Sumberdaya Air.		Penanggulangan Bencana Daerah
		Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana	
		Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
		Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan	
		Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
		Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana	
		Perhubungan	Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, <i>Traffic Light</i> , Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan
			Optimalisasi penurunan kecelakaan
		Komunikasi dan Informatika	Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK
			Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat
			Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa
		Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi
			Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui
		Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
		Lingkungan Hidup	<p>Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan</p> <p>Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali</p> <p>Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang</p> <p>Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor</p>
		Pertanahan	<p>Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat</p>

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Tabel 4.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kurang berkualitas dan belum merata	Sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat yang berkualitas	Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2020 yaitu 6,7 tahun atau setara dengan lulusan Sekolah Dasar.
		Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD tahun 2020 yaitu 97,30% Artinya bahwa masih terdapat 2,7% penduduk Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah. Sedangkan Angka partisipasi sekolah tingkat SLTP tahun 2020 yaitu 94,85%. Artinya bahwa masih terdapat 5,15% penduduk Kabupaten Pamekasan yang masih belum bersekolah.
Angka Putus Sekolah tahun 2019 yaitu 106. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Pamekasan.		
Sulitnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas	Sulitnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs tahun 2019 yaitu 84,09%. Artinya bahwa masih terdapat 15,91% masyarakat yang tidak lulus SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2019.
		Akses pelayanan kesehatan yang belum merata dan relatif rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
		Angka Kematian Bayi masih fluktuatif dan mencapai angka 13 bayi di tahun 2019.
		Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2019 mencapai angka 102 orang dan di tahun 2020 mencapai angka 101 orang.
		Angka Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih cukup tinggi hingga tahun 2020 mencapai 436 bayi.
		Kasus HIV di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 54 orang.
		Kasus DBD di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 192 orang.
		Kasus <i>Tuberculosis</i> di Kabupaten Pamekasan masih cukup tinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 1.028 orang.
Tingginya angka jumlah total kunjungan RSUD Dr.H. Slamet Martodirdjo mencapai 17.038 kasus: Hypertensi 1160; Anemia 1009; DM 995; Katarak 815; <i>Heart Failure</i> 721; Stroke 581; <i>Cronic Kidney Desease</i> 556; GEA 354; <i>Dyspepsia</i> 296; <i>Urinary tract Infection</i>		



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu	291. Belum optimalnya pembangunan jalan, sehingga: Meningkatnya Panjang jalan yang rusak berat pada tahun 2019 mencapai 89,278 km kemudian menjadi 117,86 km ditahun 2020
		Menurunnya kualitas panjang jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2019 yaitu 27.590 km dibandingkan tahun 2018 yaitu 33.109 km.
Belum optimalnya pengelolaan potensi masalah sosial	Belum optimalnya Perlindungan Sosial	Rendahnya perlindungan sosial yang ditunjukkan dengan masih tingginya Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina tahun 2019 yaitu 49 orang dibandingkan tahun 2018 yaitu 14 orang.
		Rendahnya perlindungan sosial yang ditunjukkan dengan masih tingginya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (tidak memiliki keahlian) tahun 2019 yaitu 20 orang.
Belum optimalnya pengelolaan ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang berpengaruh pada lapangan pekerjaan	Belum Optimalnya penyerapan tenaga kerja	Minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 yaitu 68,82% dibandingkan tahun 2019 yaitu 68,13%. Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yaitu 3,49%.
Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pengelolaan sampah	Kabupaten Pamekasan tidak memiliki hutan, namun memiliki hutan produksi, luas tutupan lahan juga masih tergantung pada Instansi lain seperti Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi. Hal ini karena kewenangan pengelolaan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
		Volume produksi sampah yang meningkat pada tahun 2020 yaitu 99,350,12 ton. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya usaha yang menghasilkan sampah tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>keseluruhan.</p> <p>Menurunnya jumlah daya tampung TPS pada tahun 2020 yaitu 80 m³. Hal ini karena dengan adanya TPS3R yang dikelola oleh Desa/Kelurahan maka beberapa TPS dengan ukuran kecil dibongkar.</p> <p>Menurunnya jumlah TPS per 1000 penduduk pada tahun 2020 yaitu 0,80%. Hal ini karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan dana dan infrastruktur persampahan yang dibangun untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan.</p> <p>Menurunnya kualitas udara yang dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara tahun 2020 yaitu 89,00%-89,50% dari angka. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan dan tingginya pembakaran bahan bakar fosil di areal permukiman.</p>
Belum optimalnya Peran Perempuan dalam mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera	Belum Optimalnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Belum optimalnya sarana pendukung seperti Lapraskopi untuk Layanan MOW.
Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan terhadap perekonomian inklusif	Belum optimalnya peran sektor ketahanan pangan dalam pertumbuhan ekonomi	<p>Poduksi garam tahun 2016 yang kecil dikarenakan musim penghujan sangat panjang (Efek La Nina) sehingga menyebabkan petambak garam mengalami kesulitan di dalam memproduksi garam. Sedangkan produksi budidaya tahun 2018 menurun diakibatkan perubahan cuaca yang ekstrem, masih terjadinya kematian massal khususnya budidaya udang serta masih banyaknya hama dan penyakit pada budidaya rumput laut.</p> <p>Fluktuasi harga pangan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari tahun 2019 yaitu 2982 kkal dan 57,7 gram atau menurun dari tahun 2018 yaitu 2984,42 kkal dan 57.72 gram.</p> <p>Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi keberagaman pangan terutama buah dan sayur sebagian besar dipenuhi dari luar kota. Hal ini dapat dilihat dari Konsumsi energi dan protein perkapita (Kkal/kapital/hari dan gram/kapital/hari</p>



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	tahun 2019 yaitu 2037 kkal dan 48 gram.
		Masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan. Hal ini dapat dilihat dari Persentase ASN yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis tahun 2019 yaitu 86%. Artinya bahwa terdapat 14% ASN yang belum memenuhi persyaratan kompetensi teknis. dan persentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kompetensi manajerial tahun 2020 yaitu 61% artinya terdapat 39% pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan kompetensi manajerial
Belum optimalnya Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera	Belum Optimalnya Keberdayaan Pemuda dalam Pembangunan	Masih minimnya kontrol atau pengawasan dari atasan. Hal ini dapat dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat hukuman disiplin tahun 2020 yaitu 99,8%.
		Belum optimalnya pengembangan prestasi Kepemudaan dan Olahraga di level provinsi dan nasional. Hal ini terkait dengan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang relatif minim dan tidak diselenggarakan karena terbentur jadwal.
Belum optimalnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian inklusif	Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Masih belum optimalnya produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pada tahun 2019 yaitu 206.368 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 274.372 ton.
		Masih belum optimalnya produktivitas produksi jagung dan kedelai menurut kecamatan pada tahun 2019 dengan jumlah 91.101 ton (Jagung) dan 321 ton (Kedelai) jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 94.273 ton (Jagung) dan 1.221 ton (Kedelai).
		Masih belum optimalnya luas panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 5.453 Ha jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 5.810 Ha.
Belum optimalnya peran	Belum Optimalnya Pertumbuhan	Masih belum optimalnya produktivitas Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 yaitu 354.783 ton jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 475.118 ton
		Masih relatif kecilnya nilai investasi (Penanaman Modal) akibat minimnya daya dukung investasi. Hal ini dikarenakan;



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
penanaman modal terhadap perekonomian inklusif	Nilai PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam kecepatan pemberian layanan perizinan.- Kurangnya dukungan pimpinan untuk pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada penyelenggara perizinan utamanya pemberian tunjangan khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.- Belum memiliki Peta Potensi Investasi.- Minimnya lokasi peruntukan kawasan perdagangan dan perindustrian pada Perda RTRW Kabupaten.- Belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota.- Masih ada praktek percaloan/pungli dalam pemberian layanan perizinan dan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).- Belum efektifnya jaminan keamanan berusaha.- Belum optimalnya kinerja Satgas Percepatan Berusaha sehingga banyak permasalahan perusahaan yang tidak tertangani
Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Budaya	Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata dan budaya	Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata dan budaya yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Jumlah Lembaga dan Tenaga Seni Menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan tahun 2020 yaitu 81 dan 1629. Hal ini karena sarana dan prasarana kesenian yang masih belum memadai.
Belum Optimalnya Peran Destinasi Wisata dalam Mendorong Perekonomian Inklusif	Belum Optimalnya Pengelolaan Destinasi Wisata	Belum optimalnya pengelolaan berbagai destinasi pariwisata yang mampu menarik minat wisata dan menstimulus berkembangnya ekonomi lokal. Potensi pariwisata di Kabupaten Pamekasan sangat beraneka ragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun potensi ini masih perlu pengelolaan lebih lanjut, agar jumlah kunjungan wisata terus meningkat dari tahun 2017 yaitu 30.412 orang, meningkat di tahun 2018 yaitu 30.903 orang, dan kemudian meningkat di tahun



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2019 yaitu 55.012 orang. Pertumbuhan sektor pariwisata ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor lainnya, seperti perdagangan dan jasa.
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan terkait Kependudukan dan Pengendalian Penduduk yang Berkualitas	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan terkait Kependudukan dan Pengendalian Penduduk yang Berkualitas	Belum optimalnya pelayanan publik terkait kependudukan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal ini dapat dilihat dari Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat tahun 2020 yaitu 83.190 (penerimaan) dan 81.503 (pengeluaran). Artinya bahwa terdapat 1687 alat dan obat kontrasepsi yang belum digunakan. Hal ini karena masih kurangnya minat masyarakat untuk melakukan program keluarga berencana serta minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
Belum Optimalnya Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Perekonomian Inklusif masyarakat desa	Belum optimalnya perekonomian masyarakat desa	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa menuju Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari: <ul style="list-style-type: none">- Penurunan Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di Pamekasan pada tahun 2019 yaitu 0,10% yang dimana tahun 2018 yaitu 0,19%.- Belum maksimalnya capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana jumlah LKD pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat peningkatan yaitu berjumlah 1.188 LKD.- Jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan masih sekitar 5 desa, jumlah desa mandiri memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun 5 desa tersebut masih cukup sedikit bila dibandingkan total desa yang ada di Kabupaten Pamekasan mencapai 178 desa, sehingga perlu upaya optimal untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan.
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	Menurunnya penyerapan anggaran belanja tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Belanja Tindak Langsung (BTL) tahun 2020 yaitu 52,10% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu 54.46%



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Publik terkait Pengelolaan Keuangan	dan Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan	

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Adapun tahapan berikutnya, diidentifikasi isu strategis yang telah ditentukan kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Isu strategis Rantek RPJMD tersebut telah dipetakan berdasarkan pilihan tema pembangunan prioritas Kabupaten Pamekasan, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebijakan prioritas dan program prioritas RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2019-2024. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik

Berdasarkan daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan



pembangunan Kabupaten Pamekasan tersebut dalam tabel 4.5, untuk kemudian dilakukan penapisan menggunakan kriteria tersebut di atas. Penapisan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis di Kabupaten Pamekasan yang dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dan program prioritas RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Apabila isu tersebut memiliki persentase pemenuhan keenam kriteria tersebut, maka isu tersebut merupakan yang paling strategis dibandingkan yang lain. Pada tahapan pembobotan ini, akan menghasilkan daftar pendek terhadap isu strategis terpilih yang mana berdasarkan penilaian tingkat prioritas. Proses pemilihan isu pembangunan ini diselenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk penajaman terhadap isu-isu strategis dan upaya penapisan atau membuat daftar pendek dari isu strategis pembangunan terpilih. Proses penapisan isu pembangunan daftar panjang menjadi daftar pendek dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi Daftar Panjang Isu Pembangunan

Verifikasi ini dimaksudkan untuk *cross-check* ulang identifikasi yang sudah tim temukan pada tahap penentuan isu strategis berdasar tema pembangunan prioritas dan urusan pembangunan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati, sebagaimana yang tersaji pada tabel 4.17.

2. Penilaian Daftar Panjang (*Long list*)

Penilaian daftar panjang daftar panjang identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan berdasarkan urusan pembangunan Kabupaten Pamekasan tersebut menggunakan metode *rating*. Metode *rating* yang akan dilakukan adalah dengan

menilai tingkat pengaruh dari masing-masing isu terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut meliputi: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Metode penilaian rating menggunakan interval penilaian dari angka 1-10, 1-15, 1-20, dan 1-25. Semakin tinggi penilaian yang diberikan dapat diartikan bahwa isu tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kriteria yang ditentukan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17 Skala Penilaian Metode Rating

Level Pengaruh	Skala Penilaian (Range Scale)
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah	10
Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total	100

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Tabel di atas adalah tabel pembobotan dengan metode rating yang dilakukan terhadap daftar panjang



identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Pamekasan:

Tabel 4.18 Pembobotan Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pamekasan

No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal	20	10	20	10	10	20	90
2	Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah	15	10	10	10	15	25	85
3	Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar	10	5	10	5	8	20	58
4	Standarisasi pelayanan pendidikan	8	8	10	5	8	10	49
5	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	15	10	18	10	10	23	86
6	Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial	8	5	7	5	5	10	40
7	Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga	7	7	10	5	8	10	47
8	Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat	7	5	7	4	7	8	38
11	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	20	10	20	10	15	25	100
12	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	20	10	20	10	15	25	100
13	Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran	10	5	7	5	7	8	42
14	Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah	20	9	5	10	10	20	74
15	Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran	9	8	7	5	7	10	46
16	Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya	20	10	20	10	15	20	95
17	Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan	15	10	15	5	10	20	75
18	Peningkatan program edukasi mengenai	20	5	20	7	10	20	82



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
	kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan							
19	Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil	15	5	10	5	10	15	60
20	Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat	10	5	9	5	7	10	46
21	Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi	10	5	10	5	7	10	47
22	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien <i>Tuberculosis</i>	10	5	10	5	7	10	47
23	Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat	10	5	15	5	10	10	55
24	Optimalisasi Aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi Kependudukan	15	10	10	8	10	20	73
25	Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di Kabupaten Pamekasan	15	10	20	8	10	25	88
26	Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat	10	10	15	8	10	20	73
27	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	20	10	15	8	10	20	83
28	Penguatan Pembangunan Berbasis Gender	20	10	15	10	10	25	90
29	Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA	15	10	15	10	10	20	80
30	Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi	15	10	15	10	10	20	80
31	Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini	15	10	15	10	10	20	80
33	Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk	10	10	15	10	8	10	63
34	Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik	15	10	20	10	10	20	85
35	Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat	10	10	8	10	8	10	56
36	Peningkatan partisipasi politik masyarakat	10	10	8	10	8	10	56
37	Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional	20	10	15	8	8	20	81



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
39	Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat	15	10	15	10	15	20	85
40	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjunjung supremasi hukum	20	9	10	8	5	8	60
41	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945	20	9	10	8	5	8	60
42	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	20	8	15	10	10	20	83
43	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) berkurang	10	8	8	5	7	8	46
44	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15	10	10	10	5	15	65
45	Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional	15	10	10	8	10	15	68
46	Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini	15	8	15	10	10	20	78
47	Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	10	8	10	5	7	8	48
48	Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua Perangkat Daerah	10	10	5	10	12	15	62
49	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah	10	10	5	10	12	15	62
50	Penambahan sarana/prasarana perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa	15	10	15	10	15	20	85
51	Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan	12	10	15	10	15	20	82
52	Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral	10	10	15	10	15	20	80
53	Peningkatan penyerapan anggaran	10	10	20	10	10	15	75



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
	belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung							
54	Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi	10	10	20	10	10	10	70
55	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten	10	10	8	10	7	10	55
56	Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan	15	10	20	10	10	20	85
57	Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah	20	10	15	10	15	20	90
58	Optimalisasi pengembangan IKM	15	10	15	10	10	25	85
59	Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat	18	10	15	10	10	20	83
60	Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	20	10	15	10	10	25	90
61	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	20	10	15	10	15	20	90
62	Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan	10	10	20	10	8	15	73
63	Peningkatan Resiko keamanan pangan segar untuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam	20	10	20	10	10	10	80
64	Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan	20	10	20	10	10	10	80
65	Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup	15	10	15	10	15	20	85
66	Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen	15	10	15	10	15	15	80
67	Optimalisasi kinerja kelembagaan pertanian	15	10	15	10	15	20	85
68	Peningkatan produksi pertanian	20	10	10	15	10	25	90
69	Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	15	10	15	10	15	15	80
70	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak	14	10	15	10	15	15	79
71	Peningkatan sosialiasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan	12	10	15	10	15	15	77
72	Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian	15	10	15	10	15	15	80
73	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata	20	10	15	10	10	20	85
74	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten	20	10	15	10	10	20	85



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
	Pamekasan							
75	Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman	10	10	10	10	15	20	75
76	Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata	15	10	20	10	10	15	80
77	Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata	15	10	20	10	10	15	80
78	Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat	20	10	15	10	10	25	90
79	Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa	10	10	8	9	10	15	62
80	Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga	15	10	9	10	10	15	69
81	Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan	12	10	12	10	13	15	72
82	Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan	13	10	20	10	15	20	88
83	Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna	10	8	15	10	12	12	67
84	Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana	16	10	15	10	10	25	86
85	Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana	17	10	15	10	10	25	87
86	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	18	10	15	10	10	25	88
87	Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan	19	10	15	10	10	25	89
88	Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	15	10	15	10	10	25	85
89	Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam	10	10	15	10	10	25	80



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
	mengurangi risiko bencana							
90	Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, <i>Traffic Light</i> , Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan	10	10	15	10	12	10	67
91	Optimalisasi penurunan kecelakaan	15	10	15	10	15	20	85
92	Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK	15	10	20	10	10	20	85
93	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	15	10	20	10	10	25	90
94	Optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat	15	10	20	10	10	20	85
95	Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa	12	10	20	10	10	20	82
96	Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi	20	10	15	10	15	20	90
97	Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui	20	10	15	10	10	20	85
98	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman	20	10	15	10	15	20	90
99	Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan	10	10	12	9	10	15	66
100	Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	10	10	15	9	10	15	69
101	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali	10	10	16	9	10	15	70
102	Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang	10	10	16	9	10	15	70
103	Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor	10	10	13	9	10	15	67
104	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat	10	9	14	9	10	10	62

Sumber: Olahan Penulis (2020)



**Tabel 4.19 Rata-Rata Skor Isu Strategis Pembangunan
Kabupaten Pamekasan**

No	Daftar Panjang Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal	90	15
2	Pendampingan dan pembinaan siswa untuk menurunkan angka putus sekolah	85	14
3	Peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk menurunkan angka tidak lulus di tingkat sekolah dasar	58	10
4	Standarisasi pelayanan pendidikan	49	8
5	Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	86	14
6	Mencegah Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial	40	7
7	Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga	47	8
8	Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat	38	6
11	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	100	17
12	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	100	17
13	Peningkatan kompetensi masyarakat transmigran	42	7
14	Peningkatan fasilitas dan pelatihan atau kediklatan bagi para aparatur daerah	74	12
15	Pemberian sanksi yang tegas dan terukur kepada Perangkat Daerah yang melakukan pelanggaran	46	8
16	Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya	95	16
17	Peningkatan kualitas layanan persalinan yang ada di setiap kecamatan	75	13
18	Peningkatan program edukasi mengenai kehamilan, persalinan, hingga pendampingan pasca melahirkan	82	14
19	Peningkatan pelayanan pemberian gizi dan edukasi kehamilan bagi para ibu hamil	60	10
20	Pelaksanaan tes HIV yang terjangkau, mudah, dan aman bagi seluruh masyarakat	46	8
21	Pelaksanaan sosialisasi pengasapan di lingkungan yang memiliki potensi DBD tinggi	47	8
22	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan perawatan pasien <i>Tuberculosis</i>	47	8
23	Melakukan pembinaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat	55	9
24	Optimalisasi Aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi Kependudukan	73	12



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
25	Optimalisasi Kepemilikan Akte Kelahiran bagi Penduduk (seluruh Kelompok Umur) di Kabupaten Pamekasan	88	15
26	Sosialisasi program Keluarga Berencana serta pemberian alat kontrasepsi yang terjangkau bagi masyarakat	73	12
27	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	83	14
28	Penguatan Pembangunan Berbasis Gender	90	15
29	Menciptakan Kecamatan/kelurahan/desa menginisiasi menuju KLA	80	13
30	Penguatan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi	80	13
31	Pencegahan terhadap Pernikahan usia dini	80	13
33	Pertumbuhan penduduk yang strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan penduduk	63	11
34	Peningkatan komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik	85	14
35	Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah dan kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat	56	9
36	Peningkatan partisipasi politik masyarakat	56	9
37	Peningkatan Pembangunan budaya lokal sebagai aset budaya nasional	81	14
39	Optimalisasi penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat	85	14
40	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjunjung supremasi hukum	60	10
41	Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya laten dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945	60	10
42	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	83	14
43	Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) berkurang	46	8
44	Peningkatan pembangunan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	65	11
45	Meningkatkan pemahaman, dan pembinaan masyarakat terkait kebudayaan, dan seni tradisional	68	11
46	Peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk menumbuhkan minat kompetisi sejak dini	78	13
47	Peningkatan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	48	8
48	Peningkatan kegiatan pengelolaan kearsipan pada semua	62	10



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
	Perangkat Daerah		
49	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Kearsipan pada semua Perangkat Daerah	62	10
50	Penambahan sarana/prasarana perpustakaan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa	85	14
51	Peningkatan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan	82	14
52	Optimalisasi pengembangan, dan integrasi statistik sektoral	80	13
53	Peningkatan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dengan meningkatkan belanja tidak langsung	75	13
54	Peningkatan penerimaan daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dan pemantapan sistem informasi pendapatan terintegrasi	70	12
55	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di lingkup pemerintah kabupaten	55	9
56	Peningkatan perlindungan terhadap konsumen perdagangan	85	14
57	Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah	90	15
58	Optimalisasi pengembangan IKM	85	14
59	Optimalisasi pengembangan Koperasi Aktif dan Sehat	83	14
60	Optimalisasi pengembangan usaha kecil menengah	90	15
61	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	90	15
62	Pembuatan peta potensi investasi yang potensial di kawasan tiap kecamatan	73	12
63	Peningkatan Resiko keamanan pangan segar untuk mengatasi penurunan pendapatan bagi petani garam	80	13
64	Penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan	80	13
65	Pencegahan terhadap kerawanan pangan dengan penyediaan bahan pangan yang cukup	85	14
66	Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen	80	13
67	Optimalisasi kinerja Kelembagaan Pertanian	85	14
68	Peningkatan produksi pertanian	90	15
69	Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan	80	13
70	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak	79	13
71	Peningkatan sosialisasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan	77	13
72	Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian	80	13
73	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata	85	14
74	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata Kabupaten Pamekasan	85	14
75	Pengoptimalan pengelolaan potensi budaya berbasis kesenian untuk peningkatan kesejahteraan para seniman	75	13
76	Optimalisasi nilai kemitraan antar lembaga dibidang	80	13



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
	kepariwisataan dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata		
77	Optimalisasi peran berbagai media informasi untuk promosi pariwisata	80	13
78	Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat	90	15
79	Pemaksimalan capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa	62	10
80	Optimalisasi pemberdayaan peranan perempuan di berbagai aspek pembangunan khususnya dalam menunjang pendapatan keluarga	69	12
81	Optimalisasi partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan	72	12
82	Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam desa / kelurahan	88	15
83	Optimalisasi pengetahuan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna	67	11
84	Penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana	86	14
85	Penguatan aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana	87	15
86	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	88	15
87	Optimalisasi jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan	89	15
88	Optimalisasi penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	85	14
89	Penguatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana	80	13
90	Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (Rambu, RPPJ, <i>Traffic Light</i> , Marka Jalan), Bangunan terminal AKAP/ Bandara dan Kebutuhan Penerangan Jalan	67	11
91	Optimalisasi penurunan kecelakaan	85	14
92	Pembentukan Rencana Induk Tata Kelola TIK	85	14
93	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90	15
94	Optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat	85	14
95	Penguatan komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa	82	14
96	Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi	90	15
97	Melakukan pemeliharaan jalan kota agar memiliki kualitas yang baik untuk dilalui	85	14



No	Daftar Panjang Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
98	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman	90	15
99	Peningkatan upaya pengawasan pelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan usaha/kegiatan	66	11
100	Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	69	12
101	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah daur ulang dan sulit diolah kembali	70	12
102	Peningkatan kapasitas TPS dan TPA yang ada serta melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi sampah yang tidak di daur ulang	70	12
103	Peningkatan jumlah tanaman hijau dan pembuatan peraturan pembatasan kendaraan bermotor	67	11
104	Peningkatan pelayanan pertanahan sesuai pedoman mekanisme yang berlaku, dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat	62	10

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Keterangan Kriteria:

- I = Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- II = Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- III = Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- IV = Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- V = Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- VI = Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun setelah dilakukan pembobotan setiap poin daftar panjang isu strategis, terpilihlah 13 Isu strategis pilihan prioritas yang memiliki nilai pembobotan tertinggi dilihat dari enam kriteria yang sudah ada. Berikut ini uraian dari 13 Isu strategis pilihan prioritas :



Tabel 4.20 Daftar Isu Strategis Pilihan Prioritas

No	Daftar Panjang Isu Strategis	Telaah Kriteria						Total Skor
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal Nonformal dan Informal	25	10	15	10	10	20	90
2	Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	20	10	20	10	15	25	100
3	Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan	20	10	20	10	15	25	100
4	Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat	20	10	20	10	15	20	95
5	Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah	20	10	15	10	15	20	90
6	Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20	10	15	10	10	25	90
7	Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	15	10	20	10	10	25	90
8	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	20	10	15	10	15	20	90
9	Peningkatan Produksi Pertanian	20	10	10	15	10	25	90
10	Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat	20	10	15	10	10	25	90
11	Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi	20	10	15	10	15	20	90
12	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman	20	10	15	10	15	20	90
13	Penguatan Pembangunan berbasis gender	20	10	15	10	10	25	90

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Adapun pembobotan dari isu strategis prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah terpilih, dimana dalam penyesuaiannya telah terbentuk 5 (empat) bidang pembangunan secara makro: SDM, Ekonomi, Sosial Budaya, Infrastruktur dan Pemerintahan yang akhirnya menghasilkan 13 isu Kabupaten Pamekasan, antara lain:



1. Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui pendidikan formal nonformal dan informal;
2. Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan;
3. Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja serta Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan;
4. Penguatan upaya kesehatan masyarakat melalui meningkatkan peran serta masyarakat melalui pelayanan Puskesmas dan jaringannya;
5. Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah;
6. Optimalisasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
7. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
8. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
9. Peningkatan produksi pertanian;
10. Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat;
11. Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi;
12. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman; dan
13. Penguatan Pembangunan Berbasis Gender.

Ketiga belas Isu Strategis di atas telah mengakomodasi isu Strategis Internasional, Nasional dan Regional Jawa Timur. Isu Strategis tersebut kemudian diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang selanjutnya dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya. Adapun detail penjabaran tersebut sebagaimana disajikan dalam Bab V.



Tabel 4. 21 Pemetaan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pamekasan

Bidang Pembangunan	Isu Strategis Prioritas Strategis	Misi Kabupaten Pamekasan
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal- Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja- Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan- Optimalisasi upaya promosi produk unggulan daerah- Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah- Peningkatan Produksi Pertanian- Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat	Perekonomian Inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri, perdagangan dan sektor potensial lainnya.
Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik- Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">- Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi- Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Pembangunan berbasis gender	Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-Nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan, dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera

Sumber: Olahan Penulis (2020)



Tabel 4.22 Linieritas Hubungan Antar Isu-Isu Strategis

SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • penurunan beban pengeluaran • peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. • Kebijakan ekonomi makro juga meliputi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal 	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat	Pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan • Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan • Penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan • Pengembangan kawasan peruntukan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi covid-19 • Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Pertanian • Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat • Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja • Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan
Tujuan 2. Tanpa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan 	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana tata ruang kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Indonesia Maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Kelaparan	<p>makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan;• Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet;• Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil;• Percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik;• Intervensi fortifikasi untuk	Serta Kesejahteraan Masyarakat		<p>perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan peternakan• Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	<p>melalui percepatan penurunan Angka Stunting</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan lahan sarana pertanian• Perda LP2B• Perubahan luasan LP2B/ KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS• Peningkatan status gizi	Pertanian



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
	garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin					
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">• Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;• Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;• Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care).	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Indonesia Maju melalui percepatan penurunan Angka Stunting• Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok• Peningkatan status gizi• Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular• Penguatan sistem kesehatan• Peningkatan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan upaya kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya dengan peran serta masyarakat



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
					akses layanan kesehatan	
Tujuan Pendidikan Berkualitas 4.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran;• Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;• Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik 6 Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs 7 dan tenaga kependidikan yang merata;• Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;• Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan• Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan		<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Partisipasi Pendidikan melalui Pendidikan Formal Nonformal dan Informal



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Tujuan 5: Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;• Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;• Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ul style="list-style-type: none">• Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak				<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Pembangunan berbasis gender
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman• Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;• Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional,• penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional		<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih• Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman
Tujuan 7:	<ul style="list-style-type: none">• Diversifikasi energi dan					



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Energi Bersih dan Terjangkau	<p>ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; • Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; • Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; • Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan 					
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; • Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan • Perwujudan Kawasan Budidaya • Perwujudan Kawasan Strategis • Pengembangan Kawasan Pariwisata • Pengembangan kawasan industri • Pengembangan kawasan pertambangan • Pengembangan kawasan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Meningkatkan Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja Informal • Minimnya pengetahuan masyarakat luar tentang Produk IKM • Kontinuitas produksi IKM yang tidak stabil dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penyiapan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja • Perluasan akses (penyediaan) lapangan pekerjaan • Optimalisasi upaya promosi produk unggulan



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
				<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan• Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	<p>konsisten</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya bantuan modal untuk koperasi dan UKM akibat pandemi Covid-19• Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi covid-19• Peningkatan pendapatan Keluarga Aseptor Dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga• Harga komoditas pertanian yang fluktuatif• Pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas)	<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah• Peningkatan Produksi Pertanian• Peningkatan tumbuhnya usaha masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; • Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; • Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; • Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; • Melaksanakan pembangunan rendah karbon; • Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat. • aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah • penyediaan infrastruktur sumber daya air • 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem transportasi darat • Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telematika • Pengembangan Sistem jaringan Prasarana Sumber Daya Air • Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih • Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) di Ruas-Ruas Jalan termasuk Rambu dan Marka Jalan • Jumlah Bangunan Pertanian (RPH/Puskesmas/BPP) yang perlu ditingkatkan • Perubahan panjang jalan kewenangan Kabupaten melalui peningkatan status jalan • Pengembangan Lapangan Paus biru medco (Industri Migas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan perbaikan jalan untuk mempercepat akses transportasi



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengentaskan kemiskinan; • Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; • Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat. • Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah 		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan 		
Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (enabling environment) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; • Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; • Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman • penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan • Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan • Pengembangan kawasan permukiman baru 	<ul style="list-style-type: none"> • pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Umum (air, sanitasi, listrik, persampahan) pada perumahan dan permukiman



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
	restorasi dan konservasi daerah aliran sungai					
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; • Penanganan Limbah; • Pengembangan industri hijau; • Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik 	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan agropolitan • Pengembangan kawasan minapolitan • Pengembangan kawasan peternakan • Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • pembuangan air limbah ikan ke jalan karena tidak ada saluran pembuangan, akibatnya jalan menjadi basah/becek 	
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; • Pembangunan Rendah Karbon 					
Tujuan 14: Ekosistem Lautan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan; • Peningkatan tata kelola perikanan, • Revitalisasi praktek perikanan berkelanjutan. 			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan minapolitan • Pengembangan Kawasan budidaya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pesisir pantai 	
Tujuan 15: Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 			<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kawasan lindung • Kawasan Suaka Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda LP2B • Perubahan luasan LP2B/ 	



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; Mengurangi laju degradasi hutan. 			dan Cagar Budaya <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Lindung Geologi 	KP2B pada Revisi RTRW perlu diintegrasikan pada perubahan dokumen KLHS <ul style="list-style-type: none"> Terdapat patahan aktif yang berpotensi bencana gempa bumi Adanya potensi bencana banjir di wilayah perkotaan Pamekasan 	
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi demokrasi; Reformasi birokrasi dan tata kelola; Penegakan hukum nasional; Menjaga stabilitas keamanan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik 			<ul style="list-style-type: none"> Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (PKL, PMKS, Perijinan) Alih Fungsi Lahan (konflik kepentingan antara kepemilikan lahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dalam peningkatan



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
					<p>pemanfaatan Ruang)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Berlalu Lintas dan Penataan Parkir Juga Pelaku Usaha (PKL/Pedagang Asongan) tentang Penempatan Lokasi Usahanya• Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa• Kelompok Kerja Pemilihan Barang dan Jasa tidak ada yang bersedia	<p>pelayanan kepada masyarakat</p>



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
					<p>untuk menjabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Jabatan Fungsional)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah belum melekat pada pelaksanaan tugas• Belum seluruh perangkat daerah menerapkan zona integritas• Belum optimalnya penerapan manajemen risiko• Perda LP2B• Adanya tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin	



SDGs	RPJMN	RPJMD Prop.	RPJPD Kab.Pamekasan	RTRW Kab. Pamekasan	KLHS Kab. Pamekasan	P-RPJMD Kab.Pamekasan
					<ul style="list-style-type: none">• Belum padannya NIK Penduduk yang terdaftar di DTKS dengan data Dukcapil	
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi penerimaan negara;• Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran;• Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;• Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);• Penuntasan infrastruktur TIK;• Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi;• Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.				<ul style="list-style-type: none">• Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang handal• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	

Linieritas hubungan antara tujuan yang ada di SDGs dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Pamekasan, RTRW Kabupaten Pamekasan, KLHS Kabupaten Pamekasan serta Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya kesadaran bersama terhadap permasalahan yang dihadapi baik pada tingkat internasional, nasional, daerah serta dari berbagai aspek seperti kemiskinan, kelaparan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, dll, sehingga diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan *World Class Government*.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Kabupaten Pamekasan menyadari perlunya dilakukan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi yaitu terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memaparkan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Rumusan Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Baddrut Tamam, S.Psi** dan **Raja'e, S.Hi.**, yang telah dilantik secara sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 September 2018. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan **Janji Politik** yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan 2018-2023 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pamekasan. Pada



RPJMD Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terjadi perubahan visi dan misi.

5.1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 20 tahun yakni menciptakan ***“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT ”***.

Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Pamekasan, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu penyusunan Visi Jangka Menengah selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Pamekasan dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Ilustrasi yang populer di kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggambarkan tercapainya Visi dan Misi



RPJMD ini adalah sebuah masyarakat yang **Parjhuga, Bhajjhra** dan kondisi infrastruktur yang **Rajjha**. Gambaran masyarakat Pamekasan **Parjhuga, Bhajjhra, dan Rajjha** tersebut merupakan wujud kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di tahun kelima RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Parjhuga; merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis. *Parjhuga* menjadi gambaran manusia paripurna yang menempati strata tinggi dalam relasi sosial dan kemanusiaan. Strata sosial dalam konteks ini tidak didasarkan pada garis keturunan maupun kelas ekonomi, melainkan didasarkan pada kecakapan hidup, ahlak dan perilaku yang mulia. *Parjhuga* yang memiliki kriteria sehat jasmani dan rohani, memiliki intelektualitas tinggi, berakhlakulkarimah, memiliki kedewasaan dalam bersikap, terbuka dengan pemikiran baru, kreatif dan inovatif, serta memiliki kecerdasan sosial dan spiritual yang tinggi, serta memiliki kepekaan horizontal dan vertikal. Sehingga, fokus dari pembangunan yang diilhami oleh kerangka *Parjhuga* adalah pembangunan sumber daya manusia Pamekasan menjadi masyarakat madani, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan psikis, berkualitas dan dibekali skill serta ketrampilan yang cukup memadai, yang digerakkan oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun.

Bhajjhra; merupakan sebuah konsep keberuntungan atau keberkahan dalam Bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan dan keberkahan bagi masyarakat Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomi. Tercapainya keberuntungan tersebut, menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi. Dimana gambaran masyarakat yang beruntung, khususnya dalam perspektif ekonomi, dapat tercapai apabila



masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan ekonomi yang ditopang oleh kemandirian dan kemampuan dalam mengelola berbagai potensi ekonomi lokal. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang dinamis baik di perkotaan maupun di seluruh penjuru perdesaan secara merata merupakan cermin dari konsep *Bhajjhra*. Konsep ini juga ditandai dengan penurunan prosentase penduduk miskin, lapangan kerja yang semakin terbuka dan daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.

Rajjha; merupakan gambaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, rapi, temaram, ramah dan mencitrakan karakter kehidupan asli masyarakat lokal yang kental. Pamekasan *Rajjha*, dalam konteks RPJMD ini diimplementasikan dengan ketersediaannya infrastruktur dasar yang memadai, seperti kondisi jalan dan jembatan yang baik, irigasi, penerangan jalan, serta tata kota yang dijiwai oleh karakter lokal masyarakat Pamekasan. *Rajjha* tidak hanya bertumpu pada sisi keindahan dan karakter estetika semata, akan tetapi *rajjha* juga dilandaskan pada sisi ekonomis yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Arus lalu lintas barang dan manusia yang lancar, baik kedalam Pamekasan maupun keluar Pamekasan. Dengan demikian, untuk mewujudkan Pamekasan *Rajjha*, maka pembangunan akan dititikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang yang memadai guna mendorong tumbuh dan berkembangnya segenap potensi ekonomi dan sektor potensial lainnya seperti agrobisnis, pariwisata, perdagangan, industri manufaktur serta jasa.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu **H. Baddrut Tamam, S.Psi** dan **Raja'e, S.Hi.**, yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:



“ Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama ”

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok Visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pamekasan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”	Pamekasan Sejahtera dari bawah	Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat Pendapatan Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.
	Pembangunan yang Merata	Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
	Berdasarkan	Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Nilai-nilai Agama	juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

5.2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
"Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"	<i>Pamekasan Sejahtera dari bawah</i>	<i>Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia</i>
	<i>Pembangunan yang Merata</i>	<i>Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.</i>



Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
		<i>Misi 3</i> : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. <i>Misi 4</i> : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	<i>Misi 4</i> : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
	<i>Berdasarkan Nilai-nilai Agama</i>	<i>Misi 5</i> : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan selama tahun 2018-2023 sebagai berikut.

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan pemikiran pembangunan telah sampai pada sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka Misi ini akan fokus pada upaya penguatan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya di Kota dan Desa;



Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu pertanian, industri dan perdagangan serta tetap melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan, melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu Koperasi dan Usaha Mikro. Selanjutnya setelah berkembangnya ekonomi secara merata, diharapkan dapat memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari unsur Pajak maupun Retribusi guna mendorong kemandirian fiskal daerah.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

Publik;

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang berkualitas dan merata merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Dua faktor tersebut merupakan pilar penting *good governance*. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan;

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Pamekasan membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong sektor pertanian dan industri manufaktur, serta sektor potensial lainnya. Namun demikian, guna



menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Pamekasan.

5. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan. Berpijak pada *value* tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan melihat kesesuaian dengan visi misi Kepala Daerah yang telah dijelaskan di atas, kemudian visi misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Sehingga, tujuan merupakan tahap dalam perencanaan strategis yang memuat kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Tahap ini menjadi penting, karena bila mana penjabaran visi misi kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dalam tujuan maka akan mempengaruhi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan tujuan merupakan turunan secara lebih operasional dari misi pembangunan daerah, dan mencerminkan kondisi yang



akan dicapai serta dapat mendukung pencapaian misi daerah, tujuan yang telah dirumuskan dapat diukur keberhasilan maupun pencapaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan.

Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun berbasis pada kinerja, yaitu ditekankan pada target kinerja baik hasil (*outcome*), dampak (*impact*), maupun keluaran (*output*) dari capaian sebuah sasaran, program, maupun kegiatan. Dalam merumuskan tujuan perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya perumusan tujuan tersebut menjadi landasan bagi perumusan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023:

1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat merupakan tujuan dari misi pertama, yaitu Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang merata melalui penyelenggaraan layanan dasar dari 3 aspek yaitu aspek kesehatan yang berkaitan dengan derajat kualitas layanan kesehatan yang berkualitas, aspek pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang merata, dan aspek ekonomi yaitu daya beli masyarakat yang terus meningkat. Dalam tujuan pertama ini, pembangunan



difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia maka kedepan SDM berkualitas dan unggul tersebut akan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal

Tujuan kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal yang merupakan penjabaran dari misi kedua yaitu Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan didukung percepatan pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya. Ekonomi inklusif yaitu dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mereduksi kesenjangan antar kelompok. Prioritas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui ekonomi inklusif adalah berlandaskan pada potensi ekonomi lokal, sektor strategis dan keunggulan lokal daerah yang memiliki daya saing tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Serta berfokus pada penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan iklim investasi yang baik dalam beberapa sektor, yaitu sektor perdagangan, perindustrian, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan koperasi.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu Peningkatan Tata Kelola



Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Tujuan ini berfokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik sesuai dengan agenda reformasi birokrasi. Tujuan ini memiliki prioritas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terus meningkat dan berkualitas. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif merupakan implementasi dari prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga berimplikasi pada pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

4. Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat

Tujuan empat yaitu menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup yang merata dan layak bagi masyarakat yang merupakan turunan operasional dari misi keempat yaitu pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan. Hal yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah kualitas lingkungan hidup yang meningkat, serta pemerataan infrastruktur agar dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam melaksanakan pembangunan daerah. Menjamin terpenuhinya infrastruktur dasar juga merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan infrastruktur yang merata dan layak bagi masyarakat dapat mendorong dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah.



5. Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan

Meningkatkan harmoni nilai-nilai sosial budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan dalam pembangunan merupakan tujuan dalam misi kelima yaitu Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera. Pada hakikatnya dalam berkehidupan bermasyarakat memiliki beragam nilai-nilai sosial budaya yang patut dilestarikan dan dijaga keharmoniangannya dengan berlandaskan pada aspek keagamaan sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradab, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Dalam pembangunan juga berfokus pada keterlibatan serta pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan memberikan kesempatan dan kesetaraan yang proporsional terhadap akses, partisipasi dan kontrol dalam pembangunan, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin agar pembangunan dapat merata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesetaraan gender dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Pola pikir yang positif tentang kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus-kasus ketimpangan gender di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Pamekasan khususnya. Upaya untuk menjunjung kesetaraan gender ini merupakan wujud kesadaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap



peranan penting perempuan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan.

Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang mengartikulasikan tujuan serta menggambarkan tahap untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Merujuk pada rumusan tujuan di atas maka berikut disajikan hasil umusan sasaran Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023:

1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
- 2) Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata
- 3) Meningkatnya daya beli masyarakat

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
- 2) Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha
- 3) Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja
- 4) Meningkatnya perekonomian masyarakat desa



3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan, yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas”.

4. Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau

5. Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan Dalam Pembangunan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat
- 3) Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan

Setelah dirumuskan Tujuan dan Sasaran berdasarkan Misi sebagaimana disajikan di atas, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan. Indikator Tujuan berfungsi sebagai gambaran untuk mengetahui capaian Tujuan Pembangunan di akhir periode perencanaan RPJMD, yaitu tahun 2023. Sehingga target capaian indikator tujuan merupakan patokan bagi penyusunan target indikator sasaran di akhir periode

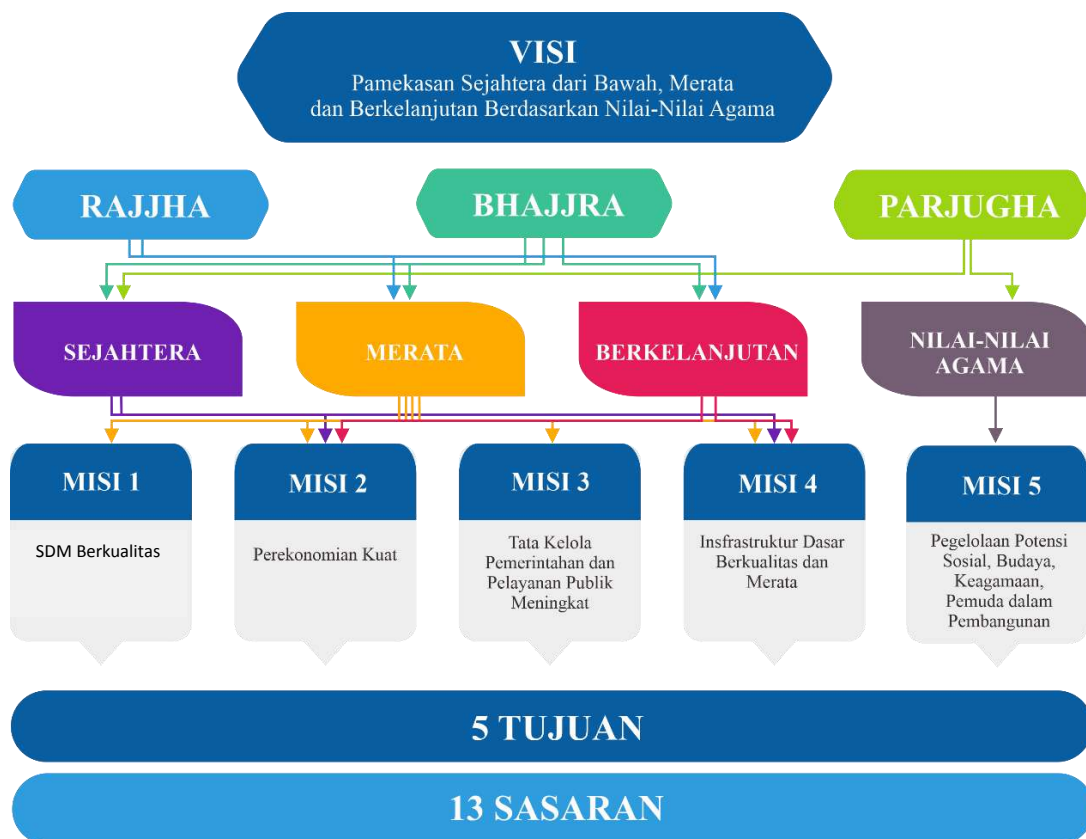


perencanaan. Indikator Tujuan juga merupakan pijakan untuk merumuskan program RPJMD beserta target capaian selama lima tahun yang akan datang. Indikator Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Indikator	Target Akhir Tahun RPJMD
1	Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.35
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal	2. Pertumbuhan ekonomi.	4,39
		3. Gini Ratio	0.26
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,45
		5. Persentase Penduduk miskin	10.97
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	6. Indeks Reformasi Birokrasi	81
4	Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	3,85
5	Meningkatkan Harmoni Nilai- Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan	8. Indeks Modal Sosial	85,26
		9. Indeks Pembangunan Gender	90

Keterkaitan logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sangat penting, karena menjadi dasar atau menggambarkan arsitektur utama perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023. Arsitektur perencanaan tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5.1 Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Guna menjamin rumusan sasaran memiliki keterkaitan yang logis dengan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, maka penjabaran rumusan Sasaran disajikan dalam tabel 5.4.



Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 Visi: "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Deskripsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023			
1	2	4	5		6	9	10	11	12	13		
1	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia	Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,26	67,18	67,94	68,35	68,35		
			1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan	Indeks	0,6	0,65	0,7	0,72	0,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2	Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan	Indeks	0,73	0,75	0,79	0,8	0,8	Dinas Kesehatan, RSUD SMART, RSUD Waru
			3	Menguatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,30	0,32	0,33	0,35	0,35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan
2	Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,54	3,02	3,66	4,39	4,39		
			1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,5	33,15	33,81	34,49	34,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas kelautan dan perikanan	
			2	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	20,17	20,78	21,40	22,04	22,04	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,77	9,92	10,08	10,72	10,72		
			4	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata	
2	Gini Ratio	Indeks	0,32	0,30	0,28	0,26	0,26					



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal	Kondisi Akhir				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Deskripsi	Satuan		2020	2021	2022	2023		2023		
1	2	4	5		6	9	10	11	12	13			
		Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha	1	Persentase Koperasi Berkualitas	%	5,20	5,62	6,24	7,22	7,22	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah		
			2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	%	2,40	3	3,15	3,3	3,3			
			3	Meningkatnya iklim Investasi yang Kondusif	1	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	77,58	79,13	80,71	82,33	82,33	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
					3	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	3,49	2,65	2,55	2,45	2,45	
			1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,51	97,48	98,45	99,43	99,43	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
					4	Persentase Penduduk Miskin	%	14,6	12,21	11,54	10,97	10,97	
			2	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase Penurunan PPKS	%	1,81	1,90	2,00	2,10	2,10	Dinas Sosial
			3	Meningkatnya perekonomian masyarakat desa	1	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	66	80	100	150	150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,73	71	76	81	81			
			3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Nilai SAKIP	Skala	70,02 (BB)	81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	82,1 (A)	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat
					2	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, Inspektorat
					3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	81	81,5	82	82	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	5346	6415	7698	9238	9238	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					5	Indeks SPBE	Indeks	3,01	3,4	3,6	3,8	3,8	Dinas Komunikasi dan Informatika



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal	Kondisi Akhir				Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Deskripsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023				
1	2	4	5		6	9	10	11	12	13			
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,85	4,01 (A(-))	4,26 (A(-))	4,51 (A)	4,51 (A)	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Sekretariat DPRD Kecamatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
				7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	14	14,5	15	15		
			1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Indeks	N/A	3,55	3,7	3,85	3,85		
				Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu	1	Rasio permukiman layak huni	%	N/A	70	75	80	80	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Indeks Pembangunan Infrastruktur	2		%	N/A	75	80	82,5	82,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
				Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,45	105	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas	1	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	%	N/A	80	80	81	81	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N / A	59,75 – 60,14	60,14 – 60,54	60,54 – 60,94	60,54 – 60,94	Dinas Lingkungan Hidup				
5	Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera	Meningkatkan Harmoni Nilai-Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Modal Sosial		Indeks	N/A	82,58	83,98	85,26	85,26			
			1	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib	1	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	82,5	83	86	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			2	Keberdayaan Pemuda dalam Pembangunan	1	Kota Layak Pemuda	Kategori	N/A	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata
			3	Meningkatkan Pelestarian	1	Nilai Pemajuan Kebudayaan	%	8,67%	9,10%	9,56%	10,04%	10,04%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Deskripsi	Satuan	2020	2021	2022	2023		2023	
1	2	4	5		6	9	10	11	12	13	
		Kebudayaan Daerah									
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	88,56	89,28	90	90	
		1 Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,01	58,54	59,22	59,9	59,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

x x x x

/



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB VI

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH**



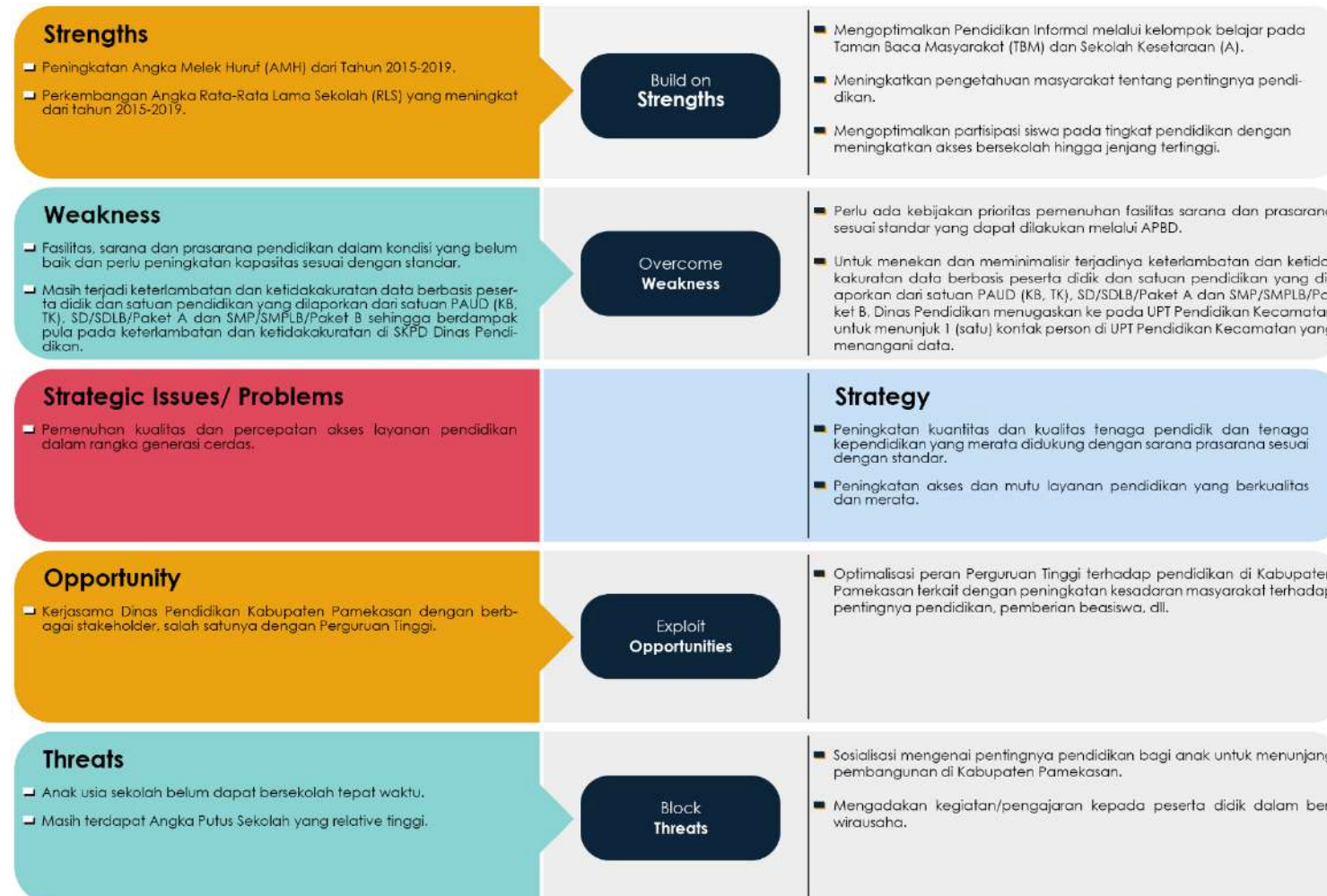
BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menyajikan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Rumusan strategi menjelaskan cara dan/atau tahapan implementasi bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal Daerah. Sedangkan arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (*Timeline*) dari strategi yang telah ditentukan dalam kurun waktu lima tahun periode RPJMD. Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

6.1 Strategi Umum

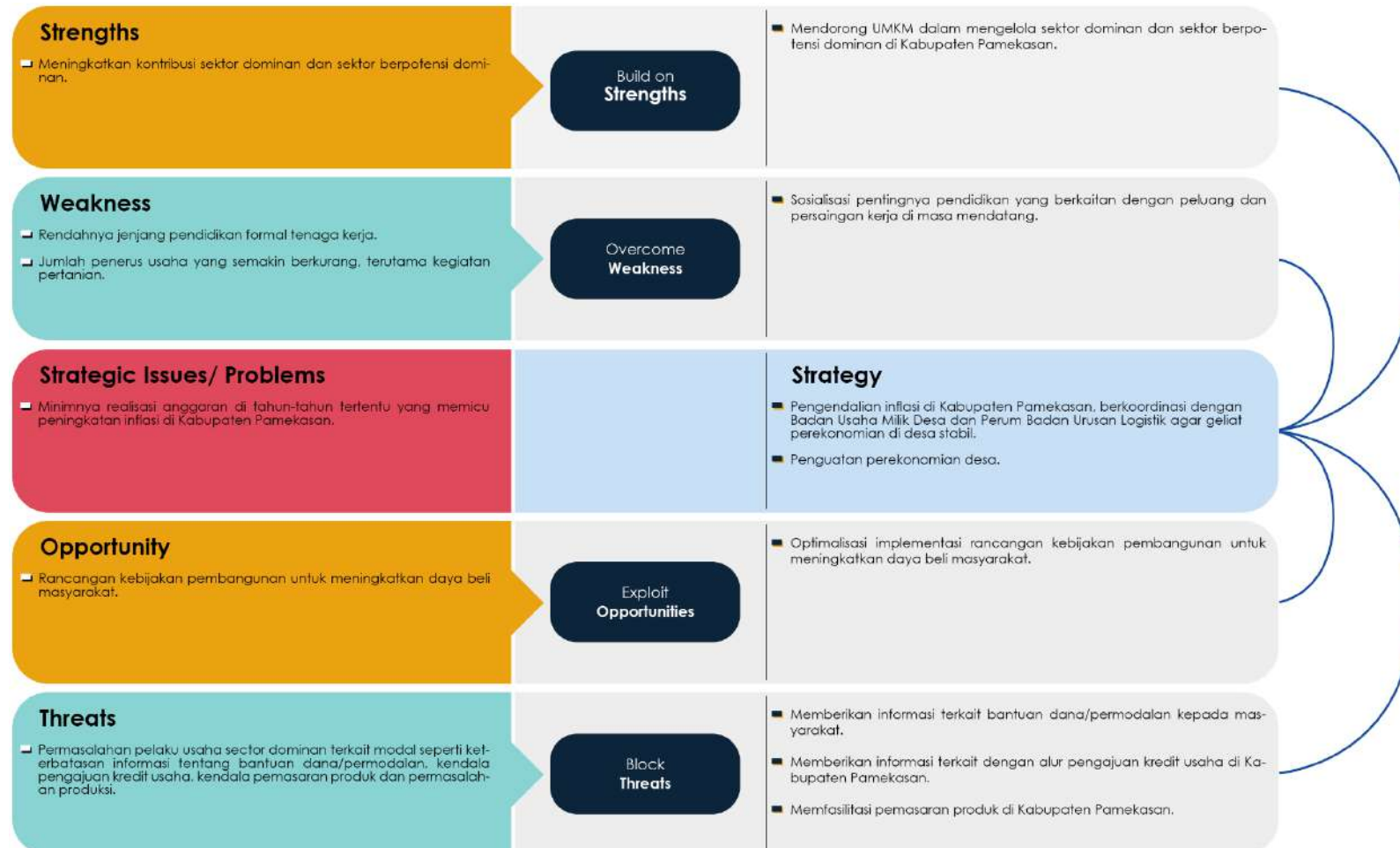
Perumusan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pamekasan dalam mencapai tujuan pembangunan.



Gambar 6.1 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata



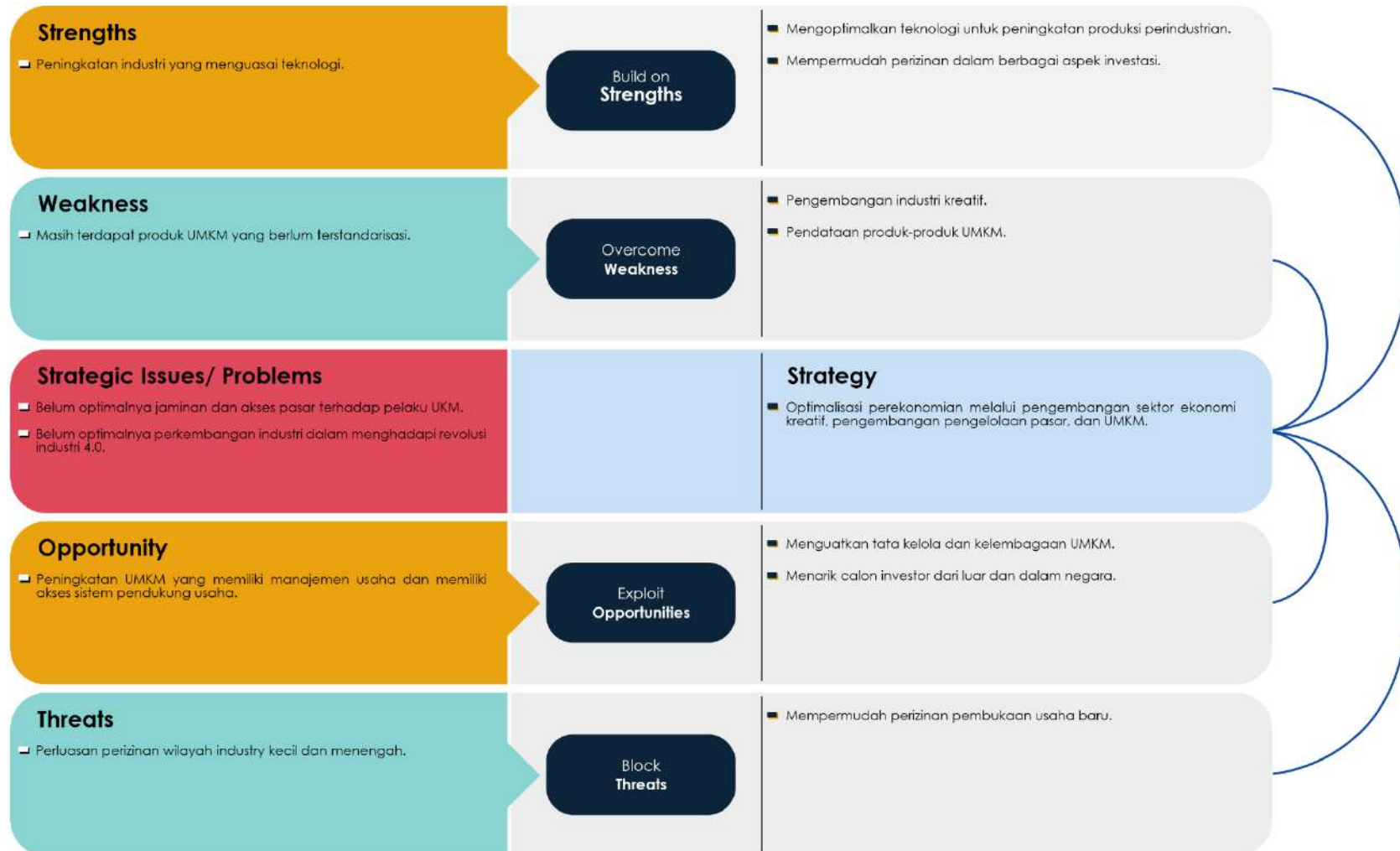
Gambar 6.2 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goals (Sasaran): Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata



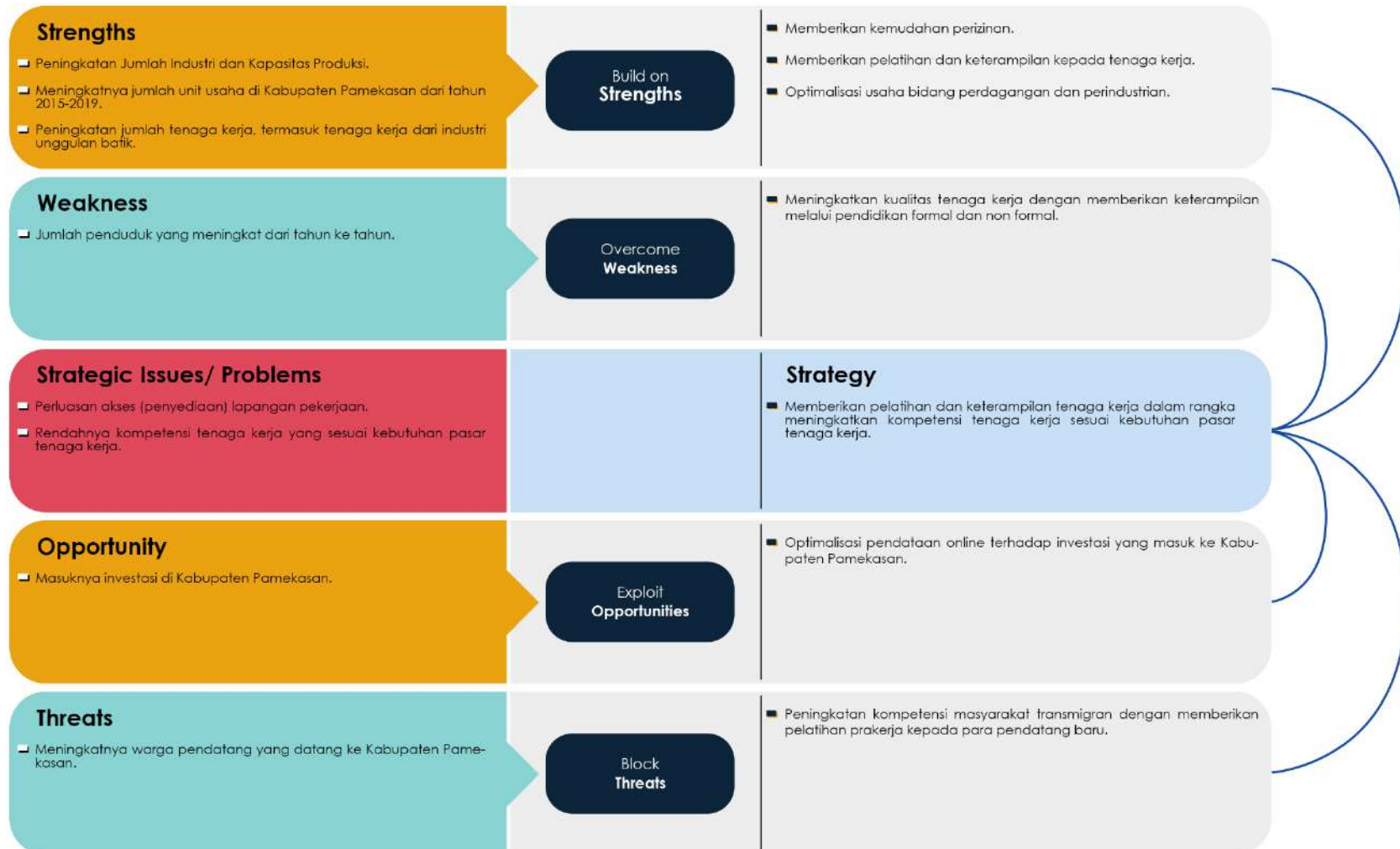
Gambar 6.3 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Daya Beli Masyarakat



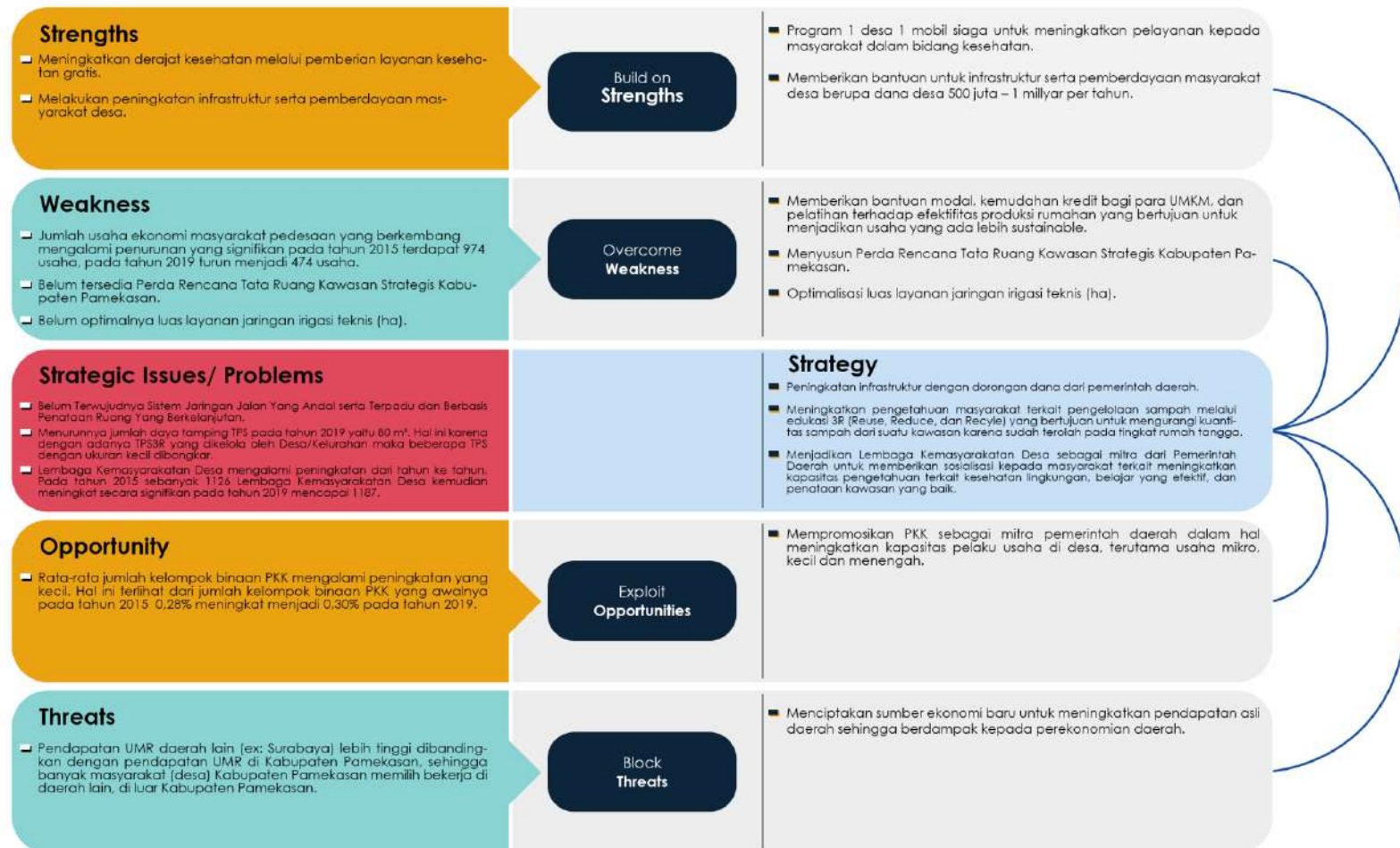
Gambar 6.4 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah



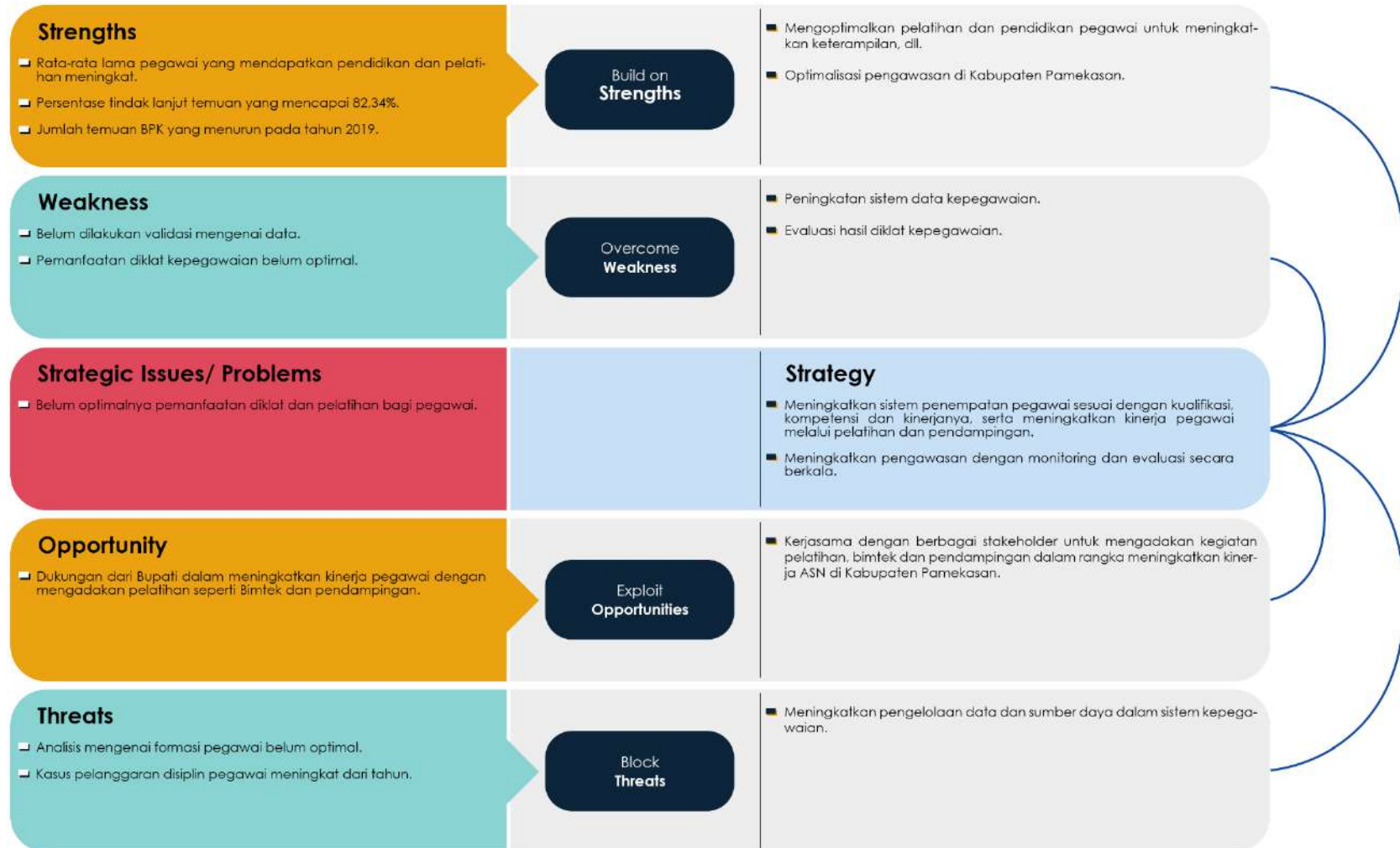
Gambar 6.5 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang Mampu Menumbuhkan Kesempatan Berwirausaha



Gambar 6.6 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja



Gambar 6.7 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kemandirian Desa



Gambar 6.8 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas



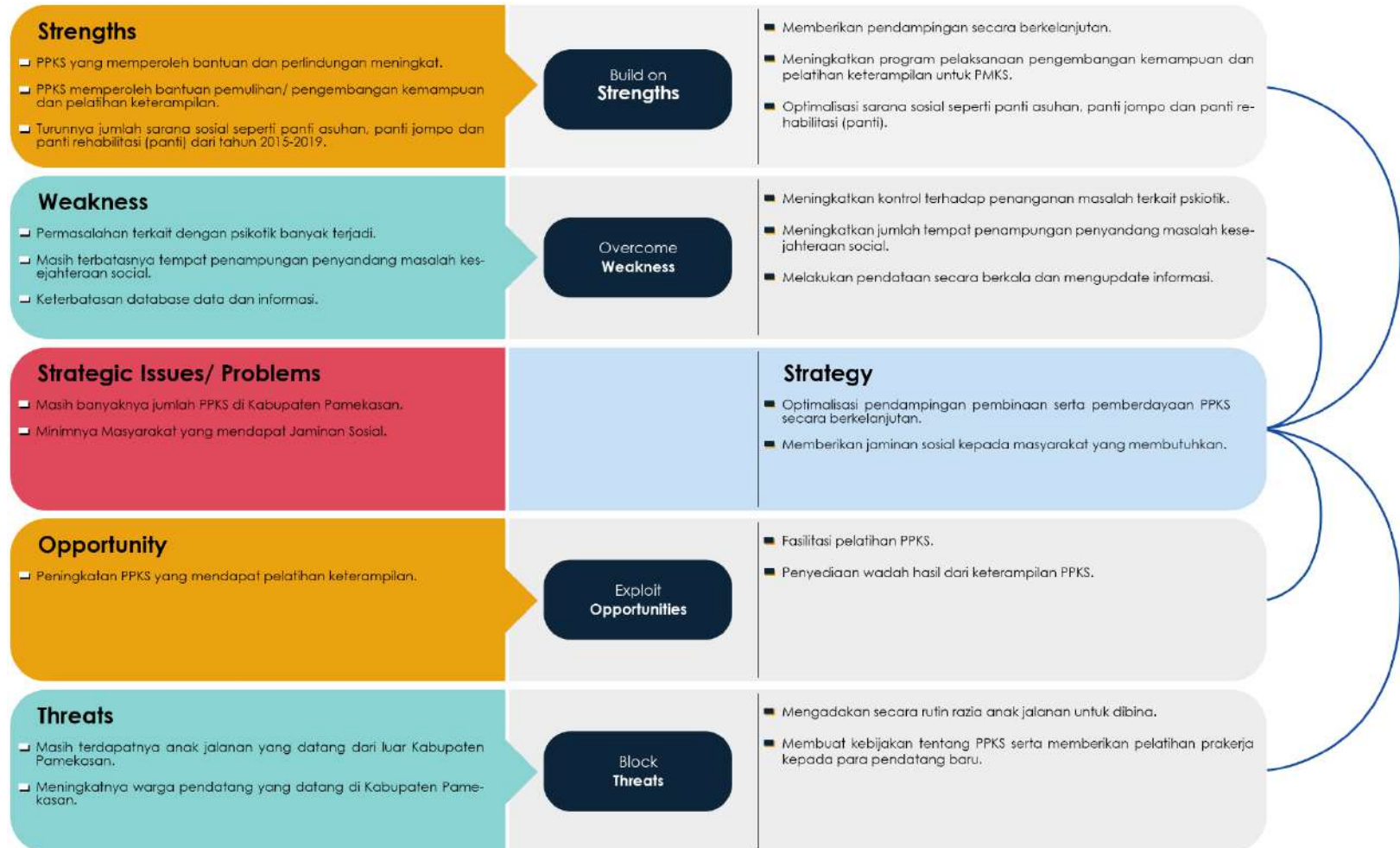
Gambar 6.9 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Secara Terpadu



Gambar 6.10 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kemanfaatan Ruang Terbuka Hijau



Gambar 6.11 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, dan Tertib



Gambar 6.12 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat



Gambar 6.13 Strategy Worksheet: SWOT Formulation Goal (Sasaran): Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan

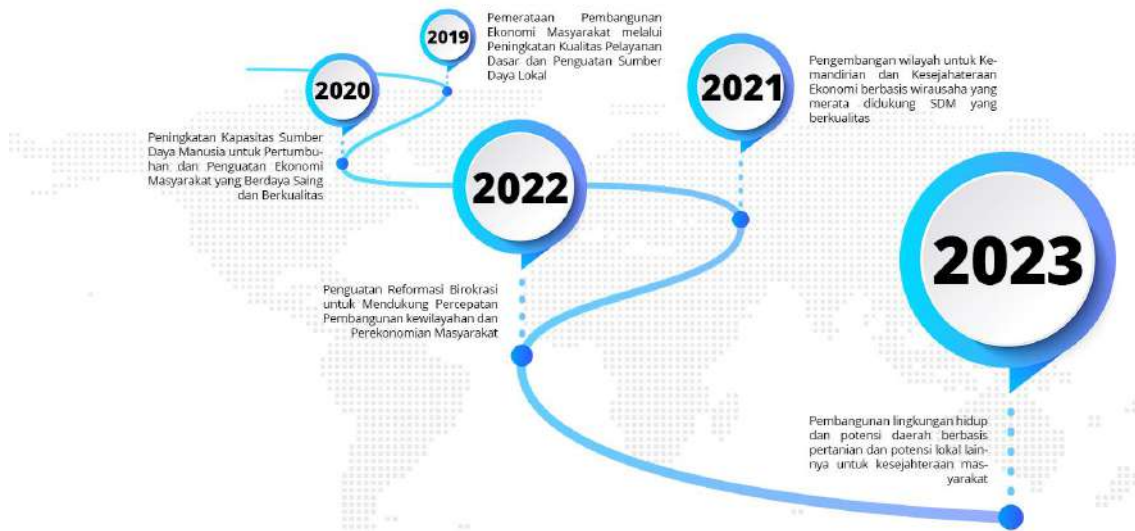


OT / SW	Streghths	Weakness
Opportunity	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan partisipasi siswa pada tingkat Pendidikan dengan meningkatkan akses bersekolah hingga jenjang tertinggi.2. Mengoptimalkan pelayanan Kesehatan dasar dengan penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar dan kualitas maupun kuantitas.3. Memetakan Kawasan objek wisata yang dikembangkan, dengan melihat potensi alam yang ada di Kabupaten Pamekasan.4. Pengawasan terhadap berkurangnya luas lahan pertanian dan bukan pertanian.5. Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.6. Mengoptimalkan pelatihan dan Pendidikan pegawai untuk meningkatkan keterampilan, dll.7. Menyediakan aplikasi pengaduan jalan rusak.8. Optimalisasi sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.9. Meningkatkan peran aktif Wanita dalam berbagai bidang kehidupan.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi peran Perguruan Tinggi terhadap Pendidikan di Kabupaten Pamekasan terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan, pemberian beasiswa, dll.2. Sanitarian atau petugas Kesehatan lingkungan Puskesmas terbaik dapat dijadikan percontohan, serta menggunakan <i>reward & punishment</i> untuk meningkatkan motivasi.3. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta kemudahan akses wisata di Kabupaten Pamekasan.4. Meningkatkan kegiatan pendampingan dan bantuan modal dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.6. Meningkatkan pengelolaan data dan sumber daya dalam system kepegawaian.7. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat.8. Melakukan pendataan PPKS secara berkala dan mengupdate informasi agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.9. Memberdayakan perempuan rentan dan perempuan kepala keluarga.
Treat	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan Pendidikan Informal melalui kelompok belajar pada Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Sekolah Kesetaraan (A).2. Mengoptimalkan layanan Kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan.3. Meningkatkan manajemen pemasaran dan promosi wisata dengan salah satunya memanfaatkan teknologi informasi.4. Mengadakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi para kelompok pelaku usaha perikanan dan para petani, serta pemberian bantuan modal.5. Optimalisasi bidang usaha industri.6. Meningkatkan pengawasan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memanfaatkan teknologi informasi.7. Pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Pamekasan, terutama jalan yang sering dilalui kendaraan besar/berat.8. Optimalisasi pendampingan, pembinaan serta pemberdayaan PPKS secara berkelanjutan.9. Meningkatkan partisipasi Angkatan kerja perempuan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan bagi anak untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Pamekasan.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesehatan.3. Memaksimalkan sektor pariwisata, perhotelan, restaurant, dan perdagangan.4. Memberikan bantuan modal kepada petani.5. Peningkatan kompetensi kepada masyarakat transmigrant dengan memberikan pelatihan pekerja kepada para pendatang baru.6. Optimalisasi pengawasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.7. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan di Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.8. Meningkatkan control terhadap penanganan masalah terkait pskiotik.9. Meningkatkan kesetaraan gender melalui berbagai bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dll.

Tabel 6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pamekasan

Arah Kebijakan				
Fokus Tahun-1	Fokus Tahun-2	Fokus Tahun-3	Fokus Tahun-4	Fokus Tahun-5
Pemerataan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berkualitas	Pengembangan Wilayah untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Berbasis Wirausaha yang Merata didukung SDM yang Berkualitas	Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Kewilayahan dan Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Lainnya untuk Kesejahteraan Masyarakat

Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai *Milestone* pembangunan Kabupaten Pamekasan selama tahun 2019-2023. *Milestone* yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah.



Gambar 6.14 Milestone Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Pamekasan Tahun 2018-2023



10 PROGRAM PRIORITAS

Pokok Perbaikan

ACAR
[Cerdas dan Pintar]

Pamekasan Hebat | pamekasankab.go.id



1. Anak Cerdas dan Pintar (*Acar*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Pendidikan adalah Anak Cerdas dan Pintar (*Acar*). Anak Cerdas dan Pintar (*Acar*) adalah beasiswa bagi santri pelajar dan mahasiswa prestasi dan makanan tambahan balita dan anak sekolah dan peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT, yang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan minimal 1.000 beasiswa untuk santri, pelajar dan mahasiswa miskin berprestasi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi guru tanpa potongan/tanpa pungutan;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan untuk Pondok-Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah Swasta;



- d. Standardisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, minimal SD dan SMP Negeri terakreditasi B;
- e. Bantuan Buku Paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta;
- f. Pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal;
- g. Bantuan peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan formal di Pondok Pesantren.
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan Perpustakaan Kecamatan, Desa dan Lembaga Pendidikan lainnya;



Tabel 6.2 Program Prioritas Anak Cerdas dan Pintar (ACAR)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Anak Cerdas dan Pintar (ACAR)	1.	Meningkatkan kesejahteraan guru melalui percepatan sertifikasi guru tanpa potongan/tanpa pungutan;	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM, APK siswa usia 7-12 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Dasar yang dikelola	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp20.000.000.000	Rp21.000.000.000,00	Rp22.050.000.000,00	Pemberian honor guru kelas, PAI, penjaga, K2, operator PTK kecamatan, insentif tahunan untuk guru honorer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan untuk pondok-pondok pesantren, madrasah dan sekolah swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM, APK siswa usia 7-12 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Dasar yang dikelola	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	Rp14.149.134.384	Rp14.856.591.103,00	Rp15.599.420.658,00	Rehabilitasi sedang/berta ruang kelas berdasarkan data Dapodik yang ditetapkan oleh kementerian	
				Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Rp8.735.146.000	Rp9.171.903.300,00	Rp9.630.498.465,00	Rehabilitasi sedang/berta ruang kelas berdasarkan data Dapodik yang ditetapkan oleh kementerian	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang dikelola	1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas yang direhabilitasi	Rp5.291.000.000	Rp5.555.550.000,00	Rp5.833.327.500,00	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas berdasarkan aspirasi dari musrenbang	
	3.	Standardisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah, minimal SD dan SMP Negeri terakreditasi B	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan	Rp126.600.000	Rp132.930.000,00	Rp139.576.500,00	Sosialisasi penerimaan peserta didik baru, program indonesia pintar, monitoring ijin operasional sekolah	
				Angka partisipasi PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pendidikan PAUD yang terkelola	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga yang menerima bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp250.000.000	Rp262.500.000,00	Rp275.625.000,00	Pemberian insentif pada guru kelompok bermain yang tidak menerima sertifikasi	
				1. Angka partisipasi PAUD 2. Persentase APM, APK,	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan	Rp4.492.500.000	Rp4.717.125.000,00	Rp4.952.981.250,00	Bantuan operasional kepada sekolah dasar dan madrasah	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
				siswa usia 7-12 Tahun 3. Persentase APM, APK siswa usia 13-15 Tahun								diniyah	
	4.	Bantuan Buku Paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	APM, APK SMP13-15 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	Rp1.347.708.796	Rp1.415.094.236,00	Rp1.485.848.948,00	Pengadaan alat-alat laboratorium bagi siswa SMP	
	5.	Pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang dibangun	Rp423.500.400	Rp444.675.420,00	Rp466.909.191,00	Pembangunan jamban, taman bermain dan rehab ruang kelas / guru PAUD	
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD							Jumlah Mebel PAUD yang diadakan	Rp198.000.000	Rp207.900.000,00	Rp218.295.000,00	Pengadaan Mebel PAUD		
1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD							Jumlah alat rumah tangga PAUD yang diadakan	Rp -	Rp -	Rp -			
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD							Jumlah perlengkapan PAUD yang diadakan	Rp -	Rp45.000.000,00	Rp47.250.000,00	Pengadaan APE dalam PAUD		
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD							Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan	Rp105.000.000	Rp110.250.000,00	Rp115.762.500,00	Pengadaan APE Luar		
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							Jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	Rp -	Rp -	Rp -	Pemberian insentif bagi guru PAUD pendamping ABK/stunting		
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD							Jumlah PAUD yang melaksanakan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi	Rp50.000.000	Rp52.500.000,00	Rp55.125.000,00	Supervisi kesiapan akreditasi PAUD		
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir	Rp -	Rp98.925.000,00	Rp103.871.250,00	Workshop peningkatan kompetensi guru PAUD		
							Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Keset	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	Rp75.000.000



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu	
									2021	2022	2023			
						yang dikelola	araan							
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang diadakan	Rp -	Rp60.000.000,00	Rp63.000.000,00	pengadaan komputer untuk operator lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan		
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/kesetaraan yang dibiayai	Rp127.500.000	Rp133.875.000,00	Rp140.568.750,00	Insentif tutor pendidikan kesetaraan		
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang diselenggarakan	Rp357.142.857	Rp375.000.000,00	Rp393.750.000,00	Insentif keaksaraan fungsional di lembaga PKBM		
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang melaksanakan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi	Rp -	Rp60.000.000,00	Rp63.000.000,00	Supevisi untuk persiapan akreditasi lembaga		
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir	Rp30.000.000	Rp31.500.000,00	Rp33.075.000,00	Workshop tutor kesetaraan		
	6.	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan perpustakaan kecamatan, desa dan lembaga pendidikan lainnya;	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun	-	Rp 15.000.000	Rp15.000.000	1. Melakukan analisa kebutuhan dan titik layanan 2. Melakukan MOU dengan pihak sekolah 3. Melakukan kunjungan sesuai jadwal dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling (PUSLING)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
							Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar wilayah kab/kota yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan	-	-	Rp40.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa kebutuhan layanan perpustakaan untuk mencapai SNP Pengadaan sarana dan prasana untuk menunjang layanan perpustakaan Penyerahan sarana dan prasarana kepada perpustakaan pada satuan pendidikan dasar 	
							Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang tersertifikasi	Rp5.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi tenaga perpustakaan yang akan di undang untuk pelatihan Mengirimkan surat kepada lembaga untuk mengugaskan tenaga perpustakaan Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tenaga perpustakaan 	
							Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten yang dikembangkan	Rp24.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa kebutuhan perpustakaan 	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
												2. Memfasilitasi layanan administrasi kepada pemustaka dalam bentuk online maupun offline	
	7.	Bantuan peningkatan kualitas pembelajaran pada pendidikan formal di Pondok Pesantren.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan social, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat yang tersusun	Rp610,000,000	Rp570.000.000	Rp600.000.000		Bagian Kesra
	8.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan minimal 1.000 beasiswa untuk santri, pelajar dan mahasiswa miskin berprestasi;					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang tersusun	Rp3,691,000,000	Rp350.000.000	Rp400.000.000		



10 PROGRAM PRIORITAS

Pokok Pembangunan

SEHATI
[Kesehatan Gratis]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



2. Kesehatan Gratis (*Sehati*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada kesehatan adalah Kesehatan Gratis (*Sehati*). Kesehatan Gratis (*Sehati*) adalah program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka peningkatan derajat kesehatan melalui pemberian layanan kesehatan gratis bagi warga miskin, yang terdiri atas:

- a. Program 1 Desa 1 Mobil Siaga diprioritaskan bagi desa yang belum memiliki;
- b. Penerapan Aplikasi *E-Rembik* (berbasis android), yaitu pendampingan kesehatan tan ibu hamil oleh tenaga Bidan sampai dengan melahirkan;
- c. Penerapan Aplikasi *E-Sehat* (berbasis android), yaitu pelayanan kesehatan terhadap laporan masyarakat adanya warga sakit/ ibu hamil yang akan melahirkan dengan mendatangi rumah si pasien untuk selanjutnya dirujuk ke Puskesmas terdekat;



- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengemban Puskesmas terakreditasi di setiap Kecamatan;
- e. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan pelayanan kesehatan berjalan dan prima;
- f. Pembinaan kesehatan dan gizi untu ibu hamil dan menyusui;
- g. Asuransi kesehatan total (*Total Coverage*) bagi warga miskin, yaitu memberikan jaminan kepada warga miskin untuk menerima pelayanan kesehatan gratis mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kelas III hingga RSUD rujukan Provinsi;
- h. Membangun dan mengembangkan Puskesmas Rawat Inap terakreditasi di setiap Kecamatan serta membangun Puskesmas Pembantu/ Pondok Bersalin Desa;
- i. Peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan (medis dan non-medis) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- j. Optimalisasi program gizi anak sekolah dan intervensi Stunting;
- k. Pemberdayaan dan Peningkat Kesejahteraan Perempuan serta Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak;
- l. Pembinaan Kesehatan Remaja;
- m. Pembinaan Prestasi Olahraga.



Tabel 6.3 Program Prioritas Kesehatan Gratis (Sehati)

Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Kesehatan Gratis (Sehati)	1.	Penerapan Aplikasi E-Rembik (berbasis android), yaitu pendampingan kesehatan ibu hamil oleh tenaga Bidan sampai dengan melahirkan;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	Rp1.408.330.000	Rp1.408.330.000,00	Rp1.408.330.000,00	a. Menyediakan Call Center b. Mengintegrasikan Call Center dengan fasilitas kesehatan terdekat	Dinas Kesehatan
	2.	Penerapan Aplikasi E-Sehat (berbasis android), yaitu pelayanan kesehatan terhadap laporan masyarakat tentang adanya warga sakit/ibu hamil yang akan melahirkan dengan mendatangi rumah si pasien untuk selanjutnya dirujuk ke puskesmas terdekat;							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
								Rp 65,000,000				Rp25,000,000.00	Rp25,000,000.00
	3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengembangkan Puskesmas terakreditasi di setiap kecamatan;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan	Rp1.736.028.420	Rp1.736.028.420,00	Rp1.736.028.420,00	a. Mempersiapkan puskesmas untuk diakreditasi dalam memenuhi pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			MASYARAKAT	Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten/ Kota								
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasional nya Berlaku	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mutunya meningkat	Rp836.750.000	Rp836.750.000,00	Rp836.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> b. mutu pelayanan Penilaian oleh tim surveyor terkait kelayakan puskesmas yang didampingi oleh Dinas Kesehatan c. Tindak lanjut hasil penilaian melalui rehabilitasi/pe meliharaan/pe ningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan 	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memenuhi penilaian Nilai Kinerja Pelayanan Puskesmas (PKP) yang ditetapkan	Rp4.118.360.125	Rp4.118.360.125,00	Rp4.118.360.125,00		
					Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Rp543.600.000	Rp543.600.000,00	Rp543.600.000,00			
	4.	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan pelayanan kesehatan berjalan dan prima;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular,	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun,	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	Rp1.408.330.000	Rp1.408.330.000,00	Rp1.408.330.000,00	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan Call Center b. Mengintegrasikan Call Center dengan fasilitas kesehatan terdekat c. Merujuk pasien pada fasilitas kesehatan lanjutan yang 	



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
				Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi						d. Melaksanakan penanganan kegawatdaruratan	
	5.	Pembinaan kesehatan dan gizi untuk ibu hamil dan menyusui;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran, Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun, Jumlah Kasus Stunting, Jumlah Rumah Tangga Sehat, Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4) Jumlah pemberian PMT untuk balita gizi kurang dan buruk serta ibu hamil KEK jumlah pemberian MP-ASI untuk balita 6-24 bulan	Rp162.009.500	Rp162.009.500,00	Rp162.009.500,00	a. Pemeriksaan ibu hamil sesuai standar b. Persalinan di Fasilitas Kesehatan c. Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar d. Pemberian ASI Eksklusif e. Pelaksanaan Bulan Timbang f. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Bayi	
	6.	Membangun dan mengembangkan Puskesmas Rawat Inap terakreditasi di setiap Kecamatan serta membangun Puskesmas Pembantu/ Pondok Bersalin Desa;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penurunan Kematian	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Pembangunan Puskesmas Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Puskesmas yang dibangun Jumlah Puskesmas yang dikembangkan Jumlah Puskesmas	Rp3.980.028.470	Rp3.980.028.470,00	Rp3.980.028.470,00	a. Analisis rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk b. Perencanaan kebutuhan pengembang	
									Rp375.000.000	Rp375.000.000,00	Rp375.000.000,00		
									Rp1.736.028.420	Rp1.736.028.420,00	Rp1.736.028.420,00		



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			T	Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar, Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Kota		Puskesmas	yang direhabilitasi dan atau dilakukan Pemeliharaan				n fasilitas kesehatan (Pengembangan) c. Analisis kerusakan fasilitas kesehatan (Rehabilitasi)	
	7.	Optimalisasi program gizi anak sekolah dan intervensi Stunting;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG AN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Prosentase Rumah Tangga Sehat b. Indeks Keluarga Sehat c. Angka Kematian Ibu d. Angka Kematian Bayi e. Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular f. Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar g. Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Jumlah pelayanan kesehatan yang disediakan b. Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran c. Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun d. Persentase Stunting, Persentase Rumah Tangga Sehat e. Jumlah indikator Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pemberian PMT untuk balita gizi kurang dan buruk serta ibu hamil KEK jumlah pemberian MP-ASI untuk balita 6-24 bulan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (K4) Jumlah Bayi Usia 0-28 Hari yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Desa STBM 5 pilar Jumlah Fasyankes yang melaksanakan Kegiatan Promosi kesehatan yang dilaksanakan sesuai standar	Rp813.114.000 Rp162.009.500 Rp80.000.000 Rp0 Rp244.714.500 Rp332.035.500	Rp813.114.000,00 Rp162.009.500,00 Rp80.000.000,00 Rp120.000.000,00 Rp244.714.500,00 Rp332.035.500,00	Rp813.114.000,00 Rp162.009.500,00 Rp80.000.000,00 Rp120.000.000,00 Rp244.714.500,00 Rp332.035.500,00	a. Pemeriksaan ibu hamil sesuai standar b. Persalinan di Fasilitas Kesehatan c. Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar d. Pemberian ASI Eksklusif e. Pelaksanaan Bulan Timbang f. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Bayi g. Promosi Kesehatan tentang Stunting melalui kader h. Perbaikan sanitasi dan penggunaan air bersih	



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan b. Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kualitas taman Posyandu yang optimal	Rp813.475.500	Rp813.475.500,00	Rp813.475.500,00		
	8.	Asuransi kesehatan total (Total Coverage) bagi warga miskin, yaitu memberikan jaminan kepada warga miskin untuk menerima pelayanan kesehatan gratis mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Kelas II hingga RSUD rujukan Provinsi;	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk yang menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp29.903.153.625	Rp29.903.153.625,00	Rp29.903.153.625,00	a. Penentuan sasaran penerima jaminan kesehatan (Dinas Sosial) b. Menerbitkan kartu jaminan sosial c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat penerima jaminan sosial d. Pembayaran premi asuransi ke fasilitas pelayanan kesehatan	
	9.	Peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan (medis dan non-medis) agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang Berizin	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Ijin Praktek	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Rp21.250.000	Rp21.250.000,00	Rp21.250.000,00	a. Penentuan jumlah SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi b. Memfasilitasi SDM untuk mengikuti Diklat c. SDM menerima Surat Ijin Praktek sesuai dengan profesinya	
	10.	Program 1 Desa 1 Mobil Siaga diprioritaskan bagi desa yang belum memiliki	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diberdayakan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang terfasilitasi pembangunan			Rp175.000.000,00		DPMDes



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	(yang di hitung adalah desanya, Desa yang mampu membedakan lembaga kemasyarakatan nya)	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	n (yang di hitung adalah lembaga kemasyarakatannya)	Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	sarana desanya Jumlah Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi prasarana desanya					
	11.	Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan serta Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak;	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan kepala keluarga terlatih dalam perekonomian keluarga	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam Pelaksanaan PUG	Rp55.000.000	Rp60.500.000,00	Rp66.000.000,00	Mengumpulkan data semua Poka (PUG) sewa tempat, nara sumber, konsumsi, materi peatihan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Desa/ Kelurahan layak anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga yang anggotanya diberdayakan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan keterampilan	Rp0	Rp110.000.000,00	Rp120.000.000,00	menentukan jumlah peserta, sewa tempat, membuat materi, nara sumber, pelaksanaan	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang layanan perlindungan khusus	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan	Rp189.395.000	Rp189.395.000,00	Rp189.395.000,00	menerima pengaduan tentang kekerasan anak, memanggil pengadu, mendampingi pengadu	



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan yang terlayani	Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp130.915.000	Rp130.915.000,00	Rp130.915.000,00	menerima pengaduan tentang kekerasan perempuan, memanggil pengadu, mendampingi pengadu	
	12.	Pembinaan Kesehatan Remaja;	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota keluarga Tribina, UPPKS dan PIK-R/M yang Aktif	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang diadakan	Rp280.000.000	Rp280.000.000,00	Rp280.000.000,00	menentukan pihak ke 3, membuat kontrak dan penandatanganan kontrak, pembelian BKB KIT dan pengadaan siap nikah anti stunting KIT	
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	Rp607.400.000	Rp607.400.000,00	Rp607.400.000,00	Data Keluarga BKB dan PIK-R di daerah stunting, data kader, tempat di Kecamatan, melakukan pembinaan dan evaluasi	
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan	Rp65.000.000	Rp192.500.000,00	Rp210.000.000,00	1. Membuat pengumuman lomba, seleksi administrasi, tempat pelaksanaan, pelaksanaan test pemilihan duta	



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
					Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	fungsi keluarga	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan				(wawancara, tes bakat, minat tentang genre dan pengetahuan umum, penentuan pemenang lomba 2. Data kader Tri Bina se Kabupaten Pamekasan, tempat pelaksanaan, nara sumber, mempersiapkan materi 3. data PS/KS yang ada tiap kelompok PIK R, materi, tempat pelaksanaan, nara sumber	
	13.	Pembinaan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan atlet yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah cabor yang dikembangkan dan dibina olahraga pendidikannya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan serta sekolah olahraga yang dibina dan dikembangkan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Mengadakan Pusat Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) di setiap Cabor	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kejuaraan dan Pekan Olahraga yang dilaksanakan	Rp17.500.000,00	Rp50.000.000,00	Rp100.000.000,00	Mengadakan Event kejuaraan di beberapa Cabang Olahraga terutama pada momen HAORNAS dan Bupati CUP	
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti		Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Fasilitasi Atlet daerah berprestasi ke tingkat Kejuaraan yang lebih tinggi (Provinsi, Nasional, dan Internasional)	
					Pembinaan	Jumlah atlet	Pembinaan dan	Jumlah atlet	Rp2.250.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp660.000.000,00	Melakukan	



Agenda Pokok	No.	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
					dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	yang mengikuti pengembangan prestasi	Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	berprestasi yang dibina				latihan intensif untuk atlet daerah binaan cabang olahraga yang dibina	
							Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan olahraga yang diberikan	Rp7.500.000,00	Rp36.000.000,00	Rp30.000.000,00	Pemberian Reward bagi atlit peraih medali	



10 PROGRAM PRIORITAS

Pada Pembangunan

DESA CERMAT

[Desa Cerdas dan
Mandiri]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



3. Desa Cerdas dan Mandiri (*Desa Cermat*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada pembangunan desa adalah Desa Cerdas dan Mandiri (*Desa Cermat*), yang meliputi:

- a. Membangun Desa Mandiri, melalui kegiatan percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa → Rp. 500 jt – 1 M pertahun;
- b. *Desa Cerdas (Smart Village)*, yaitu memanfaatkan IT sebagai media penunjang pembangunan menuju kemandirian desa;
- c. Penerapan Satu Desa Satu Sarjana Pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola pemanfaatan Dana Desa;
- d. Memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDes untuk mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan Desa berbasis *One Village One Product*;



e. Revitalisasi Desa Tematik berbasis *One Village One Product*;



Tabel 6.4 Program Prioritas Desa Cerdas dan Mandiri (Cerdas)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Desa Cerdas dan Mandiri (Desa Cermat)	1.	Membangun Desa Mandiri, melalui kegiatan percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa Rp. 500 Juta-1 Miliar pertahun;	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan sarananya	Rp.-	Rp.-	Rp.-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan Prasarananya	Rp.-	Rp.-	Rp.-		
	2.	Desa Cerdas (Smart Village) yaitu memanfaatkan IT sebagai media penunjang pembangunan menuju kemandirian desa;	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang terjalin	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa Tematik yang dikembangkan	Rp. 150.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000		
								Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Rp. 100.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000		
	3.	Memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDes untuk mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan Desa berbasis One Village One Product;	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdesa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000		
								Jumlah BUMDesa yang diberdayakan	Rp.-	Rp.-	Rp.-		
								Jumlah BUMDES bersama yang terbentuk	Rp.-	Rp.-	Rp.-		
	4.	Penerapan Satu Desa Satu Sarjana Pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola pemanfaatan Dana Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdesa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000		
								Jumlah BUMDesa yang diberdayakan	Rp.-	Rp.-	Rp.-		
								Jumlah BUMDES bersama yang terbentuk	Rp.-	Rp.-	Rp.-		
	5.	Revitalisasi Desa Tematik berbasis One Village One Product.	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Kerjasama Desa yang	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Desa Tematik yang dikembangkan	Rp. 150.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			KERJASAMA DESA	terjalin		kerjasamanya	Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi					



10 PROGRAM PRIORITAS

Pokok Pembangunan

**RUJAK
COREK**

[Infrastruktur Jalan
dan Jembatan]

Pamekasan Hebat | pamekasankab.go.id

4. Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Penataan Kawasan (*Rujak Corek*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada infrastruktur adalah Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Penataan Kawasan (*Rujak Corek*), yang meliputi:

- a. Mempermudah akses transportasi masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan antar Desa antar Kecamatan;
- b. Penerapan aplikasi *E-Lorong* (berbasis android), yaitu masyarakat melaporkan adanya jalan rusak, dan selanjutnya akan segera direspon untuk ditindaklanjuti;
- c. Peningkatan kualitas jalan poros desa dan poros antar Kecamatan;
- d. Penataan Tata Ruang Wilayah dalam rangka mewujudkan “Pamekasan Cantik”.



Tabel 6.5 Program Prioritas Rujak Corek

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Penataan Kawasan (Rujak Corek)	1.	Penataan Kawasan dalam rangka Mewujudkan "Pamekasan Cantik"	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO PENGELOLAAN KEHATI	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH/Taman	Rp1.300.000.000	Rp1.530.000.000,00	Rp6.000.000.000,00	1. Revitalisasi Taman Arek Lancor 2. Pembangunan RTH Sadangdang 3. Penataan Taman Bahagia 4. Penataan Taman Segara 5. Penataan Taman Potre Koneng	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGAN DI TPA	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Rp400.000.000	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Penyusunan dokumen pengelolaan persampahan (edaran + sosialisasi+aturan bupati)	
							Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah		Rp40.000.000	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Operasional TPA/TPS3R				Rp3.860.524.000	Rp4.000.000.000,00	Rp4.320.000.000,00	3. Pembangunan TPS3R di Kelurahan/Desa yang mempunyai timbulan sampah yang besar	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
							Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						
							Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Rp50.000.000	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Sosialisasi dan Bimtek terkait persampahan	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp10.000.000	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Pendampingan terhadap Kelurahan Desa yang memuat sarana pengelolaan sampah secara mandiri	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana persampahan yang diadakan	Rp500.000.000	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan TPA/TPST/SPA	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan sarana pengelolaan sampah	Kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kab/kota	Jumlah sarana yang dikelola	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS yan terbangun	Rp2.000.000.000	Rp12.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	1. Penyediaan incenerator TPA Angsanah 2. Pembangunan TPA Bajur 3. Pemb. TPS3R 5 unit	
							Penyediaan sarana persampahan	Jumlah sarana persampahan yang tersedia	Rp2.000.000.000	Rp2.500.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Pengadaan kendaraan pengangkut sampah	
							Peningkatan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Rp0	Rp0,00	Rp5.000.000.000,00	Penambahan Cell Sanitary Landfill TPA Angsanah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	Rp74.114.474.583	Rp26.413.000.000	Rp26.413.000.000	Melakukan Pembangunan Infrastruktur jalan di lingkungan permukiman dan sarana pendukungnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Jumlah Koordinasi Bangunan	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan,	Rp4.100.509.932	Rp89.000.000.000	Rp101.500.000.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
						Gedung yang Diselenggarakan	Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang diselenggarakan	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Rp28.749.439.350	Rp20.000.000.000	Rp20.000.000.000	Melakukan pembangunan pavingisasi di lingkungan Pondok Pesantren.	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	Rp349.999.900	Rp350.000.000	Rp350.000.000	> Melakukan Survey / Mengumpulkan data > Mengidentifikasi data dan menyusun dokumen > Deleniasi kawasan kumuh serta kebutuhan infrastruktur untuk mengentaskan kekumuhan	
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Rp1.275.260.000	Rp12.600.000.000	Rp12.600.000.000	> penyusunan proposal, > Sosialisasi Kegiatan, > Verifikasi Calon Penerima Bantuan, > penyusunan sk bupati, > pembuatan rekening calon penerima bantuan (cpb), > pencairan dana dari kasda ke rekening penerima, > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap I, Transfer Dana tahap I ke Toko Bahan Bangunan, Pelaksanaan konstruksi Tahap	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
												I, Laporan Penggunaan Dana Tahap I - Progres fisik min 30%, > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap II, Transfer Dana tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan, > Pelaksanaan konstruksi Tahap II, Laporan Penggunaan Dana Tahap II - Progres fisik 100%	
							1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah kegiatan pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yang dikoordinasikan	Rp1.268.874.960	Rp5.400.000.000	Rp6.300.000.000	> rapat koordinasi dengan TFL > Sosialisasi dengan calon penerima bantuan > verifikasi rumah calon penerima bantuan > monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTLH > honor tim pelaksana kegiatan tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dicegah kumuhnya	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10Ha yang diperbaiki	Rp12.635.000.000	Rp12.250.000.000	Rp17.500.000.000	> penyusunan proposal, > Sosialisasi Kegiatan, > Verifikasi Calon Penerima Bantuan, > penyusunan sk Bupati, > pembuatan rekening calon penerima bantuan (cpb), > pencairan dana dari kasda ke rekening penerima, > Pemesanan, Pengiriman, dan	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
												Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap I, Transfer Dana tahap I ke Toko Bahan Bangunan, Pelaksanaan konstruksi tahap I, Laporan Penggunaan Dana Tahap I - Progres fisik min 30%, > Pemesanan, Pengiriman, dan Pemeriksaan Bahan Bangunan Tahap II, Transfer Dana tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan, > Pelaksanaan konstruksi tahap II, Laporan Penggunaan Dana Tahap II - Progres fisik 100%	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU perumahan yang disusun	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah PSU yang dibangun	Rp0	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000		
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan	Rp0	Rp100.000.000	Rp100.000.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ruas jalan yang memiliki perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan yang disediakan	-	Rp. 249.898.423	-	pemasangan LPJU	Dinas Perhubungan
	2.	Mempermudah akses transportasi masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan antar desa antar kecamatan;	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Rp59.996.022.726	Rp7.000.000.000,00	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.	Penerapan aplikasi E-Lorong (berbasis android) yaitu masyarakat melaporkan adanya jalan rusak, dan selanjutnya akan segera direspon untuk ditindaklanjuti;	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data jalan dan jembatan yang disusun	Rp199.999.395	Rp200.000.000,00	-		
	4.	Peningkatan kualitas jalan poros desa dan poros antar kecamatan	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	Rp40.537.018.394	Rp15.000.000.000,00	-		



10 PROGRAM PRIORITAS

Pokok Pembangunan

STRUNGKING DESA

[Satu Tangki Truck Air
dan Jaringan Air
Minum Desa]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



5. Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (*Strungking Desa*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Sumber Daya Air adalah Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (*Strungking Desa*), yang meliputi:

- Mengembangkan PAM Desa untuk perluasan jaringan air bersih;
- Peningkatan sanitasi serta penyediaan air minum dan air bersih;
- Penyediaan bantuan satu tangki truck air bersih untuk mengatasi kekeringan di Desa-Desa rawan kekeringan;
- Peningkatan dan penyediaan jaringan irigasi.



Tabel 6.6 Program Prioritas Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu			
									2021	2022	2023					
Satu Tangki Truck Air & Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa)	1.	Mengembangkan PAM Desa untuk perluasan jaringan air bersih;	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	1.03.03.2.01.01	Jumlah rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	Rp199.999.776	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Survey lokasi, Mengamati dan menganalisa hasil survey dan , memeriksa dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
							1.03.03.2.01.04	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	Rp 36.424.999.929	Rp19.500.000.000	Rp16.200.000.000	melakukan pengeboran, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR				
							1.03.03.2.01.06	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	Rp 2.642.752.200	Rp3.000.000.000	Rp 2.800.000.000	Membangun perluasan jaringan perpipaan dan SR				
							1.03.03.2.01.08	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	Rp 1.100.000.624	Rp 2.000.000.000	Rp3.000.000.000	melakukan pengeboran, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR				
							1.03.03.2.01.11	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Rp 1.494.999.900	Rp1.700.000.000	Rp1.900.000.000	> Pendampingan Tim Fasilitator PAMSIMAS Kabupaten > Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan PAMSIMAS				
							1.03.03.2.01.13	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	> Pendampingan Tim Fasilitator PAMSIMAS Kabupaten > Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan PAMSIMAS				
							1.03.03.2.01.19	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	Rp 2.091.722.771	Rp2.500.000.000	Rp3.000.000.000	Membangun perluasan jaringan perpipaan dan SR				
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan Pengaman	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air yang dibangun		Rp 99.999.730	Rp2.000.000.000	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
				Daya Air	Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik							
	2.	Peningkatan sanitasi serta penyediaan air minum dan air bersih;	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	1.3.5.2.01.05 Rehabilitasi/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Rp 3.136.650.000	Rp4.000.000.000	Rp6.000.000.000	> Membangun MCK di lingkungan pondok pesantren. > Membangun septik tank untuk KK kurang mampu di 10 Desa / Kelurahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3.	Penyediaan bantuan satu tangki truck air bersih untuk mengatasi kekeringan di desa-desa rawan kekeringan;	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pengurangan Resiko Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusdalops dan TRC penanggulangan bencana yang aktif dalam memberikan Respon Cepat Darurat Bencana	Rp 4, 486, 810, 446	Rp 3,369,052,988	Rp 3,537,505,637	Menyediakan Satu Tangki Truck Air dan Jaringan Air Minum Desa (Strungking Desa) bagi Desa yang mengalami Kebencanaan Kekeringan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



10 PROGRAM PRIORITAS

Pilih Perbaikan

**TEKKER
PANDAN**

[Kesejahteraan Guru
Honorar, Guru Ngaji,
Penjaga Makam,
Penggali Kubur, Modin
dan Kader Posyandu]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



6. Kesejahteraan Guru Honorar, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (*Tekker Padam*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Kesejahteraan Masyarakat adalah Kesejahteraan Guru Honorar, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (*Tekker Padam*), yang meliputi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Modin, Guru Ngaji, dan Kader Posyandu melalui pemberian bantuan sosial;
- b. Tambahan insentif bagi GTT/PTT, Guru Swasta, Guru TPQ/TPA/Pondok Pesantren;
- c. Meningkatkan kesejahteraan penjaga makam cagar budaya.



Tabel 6.7 Program Prioritas Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin dan Kader Posyandu (Tekker Padam)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Kesejahteraan Guru Honorer, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Penggali Kubur, Modin, dan Kader Posyandu (Tekker Pandan)	1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, modin, guru ngaji, dan kader posyandu melalui pemberian bantuan sosial;	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan makanan	Rp3,200,000,000.00	Rp5,100,000,000.00	Rp3,200,000,000.00	1. Melakukan pendataan 2. Verifikasi dan validasi 3. Penetapan penerima permakanan 3. Melakukan MOU dengan pihak ketiga penyedia makanan 4. Pengadaan barang jasa 5. Pengecekan kelengkapan 6. Pelaksanaan pendistribusian 7. Pengawasan/pendampingan 8. Monitoring Evaluasi	Dinas Sosial
	2.	Meningkatkan kesejahteraan penjaga makam cagar budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	2.22.05.2.02.01 P elindungan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola	Rp150.000.000	Rp157.500.000,00	Rp165.375.000,00	Honor penjaga musium tim cagar budaya	
	3.	Tambahan insentif bagi GTT/PTT, Guru Swasta, Guru TPQ/TPA/Pondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM, APK, APS SD siswa usia 7-12 Tahun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidikan SD yang dikelola	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp20.000.000.000	Rp21.000.000.000,00	Rp22.050.000.000,00	Pemberian honor guru Kelas, PAI, Penjas, Penjaga, K2, Operator PTK Kecamatan, insentif tahunan untuk guru honorer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



10 PROGRAM PRIORITAS

Pilih Perbaikan

SAPU TANGAN BIRU

[Pembinaan Sepuluh
Wirausaha Baru dan
Calon Pengusaha
Baru]

Pamekasan Hebat | @ pamekasankab.go.id



7. Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (*Sapu Tangan Biru*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Kewirausahaan adalah Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (*Sapu Tangan Biru*), yang meliputi:

- a. Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;
- b. Membangun kerjasama pelatihan wirausaha dengan kementerian/lembaga, BPWS, CSR perusahaan, dll;
- c. Memajukan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;
- d. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat;



- e. Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program “*Millenial Talent Hub*” sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;
- f. Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;
- g. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;
- h. Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum pengusaha besar maupun kecil;
- i. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;
- j. Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
- k. Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis *One Village One Product*;
- l. Revitalisasi Pasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih;
- m. Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhkan peluang berwirausaha.



Tabel 6.8 Program Prioritas Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru da Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Pembinaan Sepuluh Ribu Wirausaha Baru dan Calon Wirausaha Baru (Sapu Tangan Biru)	1.	Merintis Wisata Edukasi, wisata halal dan taman budaya yang mampu menumbuhkan peluang berwirausaha;	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pemuda yang dibina	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mengikuti koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp10.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Melakukan Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi pengiriman Pemuda Pelopor ke tingkat Provinsi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mengikuti koordinasi	Rp40.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Melakukan Pelatihan pembinaan dan Monitoring Pemuda berwirausaha	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	Persentase pengembangan obyek wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	Rp 250.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Pelaksanaan event berupa atraksi wisata di Destinasi Wisata Talang Siring, Pantai Jumiang dan Edu Wisata Mangrove Kecamatan Gelis dan DTW lainnya yang bisa menarik pengunjung wisatawan nusantara dan mancanegara	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Rp350.000.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Pembangunan 2 titik Track/walking bridges Mangrove di Edu Wisata Mangrove Kecamatan Gelis & Pantai Talang Siring	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata & Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkatkan kompetensinya	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilatih	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	1. Mapping pelaku ekonomi pariwisata & ekonomi kreatif 2. Pelaksanaan pelatihan pelaku ekonomi pariwisata & ekraf	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kerjasama	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Jumlah pemasaran yang dilaksanakan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran	Rp250.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	1. Mapping mitra kerja pelaku ekonomi pariwisata dan ekraf	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
				Pariwisata	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	n	Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Baik DalamNegeri maupun Luar Negeri				2. Pelaksanan expo pariwisata kabupaten Pamekasan di luar Daerah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase peningkatan atlet yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang dikembangkan dan dibangun olahraga pendidikannya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan serta sekolah olahraga yang dibangun dan dikembangkan	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Mengadakan Pusat Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) di setiap Cabor	
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan Pekan Olahraga yang dilaksanakan	Rp17.500.000	Rp50.000.000	Rp100.000.000	Mengadakan Event kejuaraan di beberapa Cabang Olahraga terutama pada momen HAORNAS dan Bupati CUP	
							Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti		Rp300.000.000	Rp300.000.000	Fasilitasi Atlet daerah berprestasi ke tingkat Kejuaraan yang lebih tinggi (Provinsi, Nasional, dan Internasional)	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pengembangan prestasi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	Rp 2.250.000.000	Rp400.000.000	Rp660.000.000	Melakukan latihan intensif untuk atlet daerah binaan cabang olahraga yang dibina	
							Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan olahraga yang diberikan	Rp 7.500.000	Rp 36.000.000	Rp 30.000.000	Pemberian Reward bagi atlit peraih medali	
	2.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam rangka penyerapan tenaga kerja;	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECLL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang didata potensi dan pengembangannya	Rp170,000,000	Rp230,000,000	Rp250,000,000	Melakukan pendataan Usaha Mikro dan mengembangkan potensinya dengan pembinaan dan pendampingan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
							Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan	Rp -	Rp100,000,000	Rp160,000,000	Memfasilitasi kemitraan Usaha Mikro dengan lembaga lainnya untuk meningkatkan promosi dan penjualan	
							Fasilitasi Kemudahan	Jumlah Usaha Mikro yang	Rp -	Rp80,000,000	Rp85,000,000	Memfasilitasi dan melakukan	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
							Perizinan Usaha Mikro	difasilitasi kemudahan perizinan				pendampingan perizinan Usaha Mikro	
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan kelembagaan potensinya dan pengembangannya	Rp4,000,000,000	Rp230,000,000	Rp250,000,000	Memfasilitasi pengembangan usaha mikro melalui pendampingan dan penyediaan media promosi	
							Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Rp -	Rp80,000,000	Rp85,000,000	Memfasilitasi dalam berkoordinasi dengan beberapa lembaga pemangku kepentingan untuk memberdayakan usaha mikro	
	3.	Penyediaan dan Optimalisasi Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, kapasitas SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp5,000,000,000	Rp300,000,000	Rp350,000,000	Pembangunan fasilitas pusat jajanan serba ada (Pujasera) dan merelokasi PKL tersebar	
	4.	Peningkatan kualitas pengolahan produk industri rumah tangga berbasis <i>One Village One Product</i> ;	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK yang disusun dan dievaluasi pelaksanaannya	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaku industri rumah tangga yang mendapatkan pembinaan produksi dan manajerial	Rp217.000.000	Rp316.820.000	Rp340.898.320	Pelatihan pengembangan produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5.	Revitalisasi Pasar dan Pasar Tetap Tradisional yang bersih;	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	Rp 225.571.500	Rp329.334.390	Rp354.363.804	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	
	6.	Mengurangi pengangguran dengan menciptakan peluang berwirausaha berbasis potensi desa;	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun Tepat Waktu	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTK Yang Tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun	Rp30.000.000	Rp60.000.000	Rp66.000.000		DPMPSPNA KER
	7.	Membangun kerja sama	Program Pelatihan Kerja	Persentase tenaga	Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah peserta yang	Proses Pelaksanaan	Jumlah pencari kerja	Rp 5.329.112.994	Rp6.349.112.994	Rp6.349.112.994		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
		pelatihan wirausaha dengan Kementerian/Lembaga, BPWS CSR Perusahaan, dan lain-lain;	Dan Produktivitas Tenaga Kerja	kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	berdasarkan Unit Kompetensi	lulus dalam pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	terdaftar yang mengikuti pelatihan					
	8.	Mewajibkan perusahaan yang telah beroperasi untuk menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus dalam pelatihan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti pelatihan	Rp5.329.112.994	Rp5.486.368.650	Rp5.760.687.083		
	9.	Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus dalam pelatihan	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja yang disediakan	Rp190.000.000	Rp210.000.000	Rp220.500.000		
	10.	Mendorong terbentuknya komunitas baru berbasis ekonomi melalui Program "Millennial Talent Hub" sebagai fungsi Balai Latihan Kerja;	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang diberikan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanaman modal yang dibangun pelaksanaannya	Rp232.462.000	Rp99.750.000	Rp104.737.500		
	11.	Penguatan regulasi dan kebijakan dalam rangka kemudahan investasi padat modal atau padat karya;	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang diberikan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanaman modal yang dibangun pelaksanaannya dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp69.999.700	Rp157.500.000	Rp165.375.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
	12.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka iklim investasi yang baik dan kondusif;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor (PMDN/PMA)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase peta potensi investasi yang ditetapkan	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah yang disusun dengan kualitas baik	Rp220.000.000	Rp231.000.000	Rp249.480.000		
	13	Meningkatkan komunikasi dan promosi investasi bersama para investor melalui forum Pengusaha besar maupun kecil;	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang diselenggarakan	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Rp30.000.000	Rp50.000.000	Rp100.000.000		
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanaman Modal yang dilakukan melalui Media Cetak dan Elektronik	Rp230.000.000	Rp345.000.000	Rp345.000.000		



10 PROGRAM PRIORITAS

Pokok Pembangunan

KREPEK TETTE

[Pemerintah Bersih
dan Pelayanan Prima]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



8. Transformasi Birokrasi Berbasis *Good Governance* (*Kripik Tette*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada Birokrasi adalah Transformasi Birokrasi Berbasis *Good Governance* (*Kripik Tette*), yang meliputi:

- a. Penyediaan Taman Aspirasi Rakyat;
- b. Menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan strategis seperti Camat dan Kepala Dinas;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- d. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan;
- e. Penataan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan/Kawasan Perkantoran Terpadu;
- f. Pemberian TPP (Tambahan penghasilan pegawai) dan



- g. Penerapan teknologi informasi (aplikasi penunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan) untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja;
- h. Penerapan aplikasi ***E-Madul Bupati*** (berbasis android), yaitu masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati terkait dengan seluruh keluhan pelayanan publik;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja pegawai termasuk pengembangan aplikasi *e-ASN*.



Tabel 6.9 Program Prioritas Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Transformasi Birokrasi Berbasis Good Governance (Kripik Tette)	1.	Menerapkan sistem lelang jabatan untuk jabatan strategis seperti Camat dan Kepala Dinas;	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan struktur organisasi	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Laporan hasil promosi ASN yang tersusun	Rp400.000.000	Rp750.000.000	Rp800.000.000	Pelaksanaan Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	BKPSDM
				Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin									
				Persentase ASN dengan Kriteria kinerja baik									
	2.	Pemberian TPP (Tambahan penghasilan pegawai);	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Rp160.000.000	Rp250.000.000	Rp300.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja ASN berdasarkan absensi, TPP dan e-kinerja	
				Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin									
				Persentase ASN dengan Kriteria kinerja baik									
	3.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ditindaklanjuti oleh PERANGKAT DAERAH	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Capaian Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK	Rp343.914.000	Rp550.000.000	Rp605.000.000	1. Bimbingan Teknis Manajemen Anti Korupsi	Inspektorat
							Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	
									Rp784.120.500	Rp2.750.000.000	Rp3.500.000.000	1. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan APBD;	
											2. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pungutan liar dan gratifikasi;		
											3. Penghargaan atas PERANGKAT		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Rencana Pengawasan Yang Terealisasi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang terbit tepat waktu	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	Rp69.029.000	Rp450.000.000	Rp500.000.000	DAERAH dan Desa dengan akuntabilitas keuangan dan kinerja terbaik 4. Perjanjian Kerjasama APIP-APH 1. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 2. Pendampingan, asistensi dan monitoring Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) perbaikan	
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	Rp485.401.000	Rp1.000.000.000	Rp1.250.000.000	1. Audit Keuangan Perangkat Daerah / Unit Kerja 2. Audit BOS; 3. Reviu RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA PD, KUA, PPAS, DAN RKA SKPD (termasuk perubahannya) 4. Reviu DAK 5. Reviu SSH, ASB, dan HSPK 6. Reviu Pengelolaan Aset 7. Reviu Rotasi, Promosi dan Mutasi ASN (kepegawaian) 8. Monitoring Penyerapan Anggaran 9. Audit dan Monitoring Penanganan COVID-19 10. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
												Gender 11. Evaluasi benturan kepentingan 12. Probit Audit PBJ	
							Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Rp231.053.000	Rp350.000.000	Rp385.000.000	1. Audit dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa 2. Monitoring Kepatuhan Perpajakan 3. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	
	4.	Penerapan aplikasi E-Madul Bupati (berbasis android), yaitu masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati terkait dengan seluruh keluhan pelayanan publik;	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Rp 65,000,000	Rp25,000,000.00	Rp25,000,000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
	5.	Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan profesionalism e dan etos kerja pegawai termasuk pengembangan aplikasi E-ASN;	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Indeks Aspek TIK, Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang dikembangkan dan dikelola 2. Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	Rp10,000,000.00	Rp25,000,000.00		
	6.	Penataan dan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan/ Kawasan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggara	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung	Rp100.000.000	Rp2.500.000.000	Rp500.000.000	> Pembangunan gedung pelayanan publik mako polres pamekasan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
		Perkantoran Terpadu			Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	kan	Gedung Daerah Kabupaten/Kota	kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun				>Lanjutan fasilitas pendukung gedung kantor kejaksaan >Lanjutan Pagar mako polres pamekasan >Pavingisasi halaman gedung kantor imigrasi >Pavingisasi halaman gedung kantor NU >Pavingisasi jalan masuk kantor disnaker >Urugan Tanah Lapangan Ex Polwil >Pengerasan Jalan Halaman Polantas >Pembangunan Saluran Lingkungan MAPOLRES >Perbaikan Jalan MAKODIM >Pembangunan Paving Halaman Kantor Intel >Pembangunan Paving Halaman Kantor MINVETCAD	
								Jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor yang dibangun	Rp1.700.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.000.000.000		
								jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	Rp2.300.509.932	Rp85.000.000.000	Rp100.000.000.000		
	7.	Penyediaan Taman Aspirasi Rakyat ;	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan social, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan evaluasi, kebijakan dan capaian kinerja kesejahteraan masyarakat	Rp610.000.000	Rp570.000.000	Rp600.000.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
	8.	Penerapan teknologi informasi (aplikasi penunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan) untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana.	Penataan Organisasi	Persentase kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah kebijakan peningkatan kinerja pemerintah daerah yg dikoordinasikan pelaksanaannya	Rp1.150.000.000	Rp667.000.000	Rp -		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan tata pemerintahan yang dilaksanakan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan LPPD yang disusun	Rp 659.000.000	Rp150.000.000	Rp157.500.000		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Layanan Secara Elektronik yang dilaksanakan	Rp285.000.000	Rp234.720.000	Rp453.750.000		
	9.	Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan;	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah PD Bidang Pemerintahan yang mengikuti koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rp 100,000,000	Rp 110,000,000.00	Rp 115,500,000.00		Bappeda



10 PROGRAM PRIORITAS

Pilih Pembangunan

JIDULASIS

[Perijinan dan
Administrasi
Kependudukan Cepat
dan Gratis Berbasis IT]

Pamekasan Hebat | @pamekasankab.go.id



9. Pelayanan Perizinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis *Excellent Service* (Pelayanan Prima) / (*Ji Dulasis*)

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan adalah Pelayanan Perizinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis *Excellent Service* / Pelayanan Prima (*Ji Dulasis*), yang meliputi:

- a. Mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil (KTP, KK, Akta Lahir);
- b. Pengintegrasian informasi ibu melahirkan dengan proses layanan pembuatan akte kelahiran;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu (Mall Pelayanan Publik);
- d. Gratis Perijinan bagi **Home Industry** (SIUPP).



Tabel 6.10 Pelayanan Perijinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service / Pelayanan Prima (Ji Dulasis)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Pelayanan Perizinan Terpadu & Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Mudah Berbasis Excellent Service/ Pelayanan Prima (Ji Dulasis)	1.	Mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil (KTP, KK, Akta Lahir);	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang meningkat	Rp-	Rp20.500.000	Rp20.500.000	1. Pelaksanaan perekaman dan penerbitan KTP-el di tingkat desa setiap sabtu secara rutin. 2. Pemutahiran data penduduk untuk kartu keluarga yang dilakukan ditingkat desa setiap sabtu secara rutin.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dilayani tepat waktu sesuai tata cara	Rp 12,000,000	Rp60,000,000.00	Rp60,000,000.00	Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di tingkat desa setiap sabtu secara rutin.	
	2.	Pengintegrasian informasi ibu melahirkan dengan proses layanan pembuatan akte kelahiran;	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk terfasilitasi sarana prasarana pencatatan sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah sosialisasi secara berkala terkait pencatatan sipil	Rp-	Rp25.000.000	Rp33.000.000	Pelaksanaan sosialisasi secara berkala 4 bulanan terkait pencatatan sipil ditingkat kecamatan, kelurahan/ desa, bidan desa dan klinik persalinan	
	3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu (Mall Pelayanan Publik);	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan dan Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik	Rp95.000.000	Rp157.500.000	Rp165.375.000		DPMPSTPNAKER



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
	4.	Gratis Perijinan bagi Home Industry (SIUPP);					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Komitmen Perizinan dan Non- Perizinan Penanaman Modal yang dipantau pemenuhannya	Rp100.000.000	Rp210.000.000	Rp220.500.000		
							Penyediaan Layanan Pengaduan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang dilayani dan Jumlah Jenis Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan	Rp -	Rp5.050.000.000	Rp5.050.000.000		



10 PROGRAM PRIORITAS

Peta Perbaikan

TANEAN LANJENG

[Petani dan Nelayan
Sejahtera dan
Gembira]

Pamekasan Hebat | pamekasankab.go.id



10. **Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (*Tanean Lanjheng*)**

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Salah satu program Prioritas Bupati yang berfokus pada petani dan nelayan adalah Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (*Tanean Lanjheng*), yang meliputi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pupuk organik dan penyediaan dana talangan untuk petani dan nelayan;
- b. Meningkatkan ekonomi petani dan nelayan melalui pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- c. Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);
- d. Peningkatan dan Penyediaan Jaringan Irigasi.



Tabel 6.11 Petani dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng)

Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
Petani Nelayan dan Nelayan Sejahtera dan Gembira (Tanean Lanjheng)	1.	Meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pupuk organik dan penyediaan dana talangan untuk petani dan nelayan.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang di Usahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dapat diadakan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp140.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi.	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB penerima sarana usaha perikanan tangkap	Rp481.200.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi.	
							Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang berdaya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dikembangkan kapasitasnya	Rp10.000.000	Rp50.000.000	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang berdaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang dikembangkan kapasitasnya	Rp7.500.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Sosialisasi dari pihak Kantor Pertanahan, pemberkasan kelengkapan persyaratan SEHAT Budidaya, Pengukuran tanah pembudidaya ikan oleh Kantor Pertanahan,	



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang dikelola	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan penerima prasarana usaha perikanan budidaya	Rp354.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	laporan monitoring dan evaluasi	
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan sarana penerima usaha perikanan budidaya	Rp460.800.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Koordinasi dan konsolidasi SK Bupati penerima hibah, survei harga pasar, menyusun HPS, KAK, gambar & kontrak, proses pengadaan barang, penandatanganan BAST, serah terima barang dan penandatanganan BAST, monitoring dan evaluasi.	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah konsumsi ikan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penerima manfaat peningkatan konsumsi ikan dan paket produk ikan	Rp12.000.000	Rp175.000.000	Rp175.000.000	Koordinasi persiapan kegiatan dengan PKK Kabupaten, pengumpulan calon penerima, penyusunan juknis kegiatan, Pemberian paket Gemarikan pada balita stunting & rawan pangan, laporan monitoring dan evaluasi	
	2	Meningkatkan ekonomi petani dan nelayan melalui pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Persentase peningkatan penyediaan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi dalam penggunaan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaannya	Rp12.000.000.000	Rp2.500.000.000	Rp4.000.000.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah pengguna sarana	Rp1.747.528.329	Rp5.000.000.000	Rp5.000.000.000		



Agenda Pokok	No	Penjelasan Agenda Pokok	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan			Rencana Aksi	PERANGKAT DAERAH Pengampu
									2021	2022	2023		
				dan pengembangan sarana peternakan			Pendukung Pertanian	pendukung pertanian yang didampingi					
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengelolaan SDG yang disediakan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan ternak / tanaman yang dijamin kemurnian dan kelestariannya	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
							Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang meningkatkan kualitasnya	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
							Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dimanfaatkan dibina dan dikembangkan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak, tanaman pakan, dan pakan yang sesuai standar	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan terhadap Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil yang dilakukan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000		
							Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah jenis Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diawasi peredarannya	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000		
	3.	Peningkatan dan penyediaan Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Panjang pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	panjang jaringan irigasi permukaan yang diperbaiki	Rp4.626.962.820				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							rehabilitasi jaringan irigasi air tanah	Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	Rp1.799.999.863	Rp3.000.000.000			
	4.	Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT);	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK yang disusun dan dievaluasi pelaksanaannya	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kawasan industri yang dibangun	Rp988.000.000	Rp1.492.480.000	Rp1.605.908.480	Pembangunan kawasan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pamekasan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2020	2021	2022	2023	2023							
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia															
	Tujuan : Mewujudkan SDM berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat	Indikator Tujuan 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,26	67.18	Rp 168.576.469. 207	67.94	Rp202.608.0 69.529	68.35	Rp233.753.0 90.977	68.35	Rp248.541.7 23.229			
	Sasaran 1: Meningkatnya akses pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Indeks Pendidikan	Poin	0,6	0,65	Rp 168.576.469. 207	0,7	Rp 158.880.132. 957	0,72	Rp 166.824.139. 605	0,72	Rp 166.824.139. 605	Dinas Pendidikan		
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	3	Program peningkatan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	7	Program Pendidikan Dasar (SD)	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	8	Program Peningkatan Infrastruktur SD	Standart Mutu Pelayanan pendidikan Sekolah Dasar	%	74%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Dasar yang Prasarananya kondisi baik	%	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	10	Program Peningkatan Infrastruktur SMP	Standart Mutu Pelayanan pendidikan SMP	%	74%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase SMP yang Prasarananya kondisi nya Baik	%	67%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	12	Program	Cakupan pemenuhan standar mutu pelayanan pendidikan anak usia dini	%	70%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	13	Program	Cakupan pemenuhan standar mutu	%	70%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2	Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini	pelayanan pendidikan anak usia dini			-		-		-		-		
1	1	3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun	%	93%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	%	93%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
1	1	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Penerapan MBS	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan
Setelah perubahan															
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	%	0	97,66	Rp108.963.157.354	102,543	Rp102.707.176.541	107,67015	Rp107.842.535.368	107,67015	Rp107.842.535.368	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SD	%	0	108,76		114,198		119,9079		119,9079		
				APM SMP	%	0	76,07	Rp29.880.213.796	79,8735	Rp29.508.093.296	83,867175	Rp30.983.497.961	83,867175	Rp30.983.497.961	
				APK SMP	%	0	87,38		91,749		96,33645		96,33645		
				Aangka Partisipasi Kesetaraan	%	0	3105	Rp2.997.702.857	3260,25	Rp2.887.697.840	3423,2625	Rp3.032.082.732	3423,2625	Rp3.032.082.732	
				Angka Partisipasi PAUD	%	0	28381	Rp23.336.885.200	29800	Rp22.218.965.280	31290	Rp23.329.913.544	31290	Rp23.329.913.544	
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	%	-	100%	Rp231.000.000	100%	Rp115.000.000	100%	Rp120.750.000	100%	Rp120.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang berkualifikasi	%	-	93%	Rp3.137.510.000	95%	Rp1.393.200.000	97%	Rp1.462.860.000	97%	Rp1.462.860.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi	%	-								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang diterbitkan	%	-	50%	Rp30.000.000	60%	Rp50.000.000	70%	Rp52.500.000	70%	Rp52.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sasaran 2: Meningkatnya akses kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	1. Indeks Kesehatan	Indeks	0,73	0,75	Rp36.888.098.780	0,79	Rp42.604.626.572	0,8	Rp65.765.661.372	0,8	Rp80.554.293.624	Dinas Kesehatan
Sebelum perubahan															
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan,
1	2	2	Program	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	2	3	Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Sehat	%	30%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	%	96,99/23,87	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	11	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase peningkatan layanan kesehatan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	15	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Prosentase SDM Kesehatan Yang Memenuhi Standart Kualifikasi Tenaga Kesehatan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan,	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	15	Program peningkatan layanan dan penunjang layanan BLUD puskesmas	Persentase puskesmas BLUD	%	50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kesehatan
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan Administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo
1	2	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	70%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar	%	100	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	RSUD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2020	2021		2022		2023					
					8	10	11	12	13	14	15		16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Aparatur	Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya			-		-		-		-	Dr.H.Slamet Martodirdjo	
1	2	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo	
1	2	7	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit	Persentase mutu layanan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo	
1	2	14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan,	Persentase sarana prasarana dan fasilitas kesehatan yang tersedia dan layak fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo	
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
1	2	2	Program Peningkatan dan pendukung Kualitas kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung kualitas kinerja Aparatur yang Layak Fungsi	%	79%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
				Persentase ASN yang mempunyai latar belakang Diklat yang sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-		
1	2	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	79%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
1	2	7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Rumah Sakit sesuai standart	%	0%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
1	2	11	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Keberlangsungan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	%	79%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
1	2	9	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Tersedia Sesuai Dengan Standart yang Ditentukan	%	81%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
1	2	14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia Dan Layak Fungsi	%	79%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	RSUD Waru	
Setelah perubahan															
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	%	-	80%	Rp14.198.600	80%	Rp16.810.982	80%	Rp27.490.000	80%	Rp27.490.000	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu	%	-	94%	.700	95%	.600	94%	.000	94%	.000	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi	%	-	22%		22%		22%		22%	Dinas Kesehatan	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	-	72%		73%		74%		75%	Dinas Kesehatan	
				Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	%	-	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	-	82%		82%		84%		84%	Dinas Kesehatan	
				Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	%	-	100%	Rp8.260.000.000	100%	Rp14.160.000.000	100%	Rp14.160.000.000	100%	Rp14.160.000.000	Dinas Kesehatan (RSUD SMART)
					%	-	60%	Rp5.938.600.700	70%	Rp2.650.982.600	80%	Rp13.330.000.000	80%	Rp13.330.000.000	Dinas Kesehatan (RSUD Waru)
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	-	100%	Rp4.786.854.630	100%	Rp4.925.618.622	100%	Rp4.925.618.622	100%	Rp14.638.091.874	Dinas Kesehatan
				Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	-	100%	Rp1.819.000.000	100%	Rp2.022.000.000	100%	Rp3.675.000.000	100%	Rp7.516.000.000	Dinas Kesehatan (RSUD Waru)
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	-	100%	Rp136.591.750	100%	Rp136.591.750	100%	Rp136.591.750	100%	Rp409.775.250	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	%	-	16%	Rp843.475.500	16%	Rp993.475.500	16%	Rp993.475.500	16%	Rp2.830.426.500	Dinas Kesehatan
				Persentase pendampingan hukum oleh konsultan yang terlaksana	%	-	100%	Rp904.975.500	100%	Rp904.975.500	100%	Rp1.054.975.500	100%	Rp180.000.000	Dinas kesehatan (RSUD Waru)
			Sasaran 3: Meningkatkan daya beli masyarakat	1. Indeks Pengeluaran	Indeks	0,3	0,32	Rp869.620.000	0,33	Rp630.160.000	0,35	Rp628.000.000	0,35	Rp628.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sebelum perubahan															
2	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	6	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi • Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	6	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	• Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	6	8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	• Persentase tingkat Pengawasan dan Tertib Ukur	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Setelah perubahan															



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	3	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Koefisiensi harga antar waktu	%	-	100%	Rp304.590.000	100%	Rp170.000.000	100%	Rp170.000.000	100%	Rp170.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	-	30%	Rp325.030.000	30%	Rp200.000.000	30%	Rp200.000.000	30%	Rp200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	-	85%	Rp232.500.000	90%	Rp257.160.000	93%	Rp255.000.000	93%	Rp255.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	%	-	100%	Rp7.500.000	100%	Rp3.000.000	100%	Rp3.000.000	100%	Rp3.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Misi 2: Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan sektor potensial lainnya															
			Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif berbasis potensi dan keunggulan lokal	1. Pertumbuhan Ekonomi	Angka	-2,54	3,02	Rp49.406.615.849	3,66	Rp50.949.666.556	4,39	Rp51.739.801.856	4,39	Rp51.739.801.856	
			Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,5	33,15	Rp26.313.258.567	33,81	Rp28.315.555.556	34,49	Rp28.673.690.856	34,49	Rp28.673.690.856	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas kelautan dan perikanan
Sebelum perubahan															
1	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya	%	63%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	7	Program Peningkatan	Cakupan pengembangan ketersediaan sumber pangan (%)	%	17%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Ketahanan Pangan dan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)											Pertanian	
			Persentase ketersediaan pangan utama (%)	%	391,69%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	9	8	Program Pemberdayaan Peternak	Persentase peningkatan keberdayaan peternak	%	1%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Peternakan	Cakupan pembinaan lingkungan sosial lingkup peternakan	%	1%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1	9	10	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah penambahan populasi sapi dari kelahiran	ekor	24950 ekor	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				Jumlah penambahan populasi unggas dari pengembangan	ekor	1500 ekor	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
				Jumlah penambahan populasi kambing domba dari pengembangan	ekor	50 ekor	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1	9	11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan penerapan Teknologi Peternakan	%	17%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1	9	12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Ternak Sehat	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Cakupan Pengawasan Bahan Pangan Asal Ternak	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	13	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan Pos IB	Persentase Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan Pos IB	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	14	Program Pemberdayaan Kelompok Tani Berbasis Ternak Penyuluhan	Persentase Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Ternak berkompetensi	%	30%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1	9	15	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Cakupan penganekaragaman konsumsi pangan	%	17%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	17%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	9	16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Peningkatan Promosi Pemasaran Ternak dan Produksi Ternak	%	10%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Setelah perubahan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	%	-	0%	Rp -	30%	Rp99.374.400	31%	Rp140.000.000	31%	Rp140.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan)
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil	%	-	60%	Rp243.250.000	62%	Rp499.000.000	65%	Rp518.250.000	65%	Rp518.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	%	-	125%		127%		13%		13%		
				Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembiayaan Penganekaragaman Pangan	%	-	15%		17%		19%		19%		
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	-	0 Desa	Rp -	4 Desa	Rp55.750.000	5 Desa	Rp75.000.000	5 Desa	Rp75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	-	5%	Rp55.000.000	6%	Rp65.000.000	7%	Rp75.000.000	7%	Rp75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	%	-	3%	Rp14.816.645.850	3%	Rp13.667.036.050	3%	Rp13.776.045.750	3%	Rp13.776.045.750	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	%	-	2%		2%		2%		2%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	-	3%	Rp10.681.862.717		Rp12.762.895.106		Rp12.772.895.106		Rp12.772.895.106	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	-	2%								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	-	5%	Rp243.250.000	10%	Rp663.250.000	15%	Rp703.250.000	15%	Rp703.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase produk hewan yang Aman Sehat dan Utuh dari hasil sampling pemeriksaan	%	-	85%		90%		95%		95%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas tanam yang terkendali bencana pertaniannya	%	-	3%	Rp30.000.000	3%	Rp30.000.000	3%	Rp100.000.000	3%	Rp100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala	%	-	1%	Rp -	2%	Rp30.000.000	3%	Rp70.000.000	3%	Rp70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	-	1%	Rp243.250.000	2%	Rp443.250.000	3%	Rp443.250.000	3%	Rp443.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sebelum perubahan															
2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	2	Program Peningkatan dan	Persentase sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	823,43 Ton	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	19.996,51 Ton	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
				Cakupan bina kelompok nelayan	%	12%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	823,43 Ton	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
				Jumlah produksi garam	ton	136.718,16 Ton	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
2	1	10	Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	kelompok	5 Klmpk	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
				Konsumsi ikan per kapita	Kg/kapita/tahun	41,12 Kg/Kpt/Th	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perikanan
Setelah perubahan															
3	2	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	-	16%	Rp621.200.000	20%	Rp850.000.000	24%	Rp650.000.000	24%	Rp650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah KUB Yang Naik Kelas	Kelompok	-	3 Kelompok	Rp10.000.000	3 Kelompok	Rp170.000.000	4 Kelompok	Rp170.000.000	4 Kelompok	Rp170.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	-	10%	Rp1.056.960.000	20%	Rp736.000.000	25%	Rp815.000.000	25%	Rp815.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas	Kelompok	-	2 Kelompok	Rp7.500.000	2 Kelompok	Rp155.000.000	3 Kelompok	Rp155.000.000	3 Kelompok	Rp155.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawaaan sumber daya perikanan	%	-	75%	Rp -	75%	Rp100.000.000	75%	Rp100.000.000	75%	Rp100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	%	-	95%	Rp12.000.000	97,50%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Pokdahsar Yang Naik Kelas	Kelompok	-	1 Kelompok	Rp -	2 Kelompok	Rp90.000.000	2 Kelompok	Rp90.000.000	2 Kelompok	Rp90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	20,17	20,78	Rp9.954.117.791	21,4	Rp9.252.324.500	22,04	Rp9.378.324.500	22,04	Rp9.378.324.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sebelum perubahan															
2	6	9	Program	Persentase wilayah Pemberantasan Barang	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	kena Cukai			-		-		-		-	Perindustrian dan Perdagangan	
2	6	10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan formal terhadap Perdagangan Eceran dan Besar	%	20%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	6	11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar	• Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Setelah perubahan															
3	3	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	%	-	6%	Rp9.915.672.791	7%	Rp9.237.324.500	7%	Rp9.358.324.500	7%	Rp9.358.324.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha	%	-	100%	Rp38.445.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,77	9,92	Rp9.974.117.791	10,08	Rp9.272.324.500	10,72	Rp9.398.324.500	10,72	Rp9.398.324.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sebelum perubahan															
2	6	7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Bina Kelompok IKM	%	1,54%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	6	12	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	• Jumlah sentra IKM yang berhasil dikembangkan	sentra	1 sentra	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Setelah perubahan															
3	3	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	-	6%	Rp9.915.672.791	7%	Rp9.237.324.500	7%	Rp9.358.324.500	7%	Rp9.358.324.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha	%	-	100%	Rp38.445.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	3	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pelaku industri yang terdaftar di SIINas	%	-	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				4. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Orang	0,65	0,67	Rp1.005.000.000	0,69	Rp986.000.000	0,71	Rp1.187.000.000	0,73	Rp1.187.000.000	Dinas Kepemudaan, olahraga dan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2			3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Sebelum perubahan																
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	2	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	2	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	2	7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
1	2	8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisata	Jumlah sumber daya kepariwisataan yang mendapat pembinaan lingkungan social	%	30%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
1	2	9	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase objek wisata yang dikembangkan dan ditata	%	60%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
1	2	10	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan seni budaya daerah layak saji	%	20%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Setelah perubahan																
3	2	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan obyek wisata	%	-	12%	Rp675.000.000	13%	Rp516.000.000	13%	Rp717.000.000	13%	Rp717.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
3	2	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	%	-	60%	Rp280.000.000	67%	Rp320.000.000	71%	Rp320.000.000	71%	Rp320.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
3	2	8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang mendapatkan pelatihan	%	-	7%	Rp50.000.000	19%	Rp150.000.000	31%	Rp150.000.000	31%	Rp150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
				Indikator Tujuan 2: Gini Ratio	<i>Nilai</i>	0,32	0,30	Rp10.704.181.000	0,28	Rp2.859.181.000	0,26	Rp1.699.650.000	0,26	Rp1.699.650.000		
				Sasaran 2:	1. Persentase Koperasi Berkualitas	%	5,20	5,62	Rp1.534.181	6,24	Rp1.994.181	7,22	Rp519.650.0	7,22	Rp519.650.0	Dinas Koperasi



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023				
						10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Berkembangnya Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menumbuhkan kesempatan berwirausaha				.000			.000			00		00	dan Usaha Mikro
Sebelum perubahan																
1	1	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	1	7	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	1	7	1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Setelah perubahan																
2	1	7	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	%	-	100%	Rp75.000.000	100%	Rp175.000.000	100%	Rp200.750.000	100%	Rp200.750.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	-	100%	Rp -	100%	Rp180.000.000	100%	Rp133.900.000	100%	Rp133.900.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	-	100%	Rp1.000.000.000	100%	Rp130.000.000	100%	Rp85.000.000	100%	Rp85.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	-	100%	Rp459.181.000	100%	Rp459.181.000	100%	Rp -	100%	Rp -	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	7	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	-	100%	Rp -	100%	Rp1.050.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	%	2,40	3%	Rp9.170.000.000	3,15%	Rp865.000.000	3,30%	Rp1.180.000.000	3,30%	Rp1.180.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Sebelum perubahan																
1	1	7	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi	Persentase Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Mikro	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1	3	Usaha Mikro												
	7		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro yang Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	1	7	Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkembang Usaha dan Pembiayaan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	1	8	Program Peningkatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Pertambahan Jumlah Produksi dan Restrukturisasi Usaha	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	1	9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Pembinaan Sosial	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Setelah perubahan															
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	%	-	100%	Rp4.170.000.000	100%	Rp715.000.000	100%	Rp830.000.000	100%	Rp830.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	1	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	%	-	100%	Rp5.000.000.000	100%	Rp150.000.000	100%	Rp350.000.000	100%	Rp350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				3. Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	%	77,58	79,13	Rp452.461.700	80,71	Rp772.462.000	82,33	Rp872.462.000	82,33	Rp872.462.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
Sebelum perubahan															
1	1	7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pertumbuhan Investor	investor	6855 Investor	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	1	8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan	Nilai Investasi	Rp	#####	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2023		
						10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Realisasi Investasi											Terpadu Satu Pintu
1	1	9	Program Informasi, Pengaduan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	1	0	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Setelah perubahan														
2	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	-	90%	Rp50.000.000	95%	Rp150.000.000	100%	Rp150.000.000	100%	Rp150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	%	-	90%	Rp30.000.000	95%	Rp250.000.000	100%	Rp350.000.000	100%	Rp350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	%	-	90%	Rp372.461.700	95%	Rp372.462.000	100%	Rp372.462.000	100%	Rp372.462.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Nilai	3,49	2,65 %	Rp6.119.112.994	2,55 %	Rp6.737.000.000	2,45 %	Rp7.005.000.000	2,45 %	Rp7.005.000.000	
			1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,51	97,48	Rp6.119.112.994	98,45	Rp6.737.000.000	99,43	Rp7.005.000.000	99,43	Rp7.005.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dan Tenaga Kerja
Sebelum perubahan														
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	%	82%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2020	2021		2022		2023		2023		
					8	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang mjd tanggungjawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	18	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Setelah perubahan														
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	%	-	100%	Rp30.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp70.000.000	100%	Rp70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	%	-	100%	Rp5.519.112.994	100%	Rp5.539.000.000	100%	Rp5.559.000.000	100%	Rp5.559.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	-	25%	Rp170.000.000	30%	Rp685.000.000	35%	Rp870.000.000	35%	Rp870.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	-	18,39 %	Rp140.000.000	25%	Rp180.000.000	27,58%	Rp219.350.000	27,58%	Rp219.350.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	%	-	100%	Rp260.000.000	100%	Rp273.000.000	100%	Rp286.650.000	100%	Rp286.650.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indikator Tujuan 3: Persentase Penduduk Miskin	%	14,60%	12,2 1%	Rp13.481.744.248	11,54 %	Rp10.711.320.000	10,97 %	Rp9.879.320.000	10,97 %	Rp21.366.271.254	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Sasaran 1: Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat											
			1. Persentase Penurunan PPKS	%	1,81	1,9	Rp5.169.200.000	2	Rp7.777.000.000	2,1	Rp7.777.000.000	2,1	Rp7.777.000.000	Dinas Sosial
Sebelum Perubahan														
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	2	Program	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021	2022	2023		2023					
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	yang Layak Fungsi			-		-		-				
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	1 3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang di Berdayakan	%	35%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Pelayanan dan di Rehab	%	35%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	35%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	9	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata dan Layak Fungsi	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	1 0	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase Anak Yatim dan Lansia yang di Bina	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	1 1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diBerdayakan	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
1	6	1 2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Sosial
Setelah Perubahan															
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PPKS yang Diberdayakan	%	-	5%	Rp619.000.00 0	6%	Rp105.000.00 0	6%	Rp105.000.00 0	6%	Rp105.000.00 0	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	%	-	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	10000 %	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	Dinas Sosial



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021	2022	2023	2023						
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN												
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	5%	Rp3.459.547.000	7%	Rp6.310.000.000	9%	Rp6.310.000.000	9%	Rp6.310.000.000	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Menerima Bantuan	%	-	54%	Rp995.653.000	55%	Rp1.185.000.000	57%	Rp1.185.000.000	57%	Rp1.185.000.000	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	-	100%	Rp50.000.000	100%	Rp120.000.000	100%	Rp120.000.000	100%	Rp120.000.000	Dinaas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola	%	-	100%	Rp25.000.000	100%	Rp37.000.000	100%	Rp37.000.000	100%	Rp37.000.000	Dinas Sosial
			Sasaran 2: Meningkatkan Kemandirian Desa	1. Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	66	80	Rp7.362.631.254	100	Rp3.974.320.000	150	Rp2.874.320.000	150	Rp14.361.271.254	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-
1	1	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	1	7	Program Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	Jumlah Bumdes yang terbentuk	%	24%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah Bumdes yang beroperasi	%	10%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-
1	1	8	Program Peningkatan Partisipasi	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	%	203	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Masyarakat dalam Membangun Desa											Desa	
			Cakupan pembinaan Pokjanal Kab/Kec/Desa/ Kelurahan	%	35	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1	1	1	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Prosentase Desa dengan pengelolaan APBDesa sesuai pedoman	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Prosentase Desa yang melaksanakan pilkades sesuai pedoman	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Setelah perubahan															
2	1	2	PROGRAM PENATAAN DESA	%	-	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	%	-	100%	Rp616.321.400	100%	Rp521.320.000	100%	Rp521.320.000	100%	Rp1.658.961.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	%	-	100%	Rp6.341.309.854	100%	Rp2.760.000.000	100%	Rp1.660.000.000	100%	Rp10.911.309.854	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	%	-	100%	Rp405.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp1.791.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	%	-	100%	Rp405.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp1.791.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase peningkatan usaha masyarakat desa	%	-	100%	Rp405.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp693.000.000	100%	Rp1.791.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Misi 3: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
			Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Indikator Tujuan 1: Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,73	71	Rp1.490.032.834.760	76	Rp1.687.051.667.619	81	Rp1.329.296.347.499	81	Rp2.149.834.351.910	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Sasaran 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1. Nilai SAKIP	Nilai	70,02 (BB)	81,16 (A)	Rp1.093.600.285.444	81,34 (A)	Rp1.307.723.903.219	82,1 (A)	Rp1.198.343.895.408	82,1 (A)	Rp1.974.544.623.323	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sebelum perubahan															
3	8	1	Program peningkatan tata	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2020	2021		2022		2023		2023				
				8	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	kelola pemerintahan dan pengembangan kerjasama	Prosentase kebijakan tata pemerintahan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang disusun	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase dokumen pertanggungjawaban kepala daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD yang difasilitasi sesuai peraturan dan tepat waktu	%	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase rumusan kebijakan kerjasama yang disusun	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase kebijakan kerjasama di dalam negeri yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
		Prosentase kerjasama daerah yang terlaksana	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
3	8	2	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
3	8	3	Program Percepatan Reformasi Birokrasi	Prosentase SKPD dengan predikat nilai SAKIP minimal BB	%	90%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
				Jumlah dokumen LKjIP yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	dokumen	1 dokumen	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase rumusan kebijakan bidang reformasi birokrasi yang disusun	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase SKPD yang memiliki inovasi kategori baik	%	40%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase perangkat daerah yang memenuhi kaedah ketatalaksanaan sesuai ketentuan	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Jumlah SKPD yang struktur kelembagaan dan tugas fungsinya sesuai	SKPD	45	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase Dokumen kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
3	8	10	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokol dan Hubungan Masyarakat	Prosentase acara pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tata aturan keprotokol	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		
				Prosentase acara pemerintah daerah yang didokumentasikan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase acara pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
				Prosentase komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung	Prosentase sarana penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat, dan staf ahli yang terpenuhi	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat Daerah		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kualitas Kinerja Aparatur	dan berfungsi baik											
3	8	8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase gedung, kantor, dan rumah dinas yang terpenuhi dan kondisi baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase acara kedinasan pimpinan dan staf ahli yang terpenuhi makan dan minumnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	9	Program Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Prosentase pegawai yang gaji berkalanya tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase dokumen pelaporan keuangan dan asset yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan tata usaha pimpinan dan staf ahli yang dilaksanakan sesuai SOP	%	90%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pegawai yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	1	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum daerah	Prosentase rumusan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
					Prosentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
3	8	1	Program peningkatan fasilitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	1	Program Peningkatan kinerja Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan	Prosentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
					Prosentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dievaluasi pelaksanaannya	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
3	8	1	Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian	Prosentase rumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
					Prosentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
3	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat
3	5	2	Program Peningkatan dan Pendukung	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi;	%	86%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat
					Persentase PNS yang mempunyai latar			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Kualitas Kinerja Aparatur	belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.			-		-		-		-		
3	5	7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat
2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang terakomodir sesuai SOP dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi dan berfungsi baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase pelaksanaan diklat aparatur yang difasilitasi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	1	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan Laporan Kinerja Keuangan dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	1	7	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Lingkungan Hidup yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase IKU PD dengan capaian min 80% bidang infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	9	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi hasilnya sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	10	Program Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pelaporan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu yang sesuai dengan peraturan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	11	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase data / informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang terpenuhi	%	1	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	12	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase IKU PD dengan capaian min 80% bidang Perekonomian dan SDA	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	1	3	Program Fasilitasi Pengelolaan Sumber Keuangan Pendukung Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pemerintah pusat yang dikoordinasikan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	1	4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase IKU PD dengan capaian min 80% Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	8	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Prosentase rumusan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase kebijakan bidang sumber daya alam yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Prosentase rumusan kebijakan bidang cukai yang disusun	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase kebijakan bidang sumber cukai yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	3	Program Peningkatan tertib Administrasi dan Kebijakan Pembangunan	Prosentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	4	Program Penataan Administrasi Pertanahan	Prosentase rumusan kebijakan administrasi pertanahan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	5	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan	Prosentase kebijakan administrasi pembangunan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	1	Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
				Prosentase pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat Daerah
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2020	2021		2022		2023		2023					
					8	10	11	12	13	14	15	16		17			
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo		
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan		
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan		
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan		
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan
3	8	9	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan		
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan
7	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	79%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Palengaan		
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan		
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan		
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan		
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan		
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan
				persentase sengketa masyarakat yang tertangani	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pegantenan
7	8	9	Program Pelayanan	Prosentase pelayanan administrasi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020	2021		2022		2023		2023			
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Administrasi Kecamatan	kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu				-		-		-		-	Pegantenan	
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	90%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Pakong
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Kecamatan Kadur



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2021		2022		2023		2023					
						10	11	12	13	14	15	16		17			
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Kadur		
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru		
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru		
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru		
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru		
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru
				persentase sengketa masyarakat yang tertangani	%	100	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Waru		
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	83%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar		
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	• Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	82%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar		
				• Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	84%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar		
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar		
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi	Prosentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Batumarmar		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						8	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	8	1	Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
				Persentase sengketa masyarakat yang tertangani	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pasean
1	2	7	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	60%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase Pelayanan Informasi Kearsipan Yang Dapat Di Akses Pengguna Informasi	%	60%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	1	1	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai SOP	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Setelah perubahan															
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	-	100%	Rp2.725.000.000	100%	Rp43.764.298.988	100%	Rp43.764.298.988	100%	Rp43.764.298.988	Sekretariat Daerah
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai pedoman dan tepat waktu	%	-	100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	%	-	100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
				Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	-	100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan lingkup organisasi yang dilaksanakan	%	-	100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
4	1	2	Program	Persentase fasilitasi kebijakan bidang	%	-	100%	Rp44.917.400	100%	Rp42.564.500	100%	Rp45.000.375	100%	Rp45.000.375	Sekretariat



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti		.000		.000		.335		.335	Daerah		
				Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	-								Sekretariat Daerah		
				Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	-								Sekretariat Daerah		
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	%	-	100%	Rp2.066.444.700	100%	Rp2.273.000.000	100%	Rp2.386.650.000	100%	Rp2.386.650.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan	%	-							Sekretariat Daerah		
				Persentase rumusan kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan	%	-							Sekretariat Daerah		
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	-	90%	Rp6.821.501.206	90%	Rp6.864.431.206	90%	Rp7.397.501.206	90%	Rp8.000.982.908	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai	%	-	62%	Rp2.187.500.000	76%	Rp2.187.500.000	90%	Rp2.187.500.000	90%	Rp2.187.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	100%	Rp1.078.115.000	100%	Rp1.966.909.900	100%	Rp2.011.459.900	100%	Rp2.011.459.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	100%		100%		100%		100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	%	-	100%		100%		100%		100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	%	-	100%		100%		100%		100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	%	-	87%	Rp2.533.854.826	88%	Rp3.975.366.900	90%	Rp5.591.729.680	90%	Rp5.591.729.680	Inspektorat
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	%	-	70%	Rp485.531.977.135	75%	Rp489.590.640.600	80%	Rp505.942.181.654	80%	Rp505.942.181.654	Dinas Pendidikan dan kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	-	100%	Rp91.190.492.457	100%	Rp97.065.560.289	100%	Rp101.065.317.952	100%	Rp289.321.370.697	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp114.701.531.963	100%	Rp119.361.439.401	100%	Rp121.694.256.804	100%	Rp355.757.228.167	Dinas Kesehatan (RSUD SMART)
				Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	-	80%	Rp138.033.389.239	85%	Rp145.441.852.755	90%	Rp150.617.441.057	90%	Rp434.092.683.052	Dinas Kesehatan (RSUD Waru)
3	3	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp5.030.214.682	100%	Rp6.170.375.332	100%	Rp6.681.275.332	100%	Rp6.681.275.332	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	2	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp17.097.402.208	100%	Rp20.526.120.444	100%	Rp20.865.078.924	100%	Rp20.865.078.924	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
3	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp29.134.000	100%	Rp133.500.000	100%	Rp135.000.000	100%	Rp135.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp2.966.924.738	100%	Rp3.697.007.998	100%	Rp3.697.007.998	100%	Rp3.697.007.998	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	80%	Rp16.556.000	80%	Rp40.000.000	80%	Rp50.000.000	80%	Rp50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp343.602.567	100%	Rp893.869.049	100%	Rp1.376.779.841	100%	Rp1.376.779.841	Dinas Kelautan dan Perikanan
1	1	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp2.253.035.090	100%	Rp4.285.893.409	100%	Rp3.755.179.210	100%	Rp3.755.179.210	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%		100%		100%		100%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%		100%		100%		100%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%		100%		100%		100%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	1	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI	%	-	85%	Rp852.049.650	90%	Rp1.260.100.000	100%	Rp1.701.660.799	100%	Rp1.701.660.799	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
				PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS	%	-	81%	Rp88.680.000	90%	Rp562.000.000	97%	Rp622.000.000	97%	Rp622.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
				PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK	%	-	95%	Rp4.264.972.600	98%	Rp5.889.653.972	100%	Rp5.889.653.972	100%	Rp5.889.653.972	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2020	2021	2022	2023		2023					
						8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
														Transmigrasi, dan Tenaga Kerja		
			PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR	%	-	80%	Rp50.000.000	85%	Rp130.000.000	90%	Rp160.000.000	90%	Rp160.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja		
2	1	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI	%	-	100%	Rp328.161.414	100%	Rp4.114.066.320	100%	Rp418.000.000	100%	Rp418.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK	%	-	100%	Rp2.242.121.372	100%	Rp-	100%	Rp3.191.042.320	100%	Rp3.191.042.320	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR	%	-	100%	Rp430.040.000	100%	Rp-	100%	Rp435.000.000	100%	Rp435.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS	%	-	100%	Rp98.278.500	100%	Rp-	100%	Rp102.000.000	100%	Rp102.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp44.559.424,054	100%	Rp158.385.118,589	100%	Rp11.430.594,178	100%	Rp11.430.594,178	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
				Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tersusun dengan baik												
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp4.986.563.606	100%	Rp5.857.634.548	100%	Rp7.081.334.548	100%	Rp17.925.532,702	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%		100%		100%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%		100%		100%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%		100%		100%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	-	100%	Rp9.537.616.278	100%	Rp10.516.966,425	100%	Rp10.826.884,800	100%	Rp4.623.957,147	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023				
						10	11	12	13	14	15	16	17			
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	-	100%	Rp4.408.478.851	100%	Rp4.838.423.085	100%	Rp4.999.347.342	100%	Rp4.999.347.342	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	80%	Rp30.867.097.927	85%	Rp33.953.807.720	90%	Rp39.046.878.878	90%	Rp39.046.878.878	Sekretariat DPRD	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-										Sekretariat DPRD
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-										Sekretariat DPRD
				Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-										Sekretariat DPRD
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	75%	Rp31.334.000	88%	Rp60.000.000	95%	Rp75.000.000	95%	Rp166.334.000	Kecamatan pamekasan	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	83.33 %	Rp3.260.123.296	92%	Rp5.159.362.306	100%	Rp5.160.362.310	100%	Rp13.579.847.912	Kecamatan pamekasan	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	80%	Rp1.877.486.205	90%	Rp2.009.327.353	100%	Rp2.040.400.000	100%	Rp5.927.213.558	Kecamatan pamekasan	
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	85%	Rp366.933.250	95%	Rp754.578.300	100%	Rp1.164.147.566	100%	Rp2.285.659.116	Kecamatan pamekasan	
X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	84%	Rp1.462.454.250	86%	Rp1.987.409.702	88%	Rp2.027.030.187	88%	Rp2.027.030.187	Kecamatan Larangan	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	86%		89%		92%		92%		Kecamatan Larangan	
				Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur	%	-	84%		86%		88%		88%		Kecamatan Larangan	
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	84%		86%		88%		86%		Kecamatan Larangan	
X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp72.229.150	100%	Rp149.170.000	100%	Rp156.100.000	100%	Rp377.499.150	Kecamatan Galis	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp1.379.109.792	100%	Rp1.714.130.881	100%	Rp1.748.923.598	100%	Rp4.842.164.271	Kecamatan Galis	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	85%	Rp144.748.000	90%	Rp161.975.237	100%	Rp165.744.576	100%	Rp472.467.813	Kecamatan Galis	
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	80%	Rp11.332.500	85%	Rp24.985.000	95%	Rp45.000.000	95%	Rp81.317.500	Kecamatan Galis	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp15.000.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp69.000.000	Kecamatan Tlanakan	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	96%	Rp1.607.889.200	98%	Rp1.972.545.260	100%	Rp2.007.357.523	100%	Rp5.587.791.983	Kecamatan Tlanakan	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp60.000.000	Kecamatan Tlanakan	
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp56.300.000	100%	Rp78.700.000	100%	Rp102.700.000	100%	Rp237.700.000	Kecamatan Tlanakan	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp148.106.300	100%	Rp172.000.000	100%	Rp240.000.000	100%	Rp240.000.000	Kecamatan Proppo	
				Persentase laporan keuangan dengan	%	-	100%	Rp1.617.333.	100%	Rp2.038.766.	100%	Rp2.053.714.	100%	Rp2.053.714.	Kecamatan Proppo	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021	2022	2023		2023					
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kualitas baik			083			523		849		849	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	85%	Rp122.550.000	90%	Rp156.200.000	100%	Rp183.600.000	100%	Rp183.600.000	Kecamatan Proppo
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	80%	Rp44.540.950	85%	Rp20.000.000	95%	Rp25.000.000	95%	Rp25.000.000	Kecamatan Proppo
X	X	1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	75%	Rp28.249.000	88%	Rp44.000.000	100%	Rp65.000.000	100%	Rp137.249.000	Kecamatan pademawu
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	83%	Rp2.026.622.046	92%	Rp2.888.322.046	100%	Rp2.893.622.046	100%	Rp7.808.566.138	Kecamatan pademawu
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	80%	Rp23.310.000	90%	Rp20.000.000	100%	Rp36.000.000	100%	Rp79.310.000	Kecamatan pademawu
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp820.941.256	100%	Rp924.699.592	100%	Rp1.158.071.102	100%	Rp2.903.711.950	Kecamatan pademawu
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp10.000.000	100%	Rp93.094.314	100%	Rp199.997.357	100%	Rp112.997.357	Kecamatan Palengaan
				Prosentase laporan Keuangan dengan kualitas baik	%	-	91,67 %	Rp1.108.369.118	100%	Rp1.567.966.540	100%	Rp1.572.966.540	100%	Rp1.572.966.540	Kecamatan Palengaan
				Prosentase Peningkatan kompetensi aparatur	%	-	90%	Rp161.099.928	100%	Rp207.000.000	100%	Rp208.000.000	100%	Rp250.000.000	Kecamatan Palengaan
				Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	-	87,50 %	Rp31.249.000	95%	Rp45.000.000	95%	Rp35.000.000	95%	Rp35.000.000	Kecamatan Palengaan
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	85%	Rp50.669.500	90%	Rp141.354.050	100%	Rp180.508.571	100%	Rp180.508.571	Kecamatan Pakong
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp1.283.503.174	100%	Rp1.634.280.052	100%	Rp1.660.785.714	100%	Rp1.660.785.714	Kecamatan Pakong
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	80%	Rp21.826.000	90%	Rp10.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Pakong
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	85%	Rp6.096.500	90%	Rp60.000.000	95%	Rp20.000.000	95%	Rp20.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Waru
				Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Waru
				Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Waru
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Waru
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp31.991.000	100%	Rp96.654.896	100%	Rp181.000.000	100%	Rp181.000.000	Kecamatan Batumarmar
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp1.545.507.856	100%	Rp1.947.869.526	100%	Rp1.953.403.002	100%	Rp1.953.403.002	Kecamatan Batumarmar
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp18.200.000	100%	Rp29.145.104	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	Kecamatan Batumarmar
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp10.031.500	100%	Rp45.000.000	100%	Rp45.000.000	100%	Rp45.000.000	Kecamatan Batumarmar
X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp425.475.000	100%	Rp677.691.000	100%	Rp892.691.000	100%	Rp1.995.857.000	Kecamatan Pasean
				• Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp1.426.097.876	100%	Rp1.448.897.876	100%	Rp1.448.897.876	100%	Rp4.323.893.628	Kecamatan Pasean
				• Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp20.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp100.000.000	Kecamatan Pasean
				• Persentase perencanaan dan evaluasi	%	-	100%	Rp50.570.000	100%	Rp62.070.000	100%	Rp81.070.000	100%	Rp193.710.000	Kecamatan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023				
						10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kinerja yang berkualitas								0	Pasean			
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	95%	Rp1.502.737.072	95%	Rp2.141.653.202	99%	Rp2.251.439.513	99%	Rp2.251.439.513	Kecamatan Kadur	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-										Kecamatan Kadur
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-										Kecamatan Kadur
X	X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	90%	Rp2.362.521.002	92%	Rp3.273.221.002	95%	Rp3.399.132.052	95%	Rp9.034.874.056	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp97.144.000	100%	Rp97.047.500	100%	Rp97.047.500	100%	Rp291.239.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp1.859.061.952	100%	Rp2.576.207.950	100%	Rp2.576.207.950	100%	Rp7.011.477.852	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	80%	Rp148.980.000	80%	Rp148.780.000	80%	Rp148.000.000	80%	Rp445.760.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp1.322.206.626	100%	Rp1.687.705.387	100%	Rp1.187.089.204	100%	Rp4.197.001.217	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	%	0	100%	Rp6.118.537.267	100%	Rp7.428.760.165	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
				Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp395.287.406	100%	Rp650.697.012	100%	Rp955.000.000	100%	Rp2.000.984.418	Badan Penanggulangan bencana Daerah	
				Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	%	-	100%	Rp1.614.861.188	100%	Rp2.369.052.988	100%	Rp3.390.000.000	100%	Rp7.373.914.176	Badan Penanggulangan bencana Daerah	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp95.595.100	100%	Rp237.194.791	100%	Rp305.000.000	100%	Rp637.789.891	Badan Penanggulangan bencana Daerah	
				Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas	%	-	100%	Rp30.000.000	100%	Rp92.999.800	100%	Rp140.000.000	100%	Rp262.999.800	Badan Penanggulangan bencana Daerah	
				Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	-	80%	Rp4.584.859.330	80%	Rp5.778.239.961	80%	Rp6.069.842.640	80%	Rp6.069.842.640	Dinas Perhubungan	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp1.965.000.000	100%	Rp1.086.400.000	100%	Rp1.081.400.000	100%	Rp350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp9.291.271.497	100%	Rp9.291.271.497	100%	Rp9.591.271.497	100%	Rp9.591.271.497	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp170.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp140.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp105.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp357.269.565	100%	Rp364.637.835	100%	Rp1.080.000.000	100%	Rp1.080.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp2.306.402.536	100%	Rp2.846.835.976	100%	Rp2.846.836.000	100%	Rp2.846.836.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp268.000.000	100%	Rp268.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp6.960.000	100%	Rp3.010.000	100%	Rp42.000.000	100%	Rp42.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp24.206.000	100%	Rp80.000.000	100%	Rp80.000.000	100%	Rp184.206.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp3.631.323.232	100%	Rp5.013.664.688	100%	Rp5.013.664.688	100%	Rp13.658.652.608	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp33.760.000	100%	Rp72.604.500	100%	Rp72.604.500	100%	Rp178.969.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp3.072.669.656	100%	Rp3.060.112.406	100%	Rp3.021.497.556	100%	Rp9.154.279.618	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp2.938.351.358	100%	Rp3.973.067.021	100%	Rp3.973.320.371	100%	Rp3.973.320.371	Dinas Sosial
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS	%	-	80%	Rp110.000.000	85%	Rp123.000.000	90%	Rp136.000.000	90%	Rp136.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK	%	-	100%	Rp4.394.441.864	100%	Rp4.508.300.000	100%	Rp4.588.600.000	100%	Rp4.588.600.000	Dinas Pemberdayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023		2023				
							10	11	12	13	14	15	16		17
1	2			3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR	%	-	80%	Rp50.000.000	90%	Rp55.000.000	90%	Rp60.000.000	90%	Rp60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI	%	-	80%	Rp1.202.000.000	85%	Rp1.290.000.000	87%	Rp1.367.000.000	87%	Rp1.367.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp3.490.352.790,00	100%	Rp4.340.207.050	100%	Rp4.355.417.403	100%	Rp4.355.417.403	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-									Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-									Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-									Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	85%	Rp-	87%	Rp-	90%	Rp-	90%	Rp-	Kecelakaan Pegantenan
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	85%	Rp-	87%	Rp-	90%	Rp-	90%	Rp-	Kecelakaan Pegantenan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	85%	Rp-	87%	Rp-	90%	Rp-	90%	Rp-	Kecelakaan Pegantenan
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	85%	Rp-	87%	Rp-	90%	Rp-	90%	Rp-	Kecelakaan Pegantenan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	Rp338.421.882.524	WTP	Rp326.583.476.049	WTP	Rp76.911.072.047	WTP	Rp86.911.072.047	Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, Inspektorat	
Sebelum perubahan															
3	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	3	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	7	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah yang diperoleh	%	25%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	8	Program Pengelolaan Pengajian dan Pelayanan Keberatan	Persentase objek pajak dan retribusi yang bisa ditagih	%	25%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
				Persentase permohonan keberatan objek pajak dan retribusi yang diselesaikan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	9	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Jumlah Usulan sertifikasi tanah (asset daerah) yang diajukan ke BPN	Usulan	20 Usulan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
				Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	10	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penetapan APBD dan P-APBD	%	tepat waktu	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	2	11	Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	2	12	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Persentase terseleenggaranya prosedur prosedur pengelolaan keuangan daerah	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Keuangan Daerah
3	5	8	Program peningkatan sistem pengawasan	Jumlah Temuan BPK	%	10	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022		2023		2023			
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH											
3	5	9	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat
3	5	10	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	%	0,06%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Inspektorat
Setelah perubahan														
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	%	-	100%	Rp332.159.08 0.974	100%	Rp309.676.17 9.049	100%	Rp67.846.655 .053	100%	Rp67.846.655 .053	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan P-APBD		-									Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu		-									Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	%	-	100%	Rp2.404.459. 830	100%	Rp493.700.00 0	100%	Rp178.126.69 7	100%	Rp178.126.69 7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	%	-	1%	Rp1.393.673. 220	2%	Rp1.296.000. 000	3%	Rp276.850.29 7	3%	Rp276.850.29 7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase objek pajak dan retribusi daerah yang tertagih		-	100%		100%		100%	100%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	%	-	-	Rp -	100%	Rp10.000.000 .000	-	Rp -	100%	Rp10.000.000 .000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			2023		
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	-	12	Rp874.070.000	11	Rp1.254.510.000	10	Rp2.420.300.000	10	Rp2.420.300.000	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	%	-	0,18%	Rp351.745.000	0,16%	Rp356.800.000	0,14%	Rp550.000.000	0,14%	Rp550.000.000	Inspektorat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	%	-	75%	Rp1.238.853.500	80%	Rp3.506.287.000	85%	Rp5.639.140.000	85%	Rp5.639.140.000	Inspektorat
				3 Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	81	Rp8.149.280.000	81,5	Rp2.665.400.000	82	Rp6.700.000.000	82	Rp17.514.680.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sebelum perubahan															
3	3	1	Program Pelayanan Administrasi / Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	3	Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	90%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	7	Program Peningkatan Kualitas Data dan Pengendalian Sumber Daya Aparatur	Persentase Data / Informasi Kepegawaian yang dikelola dengan Baik	%	95%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	8	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Manajerial	%	52%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Telah Memiliki Sertifikat Diklat Teknis/Fungsional	%	52%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan disiplin dan jumlah ASN sesuai formasi	%	90%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	11	Program Pengelolaan Mutasi	Persentase PNS Yang di Mutasi dan Pensiun	%	92%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2023		
						10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kepegawaian											Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	1 2	Program Pengelolaan Kepegawaian dan Kenaikan Gaji Berkala	%	90%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	3	1 3	Program Peningkatan Pengembangan Karier	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Setelah perubahan														
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	%	-	1%	Rp4.074.640.000	1%	Rp1.332.700.000	1%	Rp3.350.000.000	1%	Rp8.757.340.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	%	-	99%		99%		99%		99%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%	-	95%		97%		100%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	%	-	65%	Rp4.074.640.000	67%	Rp1.332.700.000	69%	Rp3.350.000.000	69%	Rp8.757.340.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			4. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	5346	6415	Rp1.930.000.000	7698	Rp1.285.000.000	9238	Rp1.285.000.000	9238	Rp1.285.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sebelum perubahan														
3	1	1 5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Inovasi prioritas pembangunan daerah dengan kategori inovatif (IGA)	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Setelah perubahan														
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	-	100%	Rp1.930.000.000	100%	Rp1.285.000.000	100%	Rp1.285.000.000	100%	Rp1.285.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023		2023			
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Inovasi Daerah		-	75%		80%		90%		90%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5. Indeks SPBE	Indeks	3,01	3,4	Rp7.416.850.000	3,6	Rp7.281.400.000	3,8	Rp7.861.400.000	3,8	Rp7.861.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	2	Program Peningkatan Dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	97,50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi tingkat Kecamatan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Penyiaran Radio TV Lokal	Radio	12 Radio/bulan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	Informasi	112 Informasi	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Prosentase Perangkat daerah yang menyediakan Dokumen Informasi Publik sesuai standar Layanan Informasi Publik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik	Prosentase Perangkat daerah yang terhubung jaringan internet dan intranet	%	88,89%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah Aplikasi Layanan SKPD yang terintegrasi	%	1 Aplikasi	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	10	Program Penyediaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	99,50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Prosentase Penerapan Standar proteksi keamanan informasi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	1	12	Program Pengelolaan Data Statistik	Prosentase Data dan Informasi statistik Sektoral yang dikelola sesuai basis Data	%	33,30%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Cakupan Pembinaan pengelolaan Data dan Informasi Perangkat daerah	%	55,50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Komunikasi dan Informatika
Setelah perubahan															



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023					
						10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	1	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik; Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	%	-	2 (Rintisan), 2 (Interaksi), 2 (Interaksi)	Rp3.834.850.000	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi), 3 (Transaksi)	Rp3.681.400.000	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi), 3 (Transaksi)	Rp3.881.400.000	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi), 3 (Transaksi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	%	-	2 (Terkelola), 2 (Terkelola), 2 (Terkelola), 2 (Terkelola)	Rp3.431.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp3.350.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp3.435.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	%	-	2 (Terkelola), 2 (Terkelola)	Rp106.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp200.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp495.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	%	-	2 (Terkelola), 2 (Terkelola)	Rp45.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp50.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp50.000.000	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				6. Indeks Pelayanan Publik		2,85	4,01 (A-)	Rp40.449.486.792	4,26 (A-)	Rp41.282.488.352	4,51 (A)	Rp37.924.980.044	4,51 (A)	Rp61.152.526.540	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil; Sekretariat DPRD; Kecamatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.;
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2021		2022		2023		2023						
						10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
1	1	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			
1	1	7	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			
1	1	8	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	95,93%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			
1	1	9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketersediaan Database Kependudukan	%	76,51%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			
3	8	1	Program peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kerjasama	Prosentase rumusan kebijakan tata pemerintahan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD			
				Prosentase kebijakan tata pemerintahan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD	
				Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD	
				Prosentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD	
				Prosentase dokumen pertanggungjawaban kepala daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD	
				Prosentase administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD yang difasilitasi sesuai peraturan dan tepat waktu	%	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Sekretariat DPRD
				Prosentase rumusan kebijakan kerjasama yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Sekretariat DPRD
				Prosentase kebijakan kerjasama di dalam negeri yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Sekretariat DPRD
				Prosentase kerjasama daerah yang terlaksana	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Sekretariat DPRD
3	8	2	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD			
3	8	3	Program Percepatan	Prosentase SKPD dengan predikat nilai SAKIP minimal BB	%	90%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD			



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2020	2021		2022		2023					
					8	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	dokumen	1	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase rumusan kebijakan bidang reformasi birokrasi yang disusun	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase SKPD yang memiliki inovasi kategori baik	%	40%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase perangkat daerah yang memenuhi kaedah ketatalaksanaan sesuai ketentuan	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Jumlah SKPD yang struktur kelembagaan dan tugas fungsinya sesuai	SKPD	45	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase Dokumen kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	10	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	Prosentase acara pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tata aturan keprotokolan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase acara pemerintah daerah yang didokumentasikan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase acara pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang difasilitasi	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Prosentase sarana penunjang pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat, dan staf ahli yang terpenuhi dan berfungsi baik	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase gedung, kantor, dan rumah dinas yang terpenuhi dan kondisi baik	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase acara kedinasan pimpinan dan staf ahli yang terpenuhi makan dan minumannya	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	9	Program Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Prosentase pegawai yang gaji berkalanya tepat waktu	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase dokumen pelaporan keuangan dan asset yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan tata usaha pimpinan dan staf ahli yang dilaksanakan sesuai SOP	%	90%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pegawai yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
3	8	17	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum daerah	Prosentase rumusan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang disusun	%	100%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD
				Prosentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi yang dievaluasi	%	75%	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sekretariat DPRD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	8	18	Program peningkatan fasilitas bantuan hukum	pelaksanaannya Persentase bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diberikan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	19	Program Peningkatan kinerja Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan	Prosentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun Prosentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	16	Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian	Prosentase rumusan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang disusun Prosentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	21	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Prosentase rumusan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun Prosentase kebijakan bidang sumber daya alam yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	22	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Prosentase rumusan kebijakan bidang cukai yang disusun Prosentase kebijakan bidang sumber cukai yang dievaluasi pelaksanaannya	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	13	Program Peningkatan tertib Administrasi dan Kebijakan Pembangunan	Prosentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	14	Program Penataan Administrasi Pertanahan	Prosentase rumusan kebijakan administrasi pertanahan yang disusun	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	15	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan	Prosentase kebijakan administrasi pembangunan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	12	Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun Prosentase kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dievaluasi pelaksanaannya Prosentase pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Sekretariat DPRD
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	2	Program Peningkatan dan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	%	93%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	82%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
				Nilai Sakip A		AA	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
				Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang ketertarikan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
				Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
				Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Prosentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dengan kualitas baik	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
				Nilai Sakip	A	A	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
				Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
				Prosentase Hasil Koordinasi Bidang Keterntarikan dan Ketertiban Umum Yang Ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
				Prosentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Yang Ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pademawu
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2023		
						10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kecamatan											
3	8	10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Pamekasan
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Larangan
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Larangan
			yang Layak Fungsi;											
			Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Larangan
			Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Larangan
			Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Larangan
			Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SOP dan tepat waktu				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terakomodir dengan baik				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis
			yang Layak Fungsi				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		88%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis
			Persentase penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan dengan kualitas baik				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis
			Persentase pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan desa				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
			Persentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan				Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			sosial yang ditindaklanjuti												
			Prosentase hasil koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis	
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	%	95%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Galis	
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
				Persentase PNS yang mempunyai Latar Belakang Pendidikan yang Sesuai dengan Tugas yang Menjadi Tanggung Jawabnya		%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan.	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
				Prosentase dokumen pelaporan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan
3	8	8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan
			Prosentase hasil koordinasi bidang ketentrangan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
7	7	1	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Tlanakan	
3	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo	
3	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	%	93%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo	
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	%	82%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo
3	8	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Kecamatan Proppo	
Setelah perubahan															
2	1	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	%	-	95%	Rp243.160.200	96%	Rp316.244.700	97%	Rp315.000.000	97%	Rp315.000.000	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Bidang	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program/ Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
														pendaftaran penduduk)	
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	-	90%	Rp32.432.000	90%	Rp163.500.000	93%	Rp94.700.000	93%	Rp94.700.000	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Bidang Pencatatan Sipil)
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	%	-	100%	Rp312.295.000	100%	Rp103.000.000	100%	Rp150.500.000	100%	Rp150.500.000	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%	-	100%	Rp40.000.000	100%	Rp16.000.000	100%	Rp-	100%	Rp56.000.000	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	%	-	80%	Rp21.577.138.375	85%	Rp23.766.351.713	90%	Rp27.295.080.044	90%	Rp27.295.080.044	Sekretariat DPRD
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp57.306.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp267.306.000	Kecamatan Pamekasan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	-	88%	Rp13.318.463.223	95%	Rp8.384.392.373	100%	Rp1.099.000.000	100%	Rp22.801.855.596	Kecamatan Pamekasan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	85%	Rp103.340.000	90%	Rp145.000.000	100%	Rp125.000.000	100%	Rp373.340.000	Kecamatan Pamekasan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	85%	Rp15.000.000	90%	Rp59.999.900	100%	Rp60.000.000	100%	Rp134.999.900	Kecamatan Pamekasan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	80%	Rp40.000.000	90%	Rp65.000.000	100%	Rp65.000.000	100%	Rp170.000.000	Kecamatan Pamekasan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	%	-	90%	Rp15.000.000	91%	Rp15.000.000	92%	Rp25.000.000	92%	Rp20.000.000	Kecamatan Larangan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	-	80%	Rp-	83%	Rp25.000.000	85%	Rp55.000.000	100	Rp55.000.000	Kecamatan Larangan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	80%	Rp40.000.000	83%	Rp50.000.000	85%	Rp55.000.000	85%	Rp55.000.000	Kecamatan Larangan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	80%	Rp-	83%	Rp-	85%	Rp25.000.000	85%	Rp25.000.000	Kecamatan Larangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pemerintahan Umum												
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	85%	Rp42.499.950	90%	Rp15.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp15.000.000	Kecamatan Larangan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp-	100%	Rp20.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	Kecamatan Galis
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	-	0,85	Rp20.000.000	90%	Rp32.500.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	Kecamatan Galis
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp45.300.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp60.000.000	Kecamatan Galis
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp11.727.500	100%	Rp10.000.000	100%	Rp17.500.000	100%	Rp17.500.000	Kecamatan Galis
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	80%	Rp24.403.500	90%	Rp22.500.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Galis
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	96%	Rp35.000.000	98%	Rp30.000.000	100%	Rp38.000.000	100%	Rp103.000.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	-	96%	Rp5.000.000	98%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp85.000.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	96%	Rp80.500.000	98%	Rp106.000.000	100%	Rp106.000.000	100%	Rp292.500.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	96%	Rp5.000.000	98%	Rp20.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp50.000.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	96%	Rp27.600.000	98%	Rp24.000.000	100%	Rp47.100.000	100%	Rp98.700.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp4.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp35.000.000	Kecamatan Proppo
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	-	85%	Rp13.000.000	90%	Rp35.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp35.000.000	Kecamatan Proppo



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	1	4	dan Kelurahan	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp45.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	Kecamatan Proppo
7	1	5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	Kecamatan Proppo
7	1	6	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	80%	Rp10.000.000	90%	Rp20.000.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp10.000.000	Kecamatan Proppo
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp17.000.000	100%	Rp75.000.000	100%	Rp70.000.000	100%	Rp70.000.000	Kecamatan Pademawu
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	-	86,36 %	Rp3.095.194.794	95%	Rp120.000.000	100%	Rp115.000.000	100%	Rp115.000.000	Kecamatan Pademawu
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp121.950.000	100%	Rp115.000.000	100%	Rp105.000.000	100%	Rp105.000.000	Kecamatan Pademawu
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp8.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Pademawu
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	80%	Rp38.000.000	90%	Rp60.000.000	100%	Rp95.000.000	100%	Rp95.000.000	Kecamatan Pademawu
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan.	%	-	100%	Rp9.450.000	100%	Rp10.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp30.000.000	Kecamatan Palengaan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	-	83,34 %	Rp13.000.000	91,67%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	100%	Rp20.000.000	Kecamatan Palengaan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan atasu gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp40.000.000	100%	Rp45.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp50.000.000	Kecamatan Palengaan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp-	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp40.000.000	Kecamatan Palengaan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kerjanya memiliki kwalitas baik	%	-	75%	Rp45.000.000	91,67%	Rp30.000.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Palengaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp12.370.000,00		Rp30.000.000,00	100%	Rp35.000.000,00	100%	Rp-	Kecamatan Pegantenan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	-	93%	Rp25.000.000	98%	Rp25.000.000,00	-	Rp30.000.000,00	100%	Rp-	Kecamatan Pegantenan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	49.500.000		Rp60.841.494,00	100%	Rp80.000.000,00	100%	Rp220.000.000	Kecamatan Pegantenan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-		Rp16.000.000	100%	Rp12.000.000,00	-	Rp20.000.000,00	100%	Rp32.000.000	Kecamatan Pegantenan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	75%	Rp9.088.000,00		Rp36.000.000,00	90%	Rp45.000.000,00	90%	Rp175.000.000	Kecamatan Pegantenan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	90%	Rp4.500.000	95%	Rp45.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	-	90%	Rp12.000.000	95%	Rp38.740.000	100%	Rp35.000.000	100%	Rp35.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjut	%	-	85%	Rp50.000.000	90%	Rp93.763.250	100%	Rp85.000.000	100%	Rp85.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik	%	-	80%	Rp-	90%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mnyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	-	85%	Rp11.770.000	90%	Rp35.000.000	100%	Rp80.000.000	100%	Rp80.000.000	Kecamatan Pakong
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp26.600.000	100%	Rp24.000.000	100%	Rp37.500.000	100%	Rp37.500.000	Kecamatan Waru
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa	%	-	100%	Rp10.915.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp24.000.000	100%	Rp24.000.000	Kecamatan Waru
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp45.000.000	100%	Rp160.600.000	100%	Rp105.600.000	100%	Rp105.600.000	Kecamatan Waru
7	1	5	Program Penyelenggaraan	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp5.430.000	100%	Rp22.500.000	100%	Rp23.000.000	100%	Rp23.000.000	Kecamatan Waru



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Urusan Pemerintahan Umum												
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik	%	-	100%	Rp25.310.000	100%	Rp46.451.522	100%	Rp47.500.000	100%	Rp47.500.000	Kecamatan Waru
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp5.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	Kecamatan Batumarmar
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	-	100%	Rp25.020.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp27.000.000	100%	Rp27.000.000	Kecamatan Batumarmar
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	Rp62.500.000	100%	Rp95.000.000	100%	Rp95.000.000	100%	Rp95.000.000	Kecamatan Batumarmar
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp2.000.000	100%	Rp15.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	Kecamatan Batumarmar
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	100%	Rp15.000.000	100%	Rp34.000.000	100%	Rp34.000.000	100%	Rp98.700.000	Kecamatan Batumarmar
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	-	100%	Rp26.000.000	100%	Rp32.000.000	100%	Rp58.000.000	100%	Rp58.000.000	Kecamatan Pasean
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	-	100%	Rp13.423.500	100%	Rp26.000.000	100%	Rp27.500.000	100%	Rp27.500.000	Kecamatan Pasean
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	95%	Rp49.084.000	100%	Rp72.000.000	100%	Rp52.000.000	100%	Rp52.000.000	Kecamatan Pasean
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	-	100%	Rp18.000.000	100%	Rp22.000.000	100%	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	Kecamatan Pasean
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	-	100%	Rp10.245.000	100%	Rp28.000.000	100%	Rp51.000.000	100%	Rp89.245.000	Kecamatan Pasean
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	%	-	0%	Rp-	96%	Rp7.145.000	99%	Rp11.000.000	99%	Rp11.000.000	Kecamatan Kadur
7	1	3	Program Pemberdayaan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	-	96%	Rp11.801.000	97%	Rp11.560.000	99%	Rp17.000.000	99%	Rp17.000.000	Kecamatan Kadur



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Masyarakat Desa dan Kelurahan												
7	1	4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%	-	96%	Rp37.376.000	97%	Rp74.026.400	99%	Rp41.000.000	99%	Rp41.000.000	Kecamatan Kadur
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	-	0%	Rp-	97%	Rp8.272.000	99%	Rp13.000.000	99%	Rp13.000.000	Kecamatan Kadur
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik	%	-	97%	Rp9.793.750	97%	Rp11.100.000	99%	Rp13.000.000	99%	Rp13.000.000	Kecamatan Kadur
2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola	%	-	80%	Rp20.000.000	83%	Rp95.000.000	85%	Rp100.000.000	85%	Rp215.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	-		Rp-	80%	Rp20.000.000	85%	Rp30.000.000	85%	Rp50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peraturan tingkat daerah yang telah dibuat	%	-	100%	Rp25.000.000	0%	Rp-	0%	Rp-	100%	Rp25.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	1	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TEPAT WAKTU	%	-	100%	Rp195.000.000	100%	Rp5.700.000.000	100%	Rp5.830.000.000	100%	Rp5.830.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN YANG TERVERIFIKASI DAN TERVALIDASI	%	-	100%	Rp30.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN YANG TERVERIFIKASI DAN TERVALIDASI	%	-	100%	Rp30.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	14	Rp65.050.000	14,5	Rp230.000.000	15	Rp270.000.000	15	Rp565.050.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sebelum perubahan															
1	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	90%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	90%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				• Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya											



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2021		2022		2023				
							10	11	12	13	14	15			16
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase Unit Kerja Menyusun Perencanaan dan laporan Kinerja dengan Kualitas baik	%	90%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	9	Program Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	pengunjung	60.000 pengunjung	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	10	Program Pembinaan, Pengembangan, Teknologi Infomasi dan Promosi	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan Yang Berkualitas	%	81%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Setelah perubahan															
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengelola perpustakaan yang dibina	%	-	10%	Rp58.500.000	15%	Rp205.000.000	20%	Rp245.000.000	20%	Rp508.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	-	1%	Rp6.550.000	2%	Rp25.000.000	2%	Rp25.000.000	2%	Rp56.550.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Misi 4: Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan															
			Tujuan: Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Merata dan Layak bagi Masyarakat	Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	-	3,55	Rp389.236.120.522	3,7	Rp209.613.479.631	3,85	Rp68.702.167.370	3,85	Rp369.183.468.550	
			Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu	1. Rasio permukiman layak huni	Rasio	-	70	Rp123.968.048.479	75	Rp97.552.491.952	80	Rp38.642.500.000	80	Rp257.855.548.269	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sebelum perubahan															
1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	87,50%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja	Persentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			dan Keuangan												
1	4	7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,57%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	8	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	85%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani	%	47,75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
				Persentase Pondok pesantren yang tertangani	%	38,00%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
				Persentase Kawasan Perdesaan yang tertangani	%	5 kawasan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	4	9	Program Penataan bangunan dan lingkungan	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung	%	24%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi	%	3%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	4	11	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	Prosentase tenaga terampil yang bersertifikat di bidang Jasa Konstruksi	unit	24%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Setelah perubahan															
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	%	-	49,25 %	Rp4.924.999.999	50,75%	Rp1.400.000.000	52,25%	Rp1.100.000.000	52,25%	Rp7.424.999.999	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	%	-	60,00 %	Rp74.314.474.480	70%	Rp74.064.999.790	80%	Rp5.400.000.000	80%	Rp153.779.474.270	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	%	-	26%	Rp200.000.000	28%	Rp200.000.000	30%	Rp200.000.000	30%	Rp600.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	%	-	38,50 %	Rp28.749.439.350	39%	Rp1.750.000.000	40%	Rp500.000.000	40%	Rp30.999.439.350	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	%	-	24%	Rp250.000.000	24%	Rp375.000.000	24%	Rp450.000.000	24%	Rp1.075.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	%	-	0	Rp -	96,04%	Rp2.307.492.162	96,27%	Rp4.575.000.000	96,27%	Rp4.575.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman	%	-	89%	Rp2.838.234.	92%	Rp5.005.000.	94%	Rp8.717.500.	94%	Rp16.560.734	Dinas Perumahan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			KAWASAN PERMUKIMAN	Kumuh yang tertangani			650		000		000		.650	Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	95,80 %	Rp12.635.000.000	96,04%	Rp12.250.000.000	96,27%	Rp17.500.000.000	96,27%	Rp42.385.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	%	-	33,33 %	Rp55.900.000	66,66%	Rp200.000.000	100%	Rp200.000.000	100%	Rp455.900.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI dan REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil sesuai pedoman dan SOP	%	-									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				2. Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	-	75	Rp245.008.156.255	80	Rp95.935.000.000	82,5	Rp12.737.000.000	82,5	Rp92.929.253.061	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sebelum perubahan															
1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	3	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	95%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%		-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	3	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	3	7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentasejalan yang ditingkatkan	%	3,15%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Panjangjembatan yang ditingkatkan	meter	4 x 235 m	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	3	8	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan yang terpelihara	%	2,70%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Panjang jembatan yang dipelihara	meter	160 m	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas pekerjaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023		
						10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						-		-		-		-	Umum & Penataan Ruang	
1	3	9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	point	14,69	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah Long Storage terbangun	unit	2	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	11	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang penanganan kerusakan akibat abrasi pantai	meter	0	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	12	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik genangan banjir yang teratasi	lokasi	2	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	13	Program Penataan Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang yang disusun dengan kualitas baik	dokumen	4	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	Persentase jalan yang terpelihara	%	2,70%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	4	10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
				Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi	%	3%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
1	11	12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan B3	Jumlah sampah Yang tertangani (ton)	ton	11709,5	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup	
Setelah perubahan														
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	%	-	100%	Rp14.354.310.931	100%	Rp18.200.000.000	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	-	100%	Rp16.797.674.802	100%	Rp14.000.000.000	100%	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	%	-	100%	Rp146.718.394.189	100%	Rp40.050.000.000	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
1	3	12	Program Penyelenggaraan	Persentase penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	-	100%	Rp734.999.272	100%	Rp1.100.000.000	-	Rp -	Dinas pekerjaan Umum &	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						8	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	3	3	Penataan Ruang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	%	-	80,00 %	Rp44.004.474 .061	80%	Rp15.850.000 .000	80%	Rp5.600.000 .000	80%	Rp65.454.474 .061	Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	%	-	65,65 %	Rp17.537.779 .000	66,65%	Rp2.800.000 .000	67,65%	Rp3.172.000 .000	67,65%	Rp23.509.779 .000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI DI TPA	%	-	41,53 %	Rp4.860.524 .000	55,20%	Rp3.935.000 .000	68,62%	Rp3.965.000 .000	68,62%	Rp3.965.000 .000	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Indeks Risiko Bencana	Indeks		160,45	105	Rp557.000.000	100	Rp518.999.850	100	Rp690.000.000	100	Rp1.765.999.850	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sebelum perubahan															
3	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	7	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi; Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	7	7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan penanggulangan korban bencana alam	%	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	7	8	Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Prosentase Penanganan Kedaruratan dan penyaluran logistik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	7	9	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana)	Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Setelah perubahan															
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai Peningkatan Kapasitas Daerah	Nilai	-	0,1	Rp557.000.000	0,1	Rp518.999.850	0,1	Rp690.000.000	0,1	Rp1.765.999.850	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4. Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Indeks	-	80	Rp13.202.915.788	80	Rp12.673.632.829	81	Rp13.307.312.370	81	Rp13.307.312.370	Dinas Perhubungan	
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	1	3	Program peningkatan Perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Layak Fungsi	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Laik Pakai	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	9	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal yang dikelola	unit	1	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	0	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Laik Pakai	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	1	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	unit	1 unit	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	2	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Persentase Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum yang Layak Fungsi	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	3	Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan	Persentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan
1	1	4	Program Peningkatan Tata Kelola	Persentase Tata Kelola Perhubungan yang Sesuai dengan Kebijakan/ Peraturan Daerah	%	78%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Setelah perubahan															
Perhubungan															
2	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	-	80%	Rp4.584.859.330	80%	Rp5.778.239.961	80%	Rp6.069.842.640	80%	Rp6.069.842.640	Dinas Perhubungan
				Persentase ruas jalan yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik (km)	%	-	70%	Rp8.618.056.458	70%	Rp6.895.392.868	70%	Rp7.237.469.730	70%	Rp7.237.469.730	Dinas Perhubungan
			Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kemanfaatan ruang terbuka hijau	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N / A	59,75 - 60,14	Rp6.500.000.000	60,14 - 60,54	Rp2.933.355.000	60,54 - 60,94	Rp3.325.355.000	60,54 - 60,94	Rp3.325.355.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase PNS yang mempunyai Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Tugas yang menjadi tanggungjawabnya	%	8%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Jumlah sungai yang terpantau baku mutunya	sungai	4	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	8	Program Peningkatan Kapasitas LH	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Kewajiban sesuai Dokumen Lingkungan	%	27%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	9	Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium	Jumlah Parameter pengujian sampel sesuai SNI	parameter	8	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup	Jumlah Sarpras Lingkungan yang terpenuhi	unit	4	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	11	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kawasan yang terpantau baku mutunya	kawasan	4	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	12	Program	Jumlah taman / RTH Pemerintah yang	taman/	11	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Lingkungan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	terkelola	RTH		-		-		-		-	Hidup	
1	1	4	Program Peningkatan Tata Lingkungan	Persentase Kajian lingkungan yang dipedomi	%	100%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
Setelah Perubahan															
2	1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	100%	Rp150.000.000	100%	Rp75.000.000	100%	Rp400.000.000	100%	Rp400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN	%	-	100%	Rp450.000.000	100%	Rp221.355.000	100%	Rp253.355.000	100%	Rp253.355.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO RTH	Ratio	-	0,2223	Rp1.300.000.000	0,2246	Rp906.000.000	0,2268	Rp906.000.000	0,2268	Rp906.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	%	-	100%	Rp100.000.000	100%	Rp56.000.000	100%	Rp81.000.000	100%	Rp81.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROSENTASE USAHA YANG KELUAR IZIN LINGKUNGANNYA	%	-	100%	Rp100.000.000	100%	Rp175.000.000	100%	Rp175.000.000	100%	Rp175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	-	100%	Rp150.000.000	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN	PROSENTASE PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT YANG TERSELENGGARA	%	-	66,67%	Rp200.000.000	66,67%	Rp250.000.000	66,67%	Rp250.000.000	66,67%	Rp250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023		2023					
1	2			3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
2	1	1	0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	100%	Rp50.000.000	100%	Rp50.000.000	100%	Rp60.000.000	100%	Rp60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
1	3	4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	%	-	13,21 %	Rp4.000.000.000	14,75%	Rp1.200.000.000	16,74%	Rp1.200.000.000	16,74%	Rp1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Misi 5: Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera																
				Tujuan 1: Meningkatkan Harmoni Nilai-Nilai Sosial Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan dalam Pembangunan	Indikator Tujuan 1: Indeks Modal Sosial	Indeks	-	82,58	Rp1.865.523.718	83,98	Rp3.640.628.100	85,26	Rp8.435.628.811	85,26	Rp9.012.782.711	
				Sasaran 1: Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib	1. Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	%	100%	100%	Rp1.714.499.018	100%	Rp3.214.498.900	100%	Rp7.914.499.018	100%	Rp7.914.499.018	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebelum perubahan																
3	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	6	2		Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi;	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
3	6	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	6	7		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	6	8		Program Kewaspadaan Nasional	Persentase Pencegahan potensi Konflik	%	80%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	6	9		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Ormas, PARPOL, dan LSM yang aktif	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Setelah perubahan															
8	1	2	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	%	-	100%	Rp -	100%	Rp450.000.000	100%	Rp850.000.000	100%	Rp850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	%	-	100%	Rp1.464.499.018	100%	Rp1.614.498.900	100%	Rp5.564.499.018	100%	Rp5.564.499.018	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/ Parpol/ LSM yang Aktif	%	-	100%	Rp150.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	-	100%	Rp -	100%	Rp200.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM Peningkatan KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Dini Potensi Konflik SARA	%	-	100%	Rp100.000.000	100%	Rp700.000.000	100%	Rp900.000.000	100%	Rp900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	82,5	83	Rp151.024.700	86	Rp426.129.200	90	Rp521.129.793	90	Rp1.098.283.693	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sebelum perubahan															
1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase PNS Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	Program peningkatan	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2023			
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Perencanaan, Pelaporan, Kinerja dan Keuangan	Kualitas Baik											
1	5	7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	8	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten / Kota	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	9	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten / Kota	orang/rumah tangga	1 Orang/RT	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	10	Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengakuan Peraturan Daerah	Persentase penegakan PERDA	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	11	Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan	Persentase kegiatan kepomongprajaan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan tepat waktu	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Satuan Polisi Pamong Praja
Setelah Perubahan															
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keindahan, Ketentraman, Ketertiban)	%	-	85%	Rp67.785.750	88%	Rp307.376.800	92%	Rp332.377.393	92%	Rp707.539.943	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	4	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	-	100%	Rp83.238.950	100%	Rp118.752.400	100%	Rp188.752.400	100%	Rp390.743.750	Satuan Polisi Pamong Praja
				3. Kota Layak Pemuda	%	N / A	Pratama	Rp4.557.000.000	Pratama	Rp4.878.000.000	Madya	Rp3.933.000.000	Madya	Rp3.933.000.000	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata
Sebelum perubahan															
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	1	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2023		
						10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	
1	1 9	3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	1 9	7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	orang	104	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	1 9	8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	kelompok	40 kelompok	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	1 9	9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	75%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	1 9	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	unit	1 stadion, 2 GOR & 1 Lapangan	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemuda dan Olahraga
Setelah perubahan														
2	1 9	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	%	-	1,50%	Rp552.000.000	1,55%	Rp682.000.000	1,55%	Rp747.000.000	1,55%	Rp747.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	1 9	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	%	-	100 %; 100%	Rp3.755.000.000	100 %; 100%	Rp3.946.000.000	100 %; 100%	Rp2.936.000.000	100 %; 100%	Rp2.936.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
			Presentase pelestarian olahraga rekreasi & tradisional											
2	1 9	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	%	-	100%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp250.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
			4. Nilai Pemajuan Kebudayaan	%	8,67%	9,10%	Rp.408.000.000	9,56%	Rp 373.000.000	10,04%	Rp 409.132.500	10,04 %	Rp 409.132.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah perubahan														
1	1 6	6	Program Pengembangan bahasa dan Sastra	%	-	78%	Rp83.000.000	83%	Rp40.000.000	88%	Rp42.000.000	88%	Rp42.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN	%	-	13%	Rp325.000.000	14%	Rp333.000.000	15%	Rp367.132.500	15%	Rp367.132.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2023			
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				KEBUDAYAAN									
				Persentase pelaku seni yang dibina	%	-							
2	2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	100%	Rp150.000.000	100%	Rp120.150.000	100%	Rp126.157.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indikator Tujuan 2: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	88,56	Rp23.572.033.500	89,28	Rp27.207.333.500	90	Rp27.069.833.500	
			Sasaran 1: Keberdayaan Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,01	58,54	Rp13.845.833.500	59,22	Rp14.552.333.500	59,9	Rp15.359.833.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sebelum perubahan													
1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	%	80%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	2	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	%	80%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Persentase PNS yang mempunyai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	%	80%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	3	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	15%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	7	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Promosi/Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak	%	70%	-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021	2022	2023		2023				
1	8	8	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8	8	Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Promosi/Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan	%	60%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	9	Program Keluarga Berencana	Persentase Laporan bulanan pengendalian lapangan tingkat Kecamatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)	%	70%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	10	Program Ketahanan Keluarga	Persentase bahan Informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang Anak dikelompok BKB,BKR dan BKL	%	60%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	11	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	Persentase Petugas Pelayanan KB	%	33%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	8	12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Remaja yang mengikuti Pembinaan KRR	%	65%	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Setelah perubahan															
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSNTASE PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER	%	-	100%	Rp616.000.000	100%	Rp726.500.000	100%	Rp768.000.000	100%	Rp768.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PERSNTASE PEREMPUAN KEPALA KELUARGA TERLATIH DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA	%	-	100%	Rp260.000.000	100%	Rp270.000.000	100%	Rp290.000.000	100%	Rp290.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	2023		2023				
						10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			PERSENTASE LEMBAGA YANG ANGGOTANYA DIBERDAYAKAN	%	-	100%	Rp260.000.000	100%	Rp260.000.000	100%	Rp260.000.000	100%	Rp260.000.000	Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI	%	-	100%	Rp764.085.500	100%	Rp824.085.500	100%	Rp894.085.500	100%	Rp894.085.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	-	100%	Rp758.170.500	100%	Rp843.170.500	100%	Rp938.170.500	100%	Rp938.170.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	-	80%	Rp190.000.000	85%	Rp190.000.000	90%	Rp200.000.000	90%	Rp200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	%	-	20%	Rp440.000.000	35%	Rp450.000.000	57%	Rp470.000.000	57%	Rp470.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	-	100%	Rp715.534.500	100%	Rp730.534.500	100%	Rp750.534.500	100%	Rp750.534.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021	2022	2023		2023					
						10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2		3	4	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	1	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN PADA REMAJA USIA 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19 TH)	%	-	27%	Rp1.565.000.000	26%	Rp1.695.000.000	25%	Rp1.885.000.000	25%	Rp1.885.000.000	Keluarga Berencana
2	1	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	-	77%	Rp6.817.043.000	80%	Rp6.941.043.000	85%	Rp7.066.043.000	2 Dok	Rp50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF	%	-	40%	Rp1.460.000.000	50%	Rp1.622.000.000	60%	Rp1.838.000.000	32 Unit	Rp75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah kabupaten Pamekasan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.



Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.920.014.132.343,13	1.824.167.916.966,71	1.932.310.486.095,00	1.802.607.014.408,71	1.884.515.169.799,81
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	511.391.307.874,22	479.907.632.159,00	313.874.652.507,00	199.327.032.524,30	217.515.579.479,85
	Total penerimaan	2.431.405.440.217,35	2.304.075.549.125,71	2.246.185.138.602,00	2.001.934.046.933,01	2.102.030.749.279,66
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	1.061.471.329.671,00	1.072.864.075.323,45	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.589.000.000,00	16.000.000.000,00	0	41.978.882.541,87	44.077.826.668,96
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.367.345.110.546,35	1.215.211.473.802,26	2.246.185.138.603,10	1.959.955.164.391,14	2.057.952.922.610,70
	Prioritas I	449.155.328.655,00	661.736.046.836,60	1.462.887.357.777,59	1.139.552.085.973,95	1.410.982.415.410,48
	Prioritas II	917.779.578.358,19	553.110.863.523,52	782.543.939.309,02	819.755.870.377,56	646.045.042.951,20
	Prioritas III	410.203.533,16	364.563.442,14	753.841.516,49	647.208.039,64	925.464.249,02

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2021



Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	URUSAN WAJIB														
	URUSAN WAJIB : TERKAIT PELAYANAN DASAR					Rp 1.426.323.948.000,00		Rp 1.278.546.767.891,80		Rp 1.189.113.060.005,39		Rp 2.241.217.167.893,19			
	PENDIDIKAN					Rp 654.191.446.342,00		Rp 648.510.773.557,00		Rp 672.808.321.258,85		Rp 672.808.321.258,85			
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	70%	Rp 485.531.977.135,00	75%	Rp 489.590.640.600,00	80%	Rp 505.942.181.654,00	80%	Rp 505.942.181.654,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD	%	0	97,66	Rp 108.963.157.354	102,543	Rp 102.707.176.541	107,67,015	Rp 107.842.535.368	107,67,015	Rp 107.842.535.368	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SD	%	0	108,76	Rp 29.880.213.796	114,198	Rp 29.508.093.296	1,199,079	Rp 30.983.497.961	1,199,079	Rp 30.983.497.961	
				APM SMP	%	0	76,07	Rp 29.880.213.796	798,735	Rp 29.508.093.296	83,867,175	Rp 30.983.497.961	83,867,175	Rp 30.983.497.961	
				APK SMP	%	0	87,38	Rp 2.997.702.857	91,749	Rp 2.887.697.840	9,633,645	Rp 3.032.082.732	9,633,645	Rp 3.032.082.732	
				Aangka Partisipasi Kesetaraan	%	0	3105	Rp 2.997.702.857	3260,25	Rp 2.887.697.840	34,232,625	Rp 3.032.082.732	34,232,625	Rp 3.032.082.732	
			Angka Partisipasi PAUD	%	0	28381	Rp 23.336.885.200	29800	Rp 22.218.965.280	31290	Rp 23.329.913.544	31290	Rp 23.329.913.544		
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum	%	0	100%	Rp 231.000.000,00	100%	Rp 115.000.000,00	100%	Rp 120.750.000,00	100%	Rp120.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1) Persentase pendidik berkualifikasi 2) Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi	%	0	93%	Rp 3.137.510.000,00	95%	Rp1.393.200.000,00	97%	Rp1.462.860.000,00	97%	Rp1.462.860.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang diterbitkan	%	0	50%	Rp 30.000.000,00	60%	Rp50.000.000,00	70%	Rp52.500.000,00	70%	Rp52.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	%	0	78%	Rp 83.000.000,00	83%	Rp40.000.000,00	88%	Rp42.000.000,00	88%	Rp42.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
		KESEHATAN				Rp 380.813.512.439,00			Rp 404.473.479.016,80			Rp 439.142.677.184,54		Rp 1.159.725.575.540,34	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Rp 91.190.492.457,00	100%	Rp 97.065.560.288,70	100%	Rp 101.065.317.951,64	100%	Rp 289.321.370.697,34	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	-	100%	Rp 114.701.531.963,00	100%	Rp 119.361.439.400,70	100%	Rp 121.694.256.803,64	100%	Rp 355.757.228.167,34	RSUD SMART	
				Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	-	80%	Rp 138.033.389.239,00	85%	Rp 145.441.852.755,40	90%	Rp 150.617.441.057,27	90%	Rp 434.092.683.051,67	RSUD Waru	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	%	-	80%		80%		80%		80%	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Ibu	%	-	94%		95%		94%		94%	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi	%	-	22%		22%		22%		22%	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	-	72%	Rp 14.198.600.700,00	73%	Rp 16.810.982.600,00	74%	Rp 27.490.000.000,00	75%	Rp 27.490.000.000,00	Dinas Kesehatan
				Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar	%	-	100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
				Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	-	82%		82%		84%		84%	Dinas Kesehatan	
				Persentase pemenuhan fasilitas, alat dan atau obat yang sesuai standar	%	-	100%	Rp 8.260.000.000,00	100%	Rp 14.160.000.000,00	100%	Rp 14.160.000.000,00	100%	Rp 14.160.000.000,00	RSUD SMART
					%	-	60%	Rp 5.938.600.700,00	70%	Rp 2.650.982.600,00	80%	Rp 13.330.000.000,00	80%	Rp 13.330.000.000,00	RSUD Waru
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	-	100%	Rp 4.786.854.630,00	100%	Rp 4.925.618.622,00	100%	Rp 4.925.618.622,00	100%	Rp 14.638.091.874,00	Dinas Kesehatan
				Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	-	100%	Rp 1.819.000.000,00	100%	Rp 2.022.000.000,00	100%	Rp 3.675.000.000,00	100%	Rp 7.516.000.000,00	RSUD Waru
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	%	-	100%	Rp 136.591.750,00	100%	Rp 136.591.750,00	100%	Rp 136.591.750,00	100%	Rp 409.775.250,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	%	-	16%	Rp 843.475.500,00	16%	Rp 993.475.500,00	16%	Rp 993.475.500,00	16%	Rp 2.830.426.500,00	Dinas Kesehatan
				Persentase	%	-	100%	Rp	100%	Rp	100%	Rp	100%	RSUD Waru	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2023						
					10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		pendampingan hukum oleh konsultan yang terlaksana				904.975.500,00		904.975.500,00		1.054.975.500,00		Rp180.000.000,00					
	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG					Rp 184.723.916.461,00		Rp 80.778.760.165,00		Rp -		Rp -					
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	%	0	100%	Rp 6.118.537.267,00	100%	Rp7.428.760.165,00		Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	%	0	100%	Rp 14.354.310.931,00	100%	Rp18.200.000.000,00		Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	0	100%	Rp 16.797.674.802,00	100%	Rp14.000.000.000,00	100%	Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	%	0	100%	Rp 146.718.394.189,00	100%	Rp40.050.000.000,00		Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	0	100%	Rp 734.999.272,00	100%	Rp1.100.000.000,00		Rp -	Dinas pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp 188.881.794.118,00		Rp 120.512.232.897,00		Rp 51.222.844.654,00		Rp 360.616.871.669,00					
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 97.144.000,00	100%	Rp 97.047.500,00	100%	Rp 97.047.500,00	100%	Rp 291.239.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%		0	100%	Rp 1.859.061.952,00	100%	Rp 2.576.207.950,00	100%	Rp 2.576.207.950,00	100%	Rp 7.011.477.852,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Persentase peningkatan kompetensi aparaturnya	%		0	80%	Rp 148.980.000,00	80%	Rp 148.780.000,00	80%	Rp 148.000.000,00	80%	Rp 445.760.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%		0	100%	Rp 1.322.206.626,00	100%	Rp 1.687.705.387,00	100%	Rp 1.187.089.204,00	100%	Rp 4.197.001.217,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	%	0	80%	Rp 44.004.474.061,00	80%	Rp 15.850.000.000,00	80%	Rp 5.600.000.000,00	80%	Rp 65.454.474.061,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	%	0	65,65%	Rp 17.537.779.000,00	66,65%	Rp 2.800.000.000,00	67,65%	Rp 3.172.000.000,00	67,65%	Rp 23.509.779.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	%		49,25%	Rp 4.924.999.999,00	50,75%	Rp 1.400.000.000,00	52,25%	Rp 1.100.000.000,00	52,25%	Rp 7.424.999.999,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	%		60%	Rp 74.314.474.480,00	70%	Rp 74.064.999.898,00	80%	Rp 5.400.000.000,00	80%	Rp 153.779.474.378,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	%		26%	Rp 200.000.000,00	28%	Rp 200.000.000,00	30%	Rp 200.000.000,00	30%	Rp 600.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	%		38,5%	Rp 28.749.439.350,00	39%	Rp 1.750.000.000,00	40%	Rp 500.000.000,00	40%	Rp 30.999.439.350,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	%		24%	Rp 250.000.000,00	24%	Rp 375.000.000,00	24%	Rp 450.000.000,00	24%	Rp 1.075.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	%		0%	Rp -	96,04%	Rp 2.307.492.162,00	96,27%	Rp 4.575.000.000,00	96,27%	Rp 6.882.492.162,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%		89%	Rp 2.838.234.650,00	92%	Rp 5.005.000.000,00	94%	Rp 8.717.500.000,00	94%	Rp 16.560.734.650,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	%		95,80%	Rp 12.635.000.000,00	96,04%	Rp 12.250.000.000,00	96,27%	Rp 17.500.000.000,00	96,27%	Rp 42.385.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	%		33,33%	Rp 55.900.000,00	66,66%	Rp 200.000.000,00	100%	Rp 200.000.000,00	100%	Rp 455.900.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	4	6						Rp-			Rp-	0%	Rp-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp 9.605.727.282,00		Rp 12.521.455.235,00		Rp 14.188.896.537,00		Rp 36.316.079.054,00			
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 24.206.000,00	100%	Rp80.000.000,00	100%	Rp80.000.000,00	100%	Rp184.206.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 3.631.323.232,00	100%	Rp 5.013.664.688,00	100%	Rp 5.013.664.688,00	100%	Rp 13.658.652.608,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%	Rp 33.760.000,00	100%	Rp 72.604.500,00	100%	Rp 72.604.500,00	100%	Rp 178.969.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 3.072.669.656,00	100%	Rp 3.060.112.406,00	100%	Rp 3.021.497.556,00	100%	Rp 9.154.279.618,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keindahan, Ketenteraman, Ketertiban)	%	0	85%	Rp 67.785.750,00	88%	Rp 307.376.800,00	92%	Rp 332.377.393,00	92%	Rp 707.539.943,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	0	100%	Rp 83.238.950,00	100%	Rp 118.752.400,00	100%	Rp 188.752.400,00	100%	Rp 390.743.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	%		100%	Rp 395.287.406,00	100%	Rp 650.697.012,00	100%	Rp 955.000.000,00	100%	Rp 2.000.984.418,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	%		100%	Rp 1.614.861.188,00	100%	Rp 2.369.052.988,00	100%	Rp 3.390.000.000,00	100%	Rp 7.373.914.176,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase	%		100%	Rp	100%	Rp	100%	Rp	100%	Rp	Badan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2023			
					10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Peningkatan Kompetensi aparatur				95.595.100,00		237.194.791,00		305.000.000,00		637.789.891,00	Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas	%		100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 92.999.800,00	100%	Rp 140.000.000,00	100%	Rp 262.999.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai Peningkatan Kapasitas Daerah	Nilai		0,10	Rp 557.000.000,00	0,10	Rp 518.999.850,00	0,10	Rp 690.000.000,00	0,10	Rp 1.765.999.850,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	SOSIAL					Rp 8.107.551.358,00		Rp 11.750.067.021,00		Rp 11.750.320.371,00		Rp 11.750.320.371,00		
X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	Rp 2.938.351.358,00	100%	Rp3.973.067.021,00	100%	Rp3.973.320.371,00	100%	Rp3.973.320.371,00	Dinaas Sosial
1	6	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang Diberdayakan	5%	Rp 619.000.000,00	6%	Rp105.000.000,00	6%	Rp105.000.000,00	6%	Rp105.000.000,00	Dinaas Sosial
1	6	3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	10000%	Rp20.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	Dinaas Sosial
1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	5%	Rp 3.459.547.000,00	7%	Rp6.310.000.000,00	9%	Rp6.310.000.000,00	9%	Rp6.310.000.000,00	Dinaas Sosial
1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Menerima Bantuan	54%	Rp 995.653.000,00	55%	Rp1.185.000.000,00	57%	Rp1.185.000.000,00	57%	Rp1.185.000.000,00	Dinaas Sosial
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Rp 50.000.000,00	10000%	Rp120.000.000,00	10000%	Rp120.000.000,00	10000%	Rp120.000.000,00	Dinaas Sosial
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan	10000%	Rp 25.000.000,00	10000%	Rp37.000.000,00	10000%	Rp37.000.000,00	10000%	Rp37.000.000,00	Dinaas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021		2022		2023	2023					
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	yang terkelola													
	URUSAN WAJIB														
	URUSAN WAJIB NON DASAR					Rp 135.142.797.205,00		Rp 141.577.535.983,00		Rp 142.603.324.689,00		Rp 139.092.449.208,00			
	TENAGA KERJA					Rp 11.114.815.244,00		Rp 14.305.753.972,00		Rp 15.091.664.771,00		Rp 15.091.664.771,00			
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI	%	0	85%	Rp 852.049.650,00	90%	Rp 1.260.100.000,00	100%	Rp 1.701.660.799,00	100%	Rp 1.701.660.799,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS	%	0	81%	Rp 88.680.000,00	90%	Rp 562.000.000,00	97%	Rp 622.000.000,00	97%	Rp 622.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK	%	0	95%	Rp 4.264.972.600,00	98%	Rp 5.889.653.972,00	100%	Rp 5.889.653.972,00	100%	Rp 5.889.653.972,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
				PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR	%		80%	Rp 50.000.000,00	85%	Rp 130.000.000,00	90%	Rp 160.000.000,00	90%	Rp 160.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TUJUAN RENCANA TENAGA KERJA YANG TERCAPAI	%	0	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 70.000.000,00	100%	Rp 70.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN	%	0	100%	Rp 5.519.112.994,00	100%	Rp 5.539.000.000,00	100%	Rp 5.559.000.000,00	100%	Rp 5.559.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	0	25%	Rp170.000.000,00	30%	Rp685.000.000,00	35%	Rp870.000.000,00	35%	Rp870.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	INDEKS HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	0	18,39	Rp 140.000.000,00	2300%	Rp180.000.000,00	27,58	Rp219.350.000,00	27,58	Rp219.350.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN					Rp 7.082.441.864,00		Rp 7.422.800.000,00		Rp 7.669.600.000,00		Rp 7.669.600.000,00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2023		
					10	11	12	13	14	15	16	17	
	ANAK												
X	XX	1											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS	%	0	80%	Rp 110.000.000,00	85%	Rp 123.000.000,00	90%	Rp 136.000.000,00	90%	Rp 136.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 4.394.441.864,00	100%	Rp 4.508.300.000,00	100%	Rp 4.588.600.000,00	100%	Rp 4.588.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	80%	Rp 50.000.000,00	90%	Rp 55.000.000,00	90%	Rp 60.000.000,00	90%	Rp 60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	80%	Rp 1.202.000.000,00	85%	Rp 1.290.000.000,00	87%	Rp 1.367.000.000,00	87%	Rp 1.367.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	2											
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSNTASE PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER	%		100%	Rp 616.000.000,00	100%	Rp 726.500.000,00	100%	Rp 768.000.000,00	100%	Rp 768.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KEPALA KELUARGA TERLATIH DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA	%		100%	Rp 260.000.000,00	10000%	Rp 270.000.000,00	10000%	Rp 290.000.000,00	100%	Rp 290.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE LEMBAGA YANG ANGGOTANYA DIBERDAYAKAN	%		100%	Rp 260.000.000,00	10000%	Rp 260.000.000,00	10000%	Rp 260.000.000,00	100%	Rp 260.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2021		2022		2023		2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2			3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI	%		100%	758.170.500	100%	843.170.500	100%	938.170.500	100%	938.170.500	Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD YANG MENYEDIAKAN DATA TERPILAH	%		80%	Rp 190.000.000,00	85%	Rp 190.000.000,00	90%	Rp 200.000.000,00	90%	Rp 200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	%		20%	440.000.000	35%	450.000.000	56,61%	470.000.000	56,61%	470.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG TERLAYANI	%		100%	715.534.500	100%	730.534.500	100%	750.534.500	100%	750.534.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PANGAN					Rp 17.395.652.208,00		Rp 21.245.244.844,00		Rp 21.673.328.924,00		Rp 21.673.328.924,00	
X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%		100%	Rp 17.097.402.208,00	100%	Rp 20.526.120.444,00	100%	Rp 20.865.078.924,00	100%	Rp 20.865.078.924,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan Yang Sesuai Peruntukannya	%		0%	Rp -	30%	Rp 99.374.400,00	31%	Rp 140.000.000,00	31%	Rp 140.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil	%		60%	Rp 243.250.000,00	62%	Rp 499.000.000,00	65%	Rp 518.250.000,00	65%	Rp 518.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase	%		125%			127%		13%		13%	Dinas Ketahanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Cadangan Pangan											Pangan dan Pertanian		
		Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembinaan Pengankaragaman Pangan	%	-	15%		17%		19%		19%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	-	0 Desa	Rp -	4 Desa	Rp 55.750.000,00	5 Desa	Rp 75.000.000,00	5 Desa	Rp 75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	%	-	5%	Rp 55.000.000,00	6%	Rp 65.000.000,00	7%	Rp 75.000.000,00	7%	Rp 75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			LINGKUNGAN HIDUP					Rp 22.926.795.497,00		Rp 17.391.026.497,00		Rp 18.108.026.497,00		Rp 17.376.626.497,00	
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp 1.965.000.000,00	100%	Rp 1.086.400.000,00	100%	Rp 1.081.400.000,00	100%	Rp350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	100%	Rp 9.291.271.497,00	100%	Rp 9.291.271.497,00	100%	Rp 9.591.271.497,00	100%	Rp9.591.271.497,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp 170.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp 140.000.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	100%	Rp105.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	100%	Rp 150.000.000,00	100%	Rp 75.000.000,00	100%	Rp 400.000.000,00	100%	Rp 400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN	%	-	100%	Rp 450.000.000,00	100%	Rp 221.355.000,00	100%	Rp 253.355.000,00	100%	Rp 253.355.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RATIO RTH	ratio		0,2223	Rp 1.300.000.000,00	0,2246	Rp906.000.000,00	0,2268	Rp906.000.000,00	0,2268	Rp906.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN	Prosentase Usaha/Kegiatan	%	-	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 56.000.000,00	100%	Rp 81.000.000,00	100%	Rp81.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
						0									
2	11	6	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya											
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROSENTASE USAHA YANG KELUAR IZIN LINGKUNGANNYA	%	-	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 175.000.000,00	100%	Rp 175.000.000,00	100%	Rp175.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	-	100%	Rp 150.000.000,00	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT YANG TERSELENGGARA	%	-	66,67%	Rp 200.000.000,00	66,67%	Rp250.000.000,00	66,67%	Rp250.000.000,00	66,67%	Rp250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PENGADUAN YANG TERSELESAIKAN	%	-	100%	Rp 50.000.000,00	10000%	Rp 50.000.000,00	10000%	Rp 60.000.000,00	10000%	Rp60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI DI TPA	%	-	41,53%	Rp 4.860.524.000,00	55,20%	Rp 3.935.000.000,00	68,62%	Rp 3.965.000.000,00	68,62%	Rp3.965.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PROESENTASE PEMENUHAN SARANA PENGELOLAHAN SAMPAH	%	-	13,21%	Rp 4.000.000.000,00	14,75%	Rp 1.200.000.000,00	16,74%	Rp 1.200.000.000,00	16,74%	Rp 1.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL					Rp 5.036.366.051,00		Rp 5.437.167.785,00		Rp 5.559.547.342,00		Rp 5.615.547.342,00	
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp 4.408.478.851	100%	Rp 4.838.423.085	100%	Rp 4.999.347.342	100%	Rp 4.999.347.342	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	-	95%	Rp 243.160.200,00	96%	Rp316.244.700,00	97%	Rp 315.000.000,00	97%	Rp 315.000.000,00	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	%	-	90%	Rp 32.432.000,00	90%	Rp163.500.000,00	93%	Rp 94.700.000,00	93%	Rp 94.700.000,00	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	%	-	100%	Rp 312.295.000,00	100%	Rp103.000.000,00	100%	Rp 150.500.000,00	100%	Rp 150.500.000,00	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%	-	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp16.000.000,00	100%	Rp -	100%	Rp 56.000.000,00	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 10.461.232.540,00		Rp 8.088.386.320,00		Rp 6.988.386.320,00		Rp 20.254.841.488,00		
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG TERPENUHI	%	0	100%	Rp 328.161.414,00	100%	Rp 4.114.066.320,00	100%	Rp 386.024.000,00	100%	Rp 1.100.209.414,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS BAIK		%	0	100%	Rp 2.242.121.372,00	100%	100%		Rp 3.191.042.320,00	100%	Rp 3.191.042.320,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PERSENTASE PENINGKATAN KOMPETANSI APARATUR		%	0	100%	Rp 430.040.000,00	100%	100%		Rp 435.000.000,00	100%	Rp 1.300.040.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PERSENTASE PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA YANG BERKUALITAS		%	0	100%	Rp 98.278.500,00	100%	100%		Rp 102.000.000,00	100%	Rp 302.278.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	0	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	Rp -	Dinas PMD
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang terjalin	%	0	100%	Rp 616.321.400,00	100%	Rp 521.320.000,00	100%	Rp 521.320.000,00	100%	Rp 1.658.961.400,00	Dinas PMD
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	%	0	100%	Rp 6.341.309.854,00	100%	Rp 2.760.000.000,00	100%	Rp 1.660.000.000,00	100%	Rp 10.911.309.854,00	Dinas PMD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16		17
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	%	0	100%	Rp 405.000.000,00	100%	Rp 693.000.000,00	100%	Rp 693.000.000,00	100%	Rp 1.791.000.000,00	Dinas PMD
				Persentase peningkatan usaha masyarakat desa											Dinas PMD
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					Rp 9.842.043.000,00		Rp 10.258.043.000,00		Rp 10.789.043.000,00		Rp 2.010.000.000,00	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN PADA REMAJA USIA 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19 TH)	%	0	27%	Rp 1.565.000.000,00	26%	Rp 1.695.000.000,00	25%	Rp 1.885.000.000,00	25%	Rp 1.885.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)		0	77%	Rp 6.817.043.000,00	80%	Rp 6.941.043.000,00	85%	Rp 7.066.043.000,00	2 Dok	Rp 50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE ANGGOTA KELUARGA TRIBINA, UPPKS DAN PIK-R/M YANG AKTIF	%	0	40%	Rp 1.460.000.000,00	50%	Rp 1.622.000.000,00	60%	Rp 1.838.000.000,00	32 Unit	Rp 75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PERHUBUNGAN					Rp 13.202.915.788,00		Rp 12.673.632.829,00		Rp 13.307.312.370,00		Rp 13.307.312.370,00	
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	%	0	80%	Rp 4.584.859.330,00	80%	Rp 5.778.239.961,00	80%	Rp 6.069.842.640,00	80%	Rp 6.069.842.640,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Sarana Transportasi yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	0	70%	Rp 8.618.056.458,00	70%	Rp 6.895.392.868,00	70%	Rp 7.237.469.730,00	70%	Rp 7.237.469.730,00	Dinas Perhubungan
			KOMUNIKASI & INFORMATIKA					Rp 16.815.286.221,00		Rp 17.548.366.275,00		Rp 18.083.284.800,00		Rp 11.940.357.147,00	
X	XX	1	PROGRAM	Persentase Sarana	%	0	100%	Rp	100%						Dinas Komunikasi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prasarana yang Terpenuhi				9.549.436.221,00		Rp10.516.966.275,00		Rp10.766.884.800,00		Rp4.623.957.147,00	dan Informatika		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik; Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	%	0	2 (Rintisan), 2 (Interaksi)	Rp 3.834.850.000,00	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi)	Rp 3.681.400.000,00	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi)	Rp 3.881.400.000,00	3 (Terdefinisi), 3 (Transaksi)	Rp 3.881.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi, Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	%	0	2 (Terkelola),	Rp 3.431.000.000,00	3 (Terdefinisi)	Rp3.350.000.000,00	3 (Terdefinisi)	Rp 3.435.000.000,00	3 (Terdefinisi)	Rp 3.435.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH				Rp 12.957.216.090,00		Rp 7.145.074.409,00		Rp 5.454.829.210,00		Rp 5.454.829.210,00		
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%		100%		100%	100%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 2.253.035.090,00	100%	Rp 4.285.893.409,00	100%	Rp 3.755.179.210,00	100%	Rp 3.755.179.210,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%		100%		100%	100%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Persentase perencanaan dan	%	0	100%		100%		100%	100%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021	2022	2023	2023	2023						
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		evaluasi kinerja yang berkualitas											Menengah		
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	%	100%	Rp 75.000.000,00	100%	Rp 175.000.000,00	100%	Rp 200.750.000,00	100%	Rp 200.750.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	100%	Rp -	100%	Rp 180.000.000,00	100%	Rp 133.900.000,00	100%	Rp 133.900.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	100%	Rp 1.000.000.000,00	100%	Rp 130.000.000,00	100%	Rp 85.000.000,00	100%	Rp 85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	100%	Rp 459.181.000,00	100%	Rp 459.181.000,00	100%	Rp -	100%	Rp -	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	100%	Rp -	100%	Rp 1.050.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	%	0	100%	Rp 4.170.000.000,00	100%	Rp 715.000.000,00	100%	Rp 830.000.000,00	100%	Rp 830.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	%	0	100%	Rp 5.000.000.000,00	100%	Rp 150.000.000,00	100%	Rp 350.000.000,00	100%	Rp 350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PENANAMAN MODAL				Rp 677.461.700,00		Rp 6.522.462.000,00		Rp 6.752.462.000,00				
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG TERLAKSANA	%	0	90%	Rp50.000.000,00	95%	Rp150.000.000,00	100%	Rp150.000.000,00	100%	Rp150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	%	0	90%	Rp 30.000.000,00	95%	Rp 250.000.000,00	100%	Rp 350.000.000,00	100%	Rp 350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TEPAT WAKTU	%	0	100%	Rp195.000.000,00	100%	Rp5.700.000.000,00	100%	Rp5.830.000.000,00	100%	Rp5.830.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	5	PROGRAM	PERSENTASE	%	0	90%	Rp	90%	Rp	100%	Rp	100%	Rp	Dinas Penanaman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021	2022	2023	2023	2023					
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE												
	PERSANDIAN					Rp 45,000,000.00		Rp 50,000,000.00		Rp 50,000,000.00				
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian, Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	%	2 (Terkelola), 2 (Terkelola)	Rp 45,000,000.00	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp 50,000,000.00	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp 50,000,000.00	3 (Terdefinisi), 3 (Terdefinisi)	Rp50,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KEBUDAYAAN					Rp 475.000.000,00		Rp 453.150.000,00		Rp 493.290.000,00				
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1) Persentase objek budaya yang dikembangkan 2) Persentase pelaku seni yang dibina	%	0	13% Rp 325.000.000,00	14%	Rp333.000.000,00	15%	Rp367.132.500,00	15%	Rp367.132.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	100% Rp150.000.000,00	100%	Rp120.150.000,00	100%	Rp126.157.500,00	100%	Rp126.157.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN					Rp 2.427.571.002,00		Rp 3.503.221.002,00		Rp 3.669.132.052,00		Rp 9.599.924.056,00		
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	90% Rp 2.362.521.002,00	92%	Rp 3.273.221.002,00	95%	Rp 3.399.132.052,00	95%	Rp9.034.874.056,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengelola perpustakaan yang dibina	%	0	10% Rp 58.500.000,00	15%	Rp205.000.000,00	20%	Rp245.000.000,00	20%	Rp508.500.000,00	Dispersip
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	0	1% Rp 6.550.000,00	2%	Rp25.000.000,00	2%	Rp25.000.000,00	2%	Rp56.550.000,00	Dispersip
	KEARSIPAN					Rp 20.000.000,00		Rp 115.000.000,00		Rp 130.000.000,00		Rp 265.000.000,00		
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola	%	0	80% Rp 20.000.000,00	83%	Rp95.000.000,00	85%	Rp100.000.000,00	85%	Rp215.000.000,00	Dispersip
2	24	3	Program	Persentase arsip yang	%	0	Rp	80%	Rp20.000.000,00	85%	Rp30.000.000,00	85%	Rp50.000.000,00	Dispersip



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2021	2022	2023	2023	2023						
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	dialih medikan				-									
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peraturan tingkat daerah yang telah dibuat		100%	Rp 25.000.000,00				100%	Rp25.000.000,00	Dispersip		
			URUSAN PILIHAN				Rp 57.870.261.136,00		Rp 60.685.541.335,00		Rp 62.430.553.027,00		Rp 45.762.953.195,00		
			KELAUTAN DAN PERIKANAN				Rp 5.063.877.305,00		Rp 7.115.377.047,00		Rp 7.488.787.839,00		Rp 7.488.787.839,00		
3	25	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 29.134.000,00	100%	Rp 133.500.000,00	100%	Rp 135.000.000,00	100%	Rp 135.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 2.966.924.738,00	100%	Rp 3.697.007.998,00	100%	Rp 3.697.007.998,00	100%	Rp 3.697.007.998,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	80%	Rp 16.556.000,00	80%	Rp 40.000.000,00	80%	Rp 50.000.000,00	80%	Rp 50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 343.602.567,00	100%	Rp 893.869.049,00	100%	Rp 1.376.779.841,00	100%	Rp 1.376.779.841,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan			16%	Rp 621.200.000,00	20%	Rp 850.000.000,00	24%	Rp 650.000.000,00	24%	Rp 650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah KUB Yang Naik Kelas	%	0	3 Kelompok	Rp 10.000.000,00	3 Kelompok	Rp 170.000.000,00	4 Kelompok	Rp 170.000.000,00	4 Kelompok	Rp 170.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan			10%	Rp 1.056.960.000,00	20%	Rp 736.000.000,00	25%	Rp 815.000.000,00	25%	Rp 815.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Pokdakan Yang Naik Kelas	%	0	2 Kelompok	Rp 7.500.000,00	2 Kelompok	Rp 155.000.000,00	3 Kelompok	Rp 155.000.000,00	3 Kelompok	Rp 155.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawaan sumber daya perikanan	%	0	75%	Rp -	75%	Rp 100.000.000,00	75%	Rp 100.000.000,00	75%	Rp 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan			95%	Rp 12.000.000,00	98%	Rp 250.000.000,00	100%	Rp 250.000.000,00	100%	Rp 250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Poklhasr Yang Naik Kelas	%	0	1 Kelompok	Rp -	2 Kelompok	Rp 90.000.000,00	2 Kelompok	Rp 90.000.000,00	2 Kelompok	Rp 90.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PARIWISATA												
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase pengembangan obyek wisata	%	0	12%	Rp 675.000.000,00	13%	Rp 516.000.000,00	13%	Rp 717.000.000,00	13%	Rp 717.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	PARIWISATA														
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang mendapatkan pelatihan	%	0	7%	Rp 50.000.000,00	19%	Rp 150.000.000,00	31%	Rp 150.000.000,00	31%	Rp 150.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	%	0	60%	Rp 280.000.000,00	67%	Rp 320.000.000,00	71%	Rp 320.000.000,00	71%	Rp 320.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
			PERTANIAN					Rp 25.771.758,567,00		Rp 27.153.181.156,00		Rp 27.422.190.856,00		Rp 27.422.190.856,00	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	%	0	3%	Rp 14.816.645.850,00	3%	Rp 13.667.036.050,00	3%	Rp 13.776.045.750,00	3%	Rp 13.776.045.750,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	%	0	2%		2%		2%		2%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	0	3%	Rp 10.681.862.717,00		Rp 12.762.895.106,00		Rp 12.772.895.106,00		Rp 12.772.895.106,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	0	2%								
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	0	5%	Rp 243.250.000,00	10%	Rp 663.250.000,00	15%	Rp 703.250.000,00	15%	Rp 703.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase produk hewan yang Aman Sehat dan Utuh dari hasil sampling pemeriksaan	%		85%		90%		95%		95%		
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas tanam yang terkendali bencana pertaniannya	%	0	3%	Rp 30.000.000,00	3%	Rp 30.000.000,00	3%	Rp 100.000.000,00	3%	Rp 100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang diawasi	%	0	1%	Rp -	2%	Rp 30.000.000,00	3%	Rp 70.000.000,00	3%	Rp 70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2021		2022		2023		2023			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		pelaksanaannya secara berkala												
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas		1%	Rp 243.250.000,00	2%	Rp 443.250.000,00	3%	Rp 443.250.000,00	3%	Rp 443.250.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PERDAGANGAN				Rp 15.815.507.473,00		Rp 15.905.658.632,00		Rp 16.667.599.832,00			
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	%	6%	Rp 9.915.672.791,00	7%	Rp 9.237.324.500,00	7%	Rp 9.358.324.500,00	7%	Rp 9.358.324.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisiensi harga antar waktu		100%	Rp 304.590.000,00	100%	Rp 170.000.000,00	100%	Rp 170.000.000,00	100%	Rp 170.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi eskpor	%	30%	Rp 325.030.000,00	30%	Rp 200.000.000,00	30%	Rp 200.000.000,00	30%	Rp 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	85%	Rp 232.500.000,00	90%	Rp 124.958.800,00	93%	Rp 255.000.000,00	93%	Rp 255.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	%	100%	Rp 7.500.000,00	100%	Rp3.000.000,00	100%	Rp3.000.000,00	100%	Rp3.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PERINDUSTRIAN				Rp 9.954.117.791,00		Rp 9.252.324.500,00		Rp 9.378.324.500,00		Rp 9.378.324.500,00	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	6%	Rp 9.915.672.791,00	7%	Rp 9.237.324.500,00	7%	Rp 9.358.324.500,00	7%	Rp 9.358.324.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha	%	100%	Rp 38.445.000,00	100%	Rp15.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pelaku industri yang terdaftar di SIINas		100%	Rp20.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	100%	Rp20.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021		2022		2023		2023						
					10	11	12	13	14	15	16	17					
	TRANSMIGRASI					Rp 260.000.000,00		Rp 273.000.000,00		Rp 286.650.000,00		Rp 286.650.000,00					
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN	%	0	100%	Rp260.000.000,00	100%	Rp273.000.000,00	100%	Rp286.650.000,00	100%	Rp286.650.000,00	DPMPTSP dan TENAGA KERJA		
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp 102.153.081.02,00		Rp 146.321.958.420,20		Rp 157.493.283.245,03		Rp 157.493.283.245,03			
			SEKRETARIAT DAERAH					Rp 49.708.844.700,00		Rp 88.601.798.988,00		Rp 91.151.324.323,00		Rp 91.151.324.323,00			
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu			100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah		
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai pedoman dan tepat waktu			100%		100%		100%		100%				
				Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan			100%		100%	Rp 2.725.000.000	100%	Rp43.764.298.988	100%	Rp43.764.298.988		100%	Rp43.764.298.988
				Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik			100%		100%		100%		100%			100%	
				Persentase rumusan kebijakan lingkup organisasi yang dilaksanakan			100%		100%		100%		100%			100%	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	0									Sekretariat Daerah		
				Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti			100%		100%	Rp 44.917.400.000	100%	Rp 42.564.500.000	100%	Rp 45.000.375.335		100%	Rp 45.000.375.335
				Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat													
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang			100%	Rp 2.066.444.700	100%	Rp 2.273.000.000	100%	Rp 2.386.650.000	100%	Rp 2.386.650.000	Sekretariat Daerah		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		ditetapkan													
		Persentase rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan													
		Persentase rumusan kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan	%	0											
		SEKRETARIAT DPRD				Rp 52.444.236.30 2,00		Rp 57.720.159.432,2 0		Rp 66.341.958.922,0 3		Rp 66.341.958.922,0 3			
4	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0%									
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0%									
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0%	80%	Rp 30.867.097.92 7,00	85%	Rp 33.953.807.719,7 0	90%	Rp 39.046.878.877,6 6	90%	Rp 39.046.878.877,6 6	Sekretariat DPRD
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0%									
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi	%	0%	80%	Rp 21.577.138.37 5,00	85%	Rp 23.766.351.712,5 0	90%	Rp 27.295.080.044,3 8	90%	Rp 27.295.080.044,3 8	Sekretariat DPRD
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp 403.739.597.8 90,00		Rp 500.677.873.292, 00		Rp 106.395.021.878, 83		Rp 138.657.381.735, 31		
			PERENCANAAN				Rp 10.087.116.20 6,00		Rp 12.303.841.106,0 0		Rp 12.881.461.106,0 0		Rp 13.484.942.808,0 0		
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	%	0	90%	Rp 6.821.501.206	90%	Rp 6.864.431.206	90%	Rp 7.397.501.206	90%	Rp 8.000.982.908	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang tercapai	%	0	62%	Rp 2.187.500.000	76%	Rp 2.187.500.000	90%	Rp 2.187.500.000	90%	Rp 2.187.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					2021	2022	2023	2023	2023							
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0	100%		100%	100%		100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPDP (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100%		100%		100%			100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Keselarasan RKPDP terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target) Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan			100%	Rp 1.078.115.000	100%	Rp 1.966.909.900	100%	Rp 2.011.459.900		100%		Rp 2.011.459.900
				Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPDP (Program, Kegiatan, Indikator, dan Target) Bidang Bidang Perekomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan			100%		100%		100%			100%		
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0	100%	1.930.000,000	100%	Rp1.285.000.000,00	Rp1.285.000.000,00	Rp1.285.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Inovasi Daerah		0	75%		80%		90%		90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
			KEUANGAN				Rp 380.516.638,078,00		Rp 479.850.997.638,00		Rp 79.732.226.224,83		Rp 89.732.226.225,31			
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG	Persentase sarana prasarana yang	%	0%	100%	Rp 44.559.424,05	100%	Rp 158.385.118,589,	100%	Rp 11.430.594.177,5	100%	Rp 11.430.594.178,0	BPKPD	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2021		2022		2023	2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17
1	2			3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhi				4,00			00	2		0	
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang tersusun dengan baik											
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase OPD yang melaksanakan petunjuk teknis administrasi keuangan dengan baik 2. Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan P-APBD 3. Persentase penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu	%	0%	100%	Rp 332.159.080,974,00	100%	Rp 309.676.179.049,00	100%	Rp 67.846.655.053,33	100%	Rp 67.846.655.053,33	BPKPD
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib pelaporan pengelolaan barang aset daerah	%	0%	100%	Rp 2.404.459.830,00	100%	Rp 493.700.000,00	100%	Rp 178.126.697,39	100%	Rp 178.126.697,39	BPKPD
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase peningkatan penetapan wajib pajak 2. Persentase objek pajak dan retribusi daerah yang tertagih	%	0%	1%	Rp 1.393.673.220,00	2%	Rp 1.296.000.000,00	3%	Rp 276.850.296,59	3%	Rp 276.850.296,59	BPKPD
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				100%		100%		100%		100%		BPKPD
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	0%				Rp 10.000.000.000,00			100%	Rp 10.000.000.000,00	BPKPD
			KEPEGAWAIAN					Rp 9.061.203.606,00		Rp 7.190.334.548,00		Rp 10.431.334.548,00		Rp 26.682.872.702,00	
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%	Rp 4.986.563.606,00	100%	Rp 5.857.634.548,00	100%	Rp 7.081.334.548,00	100%	Rp 17.925.532.702,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Persentase sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%		100%		100%		100%		Manusia		
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	%	0	1%		1%		1%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Persentase ASN yang tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	%	0	99%	Rp 4.074.640.000,00	99%	Rp 1.332.700.000,00	99%	Rp 3.350.000.000,00	99%	Rp 8.757.340.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%	0	95%		97%		100%		100%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp 4.074.640.000,00		Rp 1.332.700.000,00		Rp 3.350.000.000,00		Rp 8.757.340.000,00			
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang bersertifikat pengembangan kompetensi sesuai jabatannya	%	0	65%	Rp 4.074.640.000,00	67%	Rp 1.332.700.000,00	69%	Rp 3.350.000.000,00	69%	Rp 8.757.340.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 4.998.523.326,00		Rp 9.092.963.900,00		Rp 14.201.169.680,00		Rp 14.201.169.680,00			
			INSPEKTORAT			Rp 4.998.523.326,00		Rp 9.092.963.900,00		Rp 14.201.169.680,00		Rp 14.201.169.680,00			
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kesekretariatan yang Terpenuhi	%	0	87%	Rp 2.533.854.826,00	88%	Rp 3.975.366.900,00	90%	Rp 5.591.729.680,00	90%	Rp 5.591.729.680,00	Inspektorat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK	%	0	12%	Rp 874.070.000,00	11%	Rp 1.254.510.000,00	10%	Rp 2.420.300.000,00	10%	Rp 2.420.300.000,00	Inspektorat
				Persentase pelanggaran pegawai	%		0,18%	Rp 351.745.000,00	0%	Rp 356.800.000,00	0%	Rp 550.000.000,00	0%	Rp 550.000.000,00	Inspektorat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	%	0	75%	Rp 1.238.853.500,00	80%	Rp 3.506.287.000,00	85%	Rp 5.639.140.000,00	85%	Rp 5.639.140.000,00	Inspektorat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2021		2022		2023	2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17
1	2			3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			UNSUR KEWILAYAHAN					Rp 55.230.642.723,00		Rp 55.485.316.095,00		Rp 49.813.205.683,00		Rp 155.275.834.998,00	
			KECAMATAN					Rp 55.230.642.723,00		Rp 55.485.316.095,00		Rp 49.813.205.683,00		Rp 155.275.834.998,00	
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang sesuai SOP	%	100%		Rp 1.076.936.250,00	100%	Rp 1.078.436.250,00	100%	Rp 1.080.736.250,00	100%	Rp 5.374.584.750,00	Kecamatan Pamekasan
3	8	10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase kelurahan yang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dengan kualitas baik	%	100%		Rp 9.728.700.000,00	95%	Rp 9.728.700.000,00	100%	Rp 9.728.700.000,00	100%	Rp 38.914.800.000,00	Kecamatan Pamekasan
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			75%	Rp 31.334.000	88%	Rp 60.000.000	95%	Rp 75.000.000	95%	Rp 166.334.000	Kecamatan pamekasan
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik			83.33%	Rp 3.260.123.296	92%	Rp 5.159.362.306	100%	Rp 5.160.362.310	100%	Rp 13.579.847.912	Kecamatan pamekasan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur			80%	Rp 1.877.486.205	90%	Rp 2.009.327.353	100%	Rp 2.040.400.000	100%	Rp 5.927.213.558	Kecamatan pamekasan
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi			85%	Rp 366.933.250	95%	Rp 754.578.300	100%	Rp 1.164.147.566	100%	Rp 2.285.659.116	Kecamatan pamekasan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0%	100%	Rp 57.306.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	100%	Rp 267.306.000,00	Kecamatan Pamekasan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	0%	88%	Rp 13.318.463.223,00	95%	Rp 8.384.392.373,00	100%	Rp 1.099.000.000,00	100%	Rp 22.801.855.596,00	Kecamatan Pamekasan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0%	85%	Rp 103.340.000,00	90%	Rp 145.000.000,00	100%	Rp 125.000.000,00	100%	Rp 373.340.000,00	Kecamatan Pamekasan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0%	85%	Rp 15.000.000,00	90%	Rp 59.999.900,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 134.999.900,00	Kecamatan Pamekasan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan	Persentase desa yang menyelenggarakan	%	0%	80%	Rp 40.000.000,00	90%	Rp 65.000.000,00	100%	Rp 65.000.000,00	100%	Rp 170.000.000,00	Kecamatan Pamekasan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2021		2022		2023		2023		
							10	11	12	13	14	15	16		17
1	2			3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pemerintahan desa	pemerintahan desa dengan baik											
3	8	9	Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi Kecamatan	%	100%	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 55.000.000,00	100%	Rp 65.000.000,00	100%	Rp 337.910.000,00	Kecamatan Pademawu
3	8	10	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Prosentase Kelurahan Yang Mela ksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan Kualitas Baik	%	100%	90%	Rp 5.018.000.000,00	95%	Rp 5.118.000.000,00	100%	Rp 4.968.000.000,00	100%	Rp 19.922.000.000,00	Kecamatan Pademawu
X	XX	1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	75%	Rp 28.249.000,00	88%	Rp 44.000.000,00	100%	Rp 65.000.000,00	100%	Rp 137.249.000,00	Kecamatan Pademawu
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	83%	Rp 2.026.622.046,00	92%	Rp 2.888.322.046,00	100%	Rp 2.893.622.046,00	100%	Rp 7.808.566.138,00	Kecamatan Pademawu
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	80%	Rp 23.310.000,00	90%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 36.000.000,00	100%	Rp 79.310.000,00	Kecamatan Pademawu
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 820.941.256,00	100%	Rp 924.699.592,00	100%	Rp 1.158.071.102,00	100%	Rp 2.903.711.950,00	Kecamatan Pademawu
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp 17.000.000,00	100%	Rp 75.000.000,00	100%	Rp 70.000.000,00	100%	Rp 70.000.000,00	Kecamatan Pademawu
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	0	86,36%	Rp 3.095.194.794,00	95%	Rp 120.000.000,00	100%	Rp 115.000.000,00	100%	Rp 115.000.000,00	Kecamatan Pademawu
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	100%	Rp 121.950.000,00	100%	Rp 115.000.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	100%	Rp 105.000.000,00	Kecamatan Pademawu
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0	100%	Rp 8.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp25.000.000,00	100%	Rp25.000.000,00	Kecamatan Pademawu
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0	80%	Rp 38.000.000,00	90%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 95.000.000,00	100%	Rp 95.000.000,00	Kecamatan Pademawu
X	XX	1	Program Penunjang	Persentase	n/a	0	84%	Rp	86%	Rp	88%	Rp	88%	Rp	Kecamatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				1.462.454.250		1.987.409.702		2.027.030.187		2.027.030.187	Larangan		
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	n/a	0	86%		89%		92%		92%		Kecamatan Larangan		
		Prosentase Peningkatan Kopetensi Aparatur	n/a	0	84%		86%		88%		88%		Kecamatan Larangan		
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	n/a	0	84%		86%		88%		86%		Kecamatan Larangan		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	n/a	0	90%	Rp 15.000.000,00	91%	Rp 15.000.000,00	92%	Rp 25.000.000,00	92%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Larangan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	n/a	0	80%	Rp -	83%	Rp 25.000.000,00	85%	Rp 55.000.000,00	100	Rp 55.000.000,00	Kecamatan Larangan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	n/a	0	80%	Rp 40.000.000,00	83%	Rp 50.000.000,00	85%	Rp 55.000.000,00	85%	Rp 55.000.000,00	Kecamatan Larangan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	n/a	0	80%	Rp -	83%	Rp -	85%	Rp 25.000.000,00	85%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Larangan
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	n/a	0	85%	Rp 42.499.950,00	90%	Rp 15.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	Kecamatan Larangan
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 72.229.150	100%	Rp 149.170.000	100%	Rp 156.100.000	100%	Rp 377.499.150	Kecamatan Galis
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 1.379.109.792	100%	Rp 1.714.130.881	100%	Rp 1.748.923.598	100%	Rp 4.842.164.271	Kecamatan Galis
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	85%	Rp 144.748.000	90%	Rp 161.975.237	100%	Rp 165.744.576	100%	Rp 472.467.813	Kecamatan Galis
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	80%	Rp 11.332.500	85%	Rp 24.985.000	95%	Rp 45.000.000	95%	Rp 81.317.500	Kecamatan Galis



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp -	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Galis
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	0	85%	Rp 20.000.000,00	90%	Rp 32.500.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Galis
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	100%	Rp 45.300.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	100%	Rp 60.000.000,00	Kecamatan Galis
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0	100%	Rp 11.727.500,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 17.500.000,00	100%	Rp 17.500.000,00	Kecamatan Galis
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0	80%	Rp 24.403.500,00	90%	Rp 22.500.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Galis
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	-	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 27.000.000	100%	Rp 27.000.000	100%	Rp 69.000.000	Kecamatan Tlanakan
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	-	96%	Rp 1.607.889.200	98%	Rp 1.972.545.260	100%	Rp 2.007.357.523	100%	Rp 5.587.791.983	Kecamatan Tlanakan
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	-	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 60.000.000	Kecamatan Tlanakan
				Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	-	100%	Rp 56.300.000	100%	Rp 78.700.000	100%	Rp 102.700.000	100%	Rp 237.700.000	Kecamatan Tlanakan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0%	96%	Rp 35.000.000,00	98%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 38.000.000,00	100%	Rp 103.000.000,00	Kecamatan Tlanakan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	0%	96%	Rp 5.000.000,00	98%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 85.000.000,00	Kecamatan Tlanakan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase pengaduan/gangguan	%	0%	96%	Rp 80.500.000,00	98%	Rp 106.000.000,00	100%	Rp 106.000.000,00	100%	Rp 292.500.000,00	Kecamatan Tlanakan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2021		2022		2023		2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Ketertiban Umum	di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti											
7	1	5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0%	96%	Rp 5.000.000,00	98%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Tlanakan
7	1	6		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0%	96%	Rp 27.600.000,00	98%	Rp 24.000.000,00	100%	Rp 47.100.000,00	100%	Rp 98.700.000,00	Kecamatan Tlanakan
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 148.106.300,00	100%	Rp 172.000.000,00	100%	Rp 240.000.000,00	100%	Rp 240.000.000,00	Kecamatan Proppo
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 1.617.333.083,00	100%	Rp 2.038.766.523,00	100%	Rp 2.053.714.849,00	100%	Rp 2.053.714.849,00	Kecamatan Proppo
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	85%	Rp 122.550.000,00	90%	Rp 156.200.000,00	100%	Rp 183.600.000,00	100%	Rp 183.600.000,00	Kecamatan Proppo
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	80%	Rp 44.540.950,00	85%	Rp 20.000.000,00	95%	Rp 25.000.000,00	95%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Proppo
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0%	100%	Rp 4.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp35.000.000,00	100%	Rp35.000.000,00	Kecamatan Proppo
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	0%	85%	Rp 13.000.000,00	90%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Proppo
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0%	100%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Proppo
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0%	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Proppo
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0%	80%	Rp 10.000.000,00	90%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Proppo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
3	8	9	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%		0%		0%		0%		0%	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Palengaan
				Prosentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	%		0%		0%		0%		0%	Rp 1.572.966.540,00	Kecamatan Palengaan
				Prosentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		0%		0%		0%		0%	Rp 250.000.000,00	Kecamatan Palengaan
				Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%		0%		0%		0%		0%	Rp 112.997.357,00	Kecamatan Palengaan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan.	%	0	100%	Rp 9.450.000,00	100%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	Kecamatan Palengaan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	0	83,34 %	Rp 13.000.000,00	91,67 %	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Palengaan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan atas gangguan diwilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Palengaan
7	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang perencanaan dan laporan kerjanya memiliki kualitas baik	%	0	75%	Rp 45.000.000,00	91,67 %	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Palengaan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp 12.370.000,00		Rp 30.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	100%		Kecamatan Pegantenan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	0	93%	Rp 25.000.000,00	98%	Rp 25.000.000,00		Rp 30.000.000,00	100%		Kecamatan Pegantenan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase pengaduan/gangguan	%	0	100%	Rp 49.500.000,00		Rp 60.841.494,00	100%	Rp 80.000.000,00	100%	Rp 220.000.000,00	Kecamatan Pegantenan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2021		2022		2023		2023			
							10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Ketertiban Umum	di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti											
7	1	5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0	Rp 16.000.000,00	100%	Rp 12.000.000,00		Rp 20.000.000,00	100%	Rp 32.000.000,00	Kecamatan Pegantenan	
7	1	6		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0	Rp 9.088.000,00	75%	Rp 36.000.000,00	90%	Rp 45.000.000,00	90%	Rp 175.000.000,00	Kecamatan Pegantenan	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%		85%	Rp 50.669.500,00	90%	Rp 141.354.050,00	100%	Rp 180.508.571,00	100%	Rp 180.508.571,00	Kecamatan Pakong
					Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%		100%	Rp 1.283.503.174,00	100%	Rp 1.634.280.052,00	100%	Rp 1.660.785.714,00	100%	Rp 1.660.785.714,00	Kecamatan Pakong
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%		80%	Rp 21.826.000,00	90%	Rp 10.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Pakong
					Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%		85%	Rp 6.096.500,00	90%	Rp 60.000.000,00	95%	Rp 20.000.000,00	95%	Rp 20.000.000,00	Kecamatan Pakong
7	1	2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	90%	Rp 4.500.000,00	95%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Pakong
7	1	3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat		0	90%	Rp 12.000.000,00	95%	Rp 38.740.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 35.000.000,00	Kecamatan Pakong
7	1	4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/Gangguan Wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	%	0	85%	Rp 50.000.000,00	90%	Rp 93.763.250,00	100%	Rp 85.000.000,00	100%	Rp 85.000.000,00	Kecamatan Pakong
7	1	5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan Baik		0	80%	Rp -	90%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Pakong
7	1	6		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa Dengan Baik	%	0	85%	Rp 11.770.000,00	90%	Rp 35.000.000,00	100%	Rp 80.000.000,00	100%	Rp 80.000.000,00	Kecamatan Pakong



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	95%	Rp 1.502.737.072,00	95%	Rp 2.141.653.202,00	99%	Rp 2.251.439.513,00	99%	Rp 2.251.439.513,00	Kecamatan Kadur
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik											Kecamatan Kadur
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur											Kecamatan Kadur
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas											Kecamatan Kadur
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standart pelayanan	%	0	0%	Rp -	96%	Rp 7.145.000,00	99%	Rp 11.000.000,00	99%	Rp 11.000.000,00	Kecamatan Kadur
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	0	96%	Rp 11.801.000,00	97%	Rp 11.560.000,00	99%	Rp 17.000.000,00	99%	Rp 17.000.000,00	Kecamatan Kadur
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	96%	Rp 37.376.000,00	97%	Rp 74.026.400,00	99%	Rp 41.000.000,00	99%	Rp 41.000.000,00	Kecamatan Kadur
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	%	0	0%	Rp -	97%	Rp 8.272.000,00	99%	Rp 13.000.000,00	99%	Rp 13.000.000,00	Kecamatan Kadur
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang peyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik	%	0	97%	Rp 9.793.750,00	97%	Rp 11.100.000,00	99%	Rp 13.000.000,00	99%	Rp 13.000.000,00	Kecamatan Kadur
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp 26.600.000,00	100%	Rp 24.000.000,00	100%	Rp 37.500.000,00	100%	Rp 37.500.000,00	Kecamatan Waru
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa	%	0	100%	Rp 10.915.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 24.000.000,00	100%	Rp24.000.000,00	Kecamatan Waru
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI	Persentase pengaduan/gangguan	%	0	100%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 160.600.000,00	100%	Rp 105.600.000,00	100%	Rp105.600.000,00	Kecamatan Waru



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti													
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	100%	Rp 5.430.000,00	100%	Rp 22.500.000,00	100%	Rp 23.000.000,00	100%	Rp23.000.000,00	Kecamatan Waru
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan yang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik		0	100%	Rp 25.310.000,00	100%	Rp 46.451.522,00	100%	Rp 47.500.000,00	100%	Rp47.500.000,00	Kecamatan Waru
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 31.991.000,00	100%	Rp 96.654.896,00	100%	Rp 181.000.000,00	100%	Rp 181.000.000,00	Kecamatan batumarmar
				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 1.545.507.856,00	100%	Rp 1.947.869.526,00	100%	Rp 1.953.403.002,00	100%	Rp 1.953.403.002,00	Kecamatan batumarmar
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%	Rp 18.200.000,00	100%	Rp 29.145.104,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	Kecamatan batumarmar
				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 10.031.500,00	100%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 45.000.000,00	100%	Rp 45.000.000,00	Kecamatan batumarmar
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%	0	100%	Rp 5.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Batumarmar
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%	0	100%	Rp 25.020.000,00	100%	Rp 27.000.000,00	100%	Rp 27.000.000,00	100%	Rp 27.000.000,00	Kecamatan Batumarmar
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	0	100%	Rp 62.500.000,00	100%	Rp 95.000.000,00	100%	Rp 95.000.000,00	100%	Rp 95.000.000,00	Kecamatan Batumarmar
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	0	100%	Rp 2.000.000,00	100%	Rp 15.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	100%	Rp 25.000.000,00	Kecamatan Batumarmar
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%	0	100%	Rp 15.000.000,00	100%	Rp 34.000.000,00	100%	Rp 34.000.000,00	100%	Rp 34.000.000,00	Kecamatan Batumarmar



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021		2022		2023		2023				
					10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 425.475.000,00	100%	Rp 677.691.000,00	100%	Rp 892.691.000,00	100%	Rp 1.995.857.000,00	Kecamatan Pasean
				• Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	0	100%	Rp 1.426.097.876,00	100%	Rp 1.448.897.876,00	100%	Rp 1.448.897.876,00	100%	Rp 4.323.893.628,00	Kecamatan Pasean
				• Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%	Rp 20.000.000,00	100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 100.000.000,00	Kecamatan Pasean
				• Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 50.570.000,00	100%	Rp 62.070.000,00	100%	Rp 81.070.000,00	100%	Rp 193.710.000,00	Kecamatan Pasean
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	%		100%	Rp 26.000.000,00	100%	Rp 32.000.000,00	100%	Rp 58.000.000,00	100%	Rp 58.000.000,00	Kecamatan Pasean
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	%		100%	Rp 13.423.500,00	100%	Rp 26.000.000,00	100%	Rp 27.500.000,00	100%	Rp 27.500.000,00	Kecamatan Pasean
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	%		95%	Rp 49.084.000,00	100%	Rp 72.000.000,00	100%	Rp 52.000.000,00	100%	Rp 52.000.000,00	Kecamatan Pasean
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%		100%	Rp 18.000.000,00	100%	Rp 22.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	100%	Rp 40.000.000,00	Kecamatan Pasean
7	1	6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	%		100%	Rp 10.245.000,00	100%	Rp 28.000.000,00	100%	Rp 51.000.000,00	100%	Rp 89.245.000,00	Kecamatan Pasean
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					Rp 4.585.131.119,00		Rp 6.628.982.711,00		Rp 12.301.335.018,00		Rp 12.301.335.018,00	
			KESATUAN BANGSA & POLITIK					Rp 4.585.131.119,00		Rp 6.628.982.711,00		Rp 12.301.335.018,00		Rp 12.301.335.018,00	
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	%	0	100%	Rp 357.269.565,00	100%	Rp 364.637.835,00	100%	Rp 1.080.000.000,00	100%	Rp 1.080.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase laporan keuangan dengan	%	0	100%	Rp 2.306.402.536,00	100%	Rp 2.846.835.976,00	100%	Rp 2.846.836.000,00	100%	Rp 2.846.836.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		2023		
					10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KABUPATEN/KOTA	kualitas baik				00							
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	0	100%	Rp 200.000.000,00	100%	Rp 200.000.000,00	100%	Rp 268.000.000,00	100%	Rp 268.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	0	100%	Rp 6.960.000,00	100%	Rp 3.010.000,00	100%	Rp 42.000.000,00	100%	Rp 42.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2											
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase peningkatan cakupan wawasan kebangsaan	%	0	100%	Rp -	100%	Rp 450.000.000,00	100%	Rp 850.000.000,00	100%	Rp 850.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3											
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	0	100%	Rp 1.464.499.018,00	100%	Rp 1.614.498.900,00	100%	Rp 5.564.499.018,00	100%	Rp 5.564.499.018,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/ Parpol/ LSM yang aktif	%	0	100%	Rp 150.000.000,00	100%	Rp 250.000.000,00	100%	Rp300.000.000,00	100%	Rp300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5											
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	0	100%	Rp -	100%	Rp 200.000.000,00	100%	Rp300.000.000,00	100%	Rp300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6											
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan dini potensi konflik SARA	%	0	100%	Rp 100.000.000,00	100%	Rp 700.000.000,00	100%	Rp1.050.000.000,00	100%	Rp1.050.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL					Rp 2.246.185.136.602		Rp 1.959.955.164.391,14		Rp 2.057.952.922.610,7		Rp 2.057.952.922.610,7	



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2019-2024 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pamekasan diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1.



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Realisasi		Target Tahun ke (Sebelum Perubahan)		Target Tahun ke (Setelah Perubahan)		
		2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,94	66,26	65,11	65,56	67.18	67.94	68.35
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	-2,54	6	5,22	3,02	4,02	5,02
3	Gini Ratio	0,34	0,32	0,25	0,3	0.30	0.28	0.26
4	Persentase Penduduk Miskin	13,95	14,6	10,97	12,98	12,21	11,54	10,97
5	Indeks Reformasi Birokrasi	60,06	-	-	66	71	76	81
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	-	-	-	3,55	3,7	3,85
7	Indeks Modal Sosial	-	-	-	-	82,58	83,98	85,26
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,05	86,17	87,12	87,84	88,56	89,28	90
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,26	3,49	-	2,65	2,65	2,55	2,45



8.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikangambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan denganmengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskanberdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakankeberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaituaspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan



indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pamekasan tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,04 (2017)	5.15	5.22	5.45	5.85	6	6
1.1.2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,92 (2018)	2,92 (2018)	2.85	2.5	2.25	2	2
1.1.3	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)	0,33 (2017)	0.31	0.3	0.29	0.27	0.25	0.25
1.1.4	Indeks Reformasi Birokrasi	55 (2018)	61	66	71	76	81	81
1.1.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,26 (2018)	60,26 - 60,96	60,96 - 61,66	67,10 - 68,38	67,63 - 68,91	68,91 - 70,20	68,91 - 70,20
1.1.6	Indek Modal Sosial	n.a	n.a	n.a	82.58	83.98	85.26	85.26
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,93 (2017)	65.11	65.56	66.78	67.54	68.15	68.15
1.2.2	Persentase Penduduk Miskin	14,47 (2018)	13.67	12.98	12.21	11.54	10.97	10.97
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Pendidikan								
Sebelum								
2.1.1	Indeks Pendidikan	0,59 (2017)	0.6	0.62	0.65	0.7	0.72	0.72
Setelah								
2.1.1.1	Indeks Pendidikan	-	-	0.6	0.65	0.7	0.72	0.72
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun	-	-	-	90%	94.50%	99.23%	99.23%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang berpartisipasi dalam PAUD							
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	-	98%	99%	100%	100%
2.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	-	-	-	98%	99%	100%	100%
2.1.1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	-	2.57%	2.70%	2.83%	2.83%
2.1.1.6	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	-	-	-	90	95	99	99
2.1.1.7	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	14835	14835	15577	15577
2.1.1.8	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	27182	28541	29968	29968
2.1.1.9	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	-	-	-	1978	2077	2181	2181
2.1.1.10	Jumlah pendidik pada PAUD	-	-	-	4664	4897	5142	5142
2.1.1.11	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang	-	-	-	2709	2844	2987	2987



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini							
2.1.1.12	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	-	-	-	658	691	725	725
2.1.1.13	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	-	-	-	SD : 412	SD : 412	SD : 412	SD : 412
					SMP : 34	SMP : 34	SMP : 34	SMP : 34
2.1.1.14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	50,286	50,588	50,891	50,891
2.1.1.15	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	8,928	8,973	9,018	9,018
2.1.1.16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	57,265	57,609	57,954	57,954



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.1.17	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	21,399	21,506	21,614	21,614
2.1.1.18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	4,730	4967	5215	5215
2.1.1.19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	2,379	2498	2623	2623
2.1.1.20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	4,835	5077	5331	5331
2.1.1.21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	1961	2059	2162	2162
2.1.1.22	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	473	497	521	521
2.1.1.23	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	366	384	404	404
2.1.1.24	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	-	-	-	473	497	521	521
2.1.1.25	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	-	-	-	366	384	404	404
2.1.1.26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah	-	-	-	4835	4835	4835	4835
					2491 guru	2615 guru	2745 guru	2745 guru



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik				sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi	sertifikasi
2.1.1.27	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	-	-	1,961	2059	2162	2162
2.1.1.28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	-	-	473	497	521	521
2.1.1.29	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	-	-	183	192	202	202
2.1.1.30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	236	248	260	260
2.1.1.31	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-	-	-	91	96	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.1.32	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	-	-	-	21	22	23	23
2.1.1.33	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	-	2 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	4 lembaga
2.1.1.34	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	-	21 lembaga	22 lembaga	23 lembaga	23 lembaga
2.1.1.35	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	-	-	-	83	87	92	92
2.1.1.36	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	-	-	-	83	87	92	92
2.1.1.37	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	-	-	-	83	87	92	92
2.1.1.38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	-	-	34	36	37	37
2.1.1.39	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	-	-	-	34	36	37	37



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.1.40	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	-	-	12420	13041	13693	13693
Kesehatan								
Sebelum								
2.1.2	Indeks Kesehatan	0,72 (2017)	0.74	0.76	0.75	0.79	0.8	0.8
2.1.2.1	Angka Kesakitan (Morbiditas)	20.5	19.5	18.5	-	-	-	-
2.1.2.2	Angka kematian Ibu	80	80	79	-	-	-	-
2.1.2.3	Angka kematian bayi	22	22	21	-	-	-	-
2.1.2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	55%	60%	65%	-	-	-	-
2.1.2.5	Prosentase tenaga kesehatan lulus uji kompetensi berijin	85	85	88	-	-	-	-
Setelah								
2.1.2	Indeks Kesehatan			0.73	0.75	0.79	0.8	0.8
2.1.2.7	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	-	-	-	699	721	742	742
2.1.2.8	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	-	-	-	100	100	100	100
2.1.2.9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-	-	-	75	80	80	80
2.1.2.10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-	-	-	100	100	100	100
2.1.2.11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	-	100	100	100	100
2.1.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai	-	-	-	100	100	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	standar							
2.1.2.13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	83	83	83	83
2.1.2.14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	45	50	55	55
2.1.2.15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	-	75	75	75	75
2.1.2.16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	45	50	55	55
2.1.2.17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	50	55	60	60
2.1.2.18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	-	70	75	80	80
2.1.2.19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-	-	-	80	85	85	85
2.1.2.20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	-	70	75	75	75
2.1.2.21	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai	-	-	-	6	6	6	6



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	standar							
2.1.2.22	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	-	-	-	6	6	6	6
2.1.2.23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	21	21	21	21
2.1.2.24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	-	-	-	90	90	90	90
2.1.2.25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	13947	13947	13947	13947
2.1.2.26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	13313	13313	13313	13313
2.1.2.28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.29	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	12670	13199	13199	13199
2.1.2.30	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.31	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	63516	63516	63516	63516
2.1.2.32	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai	-	-	-	88	90	90	90



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	standar							
2.1.2.33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	-	-	3,285	3,285	3,285	3,285
2.1.2.34	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	-	-	-	10	10	10	10
2.1.2.35	Jumlah Penurunan kematian ibu (AKI) per tahun	-	-	-	25	24	23	22
2.1.2.36	Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	-	-	-	100	100	100	100
2.1.2.37	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	-	-	21.1	18.4	16	16
2.1.2.38	Prevelensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	-	-	-	7.8	7.5	7.3	7.3
2.1.2.39	Insidensi TB per 100.000 penduduk	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.40	Insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	-	-	-	70	75	75	75
2.1.2.41	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.42	Treatment coverage pada pasien TB	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.43	Presentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	-	-	-	93.5	94	94.5	94.5
2.1.2.44	Presentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.45	Presentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	-	-	-	10.5	11	11.5	11.5



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.2.46	Jumlah puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	-	-	-	25	25	25	25
2.1.2.47	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	-	-	-	40	45	50	50
2.1.2.48	Presentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	-	-	-	88	90	90	90
2.1.2.49	Presentase sarana produksi UMOT	-	-	-	88	90	90	90
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Sebelum								
2.1.3.1	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	82.8	83.5	84.2	-	-	-	-
2.1.3.2	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	14.69	15.7	16.75	-	-	-	-
Setelah								
2.1.3.3	Indeks Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	75	80	82.5	82.5
2.1.3.4	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	336,110	-	-	336,110	350	385,881	385,881
2.1.3.5	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	1.632	-	-	1,640	1,645	1,650	1,650
2.1.3.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	77,33 (2016)	-	-	81.16	82.34	83.17	83.17
2.1.3.7	Prosentase rencana pembangunan sesuai dengan RTRW	70	-	-	83	85	90	90



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.3.8	Rasio permukiman layak huni	-	-	-	70	75	80	80
2.1.3.9	Indeks Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	75	80	82.5	82.5
2.1.3.10	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	-	-	-	336,110	350	385,881	385,881
2.1.3.11	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	-	-	-	1,640	1,645	1,650	1,650
2.1.3.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	81.16	82.34	83.17	83.17
2.1.3.13	Prosentase rencana pembangunan sesuai dengan RTRW	-	-	-	83	85	90	90
2.1.3.14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	-	-	3.55	3.7	3.85	3.85
2.1.3.15	Rasio permukiman layak huni	-	-	-	70	75	80	80
2.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
Sebelum								
2.1.5.1	% Penanganan Gangguan Trantibum	75	77	80	-	-	-	-
2.1.5.2	% Konflik Sosial yang Tertangani.	85	86	88	-	-	-	-
Setelah								
2.1.5.3	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum			82.5	83	86	90	90
2.1.5.4	Jumlah Pelanggaran	-	-	-	200	175	150	150
2.1.5.5	Jumlah Pengaduan	-	-	-	100	75	50	50
2.1.5.6	Jumlah Keseluruhan	-	-	-	300	250	200	200
2.1.5.7	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-	-	-	189	100	100	100
2.1.5.8	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	-	15	15	15	15
2.1.5.9	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki	-	-	-	n.a	2	2	2



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kualitas sebagai PPNS							
2.1.5.10	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	-	-	-	ada	ada	ada	ada
2.1.5.11	Tersedianya sarana prasarana minimal	-	-	-	ada	ada	ada	ada
2.1.5.12	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	-	n.a	n.a	18 orang	18 orang
2.1.5.13	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	-	-	n.a	2 jenis	1 jenis	1 jenis
2.1.5.14	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	n.a	n.a	2 orang	2 orang
2.1.5.15	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	-	-	6	6	6	6
2.1.5.16	presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2.1.5.17	Indeks Modal Sosial	-	-	-	82.58	83.98	85.26	85.26
2.1.5.18	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-	-	-	83	86	90	90
2.1.5.19	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	-	-	100	100	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Target Capaian Setiap Tahun						
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.6	Sosial							
Sebelum								
2.1.6.1	Prosentase penurunan jumlah PPKS	0	1.5	1.75	-	-	-	-
Setelah								
2.1.6.1	Persentase Penurunan PPKS	-	-	1.81	1.9	2	2.1	2.1
2.1.6.2	Indeks Risiko Bencana	-	-	160.45	105	100	100	100
2.1.6.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-	100	100	100	100
2.1.6.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100	100	100	100
2.1.6.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100	100	100	100
2.1.6.6	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal				100%	100%	100%	100%
2.1.6.7	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				100%	100%	100%	100%
2.1.6.8	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/lega				100%	100%	100%	100%
2.1.6.9	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai				100%	100%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dinyatakan sah/legal							
2.1.6.10	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan				100%	100%	100%	100%
2.1.6.11	Persentase warga negara yang ikut pelatihan				100%	100%	100%	100%
2.1.6.12	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana				100%	100%	100%	100%
2.1.6.13	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan				100%	100%	100%	100%
2.1.6.14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB				100%	100%	100%	100%
2.1.6.15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana				100%	100%	100%	100%
2.1.6.16	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana				100%	100%	100%	100%
2.1.6.17	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				100%	100%	100%	100%
2.1.6.18	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial				70	80	90	90



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
2.2.1	Ketenagakerjaan							
Sebelum								
2.2.1.1	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja	95.921	96.024	96.071				
Setelah								
2.2.1.2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)			96.51	97.48	98.45	99.43	99.43
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Sebelum								
2.2,2,1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,68 (2017)	87.12	87.84	88.56	89.28	90	90
2.2,2,2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,81 (2017)	57.17	57.86	58.54	59.22	59.9	59.9
Setelah								
2.2,2,2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			53.01	58.54	59.22	59.9	59.9
2.2,2,3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				0.80%	0.90%	0.95%	0.95%
2.2,2,4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				0.01%	0.01%	0.17%	0.17%
2.2,2,5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif				4	3.8	3.5	3.5
2.2,2,6	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG				35	35	35	35
2.2,2,7	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di				35	35	35	35



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tingkat kabupaten/kota							
2.2,2,8	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak				3	3	3	3
2.2,2,9	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal				1	1	1	1
2.2,2,10	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani				100%	100%	100%	100%
2.2,2,11	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				1	1	1	1
2.2,2,12	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)				1	1	1	1
2.2,2,13	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan				5	5	5	5
2.2,2,14	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih				3	3	3	3
2.2,2,15	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang				1	1	1	1



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mendapat pelatihan							
2.2,2,16	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota				1	1	1	1
2.2,2,17	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi				1	1	1	1
2.2,2,18	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi				1	1	1	1
2.2,2,19	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani				100%	100%	100%	100%
2.2,2,20	Indeks pemberdayaan gender (IDG)				58.54	59.22	59.9	59.9
2.2,2,21	indeks perlindungan anak (IPA)				56.2	58.2	60.2	60.2
2.2,2,22	presentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif				100%	100%	100%	100%
2.2,2,23	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan				-	3 pilar	5 pilar	5 pilar



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2,2,24	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun				113	115	118	118
2.2,2,25	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				26	25	24	24
2.2,2,26	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)				80.00%	82.50%	85.00%	85.00%
2.2,2,27	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK				570	579	580	580
2.2,2,28	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP				100%	100%	100%	100%
2.2,2,29	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				79.99%	83.25%	87.00%	87.00%
2.2,2,30	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif				38	38	38	38
2.2,2,31	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan				80.00%	82.50%	85.50%	85.50%
2.2,2,32	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah				94	94	94	94
2.2,2,33	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)				70.50%	72.50%	74.50%	74.50%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2,2,34	indeks pembangunan keluarga (iBangga)				57	60	63	63
2.2.3	Pangan							
Sebelum								
2.2.3.1	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	80 (2017)	81.03	82				
2.2.3.2	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81 (2017)	82.03	83				
Setelah								
2.2.3.3	Indeks Pengeluaran			0.3	0.32	0.33	0.35	0.35
2.2.3.4	Ketersediaan energi dan protein perkapita				2965,28 dan 66,75	2973,28 dan 71,16	2986,13 dan 76,24	2986,13 dan 76,24
2.2.3.5	Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan (%)				30	35	40	40
2.2.3.6	Ketersediaan Pangan Utama (%)				388.68	389.19	389.68	389.68
2.2.3.7	Pertanahan							
2.2.3.8	Jumlah Sertipikat Tanah yang dikeluarkan				40,112	44,321	49,356	49,356
2.2.4	Lingkungan Hidup							
Sebelum								
2.2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,26 (2018)	60,26 - 60,96	60,96 - 61,66				
2.2.4.2	% Pemenuhan Infrastruktur Persampahan dalam Jakstrada	70.4	71.2	72				
2.2.4.3	Indeks Kualitas Air (IKA)	70	60,00-62,00	62,00-64,00				
2.2.4.4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86.55	88,40-89,00	89,00-89,50				
2.2.4.5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32.11	32,08-32,11	32,11-32,13				
2.2.4.6	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	n.a.	26.25%	27.55%				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Target Capaian Setiap Tahun						
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Setelah								
2.2.4.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			58,90 – 59,66	58,90 – 59,66	59,66 – 60,42	60,42 – 61,18	60,42 – 61,18
2.2.4.8	Indeks Kualitas Air (IKA)				64,00-66,00	66,00-68,00	68,00-70,00	68,00-70,00
2.2.4.9	Indeks Kualitas Udara (IKU)				89,50-90	90-90,5	90,5-91	90,5-91
2.2.4.10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				40,50-42,00	42,00-43,50	43,50-45,00	43,50-45,00
2.2.4.11	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota				Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.4.12	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				500	600	700	700
2.2.4.13	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.				100%	100%	100%	100%
2.2.4.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota				58,90 – 59,66	59,66 – 60,42	60,42 – 61,18	60,42 – 61,18
2.2.4.15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota				41.53%	55.20%	68.62%	68.62%
2.2.4.16	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				90%	88%	86%	86%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kab/Kota							
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
Sebelum								
2.2.5.1	Cakupan Desa Maju	7	8	9				
2.2.5.2	Jumlah Desa Mandiri	0	1	1				
2.2.5.3	Jumlah Posyandu aktif	983	984	985				
2.2.5.4	Persentase PKK Aktif	100	100	100				
2.2.5.5	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang Berkembang	864	474	576				
2.2.5.6	Persentase LPM berprestasi	184 (2016)	189	190				
2.2.5.7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	n.a.	n.a.	1.88				
Setelah								
2.2.5.8	Persentase Peningkatan Desa Mandiri			66	80	100	150	150
2.2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Sebelum								
2.2.6.1	Rasio Akseptor KB	135.13	136.98	138.68				
Setelah								
2.2.6.2	TFR (Angka Kelahiran Total)				1.8	1.7	1.6	1.9
2.2.6.3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				79.90%	82.50%	84.50%	72.89%
2.2.6.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				5.00%	4.50%	4.00%	12.32%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.7	Perhubungan							
Sebelum								
2.2.7.1	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	46.76	47.51	48.26				
2.2.7.2	Indeks Kepuasan Unit Kinerja	70	71	72				
2.2.7.3	Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP	80	80	80				
2.2.7.4	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	80	80	80				
2.2.7.5	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	80	80	80				
2.2.7.6	Prosentase Unit Kerja yang Menyusun Perencanaan dan Laporan Kinerja Dengan Kualitas Baik	80	80	80				
2.2.7.8	Prosentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	80	80	80				
2.2.7.9	Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan layak fungsi	80	80	80				
2.2.7.11	Prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang	80	80	80				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	laik pakai							
2.2.7.12	Jumlah Pelabuhan Laut /Terminal yang dikelola	1	1	1				
2.2.7.14	Prosentase sarana dan prasarana laik pakai	80	80	80				
2.2.7.15	Jumlah Uji KIR Angkutan Umun 11	11 Unit	2 Unit	1 Unit				
2.2.7.16	Prosentase sarana prasarana penerangan jalan umum yang layak fungsi	75	80	80				
2.2.7.17	Prosentase Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Parkir Berlangganan	75	75	76				
2.2.7.18	Prosentase Tata Kelola Perhubungan yang Sesuai dengan Kebijakan/ Peraturan Daerah	78	78	78				
Setelah								
2.2.7.19	Indeks Keselamatan Lalu Lintas			-	80	80	81	81
2.2.8	Komunikasi dan Informatika							
Sebelum								
2.2.8.1	Indeks Transparansi	n.a.	61.5	63				
Setelah								
2.2.8.2	Indeks SPBE			3.01	3.4	3.6	3.8	3.8
2.2.8.3	Nilai SPBE	n.a.	2.6	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8
2.2.8.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				90%	95%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.8.5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				90%	95%	100%	100%
2.2.8.6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				100%	100%	100%	100%
2.2.8.7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%
2.2.8.8	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%
2.2.8.9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%
2.2.8.10	Tingkat keamanan informasi pemerintah				0	0.1	0.14	0.14
2.2.8.11	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				88%	95%	100%	100%
2.2.8.12	Persentase perangkat daerah yang				88%	95%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo							
2.2.8.13	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah				Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.8.14	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015				86%	95%	100%	100%
2.2.8.15	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				86%	95%	100%	100%
2.2.8.16	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan				100%	100%	100%	100%
2.2.8.17	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang				31.58%	63.16%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik							
2.2.8.18	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				31.58%	63.16%	100%	100%
2.2.8.19	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				100%	100%	100%	100%
2.2.8.20	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah				31.58%	63.16%	100%	100%
2.2.8.21	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				100%	100%	100%	100%
2.2.8.22	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah				19.04%	35.71%	50%	50%
2.2.8.23	Persentase perangkat daerah yang memperbaharuidatanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)				19.04%	35.71%	50%	50%
2.2.8.24	Persentase data yang dapat berbagi pakai				19.04%	35.71%	50%	50%
2.2.8.25	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi				19.04%	35.71%	50%	50%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	inovasi yang mendukung smart city							
2.2.8.26	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo				0%	59.52%	100%	100%
2.2.8.27	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government				Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.8.28	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota				0.50%	0.55%	0.60%	0.60%
2.2.8.29	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)				25.31%	25.36%	25.41%	25.46%
2.2.8.30	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				0.85%	0.90%	0.95%	0.95%
2.2.8.31	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan				1	1	1	1



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.8.32	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS				1	1	1	1
2.2.8.33	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral				100%	100%	100%	100%
2.2.8.34	Persentase kelengkapan metadada variabel sektoral				100%	100%	100%	100%
2.2.9	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							
Sebelum								
2.2.9.1	Persentase Jumlah Koperasi Aktif.	77,8 (2017)	80	80				
2.2.9.2	Persentase Jumlah Usaha Mikro Aktif	10 (2017)	15	20				
2.2.9.3	Indeks kepuasan unit kerja	75	75	80				
2.2.9.4	Pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro	75	75	80				
2.2.9.5	Persentase koperasi aktif dan bersertifikat	100	100	100				
Setelah								
2.2.9.6	Persentase Koperasi Berkualitas			52.2	5.62	6.24	7.22	7.22
2.2.9.7	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah			2.4	3	3.15	3.3	3.3
2.2.9.8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				55%	65%	75%	75%
2.2.9.9	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha				10%	15%	20%	20%
2.2.9.10	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah				75	80	85	85



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota							
2.2.9.11	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				70	75	80	80
2.2.9.12	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				75	80	85	85
2.2.9.13	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				75	80	85	85
2.2.9.14	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				70	75	80	80
2.2.9.15	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				80	85	90	90



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.9.16	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				70	75	80	80
2.2.9.17	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				65	70	75	75
2.2.9.18	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				75	80	85	85
2.2.9.19	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				65	70	75	75
2.2.9.20	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				70	75	80	80
2.2.9.21	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				70	75	80	80



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.9.22	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				65	70	75	75
2.2.9.23	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro				60	65	70	70
2.2.9.24	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)				70	75	80	80
2.2.9.25	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				60	65	70	70
2.2.9.26	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				60	65	70	70
2.2.9.27	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran				70	75	80	80
2.2.9.28	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan				75	80	85	85
2.2.9.29	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan				60	65	70	70
2.2.9.30	Persentase Koperasi Berkualitas				5.62	6.24	7.22	7.22
2.2.9.31	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah				3	3.15	3.3	3.3
2.2.10	Penanaman Modal							
Sebelum								



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Target Capaian Setiap Tahun						
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.10.1	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	30	35	40				
2.2.10.2	Jumlah realisasi investasi	29,076,897,640	29,076,897,640	29,778,930,257				
Setelah								
2.2.10.1	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN			78	79.13	80.71	82.33	82.33
2.2.11	Kepemudaan dan Olah Raga							
Sebelum								
2.2.11.1	Jumlah Pemuda yang berprestasi	145	152	160				
Setelah								
2.2.11.2	Indeks Pembangunan Pemuda							
2.2.11.3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			0.65	0.67	0.69	0.71	0.73
2.2.11.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				0.125%	0.140%	0.150%	0.150%
2.2.11.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				43.64%	43.64%	43.65%	43.65%
2.2.11.6	Peningkatan prestasi olahraga				45%	45%	35%	35%
2.2.11.7	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				5	50	70	70
2.2.11.8	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan				0	5	10	10
2.2.11.9	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan				76	84	84	84



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda							
2.2.11.10	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				10	10	10	10
2.2.11.11	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan				30	30	30	30
2.2.11.12	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah				1	3	5	5
2.2.11.13	Persentase pemuda berprestasi yang dibina				65	75	85	85
2.2.12	Kebudayaan							
Sebelum								
2.2.12.1	Persentase Kebudayaan Daerah yang dikembangkan/ dilestarikan	50	65	73				
Setelah								
2.2.12.2	Nilai Pemajuan Kebudayaan							
2.2.12.3	Terlestarikannya Cagar Budaya				60.70%	75%	78%	78%
2.2.12.4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)				31	33	34	34
2.2.12.5	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang				31	33	34	34



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)							
2.2.12.6	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				31	33	34	34
2.2.12.7	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)				17	18	19	19
2.2.12.8	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)				17	18	19	19
2.2.12.9	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum				290	305	320	320
2.2.12.10	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman				21	22	23	23
2.2.12.11	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman				6	6	7	7
2.2.12.12	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman				nihil			



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.12.13	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat				Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik	Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik	Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik	Sosialisasi pengenalan museum bagi peserta didik melalui transformasi pendidik
2.2.12.14	jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi				15	15	15	15
2.2.12.15	persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah				20%	21.00%	22.05%	22.05%
2.2.12.16	persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah				20%	21.00%	22.05%	22.05%
2.2.13	Perpustakaan							
Sebelum								
2.2.13.1	Indeks minat baca daerah	0.65	0.67	0.7				
Setelah								
2.2.13.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			-	14	14.5	15	15
2.2.13.3	Indeks minat baca daerah				0.73	0.75	0.78	0.78
2.2.13.4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)				84,312	86,912	89,212	89,212
2.2.13.5	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat				7	8	9	9
2.2.13.6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				4800%	4850%	4900%	4900%
2.2.13.7	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan				0.024	0.025	0.026	0.026



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan penduduk							
2.2.13.8	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				1.2%	1.5%	2.0%	2.0%
2.2.13.9	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				1 : 50.000	1 : 40.000	1 : 25.000	1 : 25.000
2.2.13.10	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan				1 unit	1 unit	5 unit	5 unit
2.2.13.11	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				1 kali	3 kali	3 kali	7 kali
2.2.13.12	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				100%	300%	300%	300%
2.2.14	Kearsipan							
Setelah								
2.2.14.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)				32	33	34	34
2.2.14.2	Persentase Perangkat Daerah Pengelola Arsip Baku (%)				64%	68%	70%	70%
2.2.14.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				60%	62%	65%	65%
2.2.14.4	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				100%	100%	100%	100%
2.2.14.5	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip				74%	75%	77%	77%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.14.6	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				65%	67%	70%	70%
2.2.14.7	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				1%	2%	4%	4%
2.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.3.1	Perikanan							
Sebelum								
2.3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	20341,69 Ton	20552,98 Ton	20819,94 Ton				
2.3.1.2	Konsumsi Ikan	39,52 Kg/Kpt/Th	40,31 Kg/Kpt/Th	41,12 Kg/Kpt/Th				
2.3.1.3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	100%	100%				
Setelah								
2.3.1.4	Indeks Pengeluaran			0.3	0.32	0.33	0.35	0.35
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			32.5	33.15	33.81	34.49	34.49
2.3.1.5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (<i>sumber data: one data KKP</i>)				21,134.59	21,529.46	21,977,61	21,977,61
					Ton	Ton	Ton	Ton
2.3.1.6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)				30 RTP	40 RTP	50 RTP	50 RTP
2.3.1.7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional				100%	100%	100%	100%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan				50 TDPIK	50 TDPIK	50 TDPIK	50 TDPIK
2.3.1.9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)				200 Pembudidaya ikan	200 Pembudidaya ikan	250 Pembudidaya ikan	250 Pembudidaya ikan
2.3.1.10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi				3.252.028 Ekor	3.349.589 Ekor	3.466.824 Ekor	3.605.497 Ekor
2.3.1.11	Distribusi Presentase PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,36 (2017)	33.81	34.17	3.99	4.01	4.03	4.03
2.3.2	Pariwisata							
Sebelum								
2.3.2.1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.009	0.009	0.01				
Setelah								
2.3.2.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				-30%	257%	100%	100%
2.3.2.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota				7%	14%	15%	15%
2.3.2.4	Tingkat hunian akomodasi				7348%	7614%	7880%	7880%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				1%	1%	1%	1%
2.3.2.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				1%	1%	1%	1%
2.3.2.7	Jumlah entitas pengelolaan destinasi				9	10	11	11
2.3.2.8	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				47	50	55	55
2.3.2.10	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata				0	Rp71,653,000,000	Rp79,542,145,000	Rp79,542,145,000
2.3.2.11	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi				54	60	70	70
2.3.2.12	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara				0.5	1	1	1
2.3.2.13	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi				1	1	1	1
2.3.2.14	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				7	25	50	50
2.3.2.15	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara				46,354	49,445	54,080	54,080
2.3.2.16	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri				3	2	3	3
2.3.2.17	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi				0	1	1	1
2.3.2.18	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri				5	10	11	11
2.3.2.19	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang				31%	37%	46%	46%



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	disertifikasi							
2.3.2.20	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan				19%	11%	15%	15%
2.3.2.21	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				7	8	9	9
2.3.2.23	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara				3,090	6,168	7,635	7,635
2.3.2.24	Angka Kunjungan Wisata				58,102	58,980	59,310	59,310
2.3.3	Pertanian							
Setelah								
2.3.2.25	Indeks Pengeluaran			0.3	0.32	0.33	0.35	0.35
2.3.2.26	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			32.5	33.15	33.81	34.49	34.49
2.3.2.27	Kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB (%)				25.34	26.12	26.94	26.94
2.3.4	Perdagangan							
Sebelum								
2.3.3.2	Distribusi Presentase PDRB Kategori Perdagangan	20,76** (2017)	21.38	21.68				
2.3.3.3	Prosentase pertumbuhan produk IKM	21.05%	22.50%	22.50%				
2.3.3.4	Prosentase penanganan aduan masyarakat tentang perlindungan konsumen	100.00%	100.00%	100.00%				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.3.5	Prosentase pertumbuhan usaha perdagangan	5.00%	5.25%	5.25%				
2.3.3.6	Prosentase pasar tradisional dalam kondisi baik	75.00%	78.75%	78.75%				
Setelah								
2.3.3.7	Indeks Pengeluaran			0.3	0.32	0.33	0.35	0.35
2.3.3.8	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan			20.17	20.78	21.4	22.04	22.04
2.3.3.9	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			6.77	9.92	10.08	10.72	10.72
2.3.5	Perindustrian							
Sebelum								
2.3.5.1	Distribusi Presentase PDRB Kategori Perindustrian	6,3** (2017)	6.49	6.58				
2.3.5.2	Prosentase pertumbuhan industri	0.78	0.93	1.03				
Setelah								
2.3.5.3	Indeks Pengeluaran			0.3	0.32	0.33	0.35	0.35
2.3.5.4	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			6.77	9.92	10.08	10.72	10.72
2.3.6	Urusan Pemerintahan Umum							
Sebelum								
2.3.6.1	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu.	73	74	74.88				
2.3.6.2	Predikat SAKIP	68,44 (B) (2018)	80,05 (A)	80,12 (A)				
2.3.6.3	Status Kinerja LPPD	2,9447 (T)	3,0000 (ST)	3,0400 (ST)				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.6.5	Persentase Aspirasi yang ditindaklanjuti	100	100	100				
Setelah								
2.3.6.6	Nilai SAKIP			70,02 (BB)	81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	82,1 (A)
2.3.6.4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N.A	3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A(-))	4,26 (A(-))	4,51 (A)	4,51 (A)
2.3.7	Kesatuan Bangsa dan Politik							
Setelah								
2.3.7.1	Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan			100	100	100	100	100
2.3.7.2	Jumlah ORMAS aktif yang mendorong wawasan Kebangsaan				104	115	136	155
2.3.7.3	Kegiatan Politik Daerah				10	10	10	10
2.3.7.4	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP				25	25	25	25
2.3.8	Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Sebelum								
2.3.8.1	Prosentase penduduk yang ber-KTPel	95.5	95.5	96				
2.3.8.2	Prosentase penduduk yang ber-KK	100	100	95				
2.3.8.3	Prosentase Penduduk yang ber-Akta Kelahiran	95.5	95.5	95.93				
2.3.8.4	Prosentase Data Kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dikelola secara elektronik	50	50	75				
Setelah								
2.3.8.4	Penerbitan akta perkawinan				100	100	100	100
2.3.8.5	Penerbitan akta perceraian				100	100	100	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.8.6	Penerbitan akta kematian				100	100	100	100
2.3.8.7	Penyajian data kependudukan				100	100	100	100
2.3.8.8	penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun				100	100	100	100
2.3.8.9	presentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 - 17 tahun				100	100	100	100
2.3.8.10	presentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				100	100	100	100
2.3.8.11	presentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan				100	100	100	100
2.3.8.12	pemanfaatan data kependudukan				100	100	100	100
2.3.8.13	Perekaman KTP elektronik				97	97	100	100
2.3.8.14	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				10	15	25	25
2.3.8.15	Kepemilikan akta kelahiran				100	100	100	100
2.4	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah							
2.4.1	Urusan Keuangan							
Sebelum								
2.4.1.1	Opini atas Laporan BPK	WTP	WTP	WTP				
2.4.1.2	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.	10.2	10.5	11				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4.1.3	Prosentase Layanan Keseekretariatan yang sesuai SOP	100	100	100				
2.4.1.4	Prosentase Subjek Pajak (Hotel/Rumah Makan) yang menggunakan system e-billing.	10%	15.27%	29.16%				
2.4.1.5	Prosentase usulan sertifikat tanah (aset daerah) yang diajukan	NA	2%	2%				
2.4.1.6	Prosentase SKPD yang melaksanakan inventarisasi aset daerah dengan baik sebagaimana aturan yang berlaku	11%	22%	33%				
2.4.1.7	Ketepatan Waktu penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu				
2.4.1.8	Prosentase opd yang dapat mengelola keuangannya dengan baik sebagaimana peraturan yang berlaku.	75%	78%	81%				
Setelah								
2.4.1.9	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.1.10	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan				0.12	0.14	0.16	0.16
2.4.1.11	Rasio PAD				0.000225	0.00023	0.000235	0.000235
2.4.1.12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				0.82	0.83	0.84	0.84
2.4.1.13	Opini Laporan keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4.1.14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				0.83	0.85	0.87	0.87
2.4.1.15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				1.25	1.23	1.21	1.21
2.4.1.16	Manajemen Aset				Iya	Iya	Iya	Iya
2.4.1.17	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				0.20%	0.18%	0.16%	0.16%
2.4.2	Urusan Kepegawaian dan Diklat							
2.4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	n.a.	80	73	81	81.5	82	82
2.4.2.2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				138%	142%	146%	146%
2.4.2.3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				12%	28%	33%	33%
2.4.2.4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				60%	62%	64%	64%
2.4.3	Urusan Pengawasan							
Sebelum								
2.4.3.1	- APIP	-	100	100				
2.4.3.2	- BPK	80	80	84				
Setelah								
2.4.3.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern				3.1	3.2	3.3	3.3



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintah (SPIP)							
2.4.3.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				2	3	3.1	3.1
2.4.4	Sekretariat Daerah							
Setelah								
2.4.4.1	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme				100	100	100	100
2.4.4.2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertata Kelembagaannya				100	100	100	100
2.4.4.3	Nilai LPPD				3,0800 (ST)	3,1000 (ST)	3,1100 (ST)	3,1100 (ST)
2.4.4.4	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Sesuai Petunjuk Teknisnya				100	100	100	100
2.4.4.5	Indeks Kepuasan Masyarakat				91	94	94	94
2.4.5	Urusan Perencanaan	70	75	80				
Sebelum								
2.4.5.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada				
2.4.5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada				
2.4.5.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada				



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4.5.5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada				
Setelah								
2.4.5.6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.5.7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.5.8	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				Ada	Ada	Ada	Ada
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67.16	70	72.5	75	80	82.5	82.5
3.2	% Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	30	35	40	45	50	55	55
3.3	Jumlah Realisasi investasi (Rp.)	29,076,897,640	29,425,820,412	29,778,930,257	30,136,277,420	30,497,912,749	30,863,887,702	30,863,887,702
3.4	Indeks Inovasi Daerah			5346	6415	7698	9238	9238
3.5	Indeks Risiko Bencana				105	100	100	100

x x x x



PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN



BAB IX

PENUTUP



BAB IX

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 pada dasarnya merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana Kabupaten Pamekasan akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam sisa waktu implementasi perencanaan yang telah dirumuskan, mulai dari bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan prioritas kepala daerah terpilih. Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Pamekasan dan Bupati Kabupaten Pamekasan, serta Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. RPJMD Perubahan ini telah mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;



2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam implementasi Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

9.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen Perubahan RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

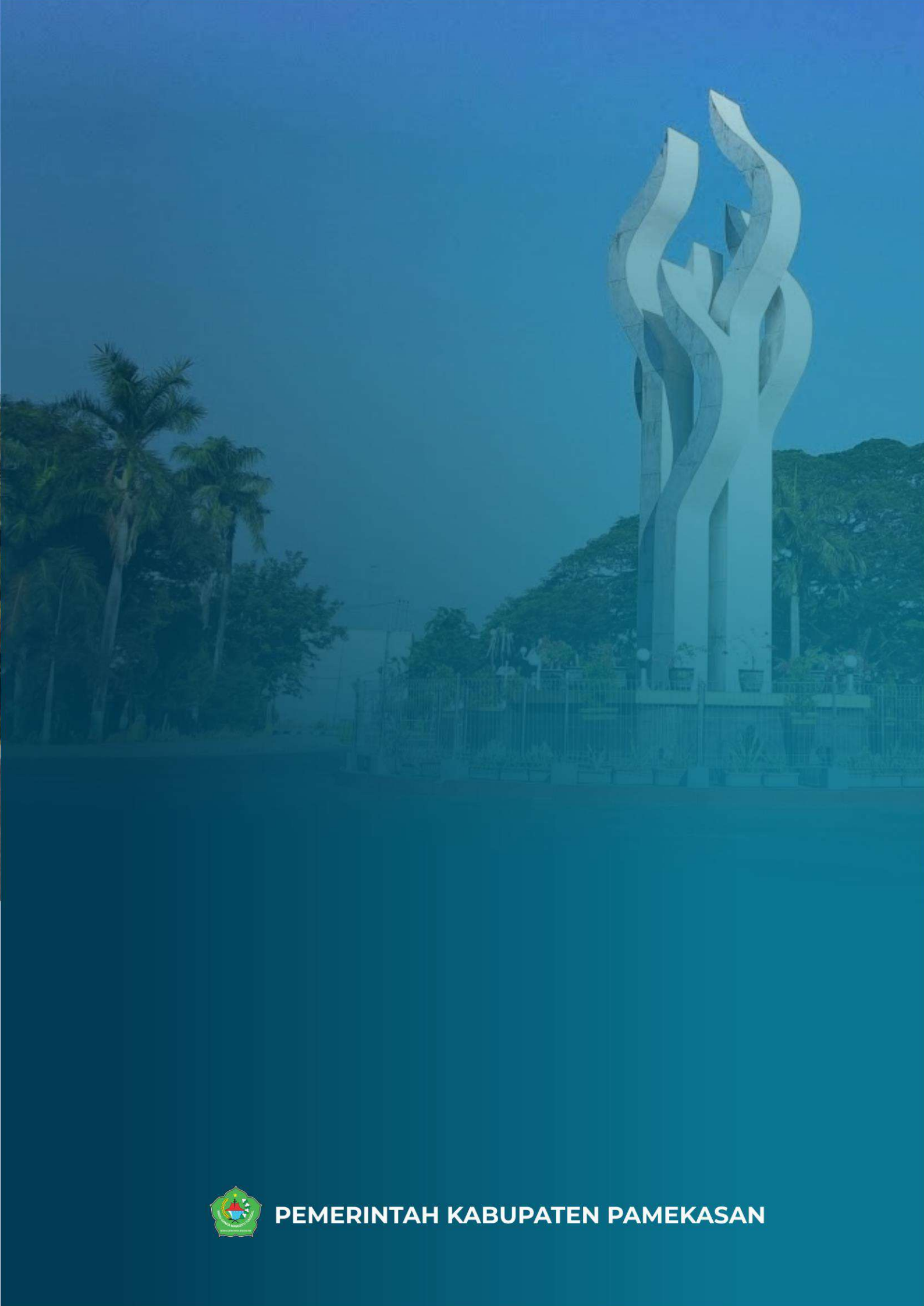
Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pamekasan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:



- 1) Setelah berakhirnya Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN